



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2014



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2014

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2013 – 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2014



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati, perlu perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 – 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD oleh Bupati berpedoman pada pentahapan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus dalam RPJPD.
- (3) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan pada RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (5) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I : Pendahuluan
BAB	II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB	III: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
BAB	IV: Analisis Isu-Isu Strategis
BAB	V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB	VI: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB	VIII: Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB	IX: Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB	X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
BAB	XI: Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Mei 2014



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 – 2018

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati, yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD memuat strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, serta penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perencanaan pembangunan tahun 2013 dan tahun 2014 yang telah dilaksanakan, ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 175

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2013-2018

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013-2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Agar terdapat kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah maka diperlukan keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan secara nasional, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Rencana pembangunan daerah ini menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga penyusunannya harus dilaksanakan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembanguan jangka menengah daerah

dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, selaras dengan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang agar program pembangunan daerah mendorong terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 harus realistis dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, mengacu arah dan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kudus.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kudus dengan RPJM Nasional meliputi :

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014.
2. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014.
3. Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.

Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana kerja tahunan kementerian/lembaga demi terwujudnya hasil guna dan daya guna pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama.

RPJMD yang telah selaras dengan RPJMN ini nantinya akan dijabarkan dalam RKPD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mekanisme penyusunan RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Penyusunannya dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *top down* dan *bottom up*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan diskusi dengan tenaga ahli sesuai dengan substansi.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan. Pendekatan politik dilakukan dengan penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Bupati terpilih serta konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD. Pendekatan *top down* dilakukan dengan cara mempedomani pada perencanaan di atasnya dan *bottom up* dilakukan dengan cara penggalan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah/desa.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dilakukan melalui beberapa urutan kegiatan seperti persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, rancangan RPJMD, musrenbang RPJMD, rancangan akhir serta penetapan RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 26 Mei 2013 telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dengan hasil H. Musthofa dan H. Abdul Hamid sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang dilantik pada tanggal 14 Agustus 2013. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus wajib menyusun RPJMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat 3, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selain itu dalam pasal 150 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 akan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan, penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013, RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah, Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166).

1.3. Hubungan antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Kudus merupakan salah satu sistem dalam perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025, dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 dan RPJM Nasional Tahun 2010–2014. Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka SKPD menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD. Setelah RKPD ditetapkan, maka SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan digunakan untuk penyusunan RAPBD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kudus Tahun 2012–2032, serta RTRW Kabupaten Pati, Demak, Jepara, Grobogan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan jangka menengah serta keterpaduan struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antar kabupaten di wilayah yang berdekatan dan memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, maka perlu dilakukan penelaahan RTRW terhadap kabupaten yang berbatasan yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Selain itu, di dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus termasuk dalam Kawasan Andalan Wanarakuti yaitu Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan dan perikanan. Tahapan pembangunan untuk sektor pertanian dan pertambangan termasuk dalam tahap II yang diarahkan bagi pengembangan kawasan andalan untuk pertanian dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor industri pertanian dan perikanan termasuk dalam tahap I yang diarahkan bagi rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan serta pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan.

Untuk penelaahan RTRW Kabupaten Pati, sebagian Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya yang tidak saling bertentangan. Sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Kecamatan Margorejo, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati peruntukannya adalah sebagai kawasan budidaya yang tidak saling bertentangan. Posisi kawasan perbatasan dengan Kabupaten Pati ini dipandang sangat strategis oleh kedua belah pihak, oleh karena itu terdapat beberapa penanganan yang harus mendapatkan prioritas, yaitu keterpaduan pengelolaan sub DAS (khususnya sub DAS Piji) yang bermuara ke DAS Juwana.

Sedangkan penelaahan RTRW Kabupaten Grobogan, sebagian Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan peruntukannya sebagai kawasan budidaya yang tidak saling bertentangan. Rencana pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan diarahkan untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah, permukiman perdesaan, pertanian lahan kering dan hutan produksi. Dengan demikian rencana pola pemanfaatan ruang ini tidak mengganggu rencana pola ruang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang diarahkan untuk kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian lahan basah dan permukiman perdesaan. Prioritas penanganan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Grobogan diarahkan untuk keterpaduan dalam penanganan pada kawasan lindung, konservasi dan rawan bencana di wilayah perbatasan khususnya yang termasuk dalam wilayah Pegunungan Kendeng.

Di sisi lain, penelaahan RTRW Kabupaten Demak adalah sebagian Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati dan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak peruntukannya sebagai kawasan budidaya yang tidak saling bertentangan. Prioritas penanganan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Demak diarahkan untuk pengendalian pencemaran di kawasan perbatasan.

Penelaahan RTRW Kabupaten Jepara, sebagian Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Kecamatan Keling dan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara peruntukannya sebagai kawasan lindung yang tidak saling bertentangan. Sebagian Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara peruntukannya adalah sebagai kawasan budidaya yang tidak saling bertentangan. Secara umum prioritas penanganan kawasan

perbatasan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati adalah meliputi :

1. Keterpaduan dalam pembangunan dan penataan infrastruktur di kawasan perbatasan.
2. Keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan perbatasan.
3. Kerjasama pengembangan wilayah di kawasan perbatasan.

Selain itu juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goals*, dan Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
Bab IV	Analisis Isu-Isu Strategis
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab VI	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab XI	Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

1. menjabarkan visi, misi dan program Bupati Kudus;
2. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lanjutan seperti Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD; dan
3. memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Tujuan :

1. Menjadi pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan visi Kabupaten Kudus;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjamin sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2018) dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah; dan
5. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah administratifnya berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan. Adapun penjabaran mengenai luas wilayah, banyaknya desa, kelurahan, dukuh, RT dan RW dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi
Kabupaten Kudus Tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	60	110	495
3	Jati	2.630	14	0	51	78	377
4	Undaan	7.177	16	0	31	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	32	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	443
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.506	11	0	44	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	85	109	581
Jumlah		42.516	123	9	434	714	3.756

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara 06°48'37" - 06°51'55" Lintang Selatan dan 110°47'42" - 110°53'05" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah

yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Jepara dan Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1.600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kudus memiliki kelerengan yang bervariasi, yaitu:

1. Kelerengan 0 – 8 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae.

2. Kelerengan 8 – 15 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief landai. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo.

3. Kelerengan 15 – 25 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian Timur.

4. Kelerengan 25 – 45 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam. Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo.

5. Kelerengan > 45 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :

1. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
2. Jenis tanah grumosol mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
3. Jenis tanah latosol merah, penyebarannya meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
4. Jenis tanah planosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Jekulo;
5. Jenis tanah latosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
6. Jenis tanah litosol grumosol, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
7. Jenis tanah mediteran, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu; dan
8. Jenis tanah aluvial coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo dan dan Kecamatan Kaliwungu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Kudus, maka dapat diinventarisasi beberapa potensi bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Kudus, yaitu :

1. Andesit-pasir

Penyebaran bahan galian andesit-pasir di daerah Kabupaten Kudus menempati daerah perbukitan yang menempati kaki lereng Gunung Muria. Breksi tuff ini dijumpai di Kecamatan Dawe (Desa Kandangmas, Desa Cranggang, Desa Rejosari), Kecamatan Jekulo (Desa Terban). Ketebalan rata-rata dari andesit-pasir adalah 2 m sampai 5 m di Kecamatan Dawe, masing-masing di Desa

Kandangmas seluas 5 ha, di Desa Cranggang seluas 2 ha, di Desa Rejosari seluas 2-3 ha, sedangkan di Desa Terban seluas 40 ha. Dengan demikian total andesit-pasir di Kabupaten Kudus yang potensial sekitar 50 ha dengan volume sekitar 2.705.000 m³ dan beratnya mencapai 9.504.300 ton.

Estimasi cadangan leusit yang terdapat pada andesit-pasir di Desa Menawan, Kecamatan Gebog sekitar 5 ha, volumenya mencapai 25.000 m³. Dengan asumsi berat jenis leusit 2,64 kg/m³, maka total cadangannya sekitar 66.000 ton.

2. Kaolin

Kaolin yang terdapat di Kabupaten Kudus berwarna putih dan berasal dari pelapukan tuff dengan penyebaran terbatas. Di Kabupaten Kudus terdapat di Kecamatan Dawe (Desa Kandangmas dan Desa Cranggang) dengan tebal berkisar 1,5 m hingga 2 m, sedangkan luas penyebarannya sekitar 1 ha hingga 1,5 ha.

Lapisan penutup yang teramati di lapangan tidak ada atau langsung ditemui lapisan kaolin, berwarna putih. Estimasi cadangan kaolin di dua desa tadi berkisar 20.000 m³ dengan berta jenis 11,58 kg/m³ maka cadangannya sekitar 31.600 ton di Desa Kandangmas dan 22.500 m³ atau 35.500 ton di Desa Cranggang.

3. Andesit

Andesit di Kabupaten Kudus antara lain ditemukan di Kecamatan Dawe (Desa Cranggang, Desa Ternadi); Kecamatan Gebog (Desa Gondosari).

Penyebaran andesit ini hanya didapatkan di bagian utara Kabupaten Kudus, lereng sebelah selatan Gunung Muria, dengan ketebalan berkisar antara 2 m hingga 30 m. Andesit tersebut bersifat kompak, keras dan berwarna abu-abu hingga abu-abu hitam, berasal dari Gunung Muria. Luas penyebaran terbesar dari andesit terdapat di Kecamatan Dawe (Desa Ternadi dan Desa Cranggang) dengan luas penyebaran 2 ha, serta volume seluruhnya mencapai sekitar 600.000 m³ atau 1.584.000 ton. Sedangkan di tempat lain seperti di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog penyebarannya terbatas yaitu sekitar 20.000 m³ atau 52.800 ton.

Pada umumnya di daerah andesit ini tidak ada lapisan penutup dan langsung menjumpai andesit di

permukaan. Selanjutnya singkapan andesit yang kecil terdapat di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe dengan luas penyebaran 625 m³ dengan ketebalan sekitar 12,5 m sehingga volumenya mencapai 7812,5 m³ atau 20.625 ton.

Selanjutnya apabila mau dimanfaatkan maka andesit yang ada di Desa Cranggang, Kecamatan Dawe sangat potensial untuk dieksplorasi dengan cara penambangan terbuka, mengingat selama ini masih dilakukan secara tradisional.

4. Andesit Sirtu dan Sirtu

Andesit Sirtu dan Sirtu ini di lapangan banyak didominasi andesit yang berupa fragmen dari gravel sampai onkrah dan sebagian kecil pasir. Bahan galian tersebut terdapat sebagai endapan sungai seperti yang ditemukan di Kecamatan Gebog (Desa Rahtawu dan Desa Gondosari) Kecamatan Dawe (Desa Lau).

Ketebalan rata-rata dari bahan galian andesit-sirtu adalah 0,5 m sampai 6 m, sedangkan luas penyebaran yang cukup potensial terdapat di Desa Rahtawu dan Desa Gondosari Kecamatan Gebog seluas 25 ha. Tebal lapisan penutup untuk bahan galian ini tidak ada, sedangkan estimasi cadangan masing-masing sebesar 1.500.000 m³ atau 3.960.000 ton dan 50.000 m³ atau 88.500 ton. Andesit sirtu dan Sirtu di Desa Lau mencapai 375.000 m³ atau 491 ton.

5. Batu pasir-lempung

Penyebaran bahan galian batu pasir-lempung di daerah Kabupaten Kudus terdapat di Kecamatan Jekulo (Desa Bulungcangkring dan Desa Klaling). Kenampakan lapangan berupa lempung yang seringkali terdapat sisipan batupasir berwarna coklat kekuningan. Lempung berwarna coklat dan merupakan komponen yang lebih dominan dari pada batu pasirnya.

Deposit dengan cadangan cukup besar terdapat di Desa Bulungcangkring, yaitu seluas 25 ha. Estimasi volume mencapai 87.500.000 m³ atau sekitar 114.625.000 ton. Lapisan penutup bahan galian tersebut antara 0,5 m–1 m di Desa Klaling, sedangkan di Desa Bulungcangkring tidak ada.

6. Tanah liat

Tanah liat merupakan bahan galian golongan C yang paling banyak dijumpai di Kabupaten Kudus. Sedangkan deposit dengan cadangan yang cukup banyak terdapat di Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae dan Desa Terban, Kecamatan Undaan. Adapun tebal deposit dan luas penyebaran masing-masing lokasi tersebut adalah 5 m dan 31,5 ha, 3 m dan 400 ha, serta 3,5 m dan 900 ha.

Lapisan penutup untuk deposit tanah liat tidak ada, sedangkan estimasi cadangan terbesar yang terdapat di 3 desa tersebut di atas masing-masing 1.575.000 m³ atau 2.063.250 ton; 12.000.000 m³ atau 15.720.000 ton; dan 31.500.000 m³ atau 41.625.000 ton.

7. Gamping

Batu gamping di Kabupaten Kudus hanya terdapat di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pati. Batu gamping tersebut terdapat di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan. Kenampakan di lapangan batu gamping tersebut berwarna putih hingga putih kekuningan, sedangkan ketebalan rata-rata adalah 8,5 m, maka ditafsirkan volume batu gamping tersebut mencapai $1.500.000 \text{ m}^2 \times 8,5 \text{ m} = 12.750.000 \text{ m}^3$ dengan berta jenis sebesar 2,05 kg/m³ maka total cadangannya sebesar 26.137.500 ton. Batu gamping tersebut tidak menunjukkan perlapisan, diduga merupakan hasil aktivitas organisme laut pada saat terbentuknya. Batu gamping yang terdapat di bagian selatan Kabupaten Kudus ini dibandingkan dengan Formasi Paciran yang umumnya tersusun dari batu gamping terumbu di daerah Rembang.

8. Tras

Tras di Kabupaten Kudus terdapat di Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Desa Kuwukan, Desa Cranggang, Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe; serta Desa Terban, Kecamatan Jekulo.

Dari estimasi cadangan tras ternyata cadangan di Desa Kuwukan dan Desa Cranggang mempunyai deposit terbesar sekitar 129.375.000 ton dan 45.983.000 ton yang sampai saat ini belum diusahakan penambangan dan pemanfaatannya, Selanjutnya hanya tras yang terdapat di Desa

Menawan diusahakan sebagai material campuran membuat batako dan dilakukan penambangannya secara tradisional.

Tras yang terdapat di Desa Menawan, Kecamatan Gebog berwarna coklat kekuningan, kompak sampai agak kompak, mudah lepas apabila ditekan dengan tangan. Luas penyebarannya sekitar 25 ha, volumenya 6.250.000 m³, berat jenisnya 1,38 kg/m³ maka tonase cadangannya sekitar 8.625.000 ton. Sedangkan tras yang terdapat di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, sifat fisiknya berwarna abu-abu kekuningan, kompak sampai agak kompak, mudah lepas apabila ditekan dengan tangan. Luas penyebarannya 50 ha, volumenya 13.020.000 m³, sehingga tonasenya sekitar 17.970.000 ton.

2.1.1.5. Hidrologi

1. Air Permukaan

Air permukaan yang dimaksud disini adalah sungai yang berair sepanjang musim dan sungai yang bersifat musiman (*intermittent*). Sungai yang mengalir sepanjang tahun diantaranya adalah Kali Serang, dimana sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratunseluna, Departemen Pekerjaan Umum, untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air bersih dan tenaga listrik. Di daerah perbukitan khususnya pada musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering, setempat dijumpai sungai yang berair dengan debit sangat kecil.

Air permukaan merupakan air yang ada di permukaan tanah, baik berupa sungai ataupun danau. Di daerah penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya, sedangkan ranting sungai yang terutama berada di daerah perbukitan umumnya berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau dan hanya berair di musim hujan.

Ada 2 sungai besar yang melintas di Kabupaten Kudus yaitu Kali Wulan dan Kali Juana. Kali Juana menampung aliran drainase dari arah timur dan Kali Wulan berperan untuk menampung aliran dari arah tengah sampai utara. Drainase Kota Kudus secara garis besar dilayani dengan saluran drainase yang dikombinasi dengan polder maupun long storage yang menampung kelebihan air selama terjadi banjir.

Secara keseluruhan sistem jaringan drainase di Kabupaten Kudus terbagi menjadi 4 (empat) sub sistem yaitu :

- a. Subsistem Kali Wulan, menampung aliran dari drainase sekunder Kali Gelis, Kali Kondang dan Kali Kencing;
- b. Subsistem SWD-1 menampung aliran dari drainase sekunder Kali Sumber, Kali Jaranan, Kali Sat/ Kali Beku dan Kali Serut;
- c. Subsistem SWD-2 menampung aliran drainase sekunder Kali Tali, Kali Jember, dan Kali Srabi; dan
- d. Subsistem Kali Juana-1 yang aliran dari semua drainase sekunder disebelah timur Kali Gelis dan Kali Kencing, seperti Kali Tumpang, Kali Dawe, Kali Jumirah, dan Kali Ngeseng.

2. Air Bawah Tanah

Berdasarkan atas jumlah, mutu dan kemudahan untuk mendapatkan air tanahnya, di Kabupaten Kudus dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah potensi air tanah yaitu :

- a. Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan tinggi pada Akuifer Dalam;
- b. Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam;
- c. Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan sedang pada Akuifer Dalam;
- d. Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam;
- e. Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan rendah pada Akuifer Dalam; dan
- f. Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam.

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah. Bulan basah jatuh antara bulan Oktober – Mei dan bulan kering terjadi antara Juni – September, sedang bulan paling kering jatuh sekitar bulan Agustus. Curah hujan yang jatuh di Kabupaten Kudus berkisar antara 2.000 – 3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500 – 5.000 mm/tahun.

Temperatur tertinggi berkisar pada 30,5°C dan terendah berkisar pada 19,6°C dengan temperatur rata-rata 28°C. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 74%. Kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 69 % - 78,5 %, angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum mencapai 50 km/jam.

Tabel 2.2.
Banyaknya Hari Hujan dirinci per Bulan
Di Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2012 (Hari)

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
Januari	17	23	22	21	18
Februari	22	18	15	16	11
Maret	16	11	12	21	13
April	9	7	12	15	7
Mei	4	10	14	6	5
Juni	1	2	9	3	3
Juli	0	1	8	6	1
Agustus	3	1	6	0	0
September	1	2	9	3	0
Oktober	8	4	11	9	6
November	8	9	6	15	7
Desember	15	10	18	13	13
Jumlah	104	98	142	128	84

Lokasi : Colo Dawe, Ketinggian : 700 m/DPL

Sumber : Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2013

Tabel 2.3.
Banyaknya Curah Hujan dirinci Per Bulan
Di Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2012 (mm)

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
Januari	387	562	112	362	572
Februari	722	296	74	282	233
Maret	224	186	177	432	243
April	102	115	167	158	145
Mei	22	88	223	83	69
Juni	8	5	122	19	73
Juli	0	6	91	130	5
Agustus	36	6	60	0	0
September	7	9	112	61	0
Oktober	89	38	147	64	30
November	92	105	87	106	125
Desember	224	139	278	273	183
Jumlah	1.913	1.555	1.650	1.970	1.678

Lokasi : Colo Dawe, Ketinggian : 700 m/DPL

Sumber : Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2013

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas 42.516 ha. Wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian seluas 29.903 ha (70,33%) dan lahan bukan pertanian seluas 12.613 ha (29,67%). Lahan pertanian terbagi atas lahan sawah seluas 20.653 ha (48,58%) dan bukan lahan sawah seluas 8.440 ha (19,85%). Kondisi lahan

pertanian di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.
Kondisi Lahan Pertanian di Kabupaten Kudus

No.	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian	Luas Lahan Sawah	Luas Ladang/ Tegal/ Kebun	Luas Lainnya	Luas Lahan Tidur	Kondisi Sawah	
							Kena Banjir	Tdk Banjir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KALIWUNGU	2.432	1.984	257	156	35	345	1.639
2	JATI	1.192	1.027	165	-	-	257	770
3	UNDAAN	6.005	5.805	200	-	-	3.206	2.599
4	MEJOBLO	2.207	1.755	103	-	349	1.176	579
5	JEKULO	5.904	4.307	1.092	4	501	1.477	2.830
6	BAE	1.151	881	270	-	-	-	881
7	GEBOG	3.819	2.052	1.178	589	-	-	2.052
8	DAWE	6.044	2.668	2.822	554	-	-	2.668
9	KOTA	339	174	48	117	-	-	174
	JUMLAH	29.093	20.653	6.135	1.420	885	6.461	14.192

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa lahan pertanian kurang produktif di Kabupaten Kudus yang sering tergenang banjir yaitu seluas 6.461 ha, dan lahan yang produktif berupa sawah yang tidak kena banjir seluas 14.192 ha. Sedangkan lahan tidur seluas 885 ha yang tersebar di 3 wilayah kecamatan akan digunakan untuk pengembangan/budidaya perikanan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun Kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.473 Ha berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog;
2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang merupakan kawasan resapan air. Kawasan ini sama dengan kawasan hutan lindung;
3. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.069 Ha berupa kawasan sempadan sungai, kurang lebih 211 Ha berupa kawasan sekitar danau atau waduk, kurang lebih 84

- Ha kawasan sekitar mata air, kurang lebih 1 Ha kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya serta kawasan ruang terbuka hijau;
4. Kawasan Cagar Budaya seluas kurang lebih 195 Ha;
 5. Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi :
 - a. Kawasan rawan tanah longsor, meliputi : Desa Rahtawu, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi, Desa Soco, Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe;
 - b. Kawasan rawan banjir, meliputi: Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan;
 - c. Kawasan rawan bencana kekeringan, meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Undaan; dan
 - d. Kawasan rawan bencana angin topan, meliputi seluruh wilayah kecamatan.
 6. Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa cekungan air tanah dan kawasan sempadan mata air; dan
 7. Kawasan Lindung Lainnya.

Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Kudus meliputi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.008 Ha meliputi Desa Ternadi, Desa Kajar Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Menawan, Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo; dan
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.121 Ha meliputi Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling,

Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.

2. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 2.285 Ha meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Undaan dan Kecamatan Jekulo.

Dari luas hutan rakyat, kurang lebih 106 Ha merupakan hutan rakyat murni, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 2.179 Ha terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan.

3. Kawasan peruntukan pertanian

a. Kawasan peruntukan tanaman pangan

1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 25.334 Ha meliputi :

- a) Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 1.047 Ha;
- b) Kecamatan Jati kurang lebih 782 Ha;
- c) Kecamatan Undaan kurang lebih 6.464 Ha;
- d) Kecamatan Mejobo kurang lebih 2.668 Ha;
- e) Kecamatan Jekulo kurang lebih 4.701 Ha;
- f) Kecamatan Bae kurang lebih 811 Ha;
- g) Kecamatan Gebog kurang lebih 3.081 Ha;
- dan
- h) Kecamatan Dawe kurang lebih 5.780 Ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 531 Ha, meliputi :

- a) Kecamatan Mejobo kurang lebih 15 Ha;
- b) Kecamatan Jekulo kurang lebih 39 Ha;
- c) Kecamatan Gebog kurang lebih 261 Ha; dan
- d) Kecamatan Dawe kurang lebih 216 Ha.

3) Kawasan peruntukan agropolitan berada di Kecamatan Undaan berupa kawasan yang diperuntukkan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

b. Kawasan peruntukan hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura berupa kawasan yang diperuntukan untuk tanaman sayur-sayuran berada di seluruh wilayah kecamatan.

c. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.387 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan, terdiri :

- 1) tanaman tebu meliputi: Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jati;
- 2) tanaman kapuk tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- 3) tanaman kelapa tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- 4) tanaman kapas berada di Kecamatan Kaliwungu;
- 5) tanaman kopi meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
- 6) tanaman cengkeh meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
- 7) tanaman mete meliputi Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Bae;
- 8) tanaman kemiri meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo; dan
- 9) tanaman aren meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo.

d. Kawasan peruntukan peternakan

- 1) Kawasan peruntukan peternakan besar terdiri atas jenis hewan :
 - a) sapi perah meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
 - b) sapi tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - c) kerbau tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - d) kuda meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- 2) Kawasan peruntukan peternakan kecil tersebar di seluruh wilayah kecamatan terdiri atas jenis hewan kambing dan domba.

- 3) Kawasan peruntukan peternakan unggas terdiri atas jenis hewan :
 - a) itik tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - b) ayam ras pedaging meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;
 - c) ayam ras petelur meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe; dan
 - d) ayam kampung tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
4. Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan darat diarahkan tersebar di 3 wilayah Kecamatan.
5. Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan luas keseluruhan kurang lebih 34 Ha, meliputi :
 - a. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo di Dukuh Kedungmojo dan sekitarnya seluas kurang lebih 23 Ha berupa andesit – pasir, tanah urug dan pasir;
 - b. Desa Rejosari Kecamatan Dawe di Dukuh Wonosari dan sekitarnya seluas kurang lebih 3 Ha berupa andesit – pasir, tanah urug dan pasir;
 - c. Desa Wonosoco Kecamatan Undaan di Dukuh Wonosoco Blok Gunung Bedhong seluas kurang lebih 4 Ha berupa batu kapur; dan
 - d. Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo di Dukuh Kali Wuluh seluas kurang lebih 4 Ha berupa andesit – pasir, tanah urug dan pasir.
6. Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 1.132 Ha terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan industri besar direncanakan berkembang di sisi luar badan jalan dengan jarak terluar batas lahan pengembangan kurang lebih 500 meter ke kiri dan/atau ke kanan diukur dari as jalan meliputi jalan Jekulo – Pati dan jalan Kaliwungu – Jepara;

- b. Kawasan peruntukan industri menengah direncanakan berkembang pada lokasi meliputi Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Bae dan Kecamatan Gebog; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil atau mikro tersebar di seluruh kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berupa penataan dan pengelompokan menjadi sentra atau lingkungan industri kecil.
7. Kawasan peruntukan pariwisata
- Kawasan peruntukan pariwisata luas keseluruhan kurang lebih 35 Ha terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi Kawasan Museum Kretek di Kecamatan Jati, Kawasan Makam Sunan Kudus berada di Kecamatan Kota, Kawasan Makam Sunan Muria berada di Kecamatan Dawe, dan Kawasan Tradisional Desa Wonosoco berada di Kecamatan Undaan;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi Kawasan Wisata Gunung Muria berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog dan Kawasan Wisata Agro Kopi dan Jeruk Pamelon berada di Kecamatan Dawe; dan
 - c. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan meliputi :
 - 1) Kawasan Wisata Kuliner berada di Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati;
 - 2) Kawasan Wisata Industri berada di Kecamatan Kota, dan Kecamatan Gebog;
 - 3) Kawasan Wisata Belanja berada di Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati;
 - 4) Kawasan Wisata Minat Khusus berada di Museum Kretek Kecamatan Jati; dan
 - 5) Kawasan Wisata Olah Raga berada di GOR Wergu Kecamatan Kota.
8. Kawasan peruntukan permukiman
- a. Permukiman perkotaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.884 Ha meliputi kawasan perkotaan (seluruh wilayah Kecamatan Kota, seluruh Kecamatan Bae, seluruh Kecamatan Jati, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog dan sebagian Kecamatan Mejobo) dan ibu kota kecamatan meliputi Ibu kota Kecamatan Undaan, Ibu kota Kecamatan Dawe,

- Ibu kota Kecamatan Jekulo, Ibu kota Kecamatan Gebog dan Ibu kota Kecamatan Mejobo; dan
- b. Permukiman perdesaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.653 Ha meliputi permukiman di luar Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan.
9. Kawasan peruntukan pertahanan
- Kawasan peruntukan pertahanan berupa pemanfaatan ruang untuk pemerintah terkait bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi :
- a. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Kota;
 - b. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
 - c. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kota; dan
 - d. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kecamatan Gebog
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Gebog diarahkan pada pengembangan industri serta pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
2. Kecamatan Dawe
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Dawe diarahkan pada pengembangan pariwisata pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan.
3. Kecamatan Jekulo
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jekulo diarahkan pada pengembangan industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
4. Kecamatan Mejobo
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Mejobo diarahkan pada pengembangan industri pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

5. Kecamatan Undaan
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Undaan diarahkan pada pengembangan agropolitan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
6. Kecamatan Jati
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jati diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
7. Kecamatan Kaliwungu
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kaliwungu diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
8. Kecamatan Kota
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kota diarahkan pada pengembangan pusat pelayanan permukiman.
9. Kecamatan Bae
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Bae diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada Tahun 2012 tercatat sebesar 780.051 jiwa, terdiri dari 385.184 jiwa laki-laki (49,38%) dan 394.867 jiwa perempuan (50,62%). Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2012 sebesar 0,98% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan kata lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat hampir di semua kecamatan (kecuali Kecamatan Undaan).

Tabel 2.5.
Penduduk menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Per Kecamatan
di Kabupaten Kudus Tahun 2012

Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio (persen)
01. Kaliwungu	45.545	46.999	92.544	96,91
02. Kota	44.027	47.459	91.486	92,77
03. Jati	48.759	50.593	99.352	96,37
04. Undaan	34.969	34.890	69.859	100,23
05. Mejobo	35.222	35.338	70.560	99,67
06. Jekulo	49.886	49.915	99.801	99,94
07. Bae	31.389	32.636	64.025	96,18
08. Gebog	47.847	48.286	96.133	99,09
09. Dawe	47.540	48.751	96.291	97,52
JUMLAH	385.184	394.867	780.051	97,55

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun (2008 - 2012) sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.6. menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 1.835 jiwa per Km². Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat dan Kecamatan Undaan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah.

Tabel 2.6.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2012

Tahun	Luas daerah (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa per Km ²)
2008	425,16	752.921	1.771
2009	425,16	759.249	1.786
2010	425,16	764.606	1.798
2011	425,16	769.904	1.811
2012	425,16	780.051	1.835

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan yang telah ditamatkan. Semakin tinggi proporsi penduduk yang berpendidikan, akan mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.7 menggambarkan komposisi dan peningkatan kapasitas penduduk Kabupaten Kudus dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012
dilihat dari Tingkat Pendidikan

Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Tidak Sekolah	50.609	39.656	43.394	37.417	34.751
Tidak / Belum Tamat SD	97.414	99.046	91.393	93.543	90.353
Tamat SD	211.636	203.351	195.358	199.559	206.612
Tamat SLTP	116.063	125.092	130.531	130.649	132.687
Tamat SLTA	115.756	124.040	125.771	126.096	127.632
Akademi / Sarjana	22.022	27.468	36.559	37.417	39.806

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan menunjukkan potensi dan komposisi penduduk yang akan mempengaruhi kapasitas penduduk dalam pengembangan sumber daya yang dimilikinya. Kecenderungan dalam lima tahun terakhir 2008 - 2012 dapat diketahui bahwa pelayanan pendidikan kepada masyarakat cukup berhasil ditinjau dari jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan SMP yang merupakan pelaksanaan program nasional dan daerah yaitu Program Wajib Belajar 9 Tahun. Sedangkan jumlah penduduk yang menamatkan SMA dan Akademi/PT kecenderungannya meningkat relatif tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah dapat diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai wilayah tersebut. Indikator yang umum digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut, sebagaimana dapat diuraikan pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10 dan Tabel 2.11.

Tabel 2.8.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 - 2012
 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
 Kabupaten Kudus

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012*	
		Rp. (000.000)	%								
1	Pertanian	369.112,83	3,16	407.829,14	3,36	426.668,77	3,37	428.868,96	3,25	461.633,05	3,36
2	Pertambangan & penggalian	4.666,99	0,04	4.134,66	0,03	4.029,44	0,03	4.293,62	0,03	4.760,44	0,03
3	Industri pengolahan	7.145.779,11	61,16	7.421.852,42	61,11	7.651.696,27	60,48	7.938.351,14	60,21	8.168.625,63	59,39
4	Listrik, gas & air bersih	39.434,71	0,34	44.886,11	0,37	49.831,95	0,39	52.596,67	0,40	56.398,39	0,41
5	Konstruksi	174.741,85	1,50	191.988,88	1,58	206.119,26	1,63	233.765,23	1,77	245.636,34	1,79
6	Perdagangan, hotel & restoran	3.218.014,82	27,54	3.309.244,27	27,25	3.503.267,11	27,69	3.648.886,48	27,68	3.878.330,24	28,20
7	Pengangkutan & komunikasi	229.419,85	1,96	239.571,43	1,97	251.675,22	1,99	279.798,75	2,12	298.909,81	2,17
8	Keuangan, sewa, & jasa Perush	252.551,43	2,16	270.065,28	2,22	282.907,51	2,24	302.015,99	2,29	324.438,92	2,36
9	Jasa-jasa	250.098,17	2,14	255.380,18	2,10	274.863,29	2,17	295.030,09	2,24	315.852,35	2,30
	PDRB	11.683.819,73	100	12.144.952,38	100	12.651.058,82	100	13.183.606,91	100	13.754.585,17	100

Sumber : Analisis PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2012

* Angka sementara

Sesuai Tabel 2.8 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Kudus tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atas dasar harga konstan pada semua sektor mengalami kenaikan dari total Rp.11.683.819.730.000,- menjadi total Rp. 13.754.585.170.000,-, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan walaupun setiap tahun proporsinya mengalami penurunan dari 61,16% (tahun 2008) menjadi 59,39% (tahun 2012) terhadap total PDRB. Sektor kedua yang penting bagi perekonomian Kabupaten Kudus adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi meningkat dari 27,54% (tahun 2008) menjadi 28,20% (tahun 2012) dan yang ketiga adalah sektor pertanian dengan kontribusi antara 3,16% sampai dengan 3,36% terhadap total PDRB. Sedangkan sektor yang paling rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian, hal ini dikarenakan Kabupaten Kudus tidak memiliki potensi pertambangan karena hanya mempunyai galian C saja.

Tabel 2.9.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 - 2012
 atas Dasar Harga Berlaku
 Kabupaten Kudus

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012*	
		Rp. (000.000)	%								
1	Pertanian	669.646,60	2,46	803.772,14	2,78	884.589,78	2,81	950.856,24	2,81	1.079.747,16	2,92
2	Pertambangan & penggalian	9.092,12	0,03	8.538,79	0,03	8.569,44	0,03	9.527,21	0,03	10.892,68	0,03
3	Industri pengolahan	17.408.531,63	63,90	18.369.527,90	63,46	19.742.458,88	62,75	21.114.288,74	62,38	22.707.038,41	61,44
4	Listrik, gas & air bersih	100.612,94	0,37	116.049,08	0,40	131.503,18	0,42	150.122,75	0,44	164.122,38	0,44
5	Konstruksi	347.586,21	1,28	402.586,23	1,39	457.798,86	1,46	525.244,33	1,55	602.878,24	1,63
6	Perdagangan, hotel & restoran	7.102.368,42	26,07	7.516.547,92	25,97	8.272.931,06	26,29	8.916.516,17	26,34	9.931.325,42	26,87
7	Pengangkutan & komunikasi	394.677,34	1,45	399.107,10	1,38	422.536,19	1,34	464.543,58	1,37	507.120,43	1,37
8	Keuangan, sewa, & jasa perush	556.816,77	2,04	624.356,50	2,16	709.068,28	2,25	795.029,03	2,35	899.966,80	2,44
9	Jasa-jasa	656.060,27	2,41	706.400,82	2,44	833.908,37	2,65	922.845,27	2,73	1.056.322,51	2,86
	PDRB	27.245.392,30	100	28.946.886,48	100	31.463.364,03	100	33.848.973,32	100	36.959.414,04	100

Sumber : Analisis PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2012

* Angka Sementara

Tabel. 2.9. menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan dari Rp.27.245.392.300.000,- (2008) menjadi Rp. 36.959.414.040.000,- (2012). Adapun kontribusi tertinggi adalah industri pengolahan meskipun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan proporsi yang menurun dari 63,90% menjadi 61,44% terhadap jumlah PDRB.

Tabel 2.10.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 - 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Kudus

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012*	
		Hb	Hk								
1	Pertanian	206.7	113.91	248.05	125.86	272.99	131.67	293.44	135.35	333.22	142.47
2	Pertambangan & penggalian	382.4	196.28	359.12	173.89	360.41	169.47	400.69	180.58	458.12	200.21
3	Industri pengolahan	361.6	148.42	381.53	154.15	410.05	158.92	438.54	164.88	471.62	169.66
4	Listrik, gas & air bersih	422.7	165.69	487.59	188.59	552.52	209.37	630.75	220.99	689.57	236.96
5	Konstruksi	543.6	273.26	629.56	300.23	715.90	322.33	821.37	365.56	942.77	384.12
6	Perdagangan, hotel & restoran	318.6	144.34	337.15	148.43	371.08	157.14	399.95	163.67	445.47	173.96
7	Pengangkutan & komunikasi	295.9	172.03	299.26	179.64	316.83	188.71	348.33	209.80	380.26	224.13
8	Keuangan, sewa, & jasa perush	320.2	145.24	359.07	155.32	409.57	162.70	457.23	173.69	517.58	186.59
9	Jasa-jasa	360.0	137.25	387.65	140.15	457.63	150.84	506.43	161.91	579.68	173.33
	PDRB	342.81	147.01	364.22	152.81	395.92	159.18	425.90	165.88	465.03	173.06

Sumber : Analisis PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2012

* Angka Sementara

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2008 - 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) sesuai Tabel 2.10 menunjukkan kenaikan dari tahun 2008 sebesar 342,81 (Hb) dan 147.01 (Hk) menjadi 465.03 (Hb) dan 173.06 (Hk) pada tahun 2012, dengan perkembangan sektor tertinggi adalah sektor konstruksi.

Tabel 2.11.
Perkembangan PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2012
atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Kabupaten Kudus

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012*	
		Berlaku	Konstan								
1	Pertanian	16,96	3,83	20,03	10,49	10,05	4,62	7,49	2,57	13,56	5,48
2	Pertambangan & penggalian	8,49	1,24	-6,09	-11,41	0,36	-2,54	11,18	6,56	14,13	10,87
3	Industri pengolahan	11,48	3,54	5,52	3,86	7,47	3,1	6,95	3,75	7,54	2,9
4	Listrik, gas & air bersih	13,06	8,54	15,34	13,82	13,32	11,02	14,16	5,55	9,33	7,23
5	Konstruksi	8,78	0,02	15,82	9,87	13,71	7,36	14,73	8,52	14,78	9,82
6	Perdagangan, hotel & restoran	16,91	4,49	5,83	2,83	10,06	5,86	7,78	4,26	11,38	6,18
7	Pengangkutan & komunikasi	15,85	7,67	1,12	4,42	5,87	5,05	9,94	11,17	9,17	6,83
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	19,37	4,81	12,13	6,93	14,06	4,95	11,64	5,86	13,2	8,13
9	Jasa-jasa	24,89	5,44	7,67	2,11	18,05	7,63	10,67	7,34	14,46	7,06
	PDRB	13,46	3,92	6,25	3,95	8,7	4,17	7,57	4,21	9,19	4,33

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

* Angka Sementara

Sesuai Tabel 2.11 perkembangan PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2012 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku memperlihatkan bahwa berdasarkan Harga Konstan menunjukkan peningkatan selama 5 (lima) tahun dari 3.92 pada tahun 2008 menjadi 4.33 pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan Harga Berlaku perkembangannya fluktuatif dan mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 13.46 menjadi sebesar 9.19 pada tahun 2012.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12.
Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2008 - 2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Kudus	11,99	3,07	7,65	3,34	4,77
Jawa Tengah	9,55	3,32	6,88	2,68	4,24
Nasional	11,06	2,78	6,69	3,79	4,30

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Laju inflasi nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus tahun 2008-2012 cukup fluktuatif dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2008. Inflasi tahun 2008 terjadi sebagai akibat dari krisis finansial global yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Seiring dengan membaiknya situasi ekonomi nasional dan global maka tahun 2011, inflasi menurun. Pada tahun 2012, kebijakan Pemerintah dalam memutuskan harga BBM yang kurang cepat telah menimbulkan spekulasi sehingga harga barang-barang telah dinaikkan. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menggeser keseimbangan yang telah tercipta. Implikasi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mendorong peningkatan laju inflasi di

Kabupaten Kudus sebesar 4,77% lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 4,24 % dan nasional sebesar 4,30 %.

2.2.1.3. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Indeks Gini di Kabupaten Kudus pada tahun 2008 sebesar 0,222, pada tahun 2009 sebesar 0,249, pada tahun 2010 sebesar 0,243, pada tahun 2011 sebesar 0,348 dan pada tahun 2012 sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Kudus relatif rendah. Indeks Williamson Kabupaten Kudus bila ditinjau dari harga berlaku pada tahun 2008 sebesar 0,797, tahun 2009 sebesar 0,799 dan pada tahun 2010 menjadi sebesar 0,797. Adapun Indeks Williamsom bila ditinjau dari harga konstan pada tahun 2008 sebesar 0,781, tahun 2009 sebesar 0,784, tahun 2010 sebesar 0,823 dan tahun 2011 sebesar 0,906. Indeks tersebut menggambarkan bahwa tingkat pemerataan aktivitas ekonomi semakin baik, namun bila ditinjau dari hasil riil menunjukkan tingkat kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus makin bertambah. Hal ini dipengaruhi aktivitas yang berkembang di masing-masing kecamatan.

2.2.1.4. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2008 ke 2012 cenderung mengalami penurunan. Ini memperlihatkan keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus khususnya yang terkait dalam program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin tahun 2008 sebesar 97.810 jiwa atau 12,99 % menurun menjadi 68.100 jiwa atau 8,63 % di tahun 2012. Perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan mulai tahun

2008 sampai tahun 2012 sebagaimana Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13.
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	97.810	84.860	70.200	73.591	68.100
Persentase Penduduk Miskin (%)	12,99	11,18	9,02	9,45	8,63
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	217.005	218.411	237.643	256.745	277.382

Sumber : Susenas BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

2.2.1.5. Angka Kriminalitas yang tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Pada tahun 2012 angka kriminalitas yang terjadi sebanyak 187 kasus dan tertangani 100%, adapun kasus tertinggi pencurian/ranmor sebanyak 154 kasus sebagaimana dalam Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Angka Kriminalitas yang ditangani Tahun 2012
Kabupaten Kudus

Kasus	Kejadian	Tertangani
Pembunuhan	-	-
Penganiayaan berat/penganiayaan	30	30
Penculikan	-	-
Penculikan dengan kekerasan	-	-
Penculikan dengan pemberatan	-	-
Pencurian/Ranmor	154	154
Pencurian Kawat telepon	-	-
Pemeriksaan	1	1
Pembakaran	-	-
Senpi/Handak	1	1
Pemerasan	-	-
Penyelundupan	1	1
Kejahatan Terhadap Kepala Negara	-	-
Jumlah	187	187

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2012

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator pada urusan pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan.

2.2.2.1. Urusan Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Kudus menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun 2008 sebesar 72,02 menjadi 73,69 pada tahun 2012, namun di tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah angka IPM Kabupaten Kudus berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Pati, meskipun masih di atas Jawa Tengah yang pada tahun 2012 mempunyai nilai IPM sebesar 73,36. Data perkembangan IPM Kabupaten Kudus dan perbandingan dengan kabupaten sekitar sebagaimana Tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kudus	72,02	72,57	72,95	73,24	73,69
2	Blora	69,63	70,14	70,61	71,25	71,49
3	Rembang	71,12	71,55	72,07	72,45	72,81
4	Pati	72,26	72,72	72,96	73,49	73,81
5	Jepara	71,49	72,45	72,64	73,12	73,54
	Jawa Tengah	71,60	72,10	72,49	72,94	73,36

Sumber : APM Kabupaten Kudus Tahun 2008-2010, ASPM Kabupaten Kudus Tahun 2011-2012

Adapun kinerja urusan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan IPM dapat diketahui dari indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni sebagaimana Tabel 2.16, Tabel 2.17, Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	540.758	546.060	550.367	554.637	575.735
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	542.385	546.935	551.083	554.637	575.735
3	Angka melek huruf	98,74	99,85	99,87	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Warga melek huruf di Kabupaten Kudus dalam 4 (empat) tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 telah mengalami kenaikan sebesar 0,13%, sehingga pada tahun 2011 dan 2012 telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program pendidikan dalam upaya menekan angka buta huruf khususnya di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.17
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	5,94	6,20	6,19	6,16	6,21
2	SMP/MTs	3,00	3,00	3,00	3,00	3,01
3	SMA/MA/SMK	3,00	2,98	2,99	3,00	3,01
	Jumlah	11,94	12,18	12,18	12,16	12,23

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Dari Tabel 2.17 didapatkan angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2011 sedikit turun 0,02 tahun, namun dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kudus telah mencapai 12,23 tahun yang artinya telah bersekolah sampai dengan 12 tahun 2 bulan atau setingkat SLTA.

Tabel 2.18
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	102,16	102,07	101,88	101,32	106,31
2	SMP/MTs	96,57	97,36	97,12	96,00	104,42
3	SMA/SMK/MA	64,88	66,94	72,72	75,25	86,79

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2008 – 2012 di tingkat SD/MI menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2009, 2010 dan 2011 mengalami penurunan dari tahun 2008 disebabkan penghitungan jumlah penduduk sebagai pembagi APK menggunakan Sensus Penduduk 2000, namun pada tahun 2012 kembali naik menjadi sebesar 106,31% karena penghitungan jumlah penduduk sebagai pembagi APK menggunakan Sensus Penduduk 2010. Di tingkat SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2008 dan sempat turun pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 104,42%. Adapun di tingkat SMA/SMK/MA mengalami kecenderungan naik dari 64,88% pada tahun 2008 menjadi 86,79% pada tahun 2012.

Tabel 2.19
 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2008 - 2012
 Kabupaten Kudus

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI/SDLB/Paket A	83,37	83,44	83,61	97,61	97,92
2	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	66,74	66,83	64,49	90,17	95,32
3	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	41,62	42,37	43,15	64,58	80,38

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun di tingkat SD/MI/SDLB/Paket A menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 sebesar 83,37% menjadi 97,92% pada tahun 2012. Pada tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2010 turun menjadi 64,49%, namun mulai tahun 2011 menunjukkan kenaikan menjadi 90,17% dan tahun 2012 menjadi 95,32%. Sedangkan di tingkat SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C cenderung mengalami kenaikan mulai tahun 2008 sebesar 41,62% menjadi 80,38% pada tahun 2012.

2.2.2.2. Urusan Kesehatan

Kinerja untuk urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka kelangsungan hidup bayi, usia harapan hidup, dan persentase balita gizi buruk, sebagaimana Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20.
 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Bayi (AKB)
 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) dan Persentase Balita Gizi Buruk
 Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus

No	Variabel Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	94,98	94,09	93,61	94,40	93,89
2	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	5,02	5,91	6,39	5,60	6,11
3	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	69,69	69,71	69,62	69,68	69,68
4	Persentase Balita Gizi Buruk	1,83	2,23	1,92	1,30	1,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) pada tahun 2008 sampai dengan 2012 memperlihatkan angka yang fluktuatif dengan angka terendah pada tahun 2010 sebesar 93,61 meskipun pada tahun 2011 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2012 turun kembali menjadi 93,89. Hal tersebut sesuai dengan Angka Kematian Bayi yang fluktuatif juga dengan angka kematian tertinggi pada tahun 2010 sebesar 6,39. Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan angka terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 69,62 dan angka tertinggi sebesar 69,71 pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar 69,68. Persentase balita gizi buruk selama lima tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan angka tertinggi pada tahun 2009 sebesar 2,23% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 1,30%.

2.2.2.3. Urusan Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan dapat diketahui melalui indikator kepemilikan tanah, sebagaimana Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21.
Luas Lahan berdasarkan Kepemilikan Tanah Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Hak Milik (HM)	4.224.966	4.236.169	3.742.807	4.520.781	2.853.177
Hak Guna Bangunan (HGB)	245.602	169.663	207.960	231.903	752.021
Hak Guna Usaha (HGU)	0	0	0	0	13.555
Hak Pengelola (HPL)	101.922	0	0	0	0
Jumlah	4.635.461	4.590.399	4.158.302	4.835.220	3.978.336

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Pemahaman masyarakat akan hak atas tanah untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah di Kabupaten Kudus menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif bahkan menurun pada tahun 2012, hal ini tercermin dalam Tabel 2.21 di atas, dimana jumlah total luas lahan yang bersertifikat HM, HGB, HGU

dan HPL Tahun 2008 sebanyak 4.635.461 menjadi 3.978.336 pada tahun 2012. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang dapat diproses pada tahun yang bersangkutan memnag cenderung menurun.

2.2.2.4. Urusan Ketenagakerjaan

Kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk yang bekerja dan mencari kerja, sebagaimana Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22.
Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Mencari Kerja Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

Tahun	Angkatan Kerja		Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
2008	377.114	24.713	93,85
2009	406.909	32.306	92,64
2010	394.361	26.152	93,78
2011	383.399	25.391	93,79
2012*	409.471	26.387	93,95

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

* Angka Sementara

Dari Tabel 2.22 dapat disimpulkan dari tahun 2008 – 2012 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan, dan pada tahun 2012 kondisinya terdapat 93,95% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan 6,05% masih mencari kerja atau pengangguran.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah grup kesenian, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagaimana Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	2	3	3	4	5
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	2	2	2	2	2
3	Jumlah gelanggang olahraga per 10.000 penduduk.	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2012
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2012

Jumlah grup kesenian pada tahun 2008 sampai dengan 2012 meningkat dari 2 grup pada tahun 2008 menjadi 5 grup pada tahun 2012, sedangkan jumlah gedung kesenian dan jumlah gelanggang olahraga tidak mengalami perubahan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari :

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

1. Urusan Pendidikan

Layanan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa, fasilitas pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan sebagaimana tertera pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	71.644	71.343	79.466	84.540	76.146
1.2	Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 Th (orang)	84.882	85.511	86.237	86.856	79.272
1.3	APS SD/MI (%)	97,82	95,79	97,52	99,93	99,64
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	28.843	29.460	36.912	40.098	38.591
2.2	Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.983	44.307	44.681	45.000	40.787
2.3	APS SMP/MTs (%)	87,94	92,08	101,33	99,81	100,29
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)	19.149	19.653	23.884	28.629	31.468
3.2	Jumlah Penduduk kelompok Usia 16-18 Th (orang)	47.483	47.828	48.231	48.571	41.567
3.3	APS SMA/SMK/MA (%)	44,7	46,31	52,55	64,86	81,43

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI pada tahun 2008 tercapai 97,82% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 99,64%. APS SMP/MTs di Kabupaten Kudus cenderung fluktuatif, tahun 2008 mencapai 87,94% meningkat hingga tahun 2010 mencapai 101,33%, kemudian menurun menjadi 99,81% di tahun 2011 dan pada tahun 2012 kembali meningkat mencapai 100,29%. Adapun APS SMA/MA/SMK tahun 2008 mencapai 44,7% cenderung meningkat hingga tahun 2012 tercapai sebesar 81,43%. Pemberian beasiswa dan dana untuk sekolah oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin setiap anak bisa bersekolah masih diperlukan untuk meningkatkan APS di Kabupaten Kudus, namun dibutuhkan kecermatan sehingga dapat tepat sasaran.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008–2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	608	611	605	609	624
1.2	Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 Th (orang)	84.882	85.511	86.237	86.856	79.272
1.3	Rasio	71,63	71,46	69,81	69,79	76,45
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	102	111	113	113	113
2.2	Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.983	44.307	44.681	45.000	40.787
2.3	Rasio	23,2	25,06	25,3	25,12	27,71
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	58	71	71	71	76
3.2	Jumlah Penduduk kelompok Usia 16-18 Th (orang)	47.483	47.828	48.231	48.571	41.567
3.3	Rasio	12,22	14,85	14,73	14,62	18,29

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan peningkatan 16 gedung. Kenaikan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai dengan 12 tahun telah diimbangi dengan perubahan pada jumlah gedung sekolah. Pada tahun 2008, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 7 - 12 tahun sebesar 71,63 dan pada tahun 2012 rasionya menjadi sebesar 76,45. Adapun rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2008 sebesar 23,2 menjadi 27,71 pada tahun 2012. Kondisi di atas menunjukkan bahwa penyediaan gedung sekolah telah meningkat seiring dengan program wajib belajar.

Untuk jenjang SMA/MA pada tahun 2012 rasio gedung sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun mencapai 18,29 atau tersedia 18,29 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMA/MA. Bila diasumsikan tiap gedung rata-rata menampung 12 lokal dengan murid 36 siswa untuk masing-masing kelas, maka diprediksikan daya tampung SMA/MA berkisar 547 siswa. Hal ini menunjukkan masih kurang memadai penyediaan sekolah tingkat SMA/MA, apalagi untuk menunjang wajib belajar 12 tahun. Tetapi hal ini dapat disiasati dengan menambah lokal kelas dimana masing-masing tingkatan kelas ada 5-6 kelas, sehingga jumlah lokal kelas keseluruhan 15-18 lokal setiap SMA/MA, dan hal ini sudah diterapkan di SMA/MA Kabupaten Kudus dimana rata-rata tiap sekolah terdapat minimal 15-18 lokal kelas.

Jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah Tahun 2008–2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.26 dan Tabel 2.27.

Tabel 2.26.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru (orang)	6.117	6.908	7.023	6.987	7.631
1.2	Jumlah Murid (siswa)	86.472	87.034	86.576	85.741	83.934
1.3	Rasio	0,07074	0,07937	0,08112	0,08149	0,09091
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru (orang)	3.148	2.817	3.056	3.113	3.361
2.2	Jumlah Murid (siswa)	41.072	42.319	41.174	42.299	42.316
2.3	Rasio	0,07766	0,06657	0,07422	0,07359	0,07943

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Tabel 2.27.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SMA/MA					
1.1	Jumlah Guru (orang)	2.069	2.370	2.492	2.572	2.941
1.2	Jumlah Murid (siswa)	29.629	30.465	31.676	33.050	33.915
1.3	Rasio	0,06983	0,07779	0,0786	0,07782	0,0867

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Dari Tabel 2.26 dan Tabel 2.27 di atas, dapat dilihat perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Rasio jumlah guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan trend yang berkebalikan dimana jumlah murid cenderung turun namun jumlah guru cenderung naik. Namun untuk SMP/MTs perkembangan lebih fluktuatif, menurun pada tahun 2011 dari 0,07422 menjadi 0,07359, tetapi tahun berikutnya naik kembali menjadi 0,07943 atau 79,43 per 1.000 murid. Untuk SMA/MA perkembangannya juga fluktuatif dimana pada tahun 2011 menurun, tetapi di tahun 2012 kembali naik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru cenderung mengalami peningkatan, namun masih perlu perhatian dalam rangka peningkatan kualitas guru.

Fasilitas pendidikan Tahun 2008–2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Fasilitas Pendidikan Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1,1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	332	375	417	413	402
1,2	Jumlah sekolah	608	611	602	606	606
1,3	Fasilitas pendidikan SD/MI (%)	54,57	61,45	69,27	68,10	66,35
2	SMP/MTs					
2,1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	94	97	102	102	103
2,2	Jumlah sekolah	102	111	113	113	113
2,3	Fasilitas pendidikan SMP/MTs (%)	92,15	87,83	90,47	90,65	91,06
3	SMA/MA					
3,1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	57	68	68	68	73
3,2	Jumlah sekolah	58	71	71	71	76
3,3	Fasilitas pendidikan SMA/MA (%)	97,45	95,47	96,09	95,94	95,62

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar 54,57% menjadi 66,35% pada tahun 2012. Pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA mengalami kecenderungan menurun, pada SMP/MTs dari 92,15% pada tahun 2008 menjadi 91,06% pada tahun 2012 dan pada SMA/MA dari 97,45% pada tahun 2008 menjadi 95,62% pada tahun 2012.

Disamping Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam urusan Pendidikan juga terdapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2008–2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak	10.533	11.221	16.635	18.118	19.158
Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	43.108	43.425	43.793	44.106	38.512
PAUD (%)	24,43	25,84	37,99	41,08	49,75
Jumlah TK	181	204	212	215	215
Jumlah guru TK	467	699	967	986	972

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama lima tahun cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar 24,43% menjadi 49,75% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kudus mulai usia dini diharapkan mampu tumbuh berkembang sesuai dengan usia dan potensinya sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Adapun kondisi Angka Putus Sekolah (APtS) jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2008–2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
SD/MI	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
SMP/MTs	0,21	0,20	0,20	0,12	0,11
SMA/SMK/MA	0,63	0,32	0,30	0,13	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Pada Tabel 2.30 memperlihatkan bahwa Angka Putus Sekolah (APS) pada tahun 2008–2012 mengalami penurunan. Di tingkat SD/MI dari 0,08% pada tahun 2008 menjadi 0,03% pada tahun 2012. Sedangkan di tingkat SMP/MTs pada tahun 2008 sebesar 0,21% menjadi 0,11% pada tahun 2012. Dan di tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2008 sebesar 0,63% turun menjadi 0,12% pada tahun 2012.

Untuk kondisi Angka Kelulusan (AL) dan Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2008–2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Persentase Angka Kelulusan (AL) dan Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2008-2012
Kabupaten Kudus

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Kelulusan (AL)					
1.1	SD/MI	97,45	98,04	98,68	100	100
1.2	SMP/MTs	90,39	98,77	98,76	99,76	99,77
1.3	SMA/SMK/MA	93,97	99,97	99,82	99,98	99,00
2	Angka Melanjutkan (AM)					
2.1	Dari SD/MI ke SMP/MTs	104,12	103,87	105,28	107,19	102,60
2.2	Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	79,19	81,91	87,47	92,69	93,56

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Kudus pada tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI cenderung meningkat dari 97,45% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2012, di tingkat SMP/MTs meningkat dari 90,39% pada tahun 2008 menjadi 99,77% pada tahun 2012, dan di tingkat SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 93,97% pada tahun 2008 menjadi 99,98% pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 turun menjadi 99,00%.

Angka Melanjutkan (AM) pada tahun 2008 – 2012 dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung meningkat dari tahun 2008 sebesar 104,12% menjadi 107,19% pada tahun 2011 meskipun pada tahun 2012 turun menjadi 102,60%, namun hal tersebut masih menunjukkan bahwa semua lulusan dari SD/MI

telah mampu melanjutkan ke tingkat SMP/MTs. Sedangkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA meningkat dari 79,19% pada tahun 2008 menjadi 93,56% pada tahun 2012.

Data persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2008–2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

Kualifikasi Guru	2008	2009	2010	2011	2012
Guru SD	25,37	30,23	39,84	51,01	59,50
Guru SMP	78,51	82,49	76,63	90,49	92,95
Guru SMA	76,04	84,44	93,34	94,06	93,81
Guru SMK	76,64	82,30	90,42	93,66	94,24

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2008 – 2012 untuk guru SD cenderung mengalami kenaikan dari 25,37% pada tahun 2008 menjadi 59,50% pada tahun 2012, untuk guru SMP cenderung fluktuatif pada tahun 2008 dan 2009 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2010 turun menjadi 76,63%, namun mulai tahun 2011 kembali naik dan menjadi 92,95% pada tahun 2012. Sedangkan guru SMA cenderung naik dari tahun 2008 sebesar 76,04% menjadi 94,06% pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 turun menjadi 93,81%. Adapun untuk guru SMK mengalami kenaikan dari 76,64% pada tahun 2008 menjadi 94,24% pada tahun 2012.

2. Urusan Kesehatan

Layanan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI), rasio Posyandu per satuan balita, rasio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk, rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan Puskesmas dan cakupan Puskesmas Pembantu.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Data AKI dan jumlah kasus kematian ibu melahirkan, sebagaimana Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Tahun 2008 - 2012 di Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kematian ibu maternal	12	14	15	16	15
2.	AKI	78,17	90,86	98,95	103,7	95,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Kecenderungan angka kematian ibu dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari 78,17 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2008 menjadi 95,4 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2012. Penyebab tertinggi kematian ibu antara lain hipertensi, pendarahan, masih rendahnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat dan masih kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam rujukan persalinan pada kehamilan risiko tinggi.

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana (dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat) dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis

untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Berdasarkan Tabel 2.34 menunjukkan rasio posyandu per 100 balita dari tahun 2008 sampai dengan 2012 di Kabupaten Kudus di atas 1 (satu). Terendah tahun 2008 sebesar 1,02 dan tertinggi tahun 2011 sebesar 1,17. Pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi 1,16. Di Kabupaten Kudus rasio Posyandu per 100 balita yang tersedia sudah memenuhi di mana 1 posyandu melayani 100 balita, akan tetapi masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 1,59.

Tabel 2.34
Rasio Posyandu terhadap Balita
Tahun 2008 - 2012 di Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah posyandu	673	678	672	777	786
2.	Jumlah balita	65.696	64.033	65.467	66.357	67.740
3.	Rasio	1,02	1,06	1,03	1,17	1,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.Tahun 2008-2012

Pada Tabel 2.35 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 rata-rata rasio posyandu menurut kecamatan per 100 balita sebesar 1,16. Paling rendah di Kecamatan Gebog sebesar 0,69 dan tertinggi di Kecamatan Jekulo sebesar 1,99.

Tabel 2.35
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Tahun 2012 di Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
1	Kaliwungu	85	8.040	1,07
2	Kota	116	8.055	1,44
3	Jati	83	7.998	1,04
4	Undaan	66	5.947	1,12
5	Jekulo	169	8.471	1,99
6	Mejobo	57	6.166	0,92
7	Bae	50	5.440	0,92
8	Gebog	65	9.438	0,69
9	Dawe	95	8.185	1,16
	Jumlah	786	67.740	1,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.36
Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
2.	Jumlah Pustu	43	43	43	43	43
3.	Jumlah PKD	82	82	83	93	93
4.	Jumlah Penduduk	752.921	759.249	764,606	769.904	780.051
5.	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,025	0,025	0,025	0,025	0,024
6.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,057	0,057	0,057	0,057	0,055
7.	Rasio PKD per 1000 penduduk	0,109	0,108	0,109	0,121	0,119

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Berdasarkan Tabel 2.36 menunjukkan rasio puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) per 1000 penduduk mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012. Pada tahun 2008 sampai dengan 2011 rasio puskesmas sebesar 0,025 dan mengalami penurunan menjadi 0,024 pada tahun 2012. Sedangkan rasio pustu per 1000 penduduk mengalami penurunan dari 0,057 pada tahun 2008 menjadi 0,055 pada tahun 2012, hal ini dikarenakan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tidak melakukan pembangunan baru Puskesmas dan Pustu sedangkan jumlah penduduk tiap tahun meningkat. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah terpenuhi dengan adanya pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes atau PKD).

Tabel 2.37
Jumlah Puskesmas dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2012
Kabupaten Kudus

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Kaliwungu	92.544	2	0,022	3	0,032
2	Kota	91.486	3	0,033	4	0,044
3	Jati	99.352	2	0,020	5	0,050
4	Undaan	69.859	2	0,029	4	0,057
5	Jekulo	70.560	2	0,028	8	0,113
6	Mejobo	99.801	2	0,020	4	0,040
7	Bae	64.025	2	0,031	3	0,047
8	Gebog	96.133	2	0,021	6	0,062
9	Dawe	96.291	2	0,021	6	0,062
	Jumlah	780.051	19	0,024	43	0,055

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.37 di atas menunjukkan rasio puskesmas per 1000 penduduk tertinggi di Kecamatan Kota sebesar 0,033 dan terendah di Kecamatan Jati dan Mejobo sebesar 0,020. Sedangkan rasio puskesmas per 1000 penduduk tertinggi di Kecamatan Jekulo sebesar 0,113 dan paling rendah di Kecamatan Kaliwungu sebesar 0,032.

Adapun untuk cakupan puskesmas tahun 2008-2012 sebagaimana Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Cakupan Puskesmas Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Cakupan Puskesmas	540.866	693.309	842.229	842.375	854.711

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Cakupan puskesmas selama tahun 2008-2012 menunjukkan kecenderungan meningkat dari 540.866 menjadi 854.711 yang merupakan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas.

Tabel 2.39
Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk
Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	3	4	6	7
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	4	5	6	8	9
5.	Jumlah Penduduk	752.921	759.249	764,606	769.904	780.051
6.	Rasio	0,00531	0,00658	0,00785	0,01039	0,01154

Sumber : - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2012
- BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.40
Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Tahun 2012
Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
1	Kaliwungu	92.544	-	-	-	-	-	-	3	0,0324	3	0,0324
2	Kota	91.486	-	-	1	0,0109	-	-	1	0,0109	2	0,0219
3	Jati	99.352	-	-	-	-	1	0,0101	2	0,0201	3	0,0302
4	Undaan	69.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jekulo	70.560	-	-	-	-	-	-	1	0,0142	1	0,0142
6	Mejobo	99.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bae	64.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Gebog	96.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dawe	96.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	780.051	-	-	1	0,0013	1	0,0013	7	0,0090	9	0,0115

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Dalam Tabel 2.39, rasio rumah sakit per 1000 penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 0,000531 menjadi 0,01154 pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan jumlah rumah sakit menurut kecamatan tahun 2012 sesuai Tabel 2.40 menunjukkan bahwa rasio rumah sakit tertinggi di Kecamatan Kaliwungu sebesar 0,0324.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, maka mulai tahun 2012 RSUD Kudus telah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dan dalam memberikan pelayanannya RSUD telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.

Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2008-2012 dan jumlah dokter menurut kecamatan tahun 2012, sebagaimana Tabel 2.41 dan Tabel 2.42.

Tabel 2.41
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Dokter	276	283	283	288	331
2.	Jumlah Penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
3.	Rasio (per 100 penduduk)	0,0366	0,0372	0,0370	0,0374	0,0424

Sumber : - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012
- BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.42
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2012
Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kaliwungu	92.544	20	0,0216
2	Kota	91.486	86	0,0940
3	Jati	99.352	151	0,1520
4	Undaan	69.859	5	0,0072
5	Jekulo	70.560	20	0,0283
6	Mejobo	99.801	22	0,0220
7	Bae	64.025	9	0,0141
8	Gebog	96.133	12	0,0125
9	Dawe	96.291	6	0,0062
	Jumlah	780.051	331	0,0424

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.41 menunjukkan rasio dokter per 100 penduduk dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan dari 0,0366 pada tahun 2008 menjadi 0,0424 pada tahun 2012. Rasio dokter menurut kecamatan tahun 2012 tertinggi di Kecamatan Jati yaitu sebesar 0,1520 dan paling rendah di Kecamatan Gebog sebesar 0,0062 (Tabel 2.42).

Untuk rasio tenaga perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya per 100 penduduk tahun 2008-2012 dan Jumlah tenaga paramedis menurut kecamatan tahun 2012 sebagaimana Tabel 2.43 dan Tabel 2.44.

Tabel 2.43
Rasio Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya
per 100 Penduduk Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Perawat	757	757	757	1.099	1082
2.	Jumlah Bidan	276	276	276	378	442
3.	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	238	245	245	433	635
4.	Jumlah Penduduk	752.921	759.249	764,606	769.904	780.051
5.	Rasio (per 100 penduduk)	0,17	0,17	0,17	0,25	0,28

Sumber : - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012
- BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.44
Jumlah Tenaga Paramedis (Perawat dan Bidan)
Menurut Kecamatan Tahun 2012
Kabupaten Kudus

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Paramedis	Rasio
1	Kaliwungu	92.544	159	1,718
2	Kota	91.486	180	1,968
3	Jati	99.352	231	2,325
4	Undaan	69.859	157	2,247
5	Jekulo	70.560	162	2,296
6	Mejobo	99.801	140	1,403
7	Bae	64.025	144	2,249
8	Gebog	96.133	141	1,467
9	Dawe	96.291	156	1,620
	Jumlah	780.051	1.470	1,884

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2012.

Tabel 2.43 menunjukkan rasio tenaga perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan, dari 0,17 pada tahun 2008 menjadi 0,28 pada tahun 2012. Sedangkan pada Tabel 2.44 menunjukkan bahwa tenaga paramedis (perawat dan bidan) paling tinggi di Kecamatan Jati sebesar 2,325 dan paling rendah di Kecamatan Mejobo sebesar 1,403.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak tahun 2008-2012 Kabupaten Kudus sebagaimana terlihat Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	36,49	108,13	108,70	82,10	94,73
2.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	93,19	94,22	94,07	94,46	94,76
3.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100	100	100
4.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
5.	Cakupan kunjungan bayi (%)	99,77	99,69	95,75	95,22	95,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung fluktuatif yang terendah pada tahun 2008 sebesar 36,49% karena masih terjadi perbedaan persepsi tentang definisi operasional mengenai pelaporan rujukan hanya yang di rumah sakit, sedangkan di pelayanan dasar (puskesmas) tidak dilaporkan dan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 108,70% karena semua kasus resiko tinggi sudah dimasukkan dalam laporan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan cenderung naik dari 93,19% pada tahun 2008 menjadi 94,76% pada tahun 2012. Sedangkan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* dan balita gizi buruk mendapat perawatan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 telah 100%. Adapun cakupan kunjungan bayi cenderung fluktuatif dari tahun 2008 sebesar 99,77% turun menjadi 95,84% pada tahun 2012.

Pada Tabel 2.46 dan tabel 2.47 berikut akan dijabarkan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit HIV/AIDS, Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan DBD Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus serta Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.

Tabel 2.46
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit HIV/AIDS, Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan DBD Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS (kasus)	-	3	39	59	58
2.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	56,66	60	55	68,98	63,37
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Tabel 2.47
Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus

No	Uraian (jiwa)	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Penduduk Miskin	155.052	155.052	155.052	155.052	155.052
2.	Jumlah Penduduk Miskin yang Ditangani Jamkesmas	127.653	127.653	127.653	127.653	127.653
3.	Jumlah Penduduk Miskin yang Ditangani Jamkesda	27.399	27.399	27.399	27.399	27.399

Sumber : TNP2K PPLS Tahun 2011

Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (Jamkesmas dan Jamkesda) dari tahun 2008-2012 sebesar 155.052 jiwa. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung fluktuatif dengan angka terendah pada tahun 2010 sebesar 55% dan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 68,98%, namun pada tahun 2012 turun menjadi 63,37% yang menunjukkan bahwa angka kesembuhan naik sehingga jumlah penderita turun. Sedangkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dalam kurun waktu lima tahun (2008 – 2012) telah mencapai 100% atau telah tertangani semua.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Cakupan layanan untuk urusan pekerjaan umum dapat dilihat dari proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah, rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU), dan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Proporsi panjang jaringan jalan di Kabupaten Kudus berdasarkan kondisinya dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut ini :

Tabel 2.48
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kondisi Baik	122.635	122.635	154.729	212.937	247.271
2.	Kondisi Sedang	323.278	323.278	239.100	177.816	257.390
3.	Kondisi Rusak Ringan	55.100	55.100	177.750	154.716	91.009
4.	Kondisi Rusak Berat	54.332	54.332	125.720	151.830	101.629
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	555.345	555.345	697.299	697.299	697.299

Sumber : Kudus Dalam Angka Tahun 2013 dan Dinas BPESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Panjang jaringan jalan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, dari 555.345 Km meningkat menjadi 697.299 Km, meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Demikian juga dengan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat dari 122.635 Km pada tahun 2008 menjadi 247.271 Km pada tahun 2012. Namun demikian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 0,35 atau 35% dari keseluruhan jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kudus.

Adapun ketersediaan jaringan irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari Tabel 2.49 berikut ini :

Tabel 2.49
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Jaringan Irigasi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jaringan Primer (m)	9.869	9.869	9.869	9.869	9.869
2	Jaringan Sekunder (m)	53.499	53.499	53.499	53.499	53.499
3	Jaringan Non Teknis (m)	175.942	175.942	175.942	175.942	175.942
4	Luas lahan budidaya pertanian (m ²)	282.500.000	283.460.000	283.060.000	282.660.000	281.690.000
5	Rasio	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008

Sumber : Sistem Informasi dan Profil Daerah Kabupaten Kudus dan Kudus Dalam Angka Tahun 2013

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Kudus tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berkisar pada angka 0,0008.

Ketersediaan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan penduduk bagi sarana peribadatannya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dari Tabel 2.50 berikut ini.

Sedangkan rasio tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten disajikan dalam Tabel berikutnya, yaitu Tabel 2.51.

Tabel 2.50
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Bangunan tempat Ibadah	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk (orang)	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk (orang)	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk (orang)	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk (orang)	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk (orang)	Rasio
1.	Masjid/Langgar /Musholla	2.268	718.091	3,2	2.285	723.124	3,16	2.009	738.802	2,72	2.428	748.240	3,24	2.572	777.763	3,31
2.	Gereja	26	18.230	1,4	28	18.565	1,508	28	34.340	0,82	28	18.473	1,52	25	18.276	1,37
3.	Pura/Kuil/ Sanggah	0	829	0	1	796	1,256	1	796	1,256	0	243	0	0	220	0
4.	Vihara/Cetya/ Klenteng	13	1.739	7,5	13	1.744	7,454	13	1.745	7,45	13	1.268	10,25	10	1.151	8,913
6.	Lain-Lain	0	2	0	0	56	0	0	1	0	0	89	0	0	83	0
	Jumlah	2.307	738.891	3,1	2.327	744.285	3,126	2.051	775.684	2,64	2.469	768.313	3,21	2.615	797.625	3,278

Sumber : SIPD Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.51
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Tahun 2008 dan 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung												
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)	2	142.189,12	71.095	2	142.189,12	71.095	2	142.189,12	71.095	2	142.189,12	71.095	2	142.189,12	71.095
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	752.921			759.249			764.606			769.904			780.051		
3.	Rasio TPU per satuan penduduk	94,43			93,64			92,98			92,34			89,78		

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2013

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kudus ditampilkan dalam Tabel 2.52 berikut ini.

Tabel 2.52
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah TPS	36	36	36	36	36
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	-	-	182,940	206,152	216,000
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah Penduduk	-	-	0,239	0,268	0,277

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2013

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 meningkat, dari 0,239 menjadi 0,277.

Sedangkan kondisi panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 di Kabupaten Kudus, ditampilkan dalam Tabel 2.53 berikut ini :

Tabel 2.53
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah panjang jalan (km)	484.225	484.225	621.180	621.180	621.180
2.	Jumlah penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
3.	Panjang jalan dilalui roda 4 (%)	64,31	63,77	81,24	80,68	79,63

Sumber: Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Jumlah panjang jalan yang dilalui roda empat selama lima tahun cenderung fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan dari tahun 2008 sebesar 64,31% menjadi 79,63% pada tahun 2012.

Sedangkan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, yang bisa dilewati kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam ditampilkan dalam Tabel 2.54 berikut ini :

Tabel 2.54
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)
Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	86.825	133.875	119.996	164.742	216.692
2.	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	484.225	484.255	621.180	621.180	621.180
3.	Persentase	17,93	27,65	19,32	26,52	34,88

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan dari tahun 2008 sebesar 17,93% menjadi sebesar 34,88% pada tahun 2012.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan prasarana jalan dapat dilihat dari aksesibilitas. Indikator aksesibilitas yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Kondisi sampai dengan Tahun 2012 seluruh titik Pusat Kegiatan (PK) sudah terhubung baik oleh jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, sehingga aksesibilitas pada Tahun 2012 telah mencapai 100%, artinya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2014 sebesar 100%.

Tabel 2.55
Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	5.227,4	5.772,0	6.402,7	8.980	9.896
2.	Luas irigasi kabupaten	15.503	15.503	15.503	15.509	15.068
3.	Persentase	33,72	37,23	41,29	57,90	65,68

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami kenaikan dari 33,72% pada tahun 2008 menjadi 65,58% pada tahun 2012.

Kinerja urusan pekerjaan umum lainnya dapat dilihat melalui cakupan pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar 73,57% untuk air minum dan 80,22% untuk sanitasi. Cakupan

pelayanan air minum perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai target Standar Pelayanan Minimal Air Minum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yaitu sebesar 75% untuk air minum, sedangkan pelayanan sanitasi perlu dipertahankan dalam upaya mencapai target Standar Pelayanan Minimal Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yaitu sebesar 68% untuk sanitasi.

Tabel 2.56
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Air Minum					
	- Perkotaan (%)	38,86	40,86	42,81	44,61	45,75
	- Perdesaan (%)	23,61	25,07	26,38	26,88	27,82
	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	62,47	65,93	69,19	71,49	73,57
2.	Sanitasi (%)	74,44	78,66	76,29	79,23	80,22

Sumber : - PDAM Kabupaten Kudus Tahun 2013
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2013
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2013

4. Urusan Perumahan

Kinerja urusan perumahan dapat dilihat melalui jumlah rumah layak huni, rasio rumah layak huni dan persentase rumah tangga pengguna listrik. Data rumah layak huni digambarkan dengan jumlah rumah tipe A dan B, rumah tidak layak huni digambarkan dengan jumlah rumah tipe C sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.57, sedangkan kebutuhan rumah di Kabupaten Kudus pada Tahun 2012 sebanyak 25.307 rumah (11,11%) dijelaskan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.57
Jumlah Rumah Berdasarkan Tipe Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rumah Tipe A (unit)	53.268	61.344	61.344	62.198	64.132
2.	Rumah Tipe B (unit)	86.183	94.110	94.110	96.252	95.142
3.	Rumah Tipe C (unit)	43.247	26.078	26.078	25.934	24.110
4.	Jumlah (unit)	182.698	181.532	181.532	184.384	183.384
5.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	43.247	26.078	26.078	25.934	24.110
6.	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	139.451	155.454	155.454	158.450	159.274
7.	Rasio Rumah Tidak Layak Huni (%)	23,67	14,37	14,37	14,07	13,15
8.	Rasio Rumah Layak Huni (%)	76,33	85,63	85,63	85,93	86,85

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2013 (diolah)

Tabel 2.58
Persentase Kebutuhan Rumah Tahun 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2012
1.	Jumlah Rumah	227.758
2.	Jumlah KK	253.065
3.	Kebutuhan Rumah (Back Log)	25.307
4.	Persentase Kebutuhan Rumah (%)	11,11

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Persentase rumah tangga pengguna listrik diperlihatkan pada Tabel 2.59. Persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kecenderungan naik, hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 sebanyak 104,37%, tahun 2009 sebanyak 105,52%, tahun 2010 sebanyak 108,21%, tahun 2011 sebanyak 115,64% dan tahun 2012 sebanyak 121,22%.

Tabel 2.59
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	191.703	195.712	202.181	216.032	226.776
2.	Jumlah seluruh rumah tangga	183.672	185.460	186.835	186.818	187.077
3.	Persentase	104,37	105,52	108,21	115,64	121,22

Sumber : PLN Kudus Tahun 2013

5. Urusan Penataan Ruang

Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat dari indikator informasi penataan ruang, pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Tabel 2.60 berikut ini.

Tabel 2.60
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Dokumen	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Dokumen RTR	1	1	1	-	4
2.	Peraturan Daerah tentang RTR	-	-	-	-	1

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel di atas menggambarkan bahwa dokumen rencana tata ruang yang pernah disusun meliputi dokumen Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan, RDTR IKK Jekulo, RDTR IKK Dawe, RDTR IKK Mejobo, RDTR IKK Gebog, RDTR IKK Undaan, dan RTBL Kawasan Perkotaan. Dari seluruh dokumen RTR yang telah disusun tersebut baru 1 (satu) dokumen yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus.

Tabel 2.61
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Pemerintah Daerah
Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Pemerintah Daerah (m ²)	211.699,12	212.066,77	212.066,77	213.366,77	218.366,77
2	Luas Kawasan Perkotaan (m ²)	103.512.900	103.512.900	103.512.900	103.512.900	103.512.900
3	Persentase RTH terhadap Luas Kawasan Perkotaan	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2013

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus cenderung mengalami kenaikan dari 211.699,12 m² pada tahun 2008 menjadi 218.366,77 m² pada tahun 2012. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap luas kawasan perkotaan Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 0,21%.

Pencapaian target SPM Penataan Ruang di Kabupaten Kudus meliputi informasi penataan ruang, pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang serta penyediaan ruang terbuka hijau publik telah tercapai sesuai target SPM pada tahun 2013. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, paling lambat pencapaian target SPM harus dicapai pada tahun 2014.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat tidak lagi berperan sebagai obyek pembangunan namun masyarakat dilibatkan partisipasinya dalam pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang ada berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, diamanatkan bahwa Pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan. RPJMD dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang secara berjenjang untuk menghasilkan RKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS sampai dengan penyusunan APBD. Adapun ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Kudus sebagaimana Tabel 2.62 berikut ini.

Tabel 2.62
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen KUA PPAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013

7. Urusan Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah terminal bis, lama pengujian kelayakan Angkutan Umum (KIR), dan pemasangan rambu-rambu sebagaimana dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.63
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah penumpang bis	1.175.862	1.135.625	1.043.930	884.561	875.117
2.	Jumlah penumpang kereta api	-	-	-	-	-
3.	Jumlah penumpang kapal laut	-	-	-	-	-
4.	Jumlah penumpang pesawat udara	-	-	-	-	-
5.	Total Jumlah Penumpang	1.175.862	1.135.625	1.043.930	884.561	875.117

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.64
Rasio Ijin Trayek Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	-
2.	Izin Trayek perdesaan	587	587	587	587	587
3.	Jumlah Izin Trayek	587	587	587	587	587
4.	Jumlah penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
5.	Rasio Izin Trayek	0,000780	0,000773	0,000768	0,000762	0,000753

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.65
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Angkutan Umum	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%									
1.	Mobil penumpang umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mobil bus	1.178	2.148	182,34	1.222	2.209	180,77	1.153	2.254	195,49	1.339	2.299	171,70	1.421	2.289	161,08
3.	Mobil barang	6.649	12.306	185,08	6.903	13.292	192,55	7.049	14.222	201,76	8.050	15.044	186,88	8.955	14.908	166,48
4.	Kendaraan khusus	21	36	171,43	21	35	166,67	21	40	190,48	24	37	154,17	26	42	161,54
5.	Kereta gandengan	19	51	268,42	27	63	233,33	25	75	300,00	26	76	292,31	26	75	288,46
6.	Kereta tempelan	10	13	130,00	10	18	180,00	11	20	181,82	16	24	150,00	34	33	97,06
	Jumlah	7.877	14.554	184,76	8.281	15.616	188,58	8.719	16.611	190,51	9.455	17.480	184,88	10.462	17.347	163,01

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.66
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Terminal Bis	5	5	5	5	5
	Jumlah	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.67
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jangka waktu proses pengujian angkutan umum (menit)	35	35	35	35	35

Sumber : - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013
- Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.68
Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	-	-	172	550	190
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	-	-	3.376	3.376	3.376
3.	Persentase	-	-	5,09	16,29	5,63

Sumber : - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013
- Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Kudus hanya terdiri dari penumpang bis karena tidak mempunyai stasiun kereta api, dermaga maupun bandara. Jumlah penumpang angkutan umum selama lima tahun menunjukkan kecenderungan menurun, pada tahun 2008 sebanyak 1.175.862 orang menjadi 875.117 orang pada tahun 2012. Rasio ijin trayek juga mengalami kecenderungan turun dari tahun 2008 0,000780 menjadi 0,000753 pada tahun 2012. Jumlah uji KIR angkutan umum menunjukkan kenaikan pada pada tahun 2008 sampai dengan 2010, dan pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan menjadi 163,01%. Jumlah terminal bus selama lima tahun (2008 - 2012) tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5 (lima) buah. Lama pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) selama 35 menit. Pemasangan rambu-rambu pada tahun 2010 sebanyak 5,09%, tahun 2011 mengalami kenaikan

menjadi sebanyak 16,29% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 5,63%.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator persentase penanganan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dalam Tabel 2.69, Tabel 2.70 dan Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.69
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Volume sampah yang ditangani (m ³ /hari)	500,34	502,4	501,2	514,9	501,5
2.	Volume produksi sampah (m ³ /hari)	650,09	662,30	636,30	640,20	609,40
3.	Persentase	76,96	75,86	78,76	80,43	82,29

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.70
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah daya tampung TPS (m ³)	-	-	182.940	206.152	213.000
2.	Jumlah penduduk	752.921	759.249	764,606	769.904	780.051
3.	Persentase	-	-	23,93	26,78	27,30

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.71
Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	-	-	5	2	4
2.	Jumlah kasus lingkungan yang ada	-	-	5	2	4
3.	Persentase	-	-	100	100	100

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2013

Penanganan sampah dalam kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) mengalami kecenderungan naik dari tahun 2008 sebesar 76,96 %, menjadi 82,29 % pada tahun 2012. Sedangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2010 sebesar 23,93% meningkat menjadi sebesar 27,30% pada tahun 2012. Adapun untuk indikator penegakan hukum lingkungan untuk tahun 2008 dan 2009 tidak ada kasus lingkungan yang diselesaikan pemda, sedangkan pada tahun 2010

sebanyak 5 kasus, tahun 2011 sebanyak 2 kasus dan tahun 2012 sebanyak 4 kasus dengan penyelesaian keseluruhannya 100%.

Pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup terdiri atas: a) pelayanan pencegahan pencemaran air; b). pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; c). Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan d). pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus baru dilaksanakan pada tahun 2010. Persentase pencapaian SPM di bidang lingkungan dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Persentase Pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Kudus

NO	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pencegahan Pencemaran Air	0	0	100	100	37
2.	Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	0	0	100	100	41
3.	Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	0	0	0	0	80
4.	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	0	0	100	100	100

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pencapaian indikator pencegahan pencemaran air pada tahun 2012 belum mencapai 100% disebabkan karena pada tahun 2012 terdapat 22 usaha/kegiatan yang diawasi belum mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air karena usaha/kegiatan tersebut baru berdiri dan beroperasi sehingga belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Pencapaian target indikator pencegahan pencemaran air pada tahun 2013 adalah 100% karena keseluruhan usaha/kegiatan yang diawasi telah mentaati

persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

Indikator pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak pada tahun 2012 hanya mencapai target SPM sebesar 41%. Hal ini disebabkan karena terdapat 20 usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang telah diinventarisasi belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara mengingat usaha/kegiatan tersebut juga baru berdiri dan beroperasi pada tahun 2012. Adapun pencapaian target indikator pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak pada tahun 2013 mencapai 100% karena keseluruhan usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pencapaian indikator informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun 2012 adalah sebesar 80%. Hal ini karena baru terdapat 24.964,31 hektar luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dari jumlah 31.205,39 hektar luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Pada tahun 2013 pencapaian indikator tersebut adalah 100% karena keseluruhan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan.

Untuk indikator tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah 100% karena semua pengaduan yang diterima Kantor Lingkungan Hidup telah ditindaklanjuti.

Emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kudus belum pernah dilakukan pendataan. Walaupun belum dilakukan pendataan, Pemerintah kabupaten Kudus telah melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca antara lain penanaman bibit tanaman keras dan pembuatan instalasi pengolah air limbah

biogas. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kudus adalah sebesar 1.015.431 ton CO₂e dan berada pada peringkat 9 se Jawa Tengah. Oleh karena itu upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kudus harus ditingkatkan dengan melakukan identifikasi kontributor emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kudus serta penyusunan langkah yang harus ditempuh dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca.

9. Urusan Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan ditunjukkan salah satunya melalui indikator luas lahan bersertifikat. Luas lahan bersertifikat selama 5 (lima) tahun menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2008 sebanyak 1,090% menjadi 0,935% pada tahun 2012. Sedangkan untuk HGU pada tahun 2008-2011 tidak ada permohonan, baru di tahun 2012 ada permohonan sejumlah 13.555. Untuk data luas lahan bersertifikat mulai tahun 2008-2012 sebagaimana dalam Tabel 2.73 berikut :

Tabel 2.73
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas wilayah daratan	425.160.000	425.160.000	425.160.000	425.160.000	425.160.000
2.	Luas tanah bersertifikat HGB	245.602	169.663	207.960	231.903	752.021
3.	Luas tanah bersertifikat HGU	0	0	0	0	13.555
4.	Luas tanah bersertifikat HM	4.224.966	4.236.169	3.742.807	4.520.781	2.853.177
5.	Luas tanah bersertifikat HPL	101.922	0	0	0	0
6.	Total luas tanah bersertifikat	4.635.461	4.590.399	4.158.302	4.835.220	3.978.336
7.	Persentase HGB dibanding luas daratan	0,057	0,039	0,048	0,054	0,17
8.	Persentase HGU dibanding luas daratan	0	0	0	0	0,003
9.	Persentase HM dibanding luas daratan	0,993	0,996	0,880	1,063	0,671
10.	Persentase HGPL dibanding luas daratan	0,023	0	0	0	0
11.	Persentase total luas lahan bersertifikat	1,090	1,079	0,978	1,137	0,935

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tahun 2013

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pelayanan urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan dalam rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, jumlah penduduk berKK, jumlah pasangan nikah berakte nikah, kepemilikan KTP, jumlah penduduk memiliki akte kelahiran, ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Tabel 2.74
Kinerja Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk	-	-	1,367	1,321	1,317
	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	-	-	600.475	614.652	627.348
	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	-	-	439.019	465.359	476.429
2.	Jumlah penduduk ber KK	-	-	133.301	232.349	246.682
3.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	-	-	1.317	1.435	1.526
4.	Kepemilikan KTP	592.315	593.438	600.905	614.683	627.379
5.	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	378.304	411.392	471.778	501.007	515.769
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2013

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 1,367 menjadi sebesar 1,317 pada tahun 2012, jumlah penduduk ber KK mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebanyak 133.301 menjadi sebanyak 246.682 pada tahun 2012, jumlah pasangan nikah berakte nikah juga mengalami peningkatan dari 1.317 pada tahun 2010 menjadi 1.526 pada tahun 2012, kepemilikan KTP mengalami kenaikan dari 592.315 pada tahun 2008 menjadi 627.379 pada tahun 2012, jumlah penduduk memiliki akte kelahiran mengalami kenaikan dari 378.304 pada tahun 2008 menjadi 515.769 pada tahun 2012, ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP nasional berbasis NIK di Kabupaten Kudus sudah ada mulai tahun 2008.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka menjamin keadilan gender, maka telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melalui Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Juli 2010 Nomor : 411.4/157/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010. Salah satu indikasi keberdayaan perempuan adalah keterlibatan atau partisipasi perempuan untuk berorganisasi serta adanya organisasi-organisasi yang menjadi wadah perjuangan kaum perempuan. Sebagai gambaran, pada tahun 2010 jumlah Organisasi Perempuan Kabupaten Kudus mencapai 40 organisasi dengan jumlah anggota mencapai 47.123 orang. Adapun organisasi massa terbesar perempuan di Kabupaten Kudus sebagaimana tertera pada Tabel 2.75 berikut :

Tabel 2.75
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar
Tahun 2012

No	Nama Organisasi Perempuan	Jumlah Anggota (orang)
1.	Muslimat NU	36.000
2.	DPD II Pengajian Al Hidayah	3.797
3.	Dharma Wanita Persatuan	3.757
4.	Aisyiyah	1.050
5.	Bhayangkari	420
6.	PKK	30.025

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Pemberdayaan perempuan juga dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya adalah partisipasi perempuan dalam bidang politik yang dapat dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus. Berdasar Tabel 2.76 jumlah anggota perempuan dalam komposisi anggota DPRD Kabupaten Kudus hanya 13,33% atau hanya 6 orang dari total 45 orang anggota. Tentu saja ini merupakan rasio yang masih jauh dari rasio ideal keanggotaan perempuan di lembaga legislatif yakni 30%. Untuk meningkatkan rasio ini diperlukan upaya memacu peran aktif perempuan agar mempunyai kesadaran terlibat

dalam bidang politik. Beberapa upaya yang ditempuh antara lain menggiatkan kegiatan sosialisasi kesetaraan gender pada masyarakat khususnya perempuan. Selain itu ke depan hendaknya sosialisasi juga melibatkan stakeholder terkait semisal partai politik, dan ormas/orsos.

Tabel 2.76
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah DPRD Perempuan	6	6	6	6	6
2.	Jumlah Anggota DPRD	45	45	45	45	45
3.	Persentase	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2012

Indikator peningkatan keberdayaan perempuan juga dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam pembangunan khususnya pada bidang eksekutif. Berdasarkan Tabel 2.77 sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 persentase pekerja/Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan terus menurun dari semula 5,7% hingga tahun 2012 hanya 5,04% dari total keseluruhan pekerja perempuan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.77
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2009 -2012 di Kabupaten Kudus

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	5	3	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	18	19	18	19
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	126	127	130	135
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4.738	4.847	4.880	4.783
5	Jumlah pekerja perempuan	82.981	87.322	93.125	94.721
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	5,7	5,5	5,2	5,04

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Indikator keberdayaan perempuan juga dapat dilihat dari akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi. Artinya dengan akses ke sumber ekonomi yang lebih terbuka kepada perempuan secara langsung juga akan berpengaruh pada kemandirian ekonomi perempuan. Berdasar Tabel 2.78 persentase jumlah perempuan yang bekerja di lembaga ekonomi swasta dibanding total jumlah pekerja perempuan sejak tahun 2009 hingga 2012 terus mengalami

peningkatan dari semula 94,29% hingga tahun 2012 yang mencapai 94,95%.

Tabel 2.78
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2009 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	78.243	82.475	88.245	89.938
2	Jumlah pekerja perempuan	82.981	87.322	93.125	94.721
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	94,29	94,44	94,75	94,95

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Tabel 2.78 penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan terlihat bahwa jumlah kasus KDRT dan kekerasan pada anak pernah mengalami kenaikan yakni dari tahun 2009 hingga 2011, meskipun pada tahun 2012 kembali menurun. Kendati demikian persentase penyelesaian laporan KDRT maupun kasus kekerasan pada anak tercapai 100%.

Kecenderungan KDRT dan kekerasan terhadap anak yang meningkat dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya perempuan akan pelanggaran hukum KDRT berkorelasi dengan semakin giatnya dilakukannya berbagai kegiatan sosialisasi bahaya KDRT, sehingga para perempuan yang menjadi korban KDRT cenderung lebih berani bertindak dan melapor pada pihak-pihak terkait. Untuk menekan angka peningkatan tersebut diupayakan terus upaya sosialisasi terkait kesadaran akan pelanggaran hukum KDRT serta kesetaraan gender dan peningkatan kapasitas perempuan. Obyek sosialisasi pun idealnya tidak hanya ditujukan untuk kaum perempuan saja melainkan juga kaum laki-laki.

Tabel 2.79
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan Tahun 2008- 2012 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah KDRT	55	38	69	61
2.	Jumlah penyelesaian KDRT	55	38	69	61
3.	Persentase penyelesaian KDRT	100	100	100	100
4.	Jumlah kekerasan terhadap anak	23	30	33	31
5.	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	23	30	33	31
6.	Persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak	100	100	100	100

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program KB, penyediaan sarana prasarana, manajemen dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan program KB, Pasangan Usia Subur (PUS) sebagian besar telah menjadi akseptor KB. Hal ini ditunjukkan dari rasio akseptor KB dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang cenderung menunjukkan kenaikan dari 79,69% pada tahun 2008 naik menjadi 82,35% di tahun 2012, walaupun di tahun 2009 sempat mengalami penurunan tetapi meningkat lagi di tahun 2010 dan 2011. Hal ini menunjukkan kesadaran PUS untuk menjadi akseptor KB semakin baik. Dari Tabel 2.80 dapat diketahui bahwa rasio akseptor KB tertinggi di Kecamatan Kaliwungu sebesar 85,87% dan terendah di Kecamatan Bae sebesar 77,40%. Sedangkan cakupan peserta KB aktif mengalami kecenderungan yang fluktuatif dengan cakupan terendah pada tahun 2009 sebesar 78,49 dan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 82,35.

Tabel 2.80
Rasio Akseptor KB Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah akseptor KB	106.658	107.803	108.628	112.669	118.707
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	133.828	137.351	136.459	136.981	144.149
3.	Rasio akseptor KB	79.69	78.48	79,60	82,25	82,35

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.81
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2012
Kabupaten Kudus

NO	Kecamatan	Jumlah akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Rasio akseptor KB (%)
1	Kaliwungu	12.424	14.469	85,87
2	Kota	11.051	13.343	82,82
3	Jati	14.311	16.902	84,67
4	Undaan	15.765	19.217	82,04
5	Jekulo	15.977	19.651	81,30
6	Mejobo	11.457	14.241	80,45
7	Bae	8.535	11.027	77,40
8	Gebog	13.180	16.023	82,26
9	Dawe	16.007	19.276	83,04
	Jumlah	118.707	144.149	82,35

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.82
Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah peserta program KB Aktif	106.648	107.803	108.628	108.506	118.707
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	133.828	137.351	136.459	136.981	144.149
	Cakupan peserta KB aktif	79,69	78,49	79,60	79,21	82,35

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.83
Metode Kontrasepsi KB Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Metode KB	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Suntik	12.501	12.847	15.783	15.211	16.561
2.	Pil	5.569	3.802	6.243	6.304	6.584
3.	Kondom	210	810	1.054	1.118	1.280
4.	AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)	429	413	694	618	1.288
5.	Implan/Susuk	414	696	565	599	1.859
6.	MOW (Medis Operasi	296	279	572	366	413
7.	MOP (Medis Operasi	11	9	22	19	5

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Pada Tabel 2.83 terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim.

Adapun perkembangan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera I dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut ini :

Tabel 2.84
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus

NO	U R A I A N	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	28.237	26.192	25.934	25.887	24.866
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	36.701	38.774	39.644	38.990	40.858
3.	Jumlah KK	193.160	200.193	203.334	208.505	209.866
4.	Persentase keluarga pra sejahtera	14,62	13,08	12,75	12,41	11,84
5.	Persentase keluarga sejahtera I	19,00	19,37	19,50	19	19,46

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2008 sebesar 28.237 KK atau 14,62 % menurun menjadi 24.866 KK atau 11,84 % pada tahun 2012. Adapun jumlah Keluarga Sejahtera I cenderung fluktuatif, dimana mengalami kenaikan di tahun 2009 dan 2010, tetapi menurun kembali di tahun 2011 menjadi 38.990 KK. Walaupun jumlah keluarga Sejahtera I masih besar dibandingkan tahun 2008 sebesar 36.701 KK, tetapi apabila dilihat dari persentasenya tetap yaitu 19 %.

13. Urusan Sosial

Kinerja pelayanan sosial dapat dilihat pada indikator jumlah sarana sosial, dan jumlah PMKS. Berdasarkan Tabel 2.85 menunjukkan bahwa sarana sosial pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berjumlah 18 unit dengan jumlah PMKS yang cenderung menurun dari tahun 2010 sebanyak 62.737 orang menjadi sebanyak 57.542 orang pada tahun 2012.

Tabel 2.85
Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

NO	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah sarana sosial	-	-	18	18	18
2.	Jumlah PMKS	-	-	62.737	58.286	57.542
3.	Jumlah PMKS terlayani	-	-	7.439	11.519	9.470
4.	Jumlah PSKS	-	-	406	406	406

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

14. Urusan Ketenagakerjaan

Kinerja pelayanan ketenagakerjaan dapat ditunjukkan melalui indikator angka partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sebagaimana Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86
Kinerja Pelayanan Ketenagakerjaan Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

NO	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	74,09	72,29	67,85	69,83	60,88
	Angkatan kerja 15 tahun ke atas	401.827	439.215	373.712	408.790	435.858
	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	542.342	607.533	550.772	585.384	715.860
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,03	0	0,03	0,03	0
	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	3	0	3	3	0
	Jumlah perusahaan	10.542	10.693	10.914	11.217	11.483
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,09	72,29	67,85	69,83	60,89

Sumber : Kudus Dalam Angka Tahun 2012

Angka partisipasi angkatan kerja kecenderungan mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 74,09 menjadi sebesar 60,88 pada tahun 2012. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun per 1.000 perusahaan cenderung fluktuatif namun hanya berkisar 0,03 sengketa (2008, 2010, 2011) dan bahkan tidak ada sengketa pada tahun 2009 dan tahun 2012. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kecenderungan yang fluktuatif bahkan turun dengan tingkat partisipasi terendah pada tahun 2012 sebesar 60,89.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat dari indikator persentase koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKM, jumlah BPR/LKM. Adapun kinerja tersebut dapat diuraikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.87
 Persentase Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat Tahun 2008 - 2012
 Kabupaten Kudus

No	Keterangan	Jumlah Koperasi				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Koperasi Aktif	302	322	352	378	406
2.	Jumlah Koperasi Sehat	112	110	113	116	121
3.	Jumlah Koperasi	374	394	419	445	471
4.	Persentase koperasi aktif	80,74	81,72	84,00	84,94	86,19
5.	Persentase koperasi sehat	29,95	27,92	26,97	26,07	25,69

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2.87 di atas dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi tahun 2008-2012 yaitu jumlah koperasi aktif bertambah 104 unit. Sedangkan Persentase koperasi aktif meningkat dari 80,74 % menjadi 86,19 %. Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitasi dalam hal permodalan, peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan.

Disamping koperasi sebagai penguat modal bagi usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kudus terdapat BPR sebanyak 11 unit.

Tabel 2.88
 Jumlah BPR Tahun 2008 - 2012
 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah BPR/LKM	11	11	11	11	11

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kudus Tahun 2012

Usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah menunjukkan peningkatan dari tahun

2008 sebesar 99,35% menjadi 99,37% pada tahun 2012 sebagaimana pada Tabel 2.88 berikut ini.

Tabel 2.89
Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2008-2012
Kabupaten Kudus

No	Kategori Usaha	Jumlah UMKM (unit)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Usaha Mikro dan Kecil	10.146	10.232	10.232	10.232	10.315
2.	Usaha Menengah	3.123	3.123	3.123	3.123	3.270
3.	Jumlah seluruh UKM	13.355	13.441	13.441	13.441	13.671
	Persentase	99,35	99,36	99,36	99,36	99,37

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2012

16. Urusan Penanaman Modal

Kinerja pelayanan Penanaman Modal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat ditunjukkan melalui indikator jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), rasio daya serap tenaga kerja dan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah). Jumlah investor PMDN/PMA cenderung mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2012 turun namun dari tahun 2008 telah menunjukkan kenaikan sebanyak 393 investor. Nilai investasi menunjukkan angka yang fluktuatif namun mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp. 8.802.795.800.000,- menjadi Rp.12.163.499.070.000,- pada tahun 2012. Realisasi PMDN menunjukkan penurunan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dan mulai tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.198 milyar dan di tahun 2012 sebesar Rp. 5.582 milyar.

Tabel 2.90
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	PMDN	1.044	1.116	1.368	1.554	1.438
2.	PMA	1	1	0	2	0
	Total	1.045	1.117	1.368	1.556	1.438

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.91
 Nilai Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012 (juta rupiah)

No.	Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
1	PMA	37.601,90	42.650,00	0	22.815,50	0
2	PMDN Fasilitas	0	0	0	0	0
3	PMDN Non Fasilitas	8.765.193,90	5.665.952,10	4.382.351,60	6.580.571,60	12.163.499,07
	Jumlah	8.802.795,80	5.708.602,10	4.382.351,60	6.603.387,10	12.163.499,07

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.92
 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2008 - 2012
 Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	(6.225)	(3.009)	(1.283)	2.198	5.582

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2012

17. Urusan Kebudayaan

Kinerja pelayanan kebudayaan dapat dilihat melalui indikator penyelenggaraan festival seni dan Budaya, sarana penyelenggaraan seni dan Budaya, serta persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan Budaya pada tahun 2008 sebanyak 25 kali, dan mengalami penurunan pada tahun 2009, namun mulai tahun 2010 kembali menunjukkan kenaikan sampai dengan tahun 2012 menjadi sebanyak 31 kali. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya hanya naik sebanyak 1 unit dari tahun 2008 sebanyak 2 unit menjadi 3 unit pada tahun 2012. Sedangkan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan telah mencapai 100% mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 2.93
Kinerja Pelayanan Kebudayaan Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	10	16	28	31
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	3	3
3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100
4	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	156	156	156	156	156
5	Total benda, situs & kawasan yang dimiliki	156	156	156	156	156

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2012

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga memprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga. Kinerja pelayanan kepemudaan dan olah raga dapat dilihat dalam Tabel 2.94 berikut ini.

Tabel 2.94
Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

NO	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah organisasi pemuda	24	27	28	23	23
2.	Jumlah organisasi olahraga	26	25	28	32	32
3.	Jumlah gelanggang olahraga	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2012

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah organisasi pemuda yang fluktuatif dengan jumlah yang semakin naik dari 24 organisasi (2008) menjadi 28 organisasi (2010), namun mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 23 organisasi. Jumlah organisasi olahraga cenderung mengalami kenaikan dari 26 organisasi pada tahun 2008 menjadi 32 organisasi pada tahun 2012. Sedangkan jumlah gelanggang olahraga tidak mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 5 buah.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pelayanan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat melalui indikator jumlah

kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah serta rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, namun pada tahun 2012 kembali naik menjadi 5 kali. Sedangkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 3 kali menjadi 2 kali pada tahun 2009 sampai dengan 2011, namun pada tahun 2012 kembali naik/sama dengan tahun 2008 sebanyak 3 kali. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 0,9562 menjadi 0,7948 pada tahun 2012. Rasio linmas juga mengalami kecenderungan turun dari tahun 2008 sebesar 67,63 menjadi sebesar 65,59 pada tahun 2012, sebagaimana dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.95
Kinerja Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2008–2012
Kabupaten Kudus

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6	4	3	2	5
2.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	3	2	2	2	3

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.96
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

NO	U R A I A N	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	72	72	65	72	62
2.	Jumlah Penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,9562	0,9483	0,8501	0,9351	0,7948

Sumber : Kudus Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 2.97
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Linmas	5.092	5.092	5.849	5.111	5.117
2.	Jumlah Penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	67,63	67,07	76,50	66,38	65,59

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Kudus Tahun 2012

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dilihat dari indikator sebagaimana dalam Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98
Kinerja Pelayanan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Laju Pertumbuhan PDRB :					
	- Atas Dasar Harga Berlaku (%)	13,46	6,25	8,70	7,57	9,25
	- Atas Dasar Harga Konstan (%)	3,92	3,95	4,17	4,21	4,33
2.	Kemiskinan (%)	12,99	11,18	9,02	9,45	8,63
3.	Sistem informasi pelayanan perijinan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA (kasus)	151	146	139	140	143
	Jumlah pelanggaran PERDA (kasus)	151	146	139	140	143
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	2	2	2	2	2
6.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	0,68	0,67	0,76	0,66	0,65
	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	5.092	5.092	5.849	5.111	5.117
	Jumlah penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,000664	0,000658	0,000653	0,000649	0,000640
	Jumlah mobil pemadam kebakaran	5	5	5	5	5
	Jumlah penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
8.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa/kelurahan yang baik (%)	87,88	87,88	87,88	87,88	87,88
	Jumlah kantor pemerintahan desa/kelurahan yang baik	116	116	116	116	116
	Jumlah seluruh pemerintahan desa/kelurahan	132	132	132	132	132
9.	Sistem Informasi Manajemen Aset/Barang Daerah					
	Jumlah sistem informasi manajemen Aset/Barang Daerah	0	0	0	0	1
10.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat					
	Survey IKM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Kudus Dalam Angka, Kantor PPT, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpolinmas, Dinas BMPESDM, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Orpeg Tahun 2012

Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2008 -2012) cenderung fluktuatif pada tahun 2009 turun dari tahun 2008, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 76,50, namun pada tahun 2011 turun menjadi 66,38 dan tahun 2012 menjadi 65,59. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan angka yang fluktuatif dengan angka tertinggi sebesar 13,46% dan terendah pada tahun 2009 sebesar 6,25%, namun untuk tahun 2012 menunjukkan kenaikan dari tahun 2011 dari sebesar 7,57% menjadi sebesar 9,25% pada tahun 2012. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan angka yang semakin meningkat dari sebesar 3,92% pada tahun 2008 menjadi sebesar 4,33% pada tahun 2012. Sistem informasi pelayanan perijinan di Kabupaten Kudus telah ada mulai tahun 2008. Penegakan Perda dalam tahun 2008 – 2012 telah dilaksanakan sebesar 100%. Cakupan patroli petugas Satpol PP dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2008 – 2012. Sedangkan petugas linmas di Kabupaten menunjukkan angka yang fluktuatif dengan angka tertinggi 0,76% pada tahun 2010, namun pada tahun 2011 – 2012 cenderung turun dari 0,66% pada tahun 2011 menjadi 0,65% pada tahun 2012. Cakupan pelayanan bencana kebakaran menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari 0,000664 pada tahun 2008 menjadi 0,000640 pada tahun 2012. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa/kelurahan yang baik dari tahun 2008 – 2012 cenderung statis sebesar 87,88%. Sistem informasi manajemen aset/barang daerah (Simda BMD) mulai ada pada tahun 2012 bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka sejak tahun 2008 telah disusun Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Layanan dasar ketahanan pangan merupakan layanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal untuk mewujudkan ketersediaan pangan

yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketahanan pangan dilaksanakan melalui 4 jenis layanan dasar yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan yang akan dicapai meliputi :

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan :

- 1) Ketersediaan energi dan protein perkapita 90 % pada tahun 2015
- 2) Penguatan cadangan pangan 60 % pada tahun 2015

b. Distribusi dan Akses Pangan

- 1) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90 % pada tahun 2015
- 2) Stabilitas harga dan pasokan pangan 90 % tahun 2015

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

- 1) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 % pada tahun 2015
- 2) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 % pada tahun 2015

d. Penanganan Kerawanan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan 60 % pada tahun 2015.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kudus tergolong baik, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama (ton)
Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Padi	128.550	161.217	173.666	124.758	148.054
2.	Jagung	13.925	12.165	13.358	25.595	21.353
3.	Ketela pohon	31.825	29.999	37.296	31.959	23.655
4.	Ubi jalar	1.368	1.592	858	135	167
5.	Kacang tanah	1.132	2.950	2.560	638	708
6.	Kedelai	216	1.174	151	166	82
7.	Kacang hijau	4.749	6.363	4.190	4.922	4.993

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pada tahun 2012 produksi padi sebanyak 148.054 ton padi atau ekuivalen 94.055 ton beras. Bila konsumsi sebanyak 64.618 ton, maka terdapat surplus beras sebanyak 29.437 ton. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produk dalam negeri, pemasokan pangan serta pengelolaan cadangan pangan. Sebagai acuan konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004, untuk konsumsi energi sebesar 2000 kkal/kapita/hr dan protein 52 gram, sedangkan ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kapita/hr dan ketersediaan protein 57 gram. Pada tahun 2011 rata - rata konsumsi energi masyarakat kabupaten Kudus telah mencapai 2.106,9 kkal/kapita/hari, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kudus telah tercukupi kebutuhan energinya.

Tingkat keragaman konsumsi pangan dapat dilihat dari Pola Pangan Harapan (PPH), dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kudus, dapat diperoleh gambaran kuantitas konsumsi masyarakat berdasarkan konsumsi energi sebagaimana Tabel 2.100 berikut.

Tabel 2.100
Angka Kecukupan Energi, Keragaman Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2011 – 2013
Kabupaten Kudus

No.	Kelompok Pangan	Angka Kecukupan Energi / Standar Nasional (Kkal/kap/hr)	Angka Kecukupan Energi Kab. Kudus (Kkal/Kpt/hr)			Skor PPH maksimum (%)	Skor PPH Kabupaten Kudus (%)		
			2011	2012	2013		2011	2012	2013
1	Padi-padian	1.000,0	978,9	995,9	862,1	25,0	25,0	25,0	21,6
2	Umbi-umbian	120,0	117,5	119,5	37,5	2,5	0,4	1,1	0,9
3	Pangan Hewani	240,0	234,9	239,0	225,3	24,0	24,0	21,3	22,5
4	Minyak & Lemak	200,0	195,8	199,2	184,8	5,0	5,0	2,8	4,6
5	Buah/Biji berminyak	60,0	58,7	59,8	11,3	1,0	0,8	0,4	0,3
6	Kacang-kacangan	100,0	97,9	99,6	245,2	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	100,0	97,9	99,6	34,8	2,5	2,5	1,8	0,9
8	Sayur dan buah	120,0	117,5	119,5	110,7	30,0	16,4	24,1	27,7
9	Lain-lain	60,0	58,7	59,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	2.000,0	1.957,8	1.991,8	1.712,2	100,0	84,0	86,5	88,5

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dari tabel di atas, didapatkan bahwa angka kecukupan energi masyarakat Kabupaten Kudus tahun 2013 adalah sebesar 1.712,2 Kkal/kapita/hari belum dapat mencapai angka kecukupan energi standar nasional yaitu sebesar 2.000 Kkal/kpt/hr, yang merupakan angka standar kebutuhan energi bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan dalam konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kudus. Pola konsumsi masyarakat Kudus belum menerapkan diversifikasi makanan dalam mengkonsumsi bahan pangan. Kontribusi konsumsi terbesar masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras, dibandingkan kelompok pangan yang lain.

Skor PPH Kabupaten Kudus pada tahun 2013 mencapai 88,5 % yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor PPH pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 84,0 % dan 2012 sebesar 86,5 %. Peningkatan skor PPH tahun 2013 didongkrak oleh meningkatnya konsumsi pangan hewani, minyak dan lemak, dan

peningkatan konsumsi sayur dan buah-buahan. Target skor PPH tahun 2015 bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah 90,0 %

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal, di Kabupaten Kudus dimulai sejak tahun 2013 sebagai bentuk keberlanjutan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal dimana kegiatannya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kelompok sasaran kegiatan ini adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu desa.

Di Kabupaten Kudus sudah terbentuk 16 kelompok wanita P2KP. Kelompok P2KP tersebut melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan, pengembangan menu B2SA, demplot pekarangan, kebun bibit dan kebun sekolah.

Di Kabupaten Kudus usaha pengembangan / pengolahan pangan sudah dimulai sejak lama. Usaha pengembangan / pengolahan pangan yang sudah ada diupayakan memanfaatkan sumber pangan yang ada di wilayah setempat dan diupayakan sumber karbohidrat tidak hanya dari beras dan terigu tetapi beralih ke umbi-umbian lewat pengolahan umbi-umbian menjadi tepung yang merupakan produk antara yang akhirnya akan dapat diolah menjadi aneka olahan pangan. Kantor Ketahanan Pangan sudah membina 83 kelompok pengolahan pangan.

Usaha pengolah pangan yang ada di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Usaha jenang dan kue basah sebanyak 43 buah;
- b. Usaha minuman ringan sebanyak 39 buah;
- c. Usaha roti dan sejenisnya sebanyak 138 buah;
- d. Usaha kerupuk dan sejenisnya sebanyak 73 buah;
- e. Usaha pengolahan ikan sebanyak 12 buah;
- f. Usaha pembuatan sirup sebanyak 41 buah;

- g. Usaha tahu/tempe sebanyak 18 buah;
- h. Usaha pengolahan mie sebanyak 6 buah; dan
- i. Usaha / kelompok pengolahan makanan lainnya, seperti usaha kecap, pengolahan kopi, jahe, gula merah dan lain-lain sebanyak 79 buah.

Pelaksanaan ketahanan pangan di pemerintah daerah diharapkan mempunyai cadangan pangan. Cadangan pangan tingkat Kabupaten minimal 100 ton ekuivalen beras dan cadangan masyarakat minimal sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 (tiga) bulan. Cadangan pangan bisa dipenuhi dari cadangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Pemanfaatan dana LDPM pada unit cadangan pangan dan distribusi pangan gapoktan tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dihitung sejak penerimaan bansos sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Pasca Mandiri (tahun 2009), sebagaimana Tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.101
Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Pasca Mandiri (Tahun 2009)
Kabupaten Kudus

No	KEC.	NAMA GAPOKTAN	ALAMAT GAPOKTAN	RENCANA USAHA GAPOKTAN		
				PEMB./REHAB GUDANG	CAD. PANGAN	DIST. PANGAN
1	Undaan	Sido Rejo	Ds. Berugenjang, Kec.Undaan	-	30.000.000	195.000.000
2	Jekulo	Tani Makmur	Ds. Pladen, Kec. Jekulo	45.000.000	60.000.000	120.000.000
	Jumlah			45.000.000	90.000.000	315.000.000

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dana Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 yang telah disalurkan ke Gapoktan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas Gapoktan khususnya :

- 1) Unit Usaha Distribusi/ Pemasaran/ Pengolahan untuk mengembangkan kegiatan usaha jual-beli gabah/beras/jagung dalam

rangka menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat petani produsen;

- 2) Unit Pengelola Cadangan Pangan dalam rangka mengembangkan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya disaat paceklik.

Alokasi gapoktan yang menerima penguatan modal Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 sebanyak 2 Gapoktan yang tersebar pada 2 Kecamatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan pada tahun kedua (2010) masing-masing gapoktan mendapatkan dana Rp. 75.000.000,- yang dialokasikan pada 2 gapoktan, sehingga dengan jumlah bansos sebesar Rp. 450.000.000,-.

Rekapitulasi pemanfaatan dana bansos gapoktan adalah sebagai berikut :

Pembangunan/rehab gudang sebesar Rp. 45.000.000,- Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan untuk mengembangkan kegiatan usaha jual-beli gabah/beras/jagung sebesar Rp. 315.000.000,- dan Unit Pengelola Cadangan Pangan sebesar Rp. 90.000.000,- sehingga total bansos mencapai Rp. 225.000.000,-

- b. Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Pasca Mandiri (Tahun 2010), sebagaimana Tabel 2.102. berikut.

Tabel 2.102
Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Pasca Mandiri (Tahun 2010)
Kabupaten Kudus

No	KEC.	NAMA GAPOKTAN	ALAMAT GAPOKTAN	RENCANA USAHA GAPOKTAN		
				PEMB./REHAB GUDANG	CAD. PANGAN	DIST. PANGAN
1	Jati	Tani Barokah	Ds. Loram Kulon, Kec. Jati	35.000.000	25.000.000	165.000.000
	Jumlah			35.000.000	25.000.000	165.000.000

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dana Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010 (tahap Mandiri) di alokasikan pada 1

Gapoktan yang berada di 1 Kecamatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,-, sedangkan pada tahun kedua (2011) gapoktan tersebut mendapatkan dana Rp. 75.000.000,- sehingga jumlah bansos yang diterima sebesar Rp. 225.000.000,-. Rekapitulasi pemanfaatan dana bansos gapoktan adalah sebagai berikut : Pembangunan / rehap gudang sebesar Rp. 35.000.000,- Unit Usaha Distribusi/ Pemasaran/Pengolahan untuk mengembangkan kegiatan usaha jual-beli gabah/beras/jagung sebesar Rp. 165.000.000,- dan Unit Pengelola Cadangan Pangan sebesar Rp. 25.000.000,-

- c. Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Mandiri (Tahun 2011), sebagaimana Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.103
Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Pasca Mandiri (Tahun 2011)
Kabupaten Kudus

No	Kec.	NAMA GAPOKTAN	ALAMAT GAPOKTAN	RENCANA USAHA GAPOKTAN		
				PEMB/REHAB GUDANG	CAD. PANGAN	DIST. PANGAN
1	Undaan	Kondang Wirotani	Ds. Undaan, Kec. Undaan	30.000.000	30.000.000	165.000.000
	Jumlah			30.000.000	30.000.000	165.000.000

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dana Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2011 (tahap Mandiri) di alokasikan pada 1 Gapoktan di desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.000.000,-, Rekapitulasi pemanfaatan dana bansos gapoktan adalah sebagai berikut : Pembangunan / rehap gudang sebesar Rp. 30.000.000,- Unit Usaha Distribusi/ Pemasaran/Pengolahan untuk mengembangkan kegiatan usaha jual-beli gabah/beras/jagung sebesar Rp. 165.000.000,- dan Unit Pengelola Cadangan Pangan sebesar Rp. 30.000.000,-.

- d. Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Pengembangan (Tahun 2012), sebagaimana Tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104
Pemanfaatan Dana Bansos Gapoktan Tahap Pengembangan (Tahun 2012)
Kabupaten Kudus

NO	KEC	NAMA GAPOKTAN	PEMANFAATAN DANA BANSOS LDPM			
			UNIT DISTRIBUSI DAN PEMASARAN (Rp.)	UNIT CADANGAN PANGAN (Rp.)	PEMB. GUDANG (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Undaan	Glagah Jaya	165.000.000	30.000.000	30.000.000	225.000.000
		Jumlah	165.000.000	30.000.000	30.000.000	225.000.000

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Dana Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2012 (tahap Pengembangan) di alokasikan pada 1 Gapoktan di desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.000.000,-, Rekapitulasi pemanfaatan dana bansos gapoktan adalah sebagai berikut : Pembangunan/rehab gudang sebesar Rp. 30.000.000, Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan untuk mengembangkan kegiatan usaha jual-beli gabah/beras/jagung sebesar Rp. 165.000.000,- dan Unit Pengelola Cadangan Pangan sebesar Rp. 30.000.000,-.

Kabupaten Kudus memiliki 9 lumbung pangan dengan perincian sebagaimana Tabel 2.105 berikut :

Tabel 2.105
Lumbung Pangan di Kabupaten Kudus Tahun 2013

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA LUMBUNG	KETUA	STATUS	
					AKTIF	TDK AKTIF
1	Jati	Jatikulon	Sumber Rejeki	Jumrat	V	-
		Pasuruan lor	Lpm		-	V
		Loram Kulon	Tani Barokah	Ach. Anshari	V	-
2	Undaan	Ngemplak	Lpm Ngemplak		-	V
		Undaan Kidul	Maju Mulyo	Budiono	V	-
		Berugenjang	Sido Rejo	Masmin	V	-
3	Jekulo	Undaan Tengah	Kondang Wiro Tani	Darwoto, Drs.	V	-
		Pladen	Tani Makmur	Kuswadi	V	-
		Sidomulyo	Lpm Sidomulyo		-	-

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Kondisi cadangan pangan di Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2013 menunjukkan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kabupaten Kudus, yaitu sebagai berikut :

- a. Cadangan Pangan Pemerintah 100 ton (Bulog);
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 57,4 ton (beras PDRP dan cadangan pangan Pemerintah Kudus); dan
- c. Cadangan Pangan Masyarakat 28.000 ton (terdiri dari produsen, dan rumah tangga).

Salah satu kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan adalah melakukan stabilisasi harga gabah melalui penetapan HPP (Harga Pokok Pemerintah) sebagai berikut :

- a. Harga Pembelian Gabah Kering Panen (GKP)
 - 1) Pembelian di Petani Rp. 3.300,-/ Kg
 - 2) Pembelian di penggilingan Rp. 3.350,-/Kg
- b. Harga Pembelian Gagah Kering Giling (GKG)
 - 1) Pembelian di penggilingan Rp. 4.150,-/Kg
 - 2) Pembelian di gudang Perum Bulog Rp. 4.200,-/Kg

Realita yang ada di Kabupaten Kudus, harga Gabah Kering Panen Rp. 4.300,-/Kg, sedang harga Gabah Kering Giling (GKG) Rp. 5.500,-/ Kg. Ini menunjukkan bahwa harga gabah ditingkat petani pada tren harga yang baik, karena petani pada tingkat yang diuntungkan (di atas BEP).

- c. Harga Pembelian Beras

Realita di lapangan (di pasar) menunjukkan tren yang positif, dimana harga beras ditingkat Produsen Rp. 8.000,-/Kg dan Rp. 8.500,-/Kg ditingkat konsumen.

HPP (Harga Pokok Pemerintah) ini digunakan untuk mengurangi kemerosotan harga pada saat panen raya. Stabilitas harga dinyatakan stabil apabila gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal. Pasokan pangan dinyatakan stabil apabila penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisaran antara (5 – 40) %.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja makro urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari indikator rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM yang aktif, PKK aktif, dan Posyandu aktif. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun yaitu 102,25 pada tahun 2008 menjadi 108,04 pada tahun 2012. Jumlah LSM yang aktif menunjukkan peningkatan dari 36 LSM pada tahun 2008 menjadi 70 LSM pada tahun 2012. PKK aktif dan Posyandu aktif dalam kurun waktu lima tahun (2008 – 2012) telah mencapai 100 %.

Tabel 2.106
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	102,25	102,26	102,26	103,82	108,04
	Jumlah kelompok binaan PKK	13.498	13.499	13.499	13.705	14.262
2.	Jumlah LSM yang Aktif	36	36	71	74	70
3.	PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah PKK	132	132	132	132	132
4.	Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah Posyandu aktif	673	678	672	777	786
	Total Posyandu	673	678	672	777	786

Sumber : PKK Kabupaten Kudus, BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2012

23. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan dalam publikasi data dan informasi statistik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan wujud peningkatan pelayanan statistik daerah. Data-data statistik telah dipublikasikan melalui web Kabupaten Kudus (www.kuduskab.go.id) dan penyusunan data statistik Kabupaten Kudus yang meliputi Kudus Dalam Angka, PDRB, dan buku saku sekilas Statistik Kabupaten Kudus serta buku Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana Tabel 2.107 berikut.

Tabel 2.107
Penyusunan Data Statistik Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Buku Kabupaten Dalam Angka (Kudus Dalam Angka)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku saku sekilas statistik Kabupaten Kudus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku ASPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013

24. Urusan Kearsipan

Kinerja pelayanan kearsipan diperlihatkan melalui indikator pengelolaan arsip secara baku, dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Pengelolaan arsip secara baku mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 telah dilaksanakan 100%.

Tabel 2.108
Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100
2.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	39	43	43	43	44
3.	Jumlah SKPD	39	43	43	43	44

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam indikator jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, website milik pemerintah daerah dan pameran/expo. Jaringan komunikasi berupa telepon otomatis di Kabupaten Kudus pada tahun 2012 sebanyak 17.649 jaringan. Rasio wartel/warnet menunjukkan kenaikan dari 0,213 pada tahun 2008 menjadi 0,240 pada tahun 2012. Surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal mengalami kenaikan dari 5 jenis pada tahun 2008 menjadi 8 jenis pada tahun 2012. Sedangkan penyiaran radio dan TV baik nasional maupun lokal selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 24 kali. Adapun *website* milik pemerintah daerah telah ada mulai tahun

2008. Sedangkan persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus yang memiliki *website* Tahun 2008 - 2012 dijelaskan pada Tabel 2.113.

Tabel 2.109
Jaringan Komunikasi Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah jaringan telepon genggam	-	-	-	-	-
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	-				17.649
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	-				17.649

Sumber : PT.Telkom Kudus Tahun 2013

Tabel 2.110
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah wartel/warnet	160	160	170	180	187
2	Jumlah penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
3	Rasio wartel/warnet	0,213	0,211	0,222	0,234	0,240

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.111
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	4	4	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	2	4	4	4	4
3	Total jenis surat kabar (1+2)	5	8	8	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.112
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penyiaran radio lokal	6	6	6	6	6
2	Jumlah penyiaran radio nasional	2	2	2	2	2
3	Jumlah penyiaran TV lokal	5	5	5	5	5
4	Jumlah penyiaran TV nasional	11	11	11	11	11
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	24	24	24	24	24

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.113
 Persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah yang Memiliki Website Tahun 2008–2012
 Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD Memiliki Website	Persentase
1.	2008	39	3	7,69
2.	2009	43	6	13,95
3.	2010	43	15	34,88
4.	2011	43	15	34,88
5.	2012	44	16	36,36

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

26. Urusan Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan serta untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, peran perpustakaan umum sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat.

Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan umum diupayakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan berupa pembangunan gedung perpustakaan umum yang lebih representatif dan penambahan bahan pustaka serta dengan pengembangan sistem pelayanan otomasi perpustakaan (*e-library*) yang dirasa mendesak untuk dilaksanakan menggantikan sistem pelayanan manual yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini. Jumlah perpustakaan pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 sampai dengan 2011 sebanyak 122 buah menjadi 163 buah pada tahun 2012, sedangkan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami kenaikan dengan jumlah pengunjung sebanyak 73.800 orang, tetapi turun pada tahun 2012 menjadi sebanyak 50.156 orang. Adapun koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan, namun pada tahun 2012 mulai naik kembali menjadi 0,82. Perlu diketahui bahwa sampai tahun

2012 Kabupaten Kudus belum memiliki tenaga fungsional pustakawan.

Tabel 2.114
Jumlah Perpustakaan Tahun 2009 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)	2	2	2	2
2.	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	120	120	120	161
3.	Total Perpustakaan (1+2)	122	122	122	163

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.115
Jumlah Pustakawan Tahun 2009 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah tenaga fungsional perpustakaan / pustakawan	-	-	-	-

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.116
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)	27.000	34.500	37.800	26.156
2.	Jumlah pengunjung Perpustakaan milik non Pemda	1.250	1.250	36.000	24.000
3.	Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)	28.250	35.750	73.800	50.156

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tabel 2.117
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,93	0,83	0,80	0,80	0,82
2.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	10.704	12.535	12.784	12.954	16.904
3.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	11.546	15.157	15.901	16.127	20.611

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

2.2.3. Fokus Layanan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Layanan pilihan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan. Perkembangan produksi komoditas pertanian sebagaimana Tabel 2.118 berikut :

Tabel 2.118
Perkembangan Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Padi	128.550	161.217	173.666	124.758	148.054
2.	Jagung	13.925	12.165	13.358	25.595	21.353
3.	Ketela pohon	31.825	29.999	37.296	31.959	23.655
4.	Ubi jalar	1.368	1.592	858	135	167
5.	Kacang tanah	1.132	2.950	2.560	638	708
6.	Kedelai	216	1.174	151	166	82
7.	Kacang hijau	4.749	6.363	4.190	4.922	4.993
8.	Kacang panjang	271	224	171	140	43
9.	Cabe	8.174	169	2.191	1.022	468
10.	Mangga	322.488	325.834	322.659	306.538	299.596

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat seperti tebu, kapuk, kelapa, kopi dan kapas. Produktivitas tebu rata-rata 650 kw/ha dengan rendemen 6,4%. Produksi tebu tahun 2012 sebesar 4.663.067 kw mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 4.291.040 kw. Perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas tebu dapat dilihat pada Tabel 2.119 berikut :

Tabel 2.119
Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tebu Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No	U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas tanam (Ha)	5.920,87	6.012,80	6.729,00	6.601,60	7.173,95
2.	Produksi (Kw)	2.195.434	4.470.270	4.494.972	4.291.040	4.663.067
3.	Produktivitas (kw/Ha)	370,796	743,459	668,00	650,00	650,00

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak mengalami peningkatan terutama ternak unggas sebagaimana tercantum pada Tabel 2.120 berikut :

Tabel 2.120
Jumlah Ternak Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012

No	Jenis ternak	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Sapi (ekor)	7.305	7.644	7.052	11.339	11.392
2.	Kerbau (ekor)	1.794	1.887	2.176	2.692	2.406
3.	Kambing (ekor)	40.219	22.806	26.540	22.976	29.032
4.	Ayam buras (ekor)	408.139	223.657	290.442	2.841	344.151

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Urusan pertanian dalam mendukung PDRB terdiri dari sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan. Adapun besarnya kontribusi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.121 berikut :

Tabel 2.121
Kontribusi pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2011
Kabupaten Kudus

LAPANGAN USAHA	Persentase terhadap PDRB				Rata-rata Kontribusi
	2008	2009	2010	2011	
- PERTANIAN	2,458	2,777	2,811	2,743	2,635
- Tanaman Bahan Makanan	1,801	2,034	2,026	1,950	1,911
- Tanaman Perkebunan	0,208	0,208	0,232	0,228	0,216
- Peternakan	0,428	0,507	0,510	0,512	0,474

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melakukan pembinaan melalui tenaga penyuluh yang tergabung dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan. Jumlah penyuluh 69 orang yang terdiri dari PNS dan THLTB. Sarana penyuluhan antara lain Balai Penyuluhan Pertanian yang tersebar di 7 kecamatan.

2. Urusan Kehutanan

Layanan urusan pilihan kehutanan dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Luas hutan di Kabupaten Kudus terdiri dari hutan lindung seluas 1.473 Ha dan hutan produksi seluas 2.129 Ha. Hutan rakyat seluas 2.285Ha tersebar di 3 Kecamatan yaitu Gebog, Dawe dan Jekulo. Jumlah kelompok tani kehutanan ada 86 kelompok.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembangunan kehutanan telah berusaha untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, pemantapan kelembagaan, pengembangan jaringan kerja dan kemitraan penyuluhan kehutanan. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan hutan tanaman, pengembangan hasil hutan non kayu, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, pengkayaan vegetatif, pembangunan konservasi tanah berupa dam pengendali jurang, sumur resapan serta sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kehutanan adalah penanganan lahan kritis. Penanganan lahan kritis telah dilakukan melalui pembuatan kebun bibit rakyat (KBR), rehabilitasi hutan lahan dan konservasi tanah, reboisasi dengan penanaman tanaman kayu – kayuan dan MPTS (*Multiple Trees Spesies*). Pada tahun 2012 dilakukan kegiatan penanaman sebanyak 143.700 batang, hal ini dapat mengurangi lahan kritis seluas 215 Ha, sedangkan pada tahun 2013 dilaksanakan pula penanganan lahan kritis sehingga diharapkan jumlahnya berkurang dari 2.718 Ha menjadi seluas 2.463 Ha. Perkembangan jumlah lahan kritis dapat dilihat pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122
Jumlah lahan kritis Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012

No	Kecamatan	Jumlah lahan kritis (Ha)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Gebog	2.346,81	2.396,81	2.280,71	2.270,71	2.075,71
2.	Dawe	3.477,29	3.457,28	3.157,28	1.867,28	1.707,28
3.	Jekulo	272,25	192,24	172,24	149,24	139,24
4.	Undaan	55,45	54,44	34,04	32,04	24,04
	Jumlah	6.151,8	6.100,77	5.644,27	4.319,27	3.946,27

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Untuk memperbaiki ekosistem sekaligus menunjang budidaya kehutanan dan perkebunan rakyat, mulai tahun 2010 dicanangkan sebagai

tahun penghijauan dan konservasi. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan), Gerakan OMOT (*One Man One Tree*) maupun OBIT (*One Billion Indonesian Trees*).

Lahan hutan saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat desa di sekitar hutan. Saat ini masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan untuk penanaman palawija dan empon-empon di bawah tegakan pohon tanaman hutan, dengan harapan terjalannya kemitraan dalam pengelolaan hutan antara PT Perhutani dan masyarakat. Hutan juga memberikan jasa lingkungan yang dimanfaatkan berbagai kalangan masyarakat.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.123 berikut :

Tabel 2.123
Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2011
Kabupaten Kudus

LAPANGAN USAHA		Persentase terhadap PDRB				Rata-rata Kontribusi
		2008	2009	2010	2011	
-	PERTANIAN	2,458	2,777	2,811	2,743	2,635
	- Kehutanan	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2012

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan sumberdaya mineral dibedakan menjadi dua bidang. Bidang energi diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan energi yang diarahkan untuk pemasangan, pemeliharaan, dan pembayaran Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Tabel 2.124
Perkembangan LPJU di Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah LPJU	17.498	17.498	17.498	17.498	17.818
2.	Biaya Rekening LPJU	12.449.639.675	12.208.381.290	13.784.023.995	16.076.703.581	15.950.454.975
3.	Pendapatan LPJU	18.954.578.005	16.186.035.500	13.036.411.970	21.201.208.264	23.496.101.705

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE) yang menunjukkan ketersediaan listrik pada semua desa di Kabupaten Kudus. Pembangunan jaringan listrik pedesaan telah dimulai pada Tahun 2011, sedangkan upaya pengembangan energi terbarukan telah dirintis mulai Tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125
Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa, Jaringan Listrik Perdesaan, serta Pengembangan Energi Terbarukan Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa (%)	100	100	100	100	100
2.	Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan (desa)	-	-	-	2	-
3.	Pengembangan Demplot Biogas (lokasi)	-	1	1	1	-

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, serta program mitigasi bencana alam tanah longsor melalui pemantauan daerah rawan tanah longsor. Jumlah pertambangan tanpa ijin serta jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau dijelaskan pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126
Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin dan Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Yang Dipantau Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin (lokasi)	7	6	3	2	1
2.	Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Yang Dipantau (Lokasi)	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

4. Urusan Pariwisata

Kinerja pelayanan pariwisata dapat ditunjukkan melalui indikator jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, lama tinggal dan potensi wisata, sebagaimana dalam Tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.127
Kinerja Pelayanan Pariwisata Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah wisatawan mancanegara	-	62	23	37	0
2.	Jumlah wisatawan nusantara	507.762	1.461.074	928.507	947.229	582.563
3.	Lama Tinggal	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
4.	Potensi Wisata	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2012

Jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung fluktuatif dengan angka terendah pada tahun 2008 sebanyak 507.762 kunjungan dan tertinggi pada tahun 2009 sebanyak 1.461.136 kunjungan.

Sedangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kudus adalah Taman Krida Wisata, Museum Kretek dan Rumah Adat, Colo dan Makam Sunan Muria, Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus, Tugu Identitas Kudus dan Halaman GOR Wergu.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Kudus meskipun secara geografis tidak memiliki potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat yang cukup besar. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Kudus masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan baik pada budidaya air tawar, perairan umum maupun di pengolahannya. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka Pembangunan Perikanan Budidaya dan Pengolahan di Kabupaten Kudus selama ini menunjukkan hasil yang positif, baik dilihat dari luas areal maupun produksi budidaya dan pengolahannya serta berkembangnya sarana dan prasarana penunjangnya.

Secara keseluruhan, dalam periode tahun 2008 - 2012, produksi usaha perikanan Kabupaten Kudus mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.128 berikut :

Tabel 2.128
Produksi Perikanan Tahun 2008 – 2012
Kabupaten Kudus

No.	Jenis Usaha	Produksi (ton)					Rerata Kenaikan (%)
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Budidaya air tawar	299,60	390,98	1.225,79	1.413,82	1.364,99	63,98
2.	Perairan Umum	165,50	223,77	253,89	379,24	405,33	26,23
3.	Pengolahan Ikan	545,72	567,55	590,25	613,86	655,00	4,68

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Perikanan budidaya terdiri dari tambak, kolam, karamba jaring apung (KJA) dan minapadi. Melihat data di atas, untuk budidaya air tawar tahun 2012 terjadi penurunan dibanding tahun 2011 sebesar 3,45 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 terjadi banjir dan banyak KJA yang hanyut. Jenis usaha budidaya ikan air tawar yang dilakukan di Kabupaten Kudus dan paling menguntungkan adalah usaha pembenihan ikan lele, sehingga Kabupaten Kudus tercatat sebagai salah satu sentra produksi benih ikan lele. Usaha pembenihan ini selain sangat menguntungkan juga tidak memerlukan lahan yang luas, pemeliharannya sangat pendek antara 2 – 4 minggu, perputaran modalnya cepat, satu induk lele dapat dipijahkan 3 - 4 kali dalam 1 tahun sepanjang pemeliharannya dilakukan secara intensif. Lokasi pembenihan lele di Kabupaten Kudus tersebar di 9 kecamatan, akan tetapi yang paling banyak ada di Kec. Bae, Jekulo, Kota dan Jati. Selain usaha budidaya ikan juga terdapat usaha pengolahan ikan yang terdiri dari pengasapan, presto, pemindangan dan otak-otak bandeng. Usaha pengolahan ikan yang ada pada saat ini masih bersifat tradisional dengan volume produksi maupun nilai produk olahannya masih relatif kecil.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan pemberdayaan petani ikan melalui pendampingan dan penyuluhan dengan harapan akan muncul para kelompok pembudidaya ikan yang bukan hanya kuat dari aspek teknis maupun kelembagaan namun tangguh dalam hal manajemen usaha. Untuk memenuhi kebutuhan

protein masyarakat yang bersumber dari ikan maka Pemerintah Kabupaten Kudus telah memasyarakatkan secara dini program Gemar Makan Ikan dengan sasaran generasi usia sekolah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi produk ikan bagi kesehatan dan dapat mendukung target konsumsi ikan sebesar 12,3 kg/kapita/tahun. Prioritas produk perikanan sebagai alternatif sumber protein bagi masyarakat menggantikan sumber protein hewani yang lain merupakan potensi dan tantangan untuk dikembangkan dan harus menjadi perhatian sejak dini.

Tabel 2.129
Kontribusi Perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008–2011
Kabupaten Kudus

LAPANGAN USAHA	Persentase terhadap PDRB				Rata-rata Kontribusi
	2008	2009	2010	2011	
- PERTANIAN	2,458	2,777	2,811	2,743	2,635
- Perikanan	0,019	0,028	0,043	0,053	0,032

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2012

6. Urusan Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan Perdagangan dapat dilihat dari perkembangan realisasi ekspor non migas, sebagaimana Tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.130
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Kudus
Tahun 2008 – 2012

(US \$)						
No	Komoditi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rokok	15.388.959	14.674.443,00	16.464.775,00	49.262.344,00	61.253.561,00
2	Garmen	-	103.894,56	-	-	-
3	Kertas	25.453.213,81	17.265.020,86	21.680.647,18	15.751.118,32	16.467.982,20
4	Elektronik	9.876.273,36	5.873.169,13	4.979.666,06	3.692.709,59	5.019.917,88
5	Furniture	5.420.970,88	1.232.082,97	4.108.012,32	5.045.452,22	3.871.951,51
6	Rotan Furniture	7.076.083	9.171.557,63	9.375.608,53	11.345.342,00	14.701.378,53
7	Sigaret Roller	3.623.300,68	1.232.082,97	2.960.077,06	3.779.150,52	2.807.029,38
8	Handycraft	4.000	-	-	40.048,70	33.509,20
9	Jenang	-	-	20.910,00	25.362,00	15.000,00
10	Playwood/barecore	-	-	-	37.448,53	592.113,20
11	Furniture stainless	-	-	-	-	452.902,27
	Total	66.842.800,73	49.608.366,84	59.589.696,15	88.941.527,35	105.215.345,17
	Jumlah Negara Tujuan	104	77	77	75	89

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2013

Perkembangan realisasi ekspor pada tahun 2009 turun dari tahun 2008 (US\$ 66,84 juta) menjadi US\$ 49,61 juta, namun mulai tahun 2010 tercatat terus meningkat menjadi US\$ 59,59, pada tahun 2011 menjadi US \$ 88,94 juta dan pada tahun 2012 menjadi US\$ 105,21 juta. Jumlah negara tujuan ekspor non migas mengalami kecenderungan yang fluktuatif dari 104 negara pada tahun 2008 turun menjadi 77 negara pada tahun 2009 – 2010, kemudian turun kembali pada tahun 2011 menjadi 75 negara, namun pada tahun 2012 kembali menunjukkan peningkatan menjadi 89 negara. Sedangkan tiga komoditas ekspor dengan kontribusi yang besar di tahun 2012 berturut-turut adalah rokok sebesar US\$ 61,25 juta (58,21 %), kertas US\$ 16,46 juta (15,65 %) dan rotan furniture US\$ 14,70 juta (13,97 %), dan nilai ekspor yang paling kecil adalah jenang yaitu sebesar US\$ 15.000 (0,014 %).

7. Urusan Industri

Kinerja urusan industri dapat dilihat dari jumlah perusahaan industri dan jumlah tenaga kerja, serta jumlah perusahaan industri dan nilai produksi. Sesuai Tabel 2.131 dan Tabel 2.132 jumlah perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) memperlihatkan jumlah yang semakin meningkat dari 10.542 perusahaan pada tahun 2008 menjadi 11.483 perusahaan pada tahun 2012 dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang meningkat pula dari 213.850 orang pada tahun 2008 menjadi 244.331 orang pada tahun 2012. Begitu pula dengan nilai produksi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu Rp. 78.595.979,81 pada tahun 2008 menjadi Rp. 117.173.754,7 pada tahun 2012.

Tabel 2.131
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012

No	Kecamatan	2008		2009		2010		2011		2012	
		Perusahaan/ Unit	Tenaga Kerja	Perusahaan/ Unit	Tenaga Kerja	Perusahaan/ Unit	Tenaga Kerja	Perusahaan/ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perusahaan/ Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Kaliwungu	1.476	11.826	1.491	11.953	1.528	12.629	1.560	12.860	1.591	13.117
2	Kota	1.677	122.324	1.723	122.627	1.772	122.991	1.847	134.045	1.902	135.385
3	Jati	1.212	22.177	1.240	22.424	1.278	22.798	1.346	26.887	1.400	27.425
4	Undaan	443	1.867	447	1.891	450	1.921	461	1.985	466	2.025
5	Mejobo	1.630	4.109	1.642	4.175	1.656	4.311	1.684	4.493	1.718	4.583
6	Jekulo	929	5.122	938	5.195	954	5.258	975	5.373	995	5.480
7	Bae	1.043	25.732	1.055	25.835	1.078	25.971	1.097	29.557	1.119	30.148
8	Gebog	985	15.073	1.001	15.413	1.023	15.605	1.055	19.534	1.076	19.925
9	Dawe	1.147	5.620	1.156	5.702	1.175	5.959	1.192	6.120	1.216	6.242
	Jumlah	10.542	213.850	10.693	215.215	10.914	217.443	11.217	240.854	11.483	244.331

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.132
Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012

No	Kecamatan	2008		2009		2010		2011		2012	
		Perusahaan (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)								
1	Kaliwungu	1.476	4.331.745,71	1.491	4.548.333,00	1.528	5.003.166,00	1.560	5.094.680,39	1.591	5.756.988,84
2	Kota	1.677	19.583.706,55	1.723	20.562.891,87	1.772	22.619.181,00	1.847	24.652.113,77	1.902	27.856.88,56
3	Jati	1.212	45.583.706,50	1.240	47.862.891,82	1.278	54.649.181,00	1.346	62.092.224,30	1.400	70.164.213,46
4	Undaan	443	430.744,88	447	452.282,12	450	497.510,00	461	514.085,38	466	580.916,48
5	Mejobo	1.630	474.028,58	1.642	497.730,00	1.656	547.503,00	1.684	570.617,25	1.718	644.797,50
6	Jekulo	929	714.484,84	938	750.209,08	954	825.230,00	975	843.278,95	995	952.905,21
7	Bae	1.043	4.646.236,87	1.055	4.878.548,71	1.078	5.366.404,00	1.097	6.107.380,95	1.119	6.901.340,47
8	Gebog	985	1.774.558,98	1.001	1.863.286,92	1.023	2.049.616,00	1.055	2.565.664,30	1.076	2.899.200,66
9	Dawe	1.147	1.056.766,90	1.156	1.109.605,24	1.175	1.220.566,00	1.192	1.253.542,96	1.216	1.416.503,54
	Jumlah	10.542	78.595.979,81	10.693	82.525.778,76	10.914	92.778.357,00	11.217	103.693.588,25	11.483	117.173.754,7

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013

8. Urusan Ketransmigrasian

Transmigrasi di Indonesia diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran diberikan sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk menunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebijakan Transmigrasi diarahkan pada penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja, serta memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk.

Pada tahun 2008 hingga tahun 2012 telah dilaksanakan pemberangkatan transmigran sebanyak 56 KK ke Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sungai Bulan, dan Kabupaten Bengkulu sebagaimana pada Tabel 2.133 berikut.

Tabel 2.133
Kinerja Makro Urusan Ketransmigrasian Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah transmigrasi	20	15	10	10	10

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Tahun 2013

2.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas per sektor menurut lapangan usaha dalam PDRB.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani yang mengacu pada tingkat kemampuan daya beli petani. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP untuk Kabupaten Kudus selain menunjukkan nilai diatas 100 juga mengalami peningkatan dari tahun 2008 - 2011, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani. Perkembangan NTP tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.134 berikut.

Tabel 2.134
Perkembangan NTP Tahun 2008 – 2011 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Indeks yang diterima petani	123,20	124,45	124,55	125,81
2.	Indeks yang dibayar petani	120,50	120,57	120,57	120,99
	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,24	103,21	103,30	103,95

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2012

Kemampuan ekonomi daerah juga tercermin dari kemampuan daerah untuk mengelola potensi yang ada dan memasarkan hasil produksinya tersebut sehingga meningkatkan pendapatan. Selain itu kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari produktivitas masing-masing sektor lapangan usaha dalam PDRB. Tiang penyangga perekonomian Kabupaten Kudus tahun 2012 masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertanian. Industri Pengolahan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 59,39%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,20% dan sektor pertanian sebesar 3,36%. Produktivitas masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB selama kurun waktu lima tahun (2008-2012) sebagaimana Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135
 Produktivitas Per Sektor Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012 (juta rupiah)

NO	Sektor	2008		2009		2010		2011*		2012**	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian	369.112,83	3,16	407.829,14	3,36	426.668,77	3,37	428.868,96	3,25	461.633,05	3,36
2.	Pertambangan & Penggalian	4.666,99	0,04	4.134,66	0,03	4.029,44	0,03	4.293,62	0,03	4.760,44	0,03
3.	Industri Pengolahan	7.145.779,11	61,16	7.421.852,42	61,11	7.651.696,27	60,48	7.938.351,14	60,21	8.168.625,63	59,39
4.	Listrik, Gas & Air bersih	39.434,71	0,34	44.886,11	0,37	49.831,95	0,39	52.596,67	0,40	56.398,39	0,41
5.	Konstruksi	174.741,85	1,50	191.988,88	1,58	206.119,26	1,63	233.765,23	1,77	245.636,34	1,79
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	3.218.014,82	27,54	3.309.244,27	27,25	3.503.267,11	27,29	3.648.886,48	27,68	3.878.330,24	28,20
7.	Pengangkutan & Komunikasi	229.419,85	1,96	239.571,43	1,97	251.675,22	1,99	279.798,75	2,12	298.909,81	2,17
8.	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	252.551,43	2,16	270.065,28	2,22	282.907,51	2,24	302.015,99	2,29	324.438,92	2,36
9.	Jasa-jasa	250.098,15	2,14	255.380,18	2,10	274.863,29	2,17	295.030,09	2,24	315.852,35	2,30
	Total PDRB	11.683.819,73	100,00	12.144.952,38	100,00	12.651.058,82	100,00	13.183.606,91	100,00	13.754.585,17	100,00

Sumber : Kudus Dalam Angka Tahun 2013

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan unsur yang menjadi pendorong dan penarik bagi pengembangan suatu wilayah serta akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah, yang meliputi fasilitas transportasi, fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih.

2.4.2.1. Aksesibilitas daerah

Kabupaten Kudus mempunyai letak yang cukup strategis karena berada di jalur pantai utara (pantura), persimpangan antara Semarang – Kudus – Pati dan Jepara – Kudus – Grobogan. Namun demikian, kondisi tersebut harus didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai antara lain dengan dimilikinya akses jalan baik berupa jalan provinsi maupun jalan kabupaten, terminal cargo serta terminal tipe A, B dan C.

2.4.2.2. Penataan wilayah

Penataan wilayah di Kabupaten Kudus diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus. Penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten Kudus berbasis industri didukung pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :

1. pengembangan ruang bagi peruntukan industri;
2. pengembangan fungsi pusat pelayanan;
3. peningkatan sektor pertanian dan pariwisata;
4. pelestarian sumber daya alam; dan
5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk yang lain, dan asuransi yang merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah), sangat berperan penting dalam pengembangan dan distribusi keuangan suatu daerah. Di Kabupaten Kudus terdapat Bank/BPR/Asuransi yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebanyak 43 unit menjadi 49 unit pada tahun 2012, sebagaimana dalam Tabel 2.136 berikut.

Tabel 2.136
Jumlah Bank, BPR dan Asuransi Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bank	18	18	18	21	24
2	BPR	11	11	11	11	11
3	Asuransi	14	14	14	14	14
	Jumlah Bank/ BPR/ Asuransi	43	43	43	46	49

Sumber : *Bagian Perekonomian Setda Kab. Kudus Tahun 2013*

2.4.2.4. Ketersediaan air bersih

Pengembangan infrastruktur air bersih dilakukan oleh PDAM Kabupaten Kudus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang selalu dituntut meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas air bersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku relatif aman atau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Departemen Kesehatan, khususnya Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/90, dengan jumlah penduduk terlayani PDAM yang semakin meningkat dari tahun 2008 sebanyak 108.972 jiwa menjadi 166.614 jiwa pada tahun 2012, dan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang juga semakin meningkat dari sebanyak 18.162 buah pada tahun 2008 menjadi sebanyak 27.522 buah pada tahun 2012, sebagaimana pada Tabel 2.137 berikut.

Tabel 2.137
Jumlah Penduduk yang Terlayani PDAM Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM (jiwa)	108.972	124.884	137.082	152.094	166.614
2.	Jumlah SR (Sambungan Rumah)	18.162	20.814	22.750	25.102	27.522

Sumber : PDAM Kabupaten Kudus Tahun 2013

2.4.2.5. Fasilitas Listrik

Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Kudus, menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir (2008 - 2012) menunjukkan kebutuhan daya yang semakin meningkat dari tahun 2008 sebesar 215 MW menjadi 320 MW pada tahun 2012, dengan penggunaan listrik yang juga meningkat bahkan lebih dari 100%, sebagaimana pada Tabel 2.138 dan Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.138
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Kudus

NO	Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kebutuhan	GWH					
	- rumah tangga	GWH	0,121	0,123	0,125	0,140	0,150
	- Komersial	GWH	0,032	0,033	0,033	0,033	0,033
	- Public	GWH	0,008	0,008	0,009	0,010	0,011
	- Industri	GWH	0,061	0,062	0,070	0,100	0,130
2.	Susut & Losses (T&D)	%	-	-	-	-	-
3.	Susut Pemakaian Sendiri	%	4	4	4	4	4
4.	Total Susut & Losses	%	5,28	4,76	5,02	4,61	4,08
5.	Faktor Beban	%	0,81	0,80	0,82	0,81	0,80
6.	Produksi	GWH	0,47	0,53	0,57	0,59	0,60
7.	Beban Puncak	MW	91	94,3	10,9	11,6	12,6
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW	189	189	189	189	189
9.	Cummulated Committed Projects	MW	-	-	-	-	-
10.	TOTAL KAPASITAS SISTEM	MW	189	189	189	189	189
11.	DAYA YANG DIBUTUHKAN	MW	215	226	243	287	320

Sumber : PLN Kudus Tahun 2013

Tabel 2.139
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
 Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	RT dengan daya 450 watt	143.990	145.689	147.970	154.592	159.876
2.	RT dengan daya 900 watt	39.141	40.643	44.029	48.016	52.161
3.	RT dengan daya 1.300 watt	5.560	5.964	6.333	8.563	9.250
4.	RT dengan daya 2.200 watt	2.592	2.922	3.218	3.218	4.250
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	420	494	631	631	911
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	191.703	195.712	202.181	215.020	226.448
7.	Jumlah Rumah Tangga	183.672	185.460	186.835	186.818	187.077
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	104,37	105,52	108,21	115,09	121,05

Sumber : PLN Kudus Tahun 2013

2.4.2.6. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Potensi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa. Kabupaten Kudus mempunyai fasilitas perdagangan dan jasa antara lain sarana perdagangan yang berupa pasar tradisional, pasar lokal, pasar regional, pasar swalayan / supermarket / toserba, hipermarket, pasar grosir, Mall/plaza, restoran dan penginapan/hotel sebagaimana Tabel 2.140 berikut.

Tabel 2.140
 Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2010 - 2012
 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2010	2011	2012
1.	Pasar Tradisional	23	17	23
2.	Pasar Lokal	6	6	0
3.	Pasar Regional	-	1	1
4.	Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	-	1	1
5.	Hipermarket	-	1	1
5.	Pasar Grosir	2	0	2
6.	Mall/Plaza	2	2	3
	Jumlah	33	28	31

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.141
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Usaha restoran golongan tertinggi	-	-	-	-	-
2.	Usaha restoran golongan menengah	1	1	1	1	1
3.	Usaha restoran golongan terendah	-	-	-	-	-
4.	Usaha rumah makan kelas A	3	3	3	3	3
5.	Usaha rumah makan kelas B	5	5	5	5	5
6.	Usaha rumah makan kelas C	-	-	-	-	-
7.	Usaha rumah makan kelas D	-	-	-	-	-
8.	Jenis Usaha Restoran	1	1	1	1	1
9.	Jenis Usaha Rumah Makan	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.142
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Kudus

No	Jenis Penginapan/Hotel	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-
2.	Hotel Bintang 4	-	-	-	-	-
3.	Hotel Bintang 3	-	-	-	-	-
4.	Hotel Bintang 2	6	6	6	6	6
5.	Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	18	18	18	14	18
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	24	24	24	20	24

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2013

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinan dan pengenaan pajak daerah.

2.4.3.1. Keamanan dan ketertiban

Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 angka kriminalitas cenderung fluktuatif dari 0,06 pada tahun 2008 turun menjadi 0,04 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sampai 2011 turun menjadi 0,01, kemudian naik menjadi 0,03 pada tahun 2012. Selain angka

kriminalitas, terjadinya demonstrasi juga mempengaruhi keamanan dan ketertiban suatu daerah. Demonstrasi merupakan hak warga negara untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan gagasan atau ide dalam bentuk penggerakan massa. Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Kudus tidak jauh berbeda dengan di daerah lain yaitu dalam bentuk aksi-aksi penolakan terhadap kebijakan pusat/regional/lokal oleh kelompok masyarakat/ormas/LSM atau aliansi dan sejenisnya. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Kudus mengalami penurunan yang tajam dari 42 kasus pada tahun 2008 menjadi 6 kasus pada tahun 2012, sebagaimana dalam Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.143
Angka Kriminalitas Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	435	297	114	115	204
2.	Jumlah Penduduk	752.921	759.249	764,606	769.904	780.051
3.	Angka Kriminalitas	0,06	0,04	0,01	0,01	0,03

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 2013

Tabel 2.144
Jumlah Demonstrasi Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	18	5	9	4	3
2	Ekonomi	21	6	13	19	3
3	Kasus pemogokan kerja	3	0	3	3	0
4	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	42	11	25	26	6

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 2013

2.4.3.2. Kemudahan Perijinan

Salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan perizinan meliputi :

1. Izin Lokasi
2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

3. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
4. Izin Tanda Daftar Industri (TDI)
5. Izin Usaha Industri (IUI)
6. Izin Perluasan Industri (IPI)
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Izin Gangguan (HO)

Adapun lama proses dan biaya perizinan sebagaimana Tabel 2.145 berikut.

Tabel 2.145
Lama Proses Perizinan
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Izin Lokasi	10 hari	Rp. 0,00	
2.	SIUP	3 hari	Rp. 0,00	
3.	TDP	3 hari	Rp. 0,00	
4.	TDI	5 hari	Rp. 0,00	
5.	IUI	5 hari	Rp. 0,00	
6.	IPI	5 hari	Rp. 0,00	
7.	IMB	15 hari	$R_{IMB} = HDB \times NK \times LB$	R IMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan HDB = Harga Dasar Bangunan NKB = Nilai Koefisien Bangunan LB = Luas Bangunan
8.	HO - Izin Baru	15 hari	$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$	RIG = Retribusi Izin Gangguan TL = Tarip Lokasi IL = Indeks Lingkungan IG = Indeks Gangguan LRTU = Luas Ruang Tempat
	- HO Daftar Ulang	14 hari	$RIG = 50\% \times \text{Tarif Izin Baru}$	

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2013

2.4.3.3. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Selain pelayanan perijinan, di Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung iklim investasi sebagaimana Tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No.	Tahun	Jumlah Perda/ Perbup	Keterangan
1.	2008	7 Perda	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 6 Tahun 1999 tentang HO - Perda No. 3 Tahun 2000 tentang IMB - Perda No. 7 Tahun 2002 tentang SIUP - Perda No. 8 Tahun 2002 tentang TDP - Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi - Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Perubahan Tanah - Perda No. 6 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2006 tentang TDI, IUI dan IPI
2.	2009	7 Perda	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 6 Tahun 1999 tentang HO - Perda No. 3 Tahun 2000 tentang IMB - Perda No. 7 Tahun 2002 tentang SIUP - Perda No. 8 Tahun 2002 tentang TDP - Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi - Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Perubahan Tanah - Perda No. 6 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2006 tentang TDI, IUI dan IPI
3.	2010	5 Perda	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 6 Tahun 1999 tentang HO - Perda No. 3 Tahun 2000 tentang IMB - Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi - Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Perubahan Tanah - Perda No. 6 tahun 2010 tentang Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.	2011	5 Perda	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 6 Tahun 1999 tentang HO - Perda No. 3 Tahun 2000 tentang IMB - Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi - Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Perubahan Tanah - Perda No. 6 tahun 2010 tentang Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	2012	5 Perda 1 Perbup	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 6 Tahun 1999 tentang HO - Perda No. 3 Tahun 2000 tentang IMB - Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi - Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Perubahan Tanah - Perda No. 6 tahun 2010 tentang Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Perbup No. 35 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor PPT Kabupaten Kudus

Sumber : Kantor PPT Kabupaten Kudus Tahun 2013

2.4.3.4. Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah di Kabupaten Kudus terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) yang mempunyai kecenderungan meningkat, sebagaimana dalam Tabel 2.147 berikut.

Tabel 2.147
Nilai Pajak Daerah Tahun 2010 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2010 (Rp. Juta)	2011 (Rp. Juta)	2012 (Rp. Juta)
1.	Pajak Hotel	404,99	465,43	660,25
2.	Pajak Restoran	794,38	812,28	1.187,48
3.	Pajak Hiburan	70,58	88,89	107,91
4.	Pajak Reklame	1.109,26	1.797,46	1.763,34
5.	Pajak Penerangan Jalan	19.155,94	21.344,64	23.496,10
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	79,87	111,55	203,38
7.	Pajak Parkiran	66,66	89,37	150,43
8.	Pajak Air Tanah	0	710,27	957,37
9.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	11.267,85	10.045,77
	Jumlah	21.681,68	36.687,74	38.572,03

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

2.4.3.5. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa yang memiliki ketahanan di segala bidang. Berdasarkan kriteria status desa dalam lima tahun terakhir (2008 - 2012), desa-desa di Kabupaten Kudus yang berstatus desa swadaya sebanyak 85 desa dan desa swakarsa sebanyak 47 desa, sebagaimana dalam Tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148
Status Desa Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Desa Swadaya	85	85	85	85	85
2.	Jumlah Desa Swakarya	47	47	47	47	47
3.	Jumlah	132	132	132	132	132

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan aset manakala kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3 yang dalam kurun waktu lima tahun (2008 – 2012) yang mengalami kenaikan signifikan dari 16,51 pada tahun 2008 menjadi 290,25 pada tahun 2012. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah rasio perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio ini menyatakan seberapa berat beban tanggungan yang harus dipikul oleh jumlah penduduk usia produktif. Rumus *Dependency Ratio* adalah jumlah penduduk usia (0 - 14 tahun) dan usia (65 tahun ke atas) dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Sejalan dengan komposisi penduduk, angka *Dependency Ratio* Kabupaten Kudus dari tahun 2008 hingga 2011 cenderung stabil. Jumlah pertambahan penduduk usia muda cenderung konstan dari sensus ke sensus. Pertambahan penduduk yang cenderung konstan ini menyebabkan angka *Dependency Ratio* Kabupaten Kudus stabil dalam kurun waktu tersebut. *Dependency Ratio* penduduk Kabupaten Kudus pada periode tahun 2008 – 2011 mencapai 0,48. Pada tahun 2012, data menggunakan hasil sensus 2010 dan masih bersifat sementara menunjukkan adanya penurunan Angka *Dependency Ratio*, berarti jumlah beban tanggungan yang harus dipikul per penduduk usia produktif semakin sedikit, sebagaimana dalam Tabel 2.150 berikut.

Tabel 2.149
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah lulusan S1	1.204	6.410	13.551	17.572	21.748
2.	Jumlah lulusan S2	38	173	490	665	839
3.	Jumlah lulusan S3	1	10	32	49	54
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.243	6.593	14.073	18.286	22.641
5.	Jumlah penduduk	752.921	759.249	764.606	769.904	780.051
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	16,51	86,84	184,06	237,51	290,25

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel. 2.150
Rasio Ketergantungan Tahun 2008-2012
Kabupaten Kudus

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011*	2012**
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	210.536	212.314	213.832	215.329	185.358
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	210.536	34.902	35.135	35.381	37.181
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	245.151	247.216	248.967	250.710	222.539
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	507.770	512.033	515.646	519.256	557.512
5.	Rasio Ketergantungan	48,27	48,28	48,29	48,28	39,91

Sumber : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013 (data diolah)
Keterangan : ** Angka sangat sementara

2.4.5. Potensi Unggulan

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, dikembangkan konsep klaster sebagai suatu pendekatan kebijakan baru dalam pengembangan wilayah, terutama dikaitkan dengan kesiapan suatu wilayah meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi regionalisasi dan globalisasi. Klaster secara signifikan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat. Klaster mampu bertindak sebagai pendorong inovasi, dimana keberadaan unsur-unsur dalam klaster diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi kekayaan. Sejalan dengan itu, Kabupaten Kudus pun telah mengembangkan beberapa klaster, diantaranya :

1. Klaster Gebyok dan Rumah Adat Kudus di Desa Besito Kecamatan Gebog;
2. Klaster Bordir dan Konveksi di Jalan Kyai Telingsing;
3. Klaster Genteng dan Batu Bata Merah di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu;
4. Klaster Pariwisata di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati;
5. Klaster Jenang dan Makanan di Desa Kaliputu Kecamatan Kota; dan
6. Klaster *Handycraft* di Desa Peganjaran Kecamatan Bae

Dengan sistem klaster ini, diharapkan potensi lokal dan kekhasan daerah Kudus bisa dikembangkan dan mendongkrak daya saing daerah sehingga pada

muaranya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu strategi melakukan reformasi pelayanan publik, memperbaiki kualitas produk dan jasa pelayanan publik termasuk jaminan keamanan, serta kerjasama dengan daerah lain diharapkan juga akan meningkatkan daya saing daerah.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kudus tahun 2008-2012 sebagaimana Tabel 2.151 berikut.

Tabel. 2.151
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2012

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi							
1.1.1	Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi keuangandaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	1 Pertumbuhan PDRB (%)	3,92	3,95	4,17	4,21	4,33	3,01	>
1.1.1.1	2 Laju inflasi (%)	11,99	3,07	7,65	3,34	4,77		
1.1.1.1	3 PDRB per kapita	15.575.996,46	16.055.492,31	16.599.936,28	17.187.949,61	17.798.721,72		
1.1.1.1	4 Indeks Gini	0,222	0,249	0,243	0,348	0,338	0,31	<
1.1.1.1	5 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan regional)	0,781	0,784	0,823	0,906		0,7	<
1.1.1.1	6 Persentase Penduduk Miskin	12,99	11,18	9,02	9,45	8,63	33	>
1.2	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	1 Angka melek huruf	98,74	99,85	99,87	100,00	100,00		
1.2.1.1	2 Angka rata-rata lama sekolah	11,94	12,18	12,18	12,16	12,23		
	- SD/MI	5,94	6,20	6,19	6,16	6,21		
	- SMP/MTs	3,00	3,00	3,00	3,00	3,01		
	- SMA/SMK/MA	3,00	2,98	2,99	3,00	3,01		
1.2.1.1	3 Angka Partisipasi Kasar							
	- SD/MI	102,16	102,07	101,88	101,32	106,31	100	>
	- SMP/MTs	96,57	97,36	97,12	96,00	104,42	100	>
	- SMA/SMK/MA	64,88	66,94	72,72	75,25	86,79	91,11	<
1.2.1.1	4 Angka Partisipasi Murni							
	- SD/MI	83,37	83,44	92,29	97,61	97,92	95	>
	- SMP/MTs	66,74	66,83	83,18	90,17	95,32	95	>
	- SMA/SMK/MA	41,62	42,37	50,53	64,58	80,38	80	>
1.2.1.1	5 Nilai IPM	72,02	72,57	72,95	73,24	73,69		
1.2.2	Kesehatan							
1.2.2.1	1 Angka Kelangsungan Hidup	94,98	94,09	93,61	94,40	93,89		
1.2.2.1	2 Angka Usia Harapan Hidup	69,69	69,71	69,62	69,68	69,68		
1.2.2.1	3 Persentase Balita Gizi Buruk	1,83	2,23	1,92	1,30	1,59		
1.2.3	Pertanahan							
1.2.3.1	1 Luas lahan yang bersertifikat HM, HGB, HGU dan HPL	4.635.461	4.590.399	4.158.302	4.835.220	3.978.336		
1.2.4	Ketenagakerjaan							
1.2.4.1	1 Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja	93,85	92,64	93,78	93,79	93,95	95,75	<
1.3	Seni Budaya dan Olah raga							
1.3.1	Kebudayaan							
1.3.1.1	1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	2	3	3	4	5		
1.3.1.1	2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	2	2	2	2	2		
1.3.2	Pemuda dan Olah raga							
1.3.2.1	1 Jumlah organisasi olahraga	26	25	28	32	32		
1.3.2.1	2 Jumlah gelanggang olahraga per 10.000 penduduk.	5	5	5	5	5		
2	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1.	Pendidikan Dasar							
2.1.1.1.1	1 Angka partisipasi sekolah (%)							
	- SD/MI	97,82	95,79	97,52	99,93	99,64	85,78	>
	- SMP/MTs	87,94	92,08	101,33	99,81	100,29	97,6	>
2.1.1.1.1	2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
	- SD/MI	71,63	71,46	69,81	69,79	76,45		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- SMP/MTs	23,2	25,06	25,3	25,12	27,71		
2.1.1.1. 3	Rasio guru/murid							
	- SD/MI	0,07074	0,07937	0,08112	0,08149	0,090912	0,08123	>
	- SMP/MTs	0,07766	0,06657	0,07422	0,07359	0,07943	0,08022	<
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2 1	Angka partisipasi sekolah (%)	44,7	46,31	52,55	64,86	81,43	67,06	>
2.1.1.2 2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	12,22	14,85	14,73	14,62	18,29		
2.1.1.2 3	Rasio guru terhadap murid	0,06983	0,07779	0,07867	0,07782	0,08672	0,0803	>
2.1.1.3	Fasilitas Pendidikan							
2.1.1.3 1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	54,57	61,45	69,27	68,1	66,35		
2.1.1.3 2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	92,15	87,83	90,47	90,65	91,06		
2.1.1.3 3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	97,45	95,47	96,09	95,94	95,62		
2.1.1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
2.1.1.4. 1	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	24,43	25,84	37,99	41,08	49,75		
2.1.1.5	Angka Putus Sekolah							
2.1.1.5 1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,00	<
2.1.1.5 2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,21	0,2	0,2	0,12	0,11	0,58	>
2.1.1.5 3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,63	0,32	0,3	0,13	0,12	0,03	<
2.1.1.6	Angka Kelulusan							
2.1.1.6. 1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,45	98,04	98,68	100	100		
2.1.1.6. 2	Angka Kelulusan (AL)	90,39	98,77	98,76	99,76	99,77		
2.1.1.6. 3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	93,97	99,97	99,82	99,98	99		
2.1.1.6. 4	Angka melanjutkan sekolah (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,12	103,87	105,28	107,19	102,6		
2.1.1.6. 5	Angka Melanjutkan Sekolah (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	79,19	81,91	87,47	92,69	93,56		
2.1.1.6. 6	Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D- IV							
	- SD/MI	25,37	30,23	39,84	51,01	59,5		
	- SMP/MTs	78,51	82,49	76,63	90,49	92,95		
	- SMA	76,04	84,44	93,34	94,06	93,81		
	- SMK	76,64	82,3	90,42	93,66	94,24		
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2 1	Angka Kematian Ibu	78,17	90,86	98,95	103,7	95,4	65	<
2.1.2 2	Rasio posyandu per satuan balita	1,02	1,06	1,03	1,17	1,16		
2.1.2 3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
	- Puskesmas (per 1000 penduduk)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,024		
	- Pustu (per 1000 penduduk)	0,057	0,057	0,057	0,057	0,055		
	- PKD (per 1000 penduduk)	0,109	0,108	0,109	0,121	0,119		
2.1.2 4	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (per 1000 penduduk)	0,00531	0,00658	0,00785	0,01039	0,01154		
2.1.2 5	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 100 penduduk)	0,0366	0,0372	0,037	0,0374	0,0424	0,046	<
2.1.2 6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100 penduduk)	0,17	0,17	0,17	0,25	0,28		
2.1.2 7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	36,49	108,13	108,7	82,1	94,73		
2.1.2 8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,19	94,22	94,07	94,46	94,76	90,78	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	
		2008	2009	2010	2011	2012			
2.1.2	9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2	10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100		
2.1.2	11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	56,66	60	55	68,98	63,37		
2.1.2	12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100		
2.1.2	13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	2,1	5,58	3,7	3,43		
2.1.2	14	Cakupan kunjungan bayi	99,77	99,69	95,75	95,22	95,84		
2.1.2	15	Cakupan puskesmas	540.866	693.309	842.229	842.375	854.711		
2.1.3		Pekerjaan Umum							
2.1.3	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	122.635	122.635	154.729	212.937	247.271		
2.1.3	2	Rasio Jaringan Irigasi	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0011	<
2.1.3	3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,100	3,126	2,640	3,210	3,278		
2.1.3	4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	94,43	93,64	92,98	92,34	89,78		
2.1.3	5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-	-	0,239	0,268	0,277		
2.1.3	6	Panjang jalan dilalui Roda 4 (%)	64,31	63,77	81,24	80,68	79,63		
2.1.3	7	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) (%)	17,93	27,65	19,32	26,52	34,88		
2.1.3	8	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	33,72	37,23	41,29	57,90	65,68		
2.1.3	9	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	62,47	65,93	69,19	71,49	73,57		
2.1.3	10	Sanitasi (%)	74,44	78,66	76,29	79,23	80,22		
2.1.4		Perumahan							
2.1.4	1	Rumah tangga pengguna listrik (%)	104,37	105,52	108,21	115,64	121,22		
2.1.4	2	Rasio Rumah Layak Huni (%)	76,33	85,63	85,63	85,93	86,85		
2.1.5		Penataan Ruang							
2.1.5	1	Persentase RTH terhadap Luas Kawasan Perkotaan	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21		
2.1.6		Perencanaan Pembangunan							
2.1.6	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.6	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.6	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.6	4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.6	5	Dokumen KUA-PPAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.6	6	Tersedianya buku profil daerah	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.7		Perhubungan							
2.1.7	1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.175.862	1.135.625	1.043.930	884.561	875.117		
2.1.7	2	Rasio ijin trayek	0,000780	0,000773	0,000768	0,000762	0,000753		
2.1.7	3	Jumlah uji kir angkutan umum	184,76	188,58	190,51	184,88	163,01		
2.1.7	4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	5	5	5	5		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	
		2008	2009	2010	2011	2012			
2.1.7	5	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	35	35	35	35	35		
2.1.7	6	Pemasangan Rambu-rambu (%)	-	-	5,09	16,29	5,63		
2.1.8		Lingkungan Hidup							
2.1.8	1	Persentase penanganan sampah	76,96	75,86	78,76	80,43	82,29	26,78	<
2.1.8	2	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	-	-	23,93	26,78	27,30		
2.1.8	3	Penegakan hukum lingkungan (%)	-	-	100,00	100,00	100,00		
2.1.9		Pertanahan							
2.1.9	1	Persentase luas lahan bersertifikat	1,090	1,079	0,978	1,137	0,935		
2.1.10.		Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.1.10.	1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	-	-	1,367	1,321	1,317		
2.1.10.	2	Kepemilikan KTP	592.315	593.438	600.905	614.683	627.379		
2.1.10.	3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.10.	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		
2.1.11.		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.11.	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		5,70	5,50	5,20	5,04		
2.1.11.	2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		94,29	94,44	94,75	94,95		
2.1.11.	3	Persentase penyelesaian KDRT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.11.	4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.12.		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
2.1.12.	1	Rasio akseptor KB	79,69	78,49	79,60	79,21	82,35		
2.1.12.	2	Cakupan peserta KB aktif	79,69	78,49	79,60	79,21	82,35		
2.1.12.	3	Persentase keluarga pra sejahtera	14,62	13,08	12,75	12,41	11,84		
2.1.12.	4	Persentase keluarga sejahtera I	19,00	19,37	19,50	19,00	19,46		
2.1.13.		Sosial							
2.1.13.	1	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	-	-	7.439	11.519	9.470		
2.1.14.		Ketenagakerjaan							
2.1.4.	1	Angka partisipasi angkatan kerja	74,09	72,29	67,85	69,83	60,89		
2.1.4.	2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,03	-	0,03	0,03	-		
2.1.4.	3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	74,09	72,29	67,85	69,83	60,89		
2.1.4.	4	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	6,15	7,36	6,22	6,21	6,05	4,25	<
2.1.15.		Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.15.	1	Persentase koperasi aktif	80,74	81,72	84,00	84,94	86,19		
2.1.15.	2	Jumlah BPR/LKM	11	11	11	11	11		
2.1.15.	3	Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,35	99,36	99,36	99,36	99,37		
2.1.16.		Penanaman Modal							
2.1.16.	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1.045	1.117	1.368	1.556	1.438		
2.1.16.	2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	8.802.795,80	5.708.602,10	4.382.351,60	6.603.387,10	12.163.499,07		
2.1.16.	3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(6.225)	(3.009)	(1.283)	2.198	5.582		
2.1.17.		Kebudayaan							
2.1.17.	1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	10	16	28	31		
2.1.17.	2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	3	3		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
2.1.17. 3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100		
2.1.18.	Kepemudaan dan Olah Raga							
2.1.18. 1	Jumlah organisasi pemuda	24	27	28	23	23		
2.1.18. 2	Jumlah organisasi olahraga	26	25	28	32	32		
2.1.18. 3	Jumlah gelanggang olahraga	5	5	5	5	5		
2.1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.19. 1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6	4	3	2	5		
2.1.19. 2	Kegiatan pembinaan politik daerah	3	2	2	2	3		
2.1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.1.20. 1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,9562	0,9483	0,8501	0,9351	0,7948	1,2	<
2.1.20. 2	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	67,63	67,07	76,50	66,38	65,59	76	<
2.1.20. 3	Pertumbuhan ekonomi	3,92	3,95	4,17	4,21	4,33		
2.1.20. 4	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,99	11,18	9,02	9,45	8,63		
2.1.20. 5	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.20. 6	Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100		
2.1.20. 7	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	2	2	2	2	2		
2.1.20. 8	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	0,68	0,67	0,76	0,66	0,65		
2.1.20. 9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,000664	0,000658	0,000653	0,000649	0,000640		
2.1.20. 10	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	87,88	87,88	87,88	87,88	87,88		
2.1.20. 11	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada		
2.1.20. 12	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.21.	Ketahanan Pangan							
2.1.21. 1	Regulasi ketahanan pangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.1.22. 1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	102,25	102,26	102,26	103,82	108,04		
2.1.22. 2	Jumlah LSM yang Aktif	36	36	71	74	70		
2.1.22. 3	Jumlah PKK	132	132	132	132	132		
2.1.22. 4	Jumlah Posyandu aktif	673	678	672	777	786		
2.1.23.	Statistik							
2.1.23. 1	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.23. 2	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.24.	Kearsipan							
2.1.24. 1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100		
2.1.25	Komunikasi dan Informatika							
2.1.25. 1	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,213	0,211	0,222	0,234	0,24		
2.1.25. 2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	8	8	8	8		
2.1.25. 3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	24	24	24	24	24		
2.1.25. 4	Web site milik pemerintah daerah (SKPD)	3	6	15	15	16		
2.1.26.	Perpustakaan							
2.1.26. 1	Jumlah perpustakaan		122	122	122	163		
2.1.26. 2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	23.750	28.250	35.750	73.800	50.156		
2.1.26. 3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.546	15.157	15.901	16.127	20.611		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1. 1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,46	2,78	2,81	2,74	2,92		
2.2.1. 2	Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB	1,80	2,03	2,03	1,95	2,12		
2.2.1. 3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan) terhadap PDRB	0,21	0,21	0,23	0,23	0,22		
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2 1	Jumlah lahan kritis	6.151,80	6.100,77	5.644,27	4.319,27	3.946,27		
2.2.2 2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,001	0,001	0,001	0,001			
2.2.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.2.3. 1	Pertambangan tanpa ijin (lokasi)	7	6	3	2	1		
2.2.3. 2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03		
2.2.4.	Pariwisata							
2.2.4. 1	Kunjungan wisata		1.461.136	928.530	947.266	582.563		
2.2.4. 2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
2.2.5.	Kelautan dan Perikanan							
2.2.5. 1	Produksi Perikanan	1.010,82	1.182,30	2.069,93	2.406,92	2.425,32		
2.2.6.	Perdagangan							
2.2.6. 1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,93	24,73	24,51	24,56	25,02		
2.2.7.	Perindustrian							
2.2.7. 1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	61,16	61,11	60,48	60,21	59,39		
3	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Pertanian							
3.1.1 1	Nilai tukar petani	102,24	103,21	103,30	103,95	104,71		
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1.	Komunikasi dan Informatika							
3.2.1. 1	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	104,37	105,52	108,21	115,64	121,22		
3.3.	Iklm Berinvestasi							
3.3.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1. 1	Angka kriminalitas	0,06	0,04	0,01	0,01	0,03		
3.3.1. 2	Jumlah demo	42	11	25	26	6		
3.3.1. 3	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	7	7	5	5	5		
3.4.	Sumber daya Manusia							
3.4.1.	Sumber Daya Manusia							
3.4.1. 1	Rasio lulusan S1/S2/S3	16,51	86,84	184,06	237,51	290,25		
3.4.1. 2	Rasio ketergantungan	48,27	48,28	48,29	48,28	39,91		

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2014 (diolah)

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana dengan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. APBD tersebut disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan rencana anggaran belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan pula pendekatan berbasis kinerja (*activity base*) yaitu didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai. Adapun berdasarkan pendekatan kinerja, penyusunan rancangan APBD harus berpedoman pada RKPD yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

1. Aspirasi Masyarakat;
2. Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya;
3. Perkembangan Arah dan Kebijakan Ekonomi Nasional, Regional dan Lokal; dan
4. Potensi Daerah.

APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJM, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Kudus mengandung makna bahwa :

1. Arah belanja APBD Kabupaten Kudus digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah lima tahunan;

2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan yang berkesinambungan/berkelanjutan (*sustainable*) dan jumlah yang memadai;
3. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta akurasi belanja (Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung). Sementara Neraca Daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Salah satu indikator kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal, yang diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah APBD. Indikator ini digunakan untuk menghitung persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah termasuk penerimaan pembiayaan. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kudus periode tahun 2008-2012, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah (Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan)	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah
2008	71.520.067.977	825.514.764.642	8,66%
2009	83.045.780.416	1.003.648.583.536	8,27%
2010	94.032.742.826	964.776.706.907	9,75%
2011	108.458.832.665	1.065.407.733.014	10,18%
2012	121.017.026.873	1.259.400.185.848	9,61%
Jumlah	478.074.450.757	5.118.747.973.946	
rata-rata	95.614.890.151	1.023.749.594.789	9,34%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)

Dari tabel di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kudus periode tahun 2008-2012 adalah sebesar 9,34%. Ini menunjukkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam pendanaan masih terbilang kecil. Meski demikian Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi harapan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal ini.

Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang lain yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah antara lain Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Indeks ini merefleksikan kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara mikro maupun makro, dengan indikator-indikator yang terukur, berimbang, dan komprehensif. Indikator-indikator yang digunakan dalam Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut antara lain :

1. Ketergantungan Fiskal (KF)

Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana Alokasi Umum (yang sudah dikurangi Belanja Pegawai) dalam Total Pendapatan anggaran daerah.

Tabel 3.2.
Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Tahun	DAU - Total Belanja Pegawai	Total Pendapatan	Ketergantungan Fiskal
2008	91.084.958.674	774.638.582.966	88,24%
2009	63.007.802.380	906.929.401.737	93,05%
2010	(29.657.609.937)	837.477.196.522	103,54%
2011	(45.370.169.079)	1.005.232.562.979	104,51%
2012	36.743.341.260	1.147.302.763.565	96,80%
Jumlah	115.808.323.298	4.671.580.507.769	
Rata-rata	23.161.664.660	934.316.101.554	97,52%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)

Dari Tabel 3.2 tersebut di atas, ditinjau dari indikator ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2008-2012 menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal sangat tinggi. Bahkan ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus pada tahun 2010 dan 2011 melebihi 100%, ini terjadi dikarenakan belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi DAU.

2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)

Proporsi PAD tidak dinyatakan dalam total nilai APBD, namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB Kabupaten yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (*income generation*) masing-masing daerah.

Tabel 3.3.
Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB jutaan rupiah	Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)
2008	71.520.067.977	27.245.392,30	0,26%
2009	83.045.780.416	28.946.886,48	0,29%
2010	94.032.742.826	31.463.364,03	0,30%
2011	108.458.832.665	33.648.973,32	0,32%
2012	121.017.026.873	36.959.414,04	0,33%
Jumlah	478.074.450.757	158.264.030	
Rata-rata	95.614.890.151	31.652.806	0,30%

Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)
- PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa kapasitas penciptaan pendapatan Kabupaten Kudus selama kurun waktu 2008-2012 masih rendah, namun demikian telah menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahun.

3. Proporsi Belanja Modal (PBM)

Indikator ini menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah pada manfaat jangka panjang, sehingga memberikan efek *multiplier* yang lebih besar terhadap perekonomian. Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Belanja Modal dengan Total Belanja pada anggaran daerah.

Tabel 3.4.
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Proporsi Belanja Modal
2008	165.755.904.798	726.323.425.107	22,82%
2009	252.376.497.399	869.172.775.415	29,04%
2010	165.092.730.270	905.610.149.269	18,23%
2011	125.456.620.067	950.508.370.939	13,20%
2012	178.143.373.570	1.152.274.704.801	15,46%
Jumlah	886.825.126.104	4.603.889.425.531	
Rata-rata	177.365.025.221	920.777.885.106	19,26%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2010 (diolah)

Selama kurun waktu 2008-2012, proporsi belanja modal menunjukkan kecenderungan menurun kemudian meningkat kembali sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4. Tingkat proporsi belanja modal paling rendah terjadi pada tahun 2011, dimana proporsi belanja modal hanya sebesar 13,20%.

4. Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)

Indikator ini menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Nilainya dinyatakan sebagai persentase Total Belanja Pemerintah dalam PDRB kabupaten yang bersangkutan.

Tabel 3.5.
Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2012

Tahun	Total Belanja	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Jutaan rupiah	Kontribusi Sektor Pemerintah
2008	726.323.425.107	27.245.392,30	2,67%
2009	869.172.775.415	28.946.886,48	3,00%
2010	905.610.149.269	31.463.364,03	2,88%
2011	950.508.370.939	33.648.973,32	2,82%
2012	1.152.274.704.801	36.959.414,04	3,12%
Jumlah	4.603.889.425.531	158.264.030	
Rata-rata	920.777.885.106	31.652.806	2,91%

Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus 2008-2012 (diolah)
- PDRB Kabupaten Kudus 2008-2012 (diolah)

Dari Tabel 3.5, menunjukkan bahwa kontribusi sektor pemerintah selama kurun waktu 2008-2012 cenderung stabil, namun pada tahun 2012 kontribusi sektor pemerintah meningkat cukup tajam yang menaikkan rata-rata kontribusi sektor pemerintah selama kurun tersebut sebesar 3,11% di atas kontribusi periode 2008-2012.

Dari keempat indikator di atas dapat dihitung Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah (IKKP) dengan rumus:

$$IKKPD_{i,t} = \frac{((100 - KFi,t) + KPPI,t + PBMi,t + KSPi,t)}{4}$$

Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6.
Indeks Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Tahun	Ketergantungan Fiskal	Kapasitas Penciptaan Pendapatan	Proporsi Belanja Modal	Kontribusi Sektor Pemerintah	Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2008	88,24%	0,26%	22,82%	2,67%	37,51%
2009	93,05%	0,29%	29,04%	3,00%	39,28%
2010	103,54%	0,30%	18,23%	2,88%	17,87%
2011	104,51%	0,32%	13,20%	2,81%	11,82%
2012	96,80%	0,33%	15,46%	3,11 %	22,10%
Rata-Rata	97,52%	0,30%	19,26%	2,91%	25,72%

Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)
- PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)

Tabel 3.6 tersebut memberikan informasi mengenai Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ditinjau dari indikator ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2008-2012 menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal semakin tinggi. Bahkan ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus pada tahun 2010 dan tahun 2011 melebihi 100%, ini terjadi dikarenakan belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi DAU.

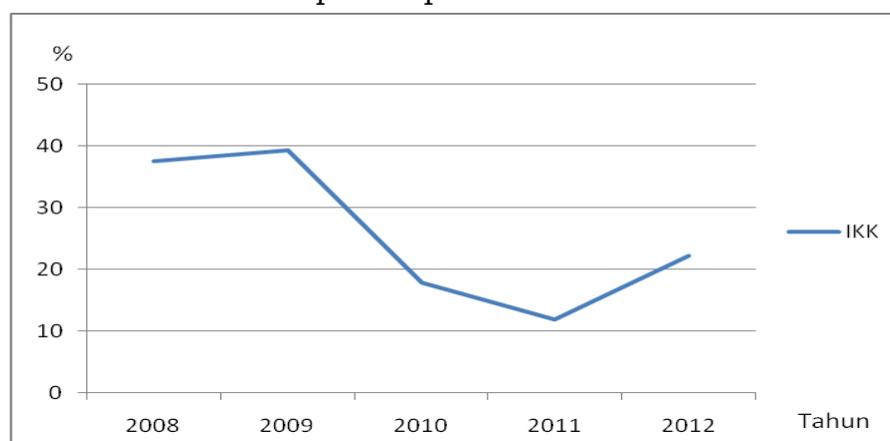
Kapasitas penciptaan pendapatan diukur dengan persentase dari perbandingan PAD dengan PDRB harga berlaku. Rata-rata KPP selama kurun waktu 2008-2012 masih rendah, yaitu hanya sebesar 0,30%.

Proporsi belanja modal menggambarkan besarnya persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama kurun waktu 2008-2012, proporsi belanja modal menunjukkan trend yang menurun. Proporsi terendah terjadi pada tahun 2011, dimana proporsi belanja modal hanya sebesar 13,20% yang dikarenakan adanya perubahan ketentuan dari Pemerintah Pusat dimana alokasi DAK Pendidikan diubah dari belanja langsung/modal ke belanja tidak langsung/hibah.

Kontribusi sektor pemerintah diukur dengan persentase dari total belanja pemerintah dengan PDRB harga berlaku. Rata-rata kontribusi sektor pemerintah selama kurun waktu 2008-2012 relatif stabil dengan angka rata-rata sebesar 2,91%.

Indeks Kinerja Keuangan sempat terjadi penurunan yang dikarenakan terjadinya penurunan proporsi belanja modal yang signifikan. Untuk meningkatkan indeks kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan peningkatan kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah sehingga tingkat ketergantungan fiskal daerah akan menurun.

Grafik yang menunjukkan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditampilkan pada Gambar 3.1 berikut.



Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)
- PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)

Gambar 3.1. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012

Di samping indikator-indikator yang dibahas di atas, dalam rangka untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus perlu diperhatikan pula aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta akurasi belanja. Sementara Neraca Daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Selanjutnya kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah serta Neraca Daerah.

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah. PAD yang besar dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber utama pendapatan daerah selain Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pemerintah senantiasa mendorong upaya-upaya peningkatan PAD agar Pemerintah Daerah mampu mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya PAD dari tahun ke tahun diharapkan Pemerintah Daerah secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat.

Analisis kemampuan Pemerintah Daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2008-2012) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. dengan rata-rata peningkatan pendapatan daerah per tahun sebesar 10,90% secara rinci seperti terlihat pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	774.638.582.966	906.929.401.737	837.477.196.522	1.005.232.562.979	1.147.302.763.565	10,90
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	71.520.067.977	83.045.780.416	94.032.742.826	108.458.832.665	121.017.026.873	14,07
1.1.1.	Pajak Daerah	15.745.844.037	19.592.883.982	21.681.679.660	36.687.744.537	38.572.029.915	27,36
1.1.2.	Retribusi Daerah	44.428.917.000	46.876.816.635	55.623.646.110	54.598.618.519	13.865.924.782	(13,07)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	1.894.556.909	2.447.274.077	3.879.533.064	4.619.012.799	4.633.796.307	26,77
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	9.450.710.031	14.128.805.722	12.847.883.992	12.553.456.810	63.945.275.869	111,88
1.2	Dana Perimbangan	590.952.702.372	599.799.512.219	623.439.210.189	669.997.974.734	825.555.159.520	9,03
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83.119.022.372	68.079.020.219	129.924.430.189	142.856.882.734	129.593.027.520	18,35
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	460.540.680.000	471.869.492.000	463.012.580.000	488.819.992.000	637.615.372.000	9,15
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	47.293.000.000	59.851.000.000	30.502.200.000	38.321.100.000	58.346.760.000	13,85

NO	URAIAN	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	112.165.812.617	224.084.109.102	120.005.243.507	226.775.755.580	200.730.577.172	32,70
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	8.500.000.000	14.868.876.000	-	2.000.000.000	-	(56,27)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.721.713.844	40.630.724.414	38.663.812.507	53.084.159.080	66.106.734.172	15,48
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.954.256.777	120.661.104.847	44.505.022.000	106.558.786.500	88.545.748.000	63,51
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.989.841.996	33.200.303.841	36.836.409.000	65.132.810.000	46.078.095.000	24,23
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	14.723.100.000	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.7, menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan total pendapatan Kabupaten Kudus adalah sebesar 10,90%, sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 14,07% per tahun. Perkembangan realisasi PAD menunjukkan peningkatan kinerja keuangan daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat struktur anggaran, dimana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan PAD serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka PAD menjadi tolok ukur kemandirian suatu daerah. Walaupun pertumbuhan rata-rata PAD tersebut sudah menunjukkan kondisi yang relatif baik, namun pemerintah daerah masih perlu melakukan langkah-langkah strategis terkait pentingnya optimalisasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan memperkuat basis pajak dan retribusi yang ada. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih kecil. Kontribusi pertumbuhan rata-rata per obyek pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 71,09% dari total pendapatan, sedangkan PAD sebesar 10,19% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 18,71%. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi dimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kudus dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Perkembangan realisasi penerimaan daerah dari Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan rata-rata 9,03% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada pos DAU yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,15% per tahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2008-2012 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pendapatan lainnya pada tahun 2009 sebesar Rp.14.723.100.000,- berasal dari dana tambahan penghasilan guru PNS. Sedangkan mulai tahun 2010 tambahan penghasilan guru PNS dimasukkan dalam dana penyesuaian dan otonomi khusus.

3.1.2. Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan mencerminkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya akan diuraikan tentang Proporsi Realisasi Belanja terhadap total realisasi belanja daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010-2012, Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kudus selama 3 tahun terakhir, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kudus.

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel. 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2010 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	Rata-rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	63,37	62,98	59,35	61,90
1	Belanja Pegawai	52,17	53,44	50,35	51,99
2	Belanja Bunga	0,01	0,01	0,09	0,04
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	4,78	3,98	3,37	4,04
5	Belanja Bantuan Sosial	3,73	2,88	2,31	2,97
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	0,28	0,29	0,38	0,31
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2,31	2,24	2,68	2,41
8	Belanja Tidak Terduga	0,10	0,15	0,16	0,14
B	Belanja Langsung	36,63	37,02	40,65	38,10
1	Belanja Pegawai	2,23	2,76	1,79	2,26
2	Belanja Barang dan Jasa	16,16	21,06	23,39	20,21
3	Belanja Modal	18,23	13,20	15,46	15,63

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2008-2012 (diolah)

Dari Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (tahun 2010-2012) proporsi rata-rata realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total realisasi belanja daerah sebesar 61,90%, jumlah realisasi belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 51,99%, sedangkan proporsi rata-rata belanja langsung digunakan untuk Belanja Pegawai 2,26%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 20,21% dan Belanja Modal sebesar 15,63%.

Gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kudus selama tiga tahun terakhir (2010-2012) dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini :

Tabel. 3.9
 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Tahun 2010 - 2012
 Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	418.525.446.557	450.518.726.190	493.723.443.121
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	390.185.974.603	435.857.783.984	472.889.292.866
2	Belanja Tambahan Penghasilan	24.461.073.000	10.954.353.250	15.902.847.000
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.668.000.000	2.668.000.000	3.856.489.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.210.398.954	1.038.588.956	1.074.814.255
B	Belanja Langsung	215.187.651.566	168.764.496.802	205.073.995.295
1	Belanja Honorarium PNS	6.958.227.750	7.925.951.400	5.895.745.900
2	Belanja Uang Lembur	10.320.380.580	3.054.094.374	2.475.804.300
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	53.800.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.419.664.858	847.829.275	513.528.567
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	8.823.255.460	13.442.243.556	1.162.577.250
7	Belanja Pakaian dinas dan atributnya	556.911.500	448.850.000	384.392.000
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Kabupaten Kudus	263.320.500	2.559.321.250	217.422.500
9	Belanja Perjalanan dinas	12.612.236.648	13.437.836.880	13.944.901.208
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	1.140.924.000	1.591.750.000	2.282.450.000
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	165.092.730.270	125.456.620.067	178.143.373.570
	TOTAL	633.713.098.123	619.283.222.992	698.797.438.416

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan aparatur tahun 2010 - 2012 melalui belanja tidak langsung cenderung meningkat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan melalui belanja langsung relatif fluktuatif sesuai kebutuhan pekerjaan.

Gambaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Kudus Tahun 2010-2012 sebagaimana Tabel 3.10 berikut :

Tabel.3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kudus

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	TA 2010	633.713.098.123	909.323.307.005	69,69
2	TA 2011	619.283.222.992	953.501.544.675	64,95
3	TA 2012	698.797.438.416	1.161.407.362.538	60,17

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Dari Tabel 3.10 di atas pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tiga tahun terakhir 2010-2012 secara berturut-turut sebesar 69,69%, 64,95% dan 60,17%. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat.

Gambaran Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kudus Tahun 2010-2012 sebagaimana Tabel 3.11 berikut :

Tabel. 3.11
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun 2010 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Tidak Langsung	414.973.433.820	461.806.646.364	511.510.452.396	11.02
1	Gaji Dan Tunjangan	390.185.974.603	435.867.614.984	472.889.292.866	10.10
2	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	454.489.000	6.81
3	Belanja Bunga	84.912.367	70.801.380	1.054.653.530	686.49
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.501.320.000	2.732.069.950	4.321.279.650	33.70
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	20.904.376.850	21.286.776.850	30.919.776.850	23.54
6	Belanja Tidak Terduga	896.850.000	1.449.383.200	1.870.960.500	45.35
B	Belanja Langsung	67.736.848.767	62.318.449.252	93.321.865.530	20.88
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.654.396.000	1.548.951.000	1.572.707.900	2.41
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.550.000	8.650.000	10.625.000	2.41
3	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.315.000	48.460.000	59.040.000	19.56
4	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.557.673.580	3.265.107.255	3.210.028.900	4.95
5	Belanja Pegawai BLUD	-	-	779.902.500	-

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
6	Belanja Alat Tulis Kantor	1.217.839.120	966.881.100	1.046.033.800	6.21
7	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	280.000	30.000	280.000	1.94
8	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	315.657.000	281.636.250	250.951.700	10.84
9	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	141.829.540	124.766.650	132.628.475	2.86
10	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	249.940.375	194.500.559	197.057.750	10.43
11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.445.000	20.094.000	63.123.952	103.92
12	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13.750.000	11.900.000	7.850.000	23.74
13	Belanja Pengisian Tabung Gas	34.850.900	25.892.997	22.691.497	19.03
14	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.439.072.640	19.728.565.249	911.443.268	41.13
15	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	-	-	242.300.000	-
16	Belanja bahan peralatan dan perlengkapan	40.060.000	89.041.350	9.662.000	16.56
17	Belanja Telepon	965.660.736	849.104.071	764.105.968	11.04
18	Belanja Air	404.547.300	399.780.970	377.116.477	3.42
19	Belanja Listrik	16.488.604.029	19.176.499.527	18.528.333.540	6.46
20	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2.300.000	-	-	-
21	Belanja Surat Kabar/Majalah	269.673.500	234.990.900	225.255.000	8.50

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
22	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.792.175	478.879.574	548.624.890	14.18
23	Belanja Paket/Pengiriman	134.712.700	133.523.415	133.554.605	0.43
24	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	464.884.450	580.076.950	741.689.750	26.32
25	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi	97.031.000	30.379.500	73.385.000	36.43
26	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan	594.563.555	398.830.300	533.330.000	0.40
27	Belanja jasa perawatan/pengobatan	-	-	1.291.969.310	-
28	Belanja jasa penghargaan	-	48.800.000	80.600.000	-
29	Belanja Jasa Penataan Peralatan dan Perlengkapan	-	730.000	-	-
30	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	55.828.380	57.796.420	-	48.24
31	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin	8.845.605.078	253.753.955	-	98.57
32	Belanja Jasa Service	581.892.997	554.456.095	639.044.478	5.27
33	Belanja Penggantian Suku Cadang	960.285.063	-	969.388.671	-
34	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.995.874.015	2.912.575.205	3.473.916.428	8.25
35	Belanja Jasa KIR	3.391.280	4.189.000	4.851.500	19.67

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
36	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	77.443.750	78.123.298	222.345.300	92.74
37	Belanja Cetak	1.598.830.825	977.008.600	1.609.635.275	12.93
38	Belanja Penggandaan	546.352.650	397.867.270	511.944.180	0.75
39	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	-	12.420.000	-
40	Belanja Sewa Meja Kursi, Peralatan	84.805.000	71.915.000	2.220.000	56.06
41	Belanja Sewa Generator	85.300.000	78.000.000	500.000	53.96
42	Belanja Sewa Tenda	40.730.000	-	-	-
43	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.065.438.075	1.079.347.400	1.061.906.400	0.16
44	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	684.698.831	557.677.450	432.469.000	20.50
45	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	323.125.388	170.095.900	224.622.150	7.65
46	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.105.565.516	1.241.328.914	125.600.000	38.80
47	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.875.000	183.600.000	191.885.000	0.64
48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.889.038.039	2.590.908.101	2.608.647.698	4.82
49	Belanja pemeliharaan bangunan	984.414.280	1.073.433.000	133.243.196	39.27

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
50	Belanja pemeliharaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	31.926.000	51.438.000	58.731.500	37.65
51	Belanja pemeliharaan meubelair	-	1.525.000	3.025.000	-
52	Belanja pemeliharaan aplikasi	-	116.824.000	108.180.000	-
53	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	-	-	1.740.000	-
54	Belanja Jasa Perawatan Pasien Jamkesda	-	1.220.315.027	2.495.291.543	-
55	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	41.661.725.929	-
56	Belanja Modal Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Bengkel	-	-	-	-
57	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	-	-	1.200.000	-
58	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	12.000.000	-
59	Belanja modal Pengadaan alat pendingin	-	-	167.738.000	-
60	Belanja modal Pengadaan televisi/tape/sound system	-	-	65.550.000	-
61	Belanja Modal Pengadaan Generator	-	-	134.200.000	-
62	Belanja Modal Pengadaan Tangga	-	-	-	-
63	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	-	115.200.000	-

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
64	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	-	-	7.700.000	-
65	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	-	-	2.000.000	-
66	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	85.500.000	-
67	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	-	6.175.000	-
68	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	-	10.750.000	-
69	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	-	-	13.300.000	-
70	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	-	40.000.000	-
71	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	-	-	2.550.000	-
72	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet	-	-	5.105.000	-
73	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	-	142.750.000	-
74	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	-	50.200.000	-
75	Belanja Modal Pengadaan Sofa	-	-	107.400.000	-
76	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang	-	-	26.400.000	-
77	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	-	-	495.000	-

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
78	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	-	4.800.000	-
79	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	-	62.500.000	-
80	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	-	-	495.000	-
81	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/ Garpu/Pisau/Tempat Air	-	-	5.976.300	-
82	Belanja modal peralatan masak	-	-	1.485.000	-
83	Belanja modal pengadaan pompa air	-	-	19.900.000	-
84	Belanja modal Pengadaan korden/tirai/teralis/sprei	-	-	309.789.400	-
85	Belanja modal pengadaan penghias meja	-	-	7.800.000	-
86	Belanja modal Pengadaan karpet/tikar	-	-	7.425.000	-
87	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	-	-	9.750.000	-
88	Belanja Modal Pengadaan Aerphone	-	-	291.044.500	-
89	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	-	-	1.055.225.100	-
90	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	-	-	87.483.000	-
91	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	-	-	2.046.234.500	-

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
92	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	-	-	-	-
93	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	-	-	-	-
94	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	-	-	55.200	-
95	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	-	-	525.000	-
96	Belanja Konsultasi Perencanaan dan Study Kelayakan	-	-	47.540.000	-
					-
C	Pengeluaran Pembiayaan	113.157.736	113.157.736	113.157.736	-
1	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	113.157.736	113.157.736	113.157.736	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Dari Tabel 3.11 di atas dapat diketahui belanja yang wajib yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta prioritas utama Kabupaten Kudus mengalami kondisi fluktuatif.

Dari uraian tersebut di atas dimana belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Adapun Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kudus tahun 2010-2012, Komposisi Defisit Riil Anggaran tahun 2010-2012, Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Daerah Kabupaten Kudus.

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2010-
2012 sebagaimana Tabel 3.12 berikut :

Tabel.3.12
Defisit Riil Anggaran
Tahun 2010 - 2012
Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	837.477.196.522	1.005.232.562.979	1.147.302.763.565
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	905.610.149.269	950.508.370.939	1.152.274.704.801
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.713.157.736	2.993.175.736	9.132.657.736
A	Defisit Riil	(71.846.110.483)	51.731.016.304	(14.104.598.972)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya	123.699.510.385	55.453.399.902	111.906.188.339
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	3.521.770.133	66.233.944
9	Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan	3.600.000.000	1.200.000.000	125.000.000
10	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	127.299.510.385	60.175.170.035	112.097.422.283
A+B	Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	55.453.399.902	111.906.186.339	97.992.823.311

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Pada tahun 2010 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.71.846.110.483,- sehingga untuk menutup defisit ini menggunakan silpa tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2011 realisasi belanja masih di bawah realisasi pendapatan atau surplus sebesar Rp.51.731.016.304,- sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2011. Demikian juga untuk tahun 2012 mengalami defisit anggaran sebesar Rp.14.104.598.972,- sehingga untuk menutup defisit ini menggunakan silpa tahun 2011.

Gambaran Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2010-2012 sebagaimana Tabel 3.13 berikut :

Tabel.3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2010 - 2012
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	172,17	107,20	793,40
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	77,18	216,32	694,75

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Komposisi penutup defisit riil anggaran tahun 2010 ditutup dari silpa tahun anggaran 2009. Untuk tahun 2011 mengalami surplus sehingga tidak diperlukan penutup defisit dan untuk tahun 2012 defisit riil ditutup dari silpa tahun 2011.

Gambaran Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sebagaimana Tabel 3.14 berikut:

Tabel.3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	2010		2011		2012		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	55.453.399.902	100,00	111.906.188.339	100,00	97.992.823.311	100,00	44,68
2	Pelampauan penerimaan PAD	1.790.878.826	3,23	-	-	4.878.304.873	4,98	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	28.236.853.734	25,23	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	12.094.170.172	12,34	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	64.207.552.731	115,79	85.661.916.061	76,55	68.266.080.199	69,66	6,55
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	2.005.626.851	3,62	1.498.114.366	1,34	1.021.865.935	1,04	(28,55)
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka selama tahun 2010-2012 SiLPA cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dari uraian SiLPA yang ada beberapa item yang berkontribusi terhadap bertambahnya SiLPA selama tahun 2010-2012 yaitu :

1. Pelampauan penerimaan PAD pada tahun 2010 berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah yang melampaui target adalah pajak hotel, pajak penerangan jalan dan pengambilan galian golongan C. Pelampauan PAD di tahun 2012 berasal dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelampauan pajak daerah karena adanya wajib pajak baru dan BPHTB yang semula merupakan bagi hasil dari provinsi menjadi pajak daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari laba atas penyertaan modal pada BUMD.
2. Pelampauan penerimaan dana perimbangan pada tahun 2011 berasal dari pelampauan penerimaan dana bagi hasil cukai tembakau dari target yang ditetapkan Rp.45.241.742.000,- realisasinya mencapai Rp.60.824.479.000,- (134,44%).
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2012 berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dari target Rp.51.447.401.000,- terealisasi Rp. 66.106.734.000,-.
4. Sisa penghematan belanja pada tahun 2010-2012 disebabkan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terbatas. Sampai dengan akhir tahun kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan keuangan daerah semakin sehat.

Gambaran Sisa lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebagaimana Tabel 3.15 berikut :

Tabel.3.15
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	48.612.146.272,79	111.906.086.725,79	96.223.012.547,79
	Dikurangi :			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	48.612.146.272,79	111.906.086.725,79	96.223.012.547,79

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka selama tahun 2010-2012 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dapat digunakan seluruhnya untuk pendanaan pembangunan daerah karena sudah tidak terdapat kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan.

Tabel sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018. Saldo kas tahun 2011 meningkat 130%, tahun 2012 menurun 14%, jadi rata-rata meningkat 58%. Adapun sisa lebih (riil) pembiayaan sama dengan saldo neraca kas. Mengingat kondisi tahun 2011 dan 2012 sangat kondisional, maka dalam proyeksi saldo kas diasumsikan sejajar dengan pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10%.

3.1.4. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Kudus pada periode tahun 2010-2012 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan aset tetap Kabupaten Kudus dalam kurun waktu tahun 2010-2012 sebesar 9,095% atau secara nominal rata-rata penambahan aset tetap kurang lebih Rp. 200 Milyar.

Berikut Tabel Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010-2012.

Tabel 3.16
Neraca Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 - 2012

(Dalam Rupiah)

KD. REK	URAIAN	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas di Kas Daerah	48.612.146.272,79	111.906.086.725,79	96.223.012.547,79
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	14.428.750,00	45.379.378,11	121.878.581,56
1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	66.834.289,00	244.763.848,00	72.294.749,00
1.1.1	Kas di BRSD	6.780.263.826,00	0,00	1.705.486.653,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	2.345.375.872,00	3.002.126.394,00	4.551.106.586,00
1.1.4	Piutang Lain-lain	335.407.497,00	2.305.500,00	4.979.621.228,00
1.1.5	Persediaan	7.952.913.061,00	9.172.617.196,41	39.755.419.233,82
1.1.6	Biaya Dibayar Dimuka	352.544.189,00	480.243.151,00	606.915.073,00
	JUMLAH ASET LANCAR	66.459.913.756,79	124.853.522.193,31	148.015.734.652,17
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.1	Investasi Non Permanen	6.915.423.515,00	2.181.790.578,00	1.543.874.415,00
1.2.2	Investasi Permanen	37.036.411.782,16	42.882.788.091,69	49.781.655.102,21
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	43.951.835.297,16	45.064.578.669,69	51.325.529.517,21
1.3	ASET TETAP			
1.3.1	Tanah	407.327.098.000,00	416.408.982.000,00	416.231.341.000,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	305.783.633.901,00	326.267.371.651,96	353.552.594.194,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	593.829.150.172,63	619.524.712.453,22	764.764.479.037,78
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	571.103.496.369,61	621.577.964.244,02	720.596.662.699,76
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	29.241.116.744,00	34.809.259.809,00	41.547.991.359,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	765.048.000,00	1.181.818.600,00	15.935.823.185,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	1.908.049.543.187,24	2.019.770.108.758,20	2.312.628.891.475,54
1.4	DANA CADANGAN			
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
1.5.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	17.425.643.800,00	17.425.643.800,00	17.425.643.800,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	1.864.507.000,00	3.036.861.453,00	3.435.678.453,00
1.5.5	Aset Lain-lain	22.075.527.375,00	43.588.234.677,04	64.040.243.392,78
	JUMLAH ASET LAINNYA	41.373.378.175,00	64.058.439.930,04	84.909.265.645,78
	JUMLAH ASET	2.059.834.670.416,19	2.253.746.649.551,24	2.596.879.421.290,70
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.844.486,00	244.662.235,00	7.970.639,00
2.1.2	Utang Bunga	521.031,99	139.664,62	538.286,69
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	183.959.115,32	170.626.148,04	156.997.713,33
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.154.148.290,00	592.158.539,00	522.829.230,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.344.472.923,31	1.007.586.586,66	688.335.869,02

KD. REK	URAIAN	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0,00
2.2.1	Utang Dalam Negeri	661.153.927,82	490.527.779,78	333.530.066,45
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	661.153.927,82	490.527.779,78	333.530.066,45
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.005.626.851,13	1.498.114.366,44	1.021.865.935,47
3	EKUITAS DANA			
3.1	EKUITAS DANA LANCAR			
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	55.453.399.901,79	111.906.188.338,79	97.992.823.310,79
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang	2.680.783.369,00	3.004.431.894,00	9.530.727.814,00
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan	7.952.913.061,00	9.172.617.195,51	39.755.419.233,82
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.338.628.437,31)	(762.924.351,66)	(680.365.230,02)
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	14.428.750,00	45.379.378,11	121.878.581,56
3.1.6	Cadangan Untuk Biaya Dibayar Dimuka	352.544.189,00	480.243.151,00	606.915.073,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	65.115.440.833,48	123.845.935.605,75	147.327.398.783,15
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI			
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	43.951.835.297,16	45.064.578.669,69	51.325.529.517,21
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.908.049.543.187,24	2.019.770.108.758,20	2.312.628.891.475,54
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	41.373.378.175,00	64.058.439.930,04	84.909.265.645,78
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(661.153.927,82)	(490.527.779,78)	(333.530.066,45)
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.992.713.602.731,58	2.128.402.599.578,15	2,448,530,156,572,08
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN			
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.057.829.043.565,06	2.252.248.535.183,90	2.595.857.555.355,23
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.059.834.670.416,19	2.253.746.649.550,34	2.596.879.421.290,70

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas Analisis Neraca Pemerintah Kabupaten Kudus bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio. Analisis data Neraca Daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Analisis data Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus disajikan dalam Tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Analisis Data Neraca Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010-2012

No	Jenis Rasio	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Rasio Likuiditas			
	a. Rasio lancar	49,45	123,99	215,14
	b. Rasio <i>quick</i>	43,53	114,88	157,35
2.	Rasio Solvabilitas			
	a. Rasio total hutang terhadap total aset	0,097	0,066	0,039
	b. Rasio hutang terhadap modal	0,097	0,067	0,039

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Kudus Tahun 2010-2012 (diolah)

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Rasio Likuiditas pemerintah Kabupaten Kudus dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, rasio lancar pada tahun 2010 mencapai 49,45 yang berarti bahwa aset lancar Pemerintah Kabupaten Kudus adalah 49,45 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Adapun rasio *quick* pada tahun 2010 menunjukkan angka 43,53 artinya aset lancar Pemerintah Kabupaten Kudus adalah 43,53 kali bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo, namun hanya mempertimbangkan aset yang dengan cepat dapat dijadikan uang/cash. Kondisi rasio likuiditas tahun 2012 dibandingkan tahun 2010 menunjukkan peningkatan karena jumlah hutang pemerintah berkurang sedangkan kas pemerintah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melunasi hutang jangka pendek sangat tinggi.
2. Meskipun rasio Solvabilitas mengalami penurunan tetapi kemampuan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memenuhi seluruh kewajibannya semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini karena terjadi penurunan hutang tiap tahunnya sedangkan total aset mengalami peningkatan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan

menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan adalah :

1. Dalam merencanakan target pendapatan asli daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.
2. Dalam upaya peningkatan PAD tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
3. Kebijakan peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
4. Kebijakan pengelolaan belanja menggunakan prinsip efisien dan efektif dengan maksud dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus jelas tolok ukur dan targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
6. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya pembangunan secara efektif dan efisien.
7. Penggunaan anggaran diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan serta pencapaian visi dan misi kabupaten.
8. Penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel artinya setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah

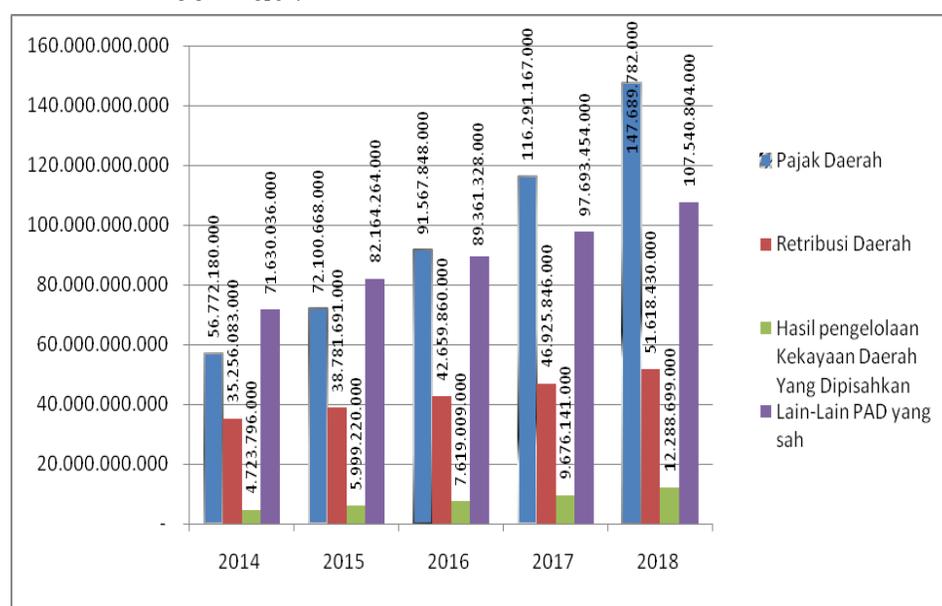
baik terkait dengan pembelanjaan pada kategori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk menguraikan lebih lanjut tentang kerangka pendanaan, maka perlu dilihat tentang proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018. Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 serta Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018.

3.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Kemampuan Pendapatan Daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target.

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 3.2. Grafik Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014–2018

Penerimaan PAD pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 diproyeksikan meningkat sebesar 17,34% per tahun. Proyeksi peningkatan tersebut terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Pajak Daerah selama lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2014-2018 diprediksikan selalu meningkat. Dengan melihat trend realisasi Pajak Daerah selama lima tahun terakhir yaitu Tahun 2008-2012 yang selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,38%, maka untuk lima tahun ke depan Pajak Daerah diprediksikan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27% per tahun. Pendapatan dari Pajak Daerah berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB), sehingga untuk lima tahun kedepan diprediksikan tidak ada jenis pajak baru, Namun demikian, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang ada diharapkan Pajak Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

2. Retribusi Daerah

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Retribusi Daerah selama lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2014-2018 diprediksikan selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10% per tahun. Walaupun dalam lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2008-2012 Retribusi Daerah tidak mencapai target, diharapkan untuk lima tahun kedepan Retribusi Daerah dapat mencapai target dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 10%.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2014-2018 diprediksikan selalu mengalami peningkatan. Dengan melihat trend realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2008-2012 yang selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,77% per tahun, untuk lima tahun ke depan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diprediksikan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27% per tahun. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD Apotik Pemda, PD Bank Pasar, PD Percetakan Pemda, PD BPR BKK Jati, dan Bank Jateng. Untuk lima tahun kedepan diharapkan BUMD dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2014-2018 diprediksikan selalu mengalami peningkatan. Dengan melihat trend realisasi selama lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2008-2012 yang berfluktuasi dan dengan pergeseran Pendapatan BLUD yang semula merupakan Retribusi Daerah ke Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 10,72% per tahun. Pada Tahun 2015 Pendapatan BLUD diprediksikan mengalami kenaikan sebesar 8,22 %, dan untuk Tahun 2016-2018 diprediksikan mengalami kenaikan sebesar 5%. Prediksi pertumbuhan pendapatan BLUD Tahun 2016 lebih rendah dari Tahun 2015 karena pada Tahun 2015-2018

diperkirakan tidak ada pengembangan atau penambahan ruang perawatan lagi. Untuk Tahun 2014 angka prediksi menyesuaikan dengan angka riil APBD.

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Proyeksi penerimaan dana perimbangan pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 meningkat sebesar 8,33% per tahun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,03 %.
2. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18,35%.
3. Realisasi penerimaan DAU selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,15%.

3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada penerimaan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,48%.

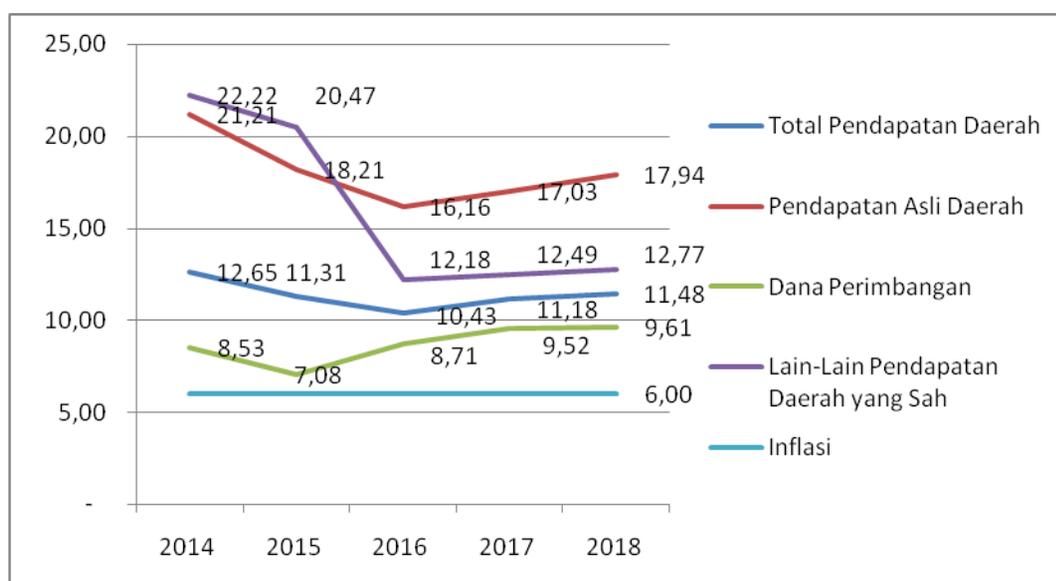
Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun sebagaimana data di atas, maka untuk melakukan proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD Tahun 2013-2018, dapat mengacu pada realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir, dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan tingkat inflasi serta asumsi pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat performa pendapatan daerah Tahun 2008-2012, diperoleh proyeksi pendapatan daerah Tahun 2014-2018 sebagaimana Tabel 3.18 berikut ini.

Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	PENDAPATAN	1.517.236.814.000	1.688.766.325.000	1.864.868.992.000	2.073.411.824.000	2.311.511.532.000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	168.382.095.000	199.045.843.000	231.208.045.000	270.586.608.000	319.137.715.000
1.1.1.	Pajak Daerah	56.772.180.000	72.100.668.000	91.567.848.000	116.291.167.000	147.689.782.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	35.256.083.000	38.781.691.000	42.659.860.000	46.925.846.000	51.618.430.000
1.1.3.	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.723.796.000	5.999.220.000	7.619.009.000	9.676.141.000	12.288.699.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	71.630.036.000	82.164.264.000	89.361.328.000	97.693.454.000	107.540.804.000
1.2.	Dana Perimbangan	1.010.417.213.000	1.082.001.012.000	1.176.267.217.000	1.288.306.088.000	1.412.160.481.000
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	159.376.462.000	171.845.285.000	196.947.077.000	225.814.138.000	259.011.258.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	795.851.851.000	854.966.827.000	924.131.240.000	1.007.303.050.000	1.097.960.323.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	338.437.506.000	407.719.470.000	457.393.730.000	514.519.128.000	580.213.336.000
1.3.1	Hibah	6.426.400.000	7.390.360.000	8.498.914.000	9.773.751.000	11.239.813.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.225.259.000	98.109.047.000	112.825.404.000	129.749.214.000	149.211.596.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.228.110.000	225.662.326.000	259.511.675.000	298.438.426.000	343.204.190.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan dan Inflasi Tahun 2014-2018 diproyeksikan sebagai berikut :



Gambar 3.3. Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan dan Inflasi Tahun 2014 - 2018

Dari proyeksi pertumbuhan pendapatan dan inflasi di atas, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Daerah

Total Pendapatan Daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu Tahun 2014-2018 diprediksikan meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan yang semakin meningkat. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan sistem kapitasi, sehingga Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat cukup signifikan. Pada Tahun 2015 dan seterusnya pertumbuhan pendapatan diprediksikan sebesar 11,10%. Dengan asumsi inflasi 6%, maka Pendapatan Riil Daerah masih meningkat sebesar 5,10%.

2) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah untuk lima tahun ke depan diprediksikan meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2014 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2016, dan untuk selanjutnya pertumbuhannya semakin meningkat. Pada Tahun 2015 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah lebih rendah dibandingkan Tahun 2014, dikarenakan Tahun 2014 terdapat kapitasi, sedangkan pada Tahun 2015 peningkatannya relatif kecil. Disamping itu pendapatan BLUD diproyeksikan meningkat dengan persentase 8,22%. Untuk Tahun 2016 – 2018 pertumbuhannya diproyeksikan 5%, karena pada Tahun

2015-2018 sudah tidak ada pengembangan atau penambahan ruang perawatan lagi. Namun secara keseluruhan, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masih lebih tinggi dari pertumbuhan inflasi sebesar 6 % per tahun.

3) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Tahun 2014-2018 diproyeksikan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 8,73 %. Pada Tahun 2015 tingkat pertumbuhan terjadi penurunan. Hal ini disebabkan Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum tingkat pertumbuhannya menurun sebesar 3 % dari pertumbuhan tahun sebelumnya karena adanya daerah pemekaran baru. Untuk Tahun 2016-2018 Dana Perimbangan kembali diproyeksikan mengalami trend pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,67 %.

4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah untuk lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2014-2018 diprediksikan meningkat dari tahun ke tahun, tapi untuk Tahun 2015 tingkat pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah lebih kecil dibandingkan Tahun 2014. Bantuan Keuangan dari Provinsi yang merupakan unsur dari Lain-lain Pendapatan yang Sah diprediksikan sama untuk setiap tahun, sehingga tidak ada pertumbuhan. Namun secara keseluruhan, pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah masih lebih tinggi dari pertumbuhan inflasi sebesar 6 % per tahun.

3.3.2. Belanja Wajib dan Mengikat

Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 untuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dibutuhkan biaya operasional yang merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Adapun proyeksi belanja daerah, pengeluaran periodik belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama, Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Daerah Kabupaten Kudus, Kapasitas Riil

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus periode 2014-2018 kami sajikan sebagaimana Tabel Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kudus.

Tabel. 3.19
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

No	Uraian	2013 Rp	Tingkat Pertum- buan %	Proyeksi				
				2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Belanja Tidak Langsung	539.658.463.000	12,20	601.765.937.000	676.158.805.000	759.728.688.000	853.669.789.000	959.431.482.000
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	529.299.547.000	12,24	588.524.530.000	662.090.096.000	744.851.358.000	837.957.777.000	942.702.499.000
3	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.869.918.000	3,08	3.989.038.000	4.198.183.000	4.326.832.000	4.484.346.000	4.678.550.000
5	Belanja Bunga	70.802.000	(20,00)	70.802.000	70.802.000	70.802.000	-	-
6	Belanja Bagi Hasil	4.418.196.000	15,98	6.181.567.000	6.799.724.000	7.479.696.000	8.227.666.000	9.050.433.000
7	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	10,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
B	Belanja Langsung	110.968.993.500	7,55	130.505.611.000	138.333.556.000	144.851.646.000	151.693.845.000	158.876.331.000
1	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.857.055.000	6,79	4.394.202.000	4.613.913.000	4.844.608.000	5.086.839.000	5.341.180.000
2	Belanja Pegawai BLUD	1.832.316.000	12,74	2.632.704.000	2.764.340.000	2.902.557.000	3.047.684.000	3.200.069.000
3	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	782.749.000	3,72	771.857.000	810.450.000	850.973.000	893.521.000	938.198.000
4	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.043.000	6,98	1.308.998.000	1.374.448.000	1.443.171.000	1.515.329.000	1.591.096.000

No	Uraian	2013 Rp	Tingkat Pertum- buan %	Proyeksi				
				2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	280.572.000	9,64	359.647.000	377.630.000	396.511.000	416.337.000	437.154.000
6	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	155.670.000	4,85	175.605.000	180.628.000	185.794.000	191.107.000	196.573.000
7	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	236.521.000	13,16	344.855.000	362.098.000	380.203.000	399.213.000	419.174.000
8	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.496.053.000	4,94	4.708.182.000	4.943.592.000	5.190.771.000	5.450.310.000	5.722.825.000
9	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11.470.000	10,85	15.400.000	16.170.000	16.979.000	17.828.000	18.719.000
10	Belanja Pengisian Tabung Gas	25.578.000	14,32	38.770.000	40.709.000	42.744.000	44.882.000	47.126.000
11	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.236.491.500	(9,99)	371.430.000	390.002.000	409.502.000	429.977.000	451.476.000
12	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	75.000.000	68,04	315.160.000	330.918.000	347.464.000	364.838.000	383.079.000
13	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan	10.597.000	10,53	14.057.000	14.760.000	15.498.000	16.273.000	17.087.000
14	Belanja Bahan Pakan Ternak	64.133.000	13,30	93.950.000	98.648.000	103.580.000	108.759.000	114.197.000
15	Belanja Bahan Logistik Bencana	83.250.000	12,74	119.650.000	125.633.000	131.915.000	138.510.000	145.436.000
16	Belanja Telepon	1.057.808.000	3,81	1.048.000.000	1.100.400.000	1.155.420.000	1.213.191.000	1.273.851.000

No	Uraian	2013 Rp	Tingkat Pertum- buan %	Proyeksi				
				2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Belanja Air	598.906.000	1,57	564.018.000	583.308.000	603.257.000	623.888.000	645.225.000
18	Belanja Listrik	19.485.287.000	9,83	25.169.351.000	26.427.819.000	27.749.210.000	29.136.670.000	30.593.504.000
19	Belanja Surat Kabar/Majalah	260.198.000	8,87	323.553.000	339.731.000	356.718.000	374.554.000	393.281.000
20	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	634.100.000	4,60	653.220.000	685.881.000	720.176.000	756.184.000	793.993.000
21	Belanja Paket/Pengiriman	147.175.000	8,87	147.237.000	210.549.000	211.455.000	212.364.000	213.277.000
22	Belanja Sertifikasi	780.000	4,53	800.000	840.000	882.000	927.000	973.000
23	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	768.000	4,01	768.000	807.000	847.000	890.000	934.000
24	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi	105.210.000	7,94	125.930.000	132.227.000	138.838.000	145.780.000	153.069.000
25	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan	643.450.000	13,09	799.461.000	1.119.246.000	1.123.723.000	1.128.218.000	1.132.731.000
26	Belanja jasa perawatan/pengobatan	3.745.385.000	(6,72)	1.737.500.000	1.824.375.000	1.915.594.000	2.011.374.000	2.111.943.000

No	Uraian	2013 Rp	Tingkat Pertum- buan %	Proyeksi				
				2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.591.797.000	17,10	2.873.131.000	3.016.788.000	3.016.788.000	3.016.788.000	3.016.788.000
28	Belanja Jasa Perawatan Pasien Jamkesda	2.332.246.000	39,30	6.448.134.000	6.770.541.000	7.109.068.000	7.464.522.000	7.837.748.000
29	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	648.000.000	4,00	648.000.000	680.400.000	714.420.000	750.141.000	787.649.000
30	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	837.800.000	4,12	843.000.000	885.150.000	929.408.000	975.878.000	1.024.672.000
31	Belanja Jasa Service	908.968.000	10,57	1.207.520.000	1.267.896.000	1.331.291.000	1.397.856.000	1.467.749.000
32	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.248.981.000	7,63	1.475.824.000	1.549.616.000	1.627.096.000	1.708.451.000	1.793.874.000
33	Belanja Jasa KIR	9.970.000	9,26	12.590.000	13.220.000	13.881.000	14.575.000	15.304.000
34	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	376.010.000	7,97	450.733.000	473.270.000	496.934.000	521.780.000	547.869.000
35	Belanja Cetak	1.639.286.500	6,82	1.870.318.000	1.963.834.000	2.062.026.000	2.165.127.000	2.273.384.000
36	Belanja Pengandaan	734.148.500	17,70	816.604.000	1.429.057.000	1.439.775.000	1.450.574.000	1.461.453.000

No	Uraian	2013 Rp	Tingkat Pertum- buan %	Proyeksi				
				2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	92.780.000	36,93	774.771.000	813.510.000	854.186.000	896.895.000	941.739.000
38	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.169.062.000	5,53	1.299.679.000	1.507.628.000	1.510.040.000	1.512.456.000	1.514.876.000
39	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	946.882.000	6,58	1.068.932.000	1.122.379.000	1.178.498.000	1.237.423.000	1.299.294.000
40	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	279.081.000	92,44	1.513.161.000	1.588.820.000	1.668.261.000	1.751.674.000	1.839.257.000
41	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	283.320.000	(0,12)	225.000.000	236.250.000	248.063.000	260.466.000	273.489.000
42	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lain	95.040.000	5,67	102.960.000	108.108.000	113.514.000	119.190.000	125.149.000
43	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	344.780.000	19,89	460.327.000	754.937.000	759.768.000	764.631.000	769.525.000
44	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.828.510.000	9,88	3.680.375.000	3.857.770.000	4.043.714.000	4.238.621.000	4.442.923.000

No	Uraian	2013 Rp	Tingkat Pertum- buan %	Proyeksi				
				2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Belanja pemeliharaan aplikasi	151.000.000	10,85	202.700.000	212.835.000	223.477.000	234.651.000	246.384.000
46	Belanja Barang Jasa BOS	2.348.247.000	3,72	2.315.571.000	2.431.350.000	2.552.918.000	2.680.563.000	2.814.592.000
47	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.194.770.000	6,00	55.210.119.000	57.970.625.000	60.869.157.000	63.912.615.000	67.108.245.000
48	Belanja Modal BOS	742.749.000	4,78	771.857.000	810.450.000	850.973.000	893.521.000	938.198.000
C	Pengeluaran Pembiayaan	51.597.586.000	(32,00)	58.115.000.000	1.915.000.000	2.375.920.000	-	-
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	51.482.586.000	(32,48)	56.000.000.000	1.800.000.000	2.260.920.000	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	115.000.000	-	115.000.000	115.000.000	115.000.000	-	-
3	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	0	(20,00)	2.000.000.000				
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama		702.225.042.500	9,80	790.386.548.000	816.407.361.000	906.956.254.000	1.005.363.634.000	1.118.307.813.000

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dari tabel di atas, dapat diketahui belanja wajib yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, dan belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta prioritas utama Kabupaten Kudus, mengalami kondisi fluktuatif.

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama 5 (lima) tahun ke depan menunjukkan tingkat pertumbuhan rata – rata tiap tahun sebesar 9,80%. Untuk proyeksi belanja wajib dan mengikat belanja tidak langsung tingkat pertumbuhan rata – rata sebesar 12,20%, terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar 12,24% yang telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta gaji 13. Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar 3,08%, Belanja Bagi Hasil sebesar 15,98% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 10%. Khusus untuk Belanja Bunga hanya dianggarkan sampai dengan tahun ke 3 dikarenakan pinjaman akan berakhir pada tahun ke 3. Untuk proyeksi belanja wajib dan mengikat belanja langsung, tingkat pertumbuhan rata – rata sebesar 7,55 % yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 8,10%, Belanja Barang dan Jasa 4,38% dan Belanja Modal 7,54%. Untuk pengeluaran pembiayaan tidak mengalami kenaikan dimana pengeluaran pembiayaan hanya digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman yang akan berakhir pada tahun ke tiga (Tahun 2016).

Berdasarkan kinerja pemerintah daerah di atas, kebijakan belanja daerah Kabupaten Kudus untuk Tahun 2013-2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2018 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
4. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis kepong desa kuasai kota, pemberdayaan koperasi dan UMKM serta dukungan infrastruktur.
5. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang pada *Asian Development Bank* berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Mengalokasikan belanja hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- f. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- g. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan kota serta pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada pemerintah desa dan partai politik.

3.3.3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah dapat diproyeksikan dari total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Tabel 3.20
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 untuk Mendanai Pembangunan
 Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

No	Uraian	Proyeksi				
		2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	1.517.236.814.000	1.688.766.325.000	1.864.868.992.000	2.073.411.824.000	2.311.511.532.000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	168.382.095.000	199.045.843.000	231.208.045.000	270.586.608.000	319.137.715.000
1.1.1.	Pajak Daerah	56.772.180.000	72.100.668.000	91.567.848.000	116.291.167.000	147.689.782.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	35.256.083.000	38.781.691.000	42.659.860.000	46.925.846.000	51.618.430.000
1.1.3.	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.723.796.000	5.999.220.000	7.619.009.000	9.676.141.000	12.288.699.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	71.630.036.000	82.164.264.000	89.361.328.000	97.693.454.000	107.540.804.000
1.2.	Dana Perimbangan	1.010.417.213.000	1.082.001.012.000	1.176.267.217.000	1.288.306.088.000	1.412.160.481.000
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	159.376.462.000	171.845.285.000	196.947.077.000	225.814.138.000	259.011.258.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	795.851.851.000	854.966.827.000	924.131.240.000	1.007.303.050.000	1.097.960.323.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	338.437.506.000	407.719.470.000	453.393.730.000	514.519.128.000	580.213.336.000
1.3.1	Hibah	6.426.400.000	7.390.360.000	8.498.914.000	9.773.751.000	11.239.813.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi				
		2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.225.259.000	98.109.047.000	112.825.404.000	129.749.214.000	149.211.596.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.228.110.000	225.662.326.000	259.511.675.000	298.438.426.000	343.204.190.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000
3	Penerimaan Pembiayaan	218.473.981.000	34.414.482.000	30.926.542.000	16.635.358.000	9.313.175.000
3.1.1	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	216.473.981.000	34.414.482.000	30.926.542.000	16.635.358.000	9.313.175.000
3.1.8	Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	2.000.000.000				
	Total penerimaan	1.735.710.795.000	1.723.180.807.000	1.895.795.534.000	2.090.047.182.000	2.320.824.707.000
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Uama	790.386.548.000	817.407.361.000	907.956.254.000	1.005.363.634.000	1.118.307.813.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	945.324.247.000	905.773.446.000	987.839.280.000	1.084.683.548.000	1.202.516.894.000
	Pertumbuhan		(4,18)	9,06	9,80	10,86

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan tingkat pertumbuhan per tahunnya rata-rata sebesar 8,86%. Untuk Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran diasumsikan menurun sebesar 46,12%. Sedangkan untuk Pencairan Dana Cadangan tidak dianggarkan.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.21 berikut.

Tabel. 3.21
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

No	Uraian	Proyeksi				
		2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	945.324.247.000	905.773.446.000	987.839.280.000	1.084.463.548.000	1.202.516.894.000
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas :					
II.a	Belanja Langsung	729.782.394.000	713.464.868.000	798.427.448.000	898.061.707.000	1.018.511.854.000
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	130.505.611.000	138.333.556.000	144.851.646.000	151.693.845.000	158.876.331.000
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a + II.b - II.c)	599.276.783.000	575.131.312.000	653.575.802.000	746.367.862.000	859.635.523.000
	Sisa Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I - II)	346.047.464.000	330.642.134.000	334.263.478.000	338.315.686.000	342.881.371.000

No	Uraian	Proyeksi				
		2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II :					
III.a	Belanja Tidak Langsung	947.813.401.000	1.006.800.939.000	1.093.992.166.000	1.191.985.475.000	1.302.312.853.000
	Dikurangi					
III.b	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	601.765.937.000	676.158.805.000	759.728.688.000	853.669.789.000	959.431.482.000
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a - III.b)	346.047.464.000	330.642.134.000	334.263.478.000	338.315.686.000	342.881.371.000
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I - II - III)	-	-	-	-	-

Sumber: - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan dianggarkan sepenuhnya untuk memenuhi pengeluaran prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung di luar belanja wajib mengikat serta prioritas utama yang dikelompokkan menjadi kebutuhan pendanaan Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III.

Kebutuhan pendanaan prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Sedangkan prioritas III merupakan alokasi belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi guru, insentif pemungutan pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa.

Rincian kebutuhan pendanaan belanja langsung berdasarkan prioritas dan kapasitas riil keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut :

Tabel. 3.22
Kebutuhan Pendanaan Untuk Belanja Langsung Tahun 2014-2018

No	URAIAN	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Belanja Langsung Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	130.505.611.000	138.333.556.000	144.851.646.000	151.693.845.000	158.876.331.000
2	Belanja Langsung Prioritas I	380.228.420.000	380.595.706.000	459.857.112.000	549.366.718.000	608.927.642.000
3	Belanja Langsung Prioritas II	219.048.363.000	194.535.606.000	193.718.690.000	197.001.144.000	250.707.881.000
	TOTAL	729.782.394.000	713.464.868.000	798.427.448.000	898.061.707.000	1.018.511.854.000

Sumber: - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 3.23
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I	40,22	380.228.420.000	42,02	380.595.706.000	46,55	459.857.112.000	50,65	549.366.718.000	50,64	608.927.642.000
2.	Prioritas II	23,17	219.048.363.000	21,48	194.535.606.000	19,61	193.718.690.000	18,16	197.001.144.000	20,85	250.707.881.000
3.	Prioritas III	36,61	346.047.464.000	36,50	330.642.134.000	33,84	334.263.478.000	31,19	338.315.686.000	28,51	342.881.371.000
	Total	100,00	945.324.247.000	100,00	905.773.446.000	100,00	987.839.280.000	100,00	1.084.683.548.000	100,00	1.202.516.894.000

*Sumber: - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014*

Proporsi penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 untuk prioritas I sebesar 46,02%, yang merupakan program unggulan kepala daerah dan program amanat peraturan perundang-undangan. Disusul kemudian sebesar 33,33% untuk prioritas III yang digunakan untuk belanja tidak langsung yang terkait dengan kebijakan kepala daerah, dan prioritas II sebesar 20,65%.

Adapun proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 tercantum dalam Tabel 3.24 berikut.

Tabel 3.24
 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

No	Uraian	Proyeksi				
		2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	1.517.236.814.000	1.688.766.325.000	1.864.868.992.000	2.073.411.824.000	2.311.511.532.000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	168.382.095.000	199.045.843.000	231.208.045.000	270.586.608.000	319.137.715.000
1.1.1.	Pajak Daerah	56.772.180.000	72.100.668.000	91.567.848.000	116.291.167.000	147.689.782.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	35.256.083.000	38.781.691.000	42.659.860.000	46.925.846.000	51.618.430.000
1.1.3.	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.723.796.000	5.999.220.000	7.619.009.000	9.676.141.000	12.288.699.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	71.630.036.000	82.164.264.000	89.361.328.000	97.693.454.000	107.540.804.000
1.2.	Dana Perimbangan	1.010.417.213.000	1.082.001.012.000	1.176.267.217.000	1.288.306.088.000	1.412.160.481.000
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	159.376.462.000	171.845.285.000	196.947.077.000	225.814.138.000	259.011.258.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	795.851.851.000	854.966.827.000	924.131.240.000	1.007.303.050.000	1.097.960.323.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000	55.188.900.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	338.437.506.000	377.719.470.000	422.893.730.000	474.844.128.000	534.587.086.000
1.3.1	Hibah	6.426.400.000	7.390.360.000	8.498.914.000	9.773.751.000	11.239.813.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.225.259.000	68.109.047.000	78.325.404.000	90.074.214.000	103.585.346.000

No	Uraian	Proyeksi				
		2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.228.110.000	225.662.326.000	259.511.675.000	298.438.426.000	343.204.190.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000	76.557.737.000
2	Belanja Daerah	1.677.595.795.000	1.720.265.807.000	1.892.419.614.000	2.090.047.182.000	2.320.824.707.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	947.813.401.000	1.006.800.939.000	1.093.992.166.000	1.191.985.475.000	1.302.312.853.000
2.1.1	Belanja Pegawai	815.347.426.000	890.877.763.000	974.934.941.000	1.069.648.339.000	1.176.391.825.000
2.1.2	Belanja Bunga	70.802.000	70.802.000	70.802.000	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	46.029.515.000	35.527.040.000	35.527.040.000	35.527.040.000	35.527.040.000
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	32.371.987.000	23.474.000.000	23.474.000.000	23.474.000.000	23.474.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hsl kpd Propinsi/Kab/Kot dan Pem Desa	6.181.567.000	6.799.724.000	7.479.696.000	8.227.666.000	9.050.433.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keu kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan parpol	44.812.104.000	47.051.610.000	49.505.687.000	52.108.430.000	54.869.555.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	729.782.394.000	713.464.868.000	798.427.448.000	898.061.707.000	1.018.511.854.000
	Surplus/Defisit	(160.358.981.000)	(31.499.482.000)	(27.550.622.000)	(16.635.358.000)	(9.313.175.000)
3	Pembiayaan Daerah					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	218.473.981.000	34.414.482.000	30.926.542.000	16.635.358.000	9.313.175.000
3.1.1	SiLPA	216.473.981.000	34.414.482.000	30.926.542.000	16.635.358.000	9.313.175.000

No	Uraian	Proyeksi				
		2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp
1	2	3	4	5	6	7
3.1.8	Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan dari LUEP	2.000.000.000				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	58.115.000.000	2.915.000.000	3.375.920.000	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah	56.000.000.000	2.800.000.000	3.260.920.000		
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	115.000.000	115.000.000	115.000.000		
3.2.5	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada LUEP	2.000.000.000				
	Pembiayaan netto	160.358.981.000	31.499.482.000	27.550.622.000	16.635.358.000	9.313.175.000
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-

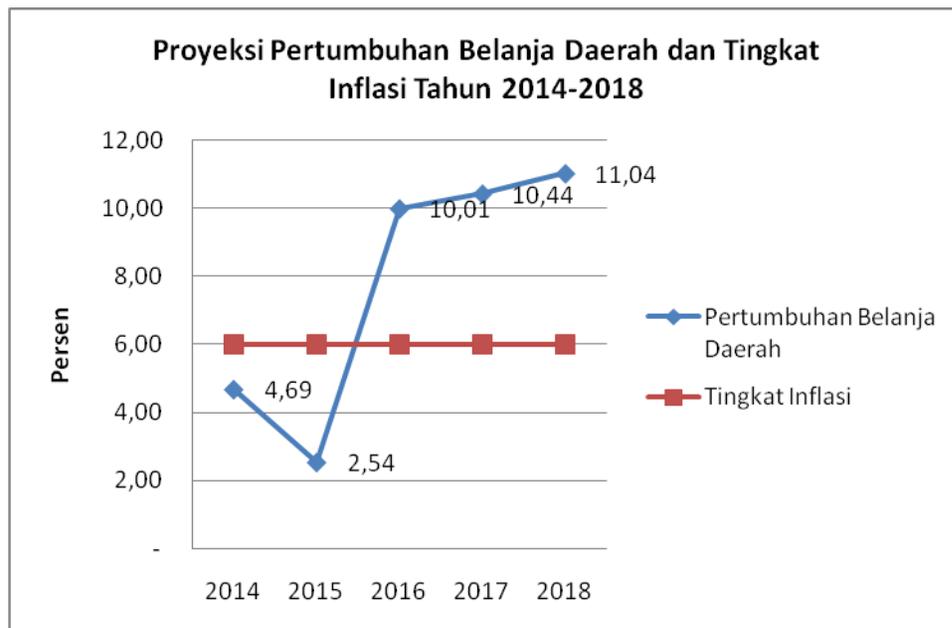
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 3.24., Pada Tahun 2014, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.677.595.795.000,- dan di Tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 2.320.824.707.000,00. Namun pada Tahun 2015, proyeksi Belanja Daerah mengalami penurunan dari Tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.216.473.981.000,- yang dianggarkan di Tahun 2014 sehingga anggaran Tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :



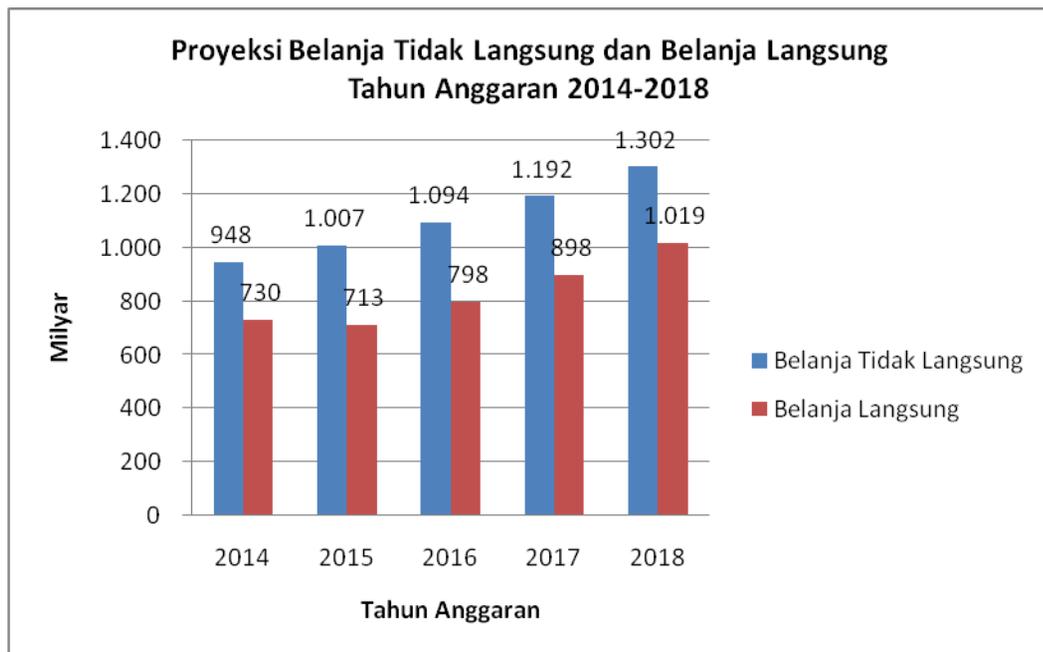
Gambar 3.4. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014-2018

Apabila dilihat dari proyeksi pertumbuhan Belanja Daerah selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, Belanja Daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,75%. Pertumbuhan tersebut apabila dibandingkan dengan proyeksi tingkat inflasi Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 yang sebesar 5 ± 1 , maka proyeksi pertumbuhan Belanja Daerah tersebut secara riil masih di atas proyeksi tingkat inflasi. Pada Tahun 2016-2018 diproyeksikan pertumbuhan belanja lebih tinggi dari angka inflasi, sehingga terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



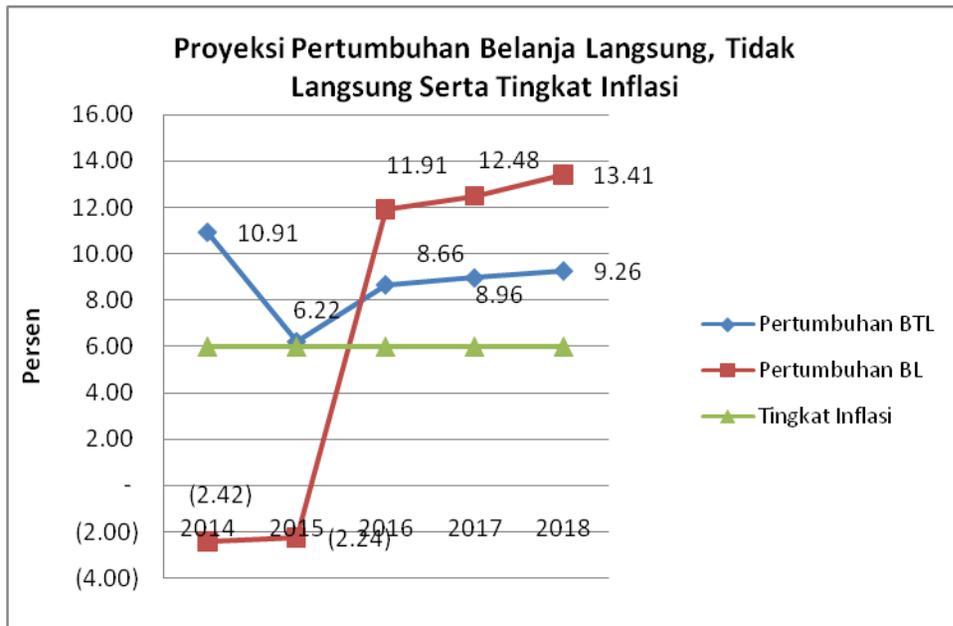
Gambar 3.5. Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah dan Tingkat Inflasi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

Sedangkan proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 apabila dilihat dari kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung maka dapat dilihat bahwa Belanja Tidak Langsung diproyeksikan mengalami kenaikan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Sedangkan Belanja Langsung pada Tahun 2015 diproyeksikan mengalami penurunan dari Tahun 2014, hal ini disebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.216.473.981.000,- yang digunakan untuk mendukung belanja langsung sehingga anggaran Tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.6. Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014-2018

Apabila dilihat dari proyeksi pertumbuhan Kelompok Belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,00%. Sedangkan untuk belanja langsung pada tahun 2015 mengalami penurunan dan pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,60%. Pertumbuhan tersebut apabila dibandingkan dengan proyeksi tingkat inflasi yang sebesar 5 ± 1 , maka proyeksi pertumbuhan Belanja Daerah tersebut secara riil masih di atas proyeksi tingkat inflasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.7. Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

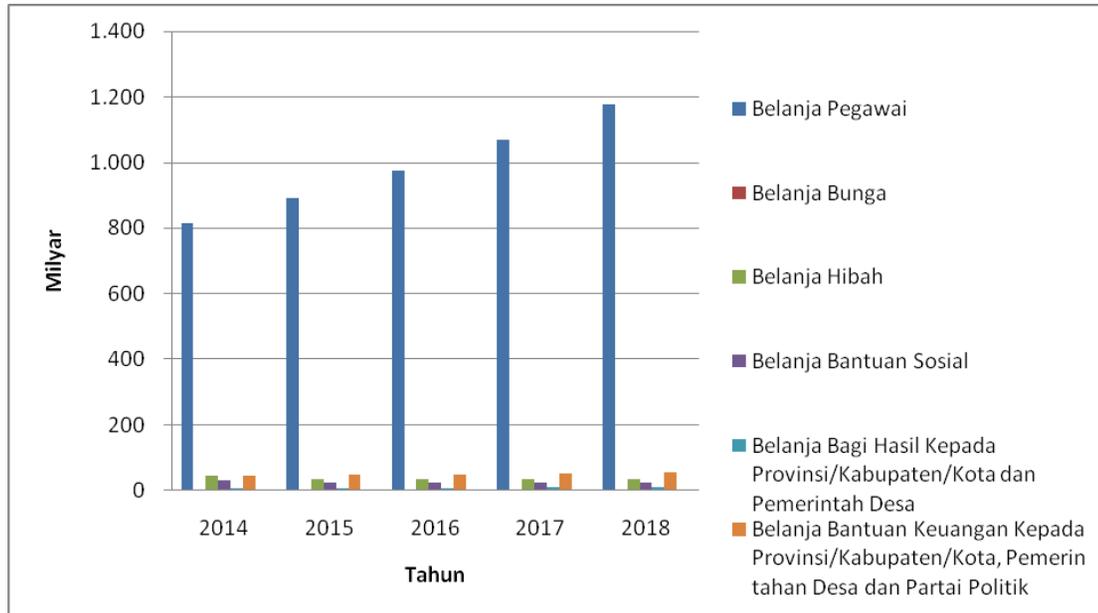
Apabila dilihat dari persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terhadap total proyeksi Belanja Daerah, maka proyeksi Belanja Tidak Langsung relatif mengalami penurunan sedangkan proyeksi Belanja Langsung mengalami kenaikan. Hal ini sebagaimana gambar berikut :



Gambar 3.8. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014-2018

Proyeksi kenaikan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 sampai Tahun 2018 apabila dilihat dari jenis belanjanya, belanja pegawai memiliki porsi terbesar dengan rata-rata 88,74% dari Belanja Tidak Langsung dan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata

peningkatan sebesar 12,06%. Rata-rata peningkatan tersebut merupakan asumsi dari kenaikan gaji PNS dan *accres* gaji. Sedangkan jenis Belanja Tidak Langsung lainnya diantaranya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial relatif mengalami penurunan (lihat Tabel 3.24). Proyeksi per Jenis Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 3.9. Proyeksi per Jenis Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya Kudus yang semakin sejahtera. Permasalahan – permasalahan secara umum dapat dirinci sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan
 - a. belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
 - b. belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
 - c. belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
 - d. masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan
 - a. belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. terbatasnya pemahaman masyarakat atas jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. terbatasnya alat-alat kesehatan diBLUD RSUD;
 - d. belum optimalnya penyuluhan kesehatan;
 - e. masih adanya penyakit menular dan tidak menular;
 - f. belum terakreditasinya puskesmas;
 - g. keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan serta penyebarannya yang kurang merata;
 - h. kecenderungan bertambahnya kasus HIV AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS);
 - i. masih adanya kasus balita gizi buruk;
 - j. masih adanya industri makanan rumah tangga yang belum memenuhi syarat kesehatan;
 - k. masih terbatasnya kesadaran ibu hamil atas keselamatan sendiri dan calon bayi; dan
 - l. terbatasnya akses air bersih.

3. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. pembangunan infrastruktur yang kurang terarah; dan
 - b. masih terjadinya banjir.

4. Urusan Perumahan
 - a. masih adanya rumah tidak layak huni; dan
 - b. adanya permukiman rusak akibat bencana alam.
5. Urusan Penataan Ruang
belum tersedianya pedoman rencana rinci tata ruang.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah.
7. Urusan Perhubungan
 - a. kemacetan pada jam-jam sibuk; dan
 - b. ketersediaan sarpras dan kelaikan sarpras pengaman lalu lintas yang kurang memadai.
8. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. kecenderungan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. belum optimalnya pengelolaan persampahan; dan
 - c. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
9. Urusan Pertanahan
belum optimalnya administrasi pertanahan.
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. belum optimalnya data base kependudukan; dan
 - b. kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. masih rendahnya peran perempuan di ranah publik;
 - b. masih lemahnya kinerja dan eksistensi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - c. masih adanya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan anak; dan
 - d. masih lemahnya pemberdayaan perempuan.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
masih tingginya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate (TFR)*) dan Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (*Unmet need*).
13. Urusan Sosial
 - a. belum optimalnya kinerja organisasi keagamaan;
 - b. kecenderungan peningkatan jumlah keluarga miskin;

- c. masih adanya anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal;
 - d. belum optimalnya penanganan penyandang cacat dan trauma;
 - e. belum adanya panti singgah;
 - f. masih adanya eks penyandang penyakit sosial; dan
 - g. belum optimalnya kelembagaan organisasi sosial.
14. Urusan Ketenagakerjaan
- a. belum sesuai skill alumni pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. masih tingginya angka pengangguran;
 - c. belum semua pendaftar pencari kerja bisa ditempatkan baik melalui Angkatan Kerja Lokal, Angkatan Kerja antar Daerah, dan Angkatan Kerja antar Negara; dan
 - d. belum optimalnya hubungan industrial.
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a. belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM; dan
 - b. terbatasnya pangsa pasar dan rendahnya modal UMKM.
16. Urusan Penanaman Modal Daerah
- a. belum optimalnya promosi potensi investasi; dan
 - b. belum optimalnya pelayanan perijinan.
17. Urusan Kebudayaan
- a. menurunnya nilai-nilai etika, moral, dan budaya pada masyarakat;
 - b. belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional; dan
 - c. belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya.
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a. belum optimalnya kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;
 - b. belum optimalnya kelembagaan, kegiatan dan sarana prasarana olahraga; dan
 - c. adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- a. kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
 - b. meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
 - c. belum optimalnya kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat, LSM dan partai politik;
 - d. belum optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan

- e. kurangnya sarana prasarana dan tenaga penanganan bencana.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- a. kurangnya profesionalisme dan integritas sumber daya aparatur;
 - b. belum optimalnya manajemen pengawasan;
 - c. belum optimalnya pengendalian pembangunan;
 - d. adanya kasus pengaduan di lingkungan pemda;
 - e. masih perlunya peningkatan kapasitas SDM legislatif;
 - f. belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
 - g. belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
 - h. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - i. belum terbentuknya forum kerjasama antar pemerintah daerah; dan
 - j. belum efektifnya kelembagaan perangkat daerah.
21. Urusan Ketahanan Pangan
masih tingginya ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - c. belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
 - d. belum optimalnya organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.
23. Urusan Statistik
belum optimalnya ketersediaan data statistik.
24. Urusan Kearsipan
belum optimalnya manajemen pengelolaan kearsipan.
25. Urusan Komunikasi dan Informatika
masih kurangnya sarpras komunikasi dan informasi.
26. Urusan Perpustakaan
- a. masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
 - b. belum terealisasinya perpustakaan elektronik (*e-library*); dan
 - c. belum adanya tenaga fungsional pustakawan.
27. Urusan Pertanian
belum optimalnya produksi pertanian.
28. Urusan Kehutanan
belum optimalnya pemanfaatan potensi hutan dan lahan.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. masih rendahnya pemahaman tentang energi terbarukan;
 - b. adanya potensi rentan gerakan tanah; dan
 - c. masih adanya kegiatan penambangan tanpa ijin.
30. Urusan Pariwisata
 - a. belum optimalnya promosi, penggalian dan jejaring pariwisata; dan
 - b. kurangnya sarpras destinasi pariwisata.
31. Urusan Kelautan dan Perikanan
belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan.
32. Urusan Perdagangan
 - a. belum optimalnya perlindungan konsumen;
 - b. belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perdagangan kecil;
 - c. belum optimalnya sarana prasarana penunjang perdagangan/pasar;
 - d. kurangnya pemahaman terhadap prosedur ekspor; dan
 - e. perlunya pengawasan peredaran barang-barang strategis/kebutuhan pokok masyarakat.
33. Urusan Industri
 - a. masih rendahnya produktivitas industri;
 - b. masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha;
 - c. pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang belum memadai;
 - d. terbatasnya akses permodalan bagi industri kecil;
 - e. rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi;
 - f. terbatasnya akses pemasaran; dan
 - g. sentra atau klaster industri potensial belum berkembang secara optimal.
34. Urusan Ketransmigrasian
belum optimalnya sinergitas pemerintah pusat dan daerah di bidang ketransmigrasian.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan ketercapaian tujuan

pembangunan di masa depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan kriteria di atas dalam 5 (lima) tahun ke depan tahun 2013-2018 yaitu :

1. pertumbuhan jumlah UMKM yang masih rendah.
Meskipun akhir-akhir ini sektor riil sudah mulai menggeliat, tapi kemampuan UMKM untuk bersaing murni dengan produk pabrikan, impor atau pemodal besar sangat berat. Fasilitasi pemerintahan dari berbagai aspek akan membantu memperkuat daya saing UMKM. Fokus yang perlu perhatian adalah peningkatan manajemen usaha, fasilitasi permodalan, dan perluasan pangsa pasar. Fasilitasi UMKM secara bertahap, akuntabel, terencana, adil dan tepat akan meningkatkan kuantitas dan kualitas jumlah UMKM, sehingga mendukung tercapainya Kudus yang sejahtera.
2. belum optimalnya mutu pendidikan dan sarpras pendukung
Beberapa hal yang masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan di bidang pendidikan antara lain :
 - a. masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru khususnya pada jenjang SD, jumlah dan distribusi siswa SD/MI yang belum merata mengakibatkan sekolah di desa kekurangan murid;
 - b. akses pendidikan menengah yang belum merata mengakibatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA rendah;
 - c. belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan

(gedung laborat, perpustakaan, buku, alat laborat, alat peraga, dan media pembelajaran lainnya), khususnya sekolah di pedesaan; dan

- d. pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya belum cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terjadi karena strategi pembangunan pendidikan yang berorientasi masukan (*input oriented*) dan diatur oleh jajaran pemerintah pusat yang berorientasi makro (*macro oriented*). Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.
3. rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Kemampuan ekonomi masih rendah mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan/mengakses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat atas kualitas kesehatan mengakibatkan rendahnya tindakan preventif. Telah ditetapkannya pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 1 Januari 2014, menuntut daerah untuk mengakomodir kebijakan tersebut dalam akses kesehatan. BPJS dilaksanakan secara bertahap dan tuntas pada tahun 2019. Oleh karena itu semua aspek yang terkait dengan jaminan sosial perlu direncanakan secara matang baik prosedur, ketersediaan sarpras kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit, maupun penyebaran informasinya.
 4. tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
Pada tahun 2011, penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung menurun yaitu mencapai 73.591 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu) jiwa. Tetapi pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 68.100 (enam puluh delapan ribu seratus) jiwa. Mengingat angka kemiskinan Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Kudus mencari formula guna pemecahan permasalahan tersebut melalui berbagai program yang lintas urusan pada kantong-kantong kemiskinan.

Adapun masih tingginya angka pengangguran dapat dilihat dari data pengangguran tahun 2012 berjumlah 25.522 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua) orang, memerlukan program yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Persoalannya, pada tahun 2015 sudah disepakati adanya liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik tenaga kerja terampil (*skillful labor*) maupun tenaga setengah terampil (*semi-skilled labor*). Oleh karena itu setiap daerah akan saling berlomba untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih produktif. Daerah yang unggul hanyalah daerah yang mampu membentengi diri (*protective belt*) melalui perbaikan kualitas manusia dan menyiapkan tenaga- kerja terampil yang siap menyongsong perubahan dan bersahabat dengan ketidakpastian tersebut. Untuk rencana jangka pendek, program percepatan peningkatan keahlian dan skill dapat dilakukan melalui program Balai Latihan Kerja (BLK), sertifikasi profesi, training dan workshop. Peran dan fungsi BLK tidak hanya dioptimalkan, tetapi juga butuh disebarluaskan mulai di tingkat desa hingga kabupaten/kota. BLK perlu bekerjasama dengan pusat-pusat pendidikan baik formal maupun non formal. Sertifikasi profesi perlu ditekankan pada pemenuhan standarisasi minimal dari satu profesi (sertifikasi guru/dosen, dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain), bukan sekadar administrasi profesi saja. Demikian pula kebijakan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial di dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.

5. rendahnya daya saing perekonomian daerah

Daya saing perekonomian daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Beberapa peluang usaha yang kurang berkembang adalah usaha bidang pertanian, pariwisata, dan kerajinan *handycraft*. Masih banyaknya lahan tidur, merupakan potensial untuk dikelola dalam menghasilkan komoditi pertanian bahan baku industri. Banyaknya produk pabrikan Cina yang kompetitif memaksa pengusaha berkreatifitas lebih baik. Pencermatan terhadap daya saing bagi potensi daerah memang menjadi langkah strategis, misalnya dengan menggali potensi sesuai keragaman produk khas daerah, utamanya yang berkaitan dengan produk unggulan (bordir, seni ukir, makanan kuliner dan sebagainya).

6. pembangunan infrastruktur yang ego sektoral dan ketimpangan antar wilayah.

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan

tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaan di suatu wilayah pembangunan infrastruktur harus mengedepankan azas prioritas dengan tetap memegang prinsip keadilan. Diharapkan pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat daya ungkit yang ditimbulkan dari adanya aktivitas-aktivitas baru. Namun demikian, bila pembangunan infrastruktur tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan biaya sosial yang tinggi, dan cenderung menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

7. belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan penempatan aparat yang kurang tepat mengakibatkan pelaksanaan tugas belum optimal. Kualitas pelayanan birokrasi juga masih kurang dikarenakan tidak dipenuhinya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan juga pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak segera dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung kinerja Kota Kudus diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten.

8. menurunnya moral dan budaya
Moralitas merupakan faktor penting bagi pembangunan identitas dan karakter masyarakat suatu bangsa. Menafikan faktor moralitas akan menjadi petaka bagi perjalanan dan masa depan sebuah bangsa. Peningkatan perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, serta korupsi yang dilakukan para petinggi dan aparat pemerintah juga sebagai fenomena kerusakan moral yang perlu diwaspadai. Tanda-tanda berupa semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, serta menguatnya budaya ketidakjujuran. Oleh karena itu, perlunya kita memperhatikan pengembangan karakter masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya kemerosotan moral. Itulah benang merah antara moral dan kebudayaan yang dalam penanganannya harus komprehensif. Penurunan nilai-nilai kebudayaan terlihat dari tergerusnya nilai-nilai budaya lokal oleh pengaruh luar.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, visi Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman tentram dan damai.

Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Tentram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir.

Damai mengandung makna tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum.

Selain itu, sejahtera lahir dan batin juga dapat dijabarkan mengandung unsur-unsur religius, maju dan adil.

Religius mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan beribadah sesuai agamanya dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.

Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

Adil mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus

mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

Keseluruhan aspek tersebut di atas saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam rangka perwujudan Kudus yang semakin sejahtera. Dengan demikian, keberhasilan mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera dapat diukur dengan berbagai indikator yang jelas dan terukur serta konsisten dalam rangka mempertajam visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Kudus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 adalah “Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. Apabila visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 disandingkan dengan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, maka dapat dilihat bahwa kedua visi tersebut mengarah ke satu tujuan yang sama. Jika visi Kabupaten Kudus Tahun 2013– 2018 disandingkan dengan visi Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari”, maka terlihat juga bahwa kedua visi tersebut menuju pada satu titik tujuan yang sama. Dari kedua visi tersebut diatas, apabila disandingkan dengan visi RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 atau Visi Indonesia 2014 yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan" dan visi RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur“, maka terlihat jelas bahwa kedua visi tersebut telah selaras dengan visi Pemerintah Republik Indonesia dalam RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 dan RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025. Dengan demikian visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat serta selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Kudus, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 serta RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan Empat Pilar. Empat Pilar tersebut, merupakan misi pertama sampai dengan misi ke empat yang merupakan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :

1. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas.;

3. tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau; dan
4. perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Di samping itu terdapat pula sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan dalam pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 yaitu Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera, yang dirinci dalam misi kelima sampai dengan ke delapan.

Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. *pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif UMKM menjadi prioritas mengingat peran yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja, dengan sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM serta akses pasar produk UMKM. Dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi, maka perekonomian akan semakin tumbuh. Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan, rendahnya kemampuan SDM, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan dari segi penguasaan teknologi dan informasi. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. *mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas.*

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendidikan sehingga lebih meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal), dengan sasaran peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan, penataan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, juga diupayakan terus-menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkauan yang luas, tenaga kependidikan yang berkualitas, dan penataan sistem kependidikan yang efektif serta efisien.

3. *tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.*

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang murah, terjangkau dan

berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat, serta keluarga kecil, sejahtera dan berkualitas. Upaya ini ditempuh dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Dalam rangka meringankan beban masyarakat terkait pelayanan dasar di puskesmas khususnya bagi masyarakat yang tidak tercantum atau tidak memiliki jaminan kesehatan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah maupun pihak ketiga, maka dibebaskan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya. Disamping itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga memasukkan unsur pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana, sehingga generasi yang akan datang lebih meningkat kualitasnya.

4. *perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.*
Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan pertumbuhan sektor industri, perlindungan tenaga kerja dan investasi.
Perlindungan usaha ditujukan untuk membantu unit-unit usaha, khususnya dalam mempertahankan produknya untuk lebih menjamin kepastian hukum, baik dalam berproduksi maupun dalam pemasaran. Pemodal (*investor*) senantiasa ingin mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu dari berbagai proses yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk itu keterbukaan, kepastian, ketepatan tindak, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah juga akan menjadi prasyarat utama akan datangnya pemodal ke daerah. Peningkatan investasi akan memperluas lapangan kerja, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur maupun setengah penganggur, dan kesenjangan produktivitas antar sektor. Dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, akan mengurangi jumlah penduduk miskin.
5. *meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.*
Berbagai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah diharapkan daerah semakin berperan dalam menciptakan iklim yang menunjang tumbuh-kembangnya kegiatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan, keuangan dan sektor ekonomi lainnya serta pemanfaatan potensi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Prakarsa dan kreativitas penyelenggara pemerintahan di daerah diharapkan semakin meningkat. Lebih jauh lagi, perlu reposisi penyelenggaraan pemerintah daerah dari

penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator, dan katalisator segenap kegiatan perekonomian di daerah. Pemerintah daerah juga harus menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya jiwa wiraswasta dan wirausaha warganya. Potensi daerah yang bersifat unggulan prioritas (pakaian, makanan, rokok, *handycraft*) untuk didorong pemasarannya. Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat akan terus ditingkatkan pengembangan pertanian yang berkelanjutan.

6. *pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.*

Pada hakikatnya keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah bisa diukur dengan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kudus untuk 5 (lima) tahun ke depan 2013-2018 akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan serta pengelolaan manajemen transportasi untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul perekonomian. Di samping itu pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta pengelolaan pertanahan. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang wilayah, peningkatan pelestarian lingkungan hidup, manajemen persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam.

7. *perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).*

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*), maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah serta didasari rasa aman, tenteram, dan damai di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditempuh adanya langkah-langkah peningkatan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur daerah secara berkesinambungan dan terarah, melaksanakan pengawasan melekat dan fungsional secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel, dan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

8. *mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial*
Masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Kudus. Untuk mewujudkan masyarakat dimaksud antara lain dengan peningkatan keimanan umat beragama, pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, peningkatan pengamalan ajaran/nilai agama, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis sebagai kader penerus pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan masa depan. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era globalisasi. Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta yang terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal. Di samping itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya, peran generasi muda dalam pembangunan, percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan peningkatan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kudus

Visi : Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM.	Jumlah UMKM (unit)	11.717	11.833	11.947	12.059	12.172
		2. Meningkatnya akses pasar produk UMKM.	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (unit)	178	178	178	178	178
Misi 2: Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal	1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	1. APK SD/ MI/ Paket A (%)	100	100	100	100	100
			2. APK SMP/ MTs/Paket B (%)	100	100	100	100	100
			3. APK SMA/ MA /SMK/ Paket C (%)	86,79	87	87,5	88	90
			4. Bangunan SD dalam kondisi baik (%)	93,80	95,80	97,80	99,80	100
			5. Bangunan SMP dalam kondisi baik (%)	91,22	91,54	91,70	91,86	92,02
			6. Bangunan SMA dalam kondisi baik(%)	95,68	95,80	95,86	95,92	95,98

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Angka Putus Sekolah SD/ MI (%)	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
			8. Angka Putus Sekolah SMP/ MTs (%)	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
			9. Angka Putus Sekolah SMA/ MA/ SMK (%)	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
			10. Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	59,8	60,10	60,5	61	61,6
			11. Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	93,25	93,55	93,95	94,45	95,05
			12. Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV(%)	94,11	94,41	94,81	95,81	95,91
			13. Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	94,54	94,84	95,24	95,74	96,34
		2. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	APK PAUD (%)	52	54	56	58	60
		3. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Angka melek huruf (%)	100	100	100	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien	Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan (%)	100	100	100	100	100
Misi 3:								
Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Cakupan puskesmas (%) 2. Cakupan puskesmas terakreditasi (unit) 3. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) 4. Cakupan pelayanan BLUD RSUD (%)	211,10 3 100 100	211,10 4 100 100	211,10 4 100 100	211,10 4 100 100	211,10 4 100 100
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif (%)	35	45	50	55	60
	2. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas	Cakupan peserta KB aktif (%)	80	80	80	81	82
Misi 4:								
Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.	Pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri.	Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha (%)	2	2	2	2	3

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,7	5,65	5,6	5,55	5,55
		3. Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja	Nilai realisasi PMDN (milyar)	8.070	8.877	9.765	10.741	11.815
Misi 5:								
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	1. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah	1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	1.234.970	1.291.105	1.347.240	1.403.375	1.459.510
		2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Jumlah pedagang di pasar tradisional	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
	2. Peningkatan peran sektor pertanian	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	1. Nilai Tukar Petani 2. Peningkatan produktivitas tanaman (%) 3. Cakupan bina kelompok tani (%)	105,91 5,80 60	106,21 5,85 70	106,51 5,90 80	106,81 5,95 90	107,11 6 100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 6: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	1. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan	1. Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	63,21	67,37	68,87	74,22	80,15
			2. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	60,84	61,01	62,94	63,82	65,47
			3. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,74	1,63	1,59	1,49	1,39
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentase rumah layak huni	87,97	88,58	89,19	89,80	90,41
	2. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan	1. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup	Proporsi RTH publik (%)	5,2	6	7	8	9
		2. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	85	86	87	88	89
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan	Kemampuan SDM bidang LH	0,093	0,123	0,121	0,090	0,089

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis	Jumlah dokumen tata ruang	3	5	5	3	2
	4. Perwujudan tertib pertanahan	Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Luas lahan bersertifikat (%)	5,6	5,45	5,45	5,45	5,45
Misi 7: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	91	92	93	94	95
		2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur	Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi	12.261	12.239	12.143	12.163	12.163
		3. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian TLHP reguler	100	100	100	100	100
		4. Meningkatkan kinerja SDM legislatif	Jumlah Perda yang ditetapkan	18	18	18	18	18
	2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD (%)	(21,21)	(18,21)	(16,16)	(17,03)	(17,94)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil	Kepemilikan e-KTP (%)	94,7	95,5	96,7	97,5	100
		2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Website milik Pemkab	17	17	18	18	18
		3. Meningkatnya pelayanan bidang ketrasmigrasian	Jumlah calon transmigran yang terlayani (KK)	20	30	30	30	30
		4. Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/ Audiensi Bupati di Desa / Kelurahan (kali)	20	33	33	33	33
		5. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase fasilitasi Kerjasama Antar Daerah		100	100	100	100
	4. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%) 2. Penurunan tindak kriminalitas di daerah(%)	75 75	77 60	80 40	82 20	85 10

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah Produk Hukum yang disusun dan didistribusikan	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku				
		3. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Jumlah desa tangguh bencana	14	21	28	35	42
Misi 8: Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial	1. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama	Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME (Orang)	90	75	80	100	100
	2. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi (jenis)	32	34	36	38	40
		2. Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	1. Jumlah sarana di situs pati ayam dan Taman Budaya 2. Jumlah BCB yang direvitalisasi	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
	3. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan	Jumlah organisasi pemuda	26	26	26	26	26
		2. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba	Jumlah kegiatan kepemudaan	15	15	15	15	15

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Perwujudan pembangunan yang berkeadilan sosial	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan (KK)	90	90	90	90	90
		2. Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan (orang)	90	90	90	90	90
	5. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial	1. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	89	89	89	89	89
		2. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada (%)	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya : 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya : 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya : 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya : 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya : 47; Desa Swasembada: 0

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2014 (diolah)

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan misi pembangunan adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM; dan
2. peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan
2. meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM.

Misi 2 :

Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas.

Strategi yang akan ditempuh adalah :

1. perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
2. perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
3. perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
4. perbaikan kualitas manajemen pendidikan.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan tetap mempertahankan tuntas wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;

3. mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
4. mengoptimalkan pelayanan pendidikan.

Misi 3 :

Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
2. pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD;
3. peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan;
4. penurunan angka kesakitan;
5. peningkatan mutu sumber daya kesehatan;
6. peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan;
7. pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual);
8. peningkatan gizi masyarakat;
9. peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga;
10. peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
11. peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih; dan
12. pengendalian pertumbuhan penduduk.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan;
2. meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD;
3. meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan;
4. menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular;
5. meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan;
6. meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan;
7. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual);
8. meningkatkan cakupan pengetahuan gizi;
9. meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang syarat kesehatan makanan;
10. meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
11. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat; dan
12. meningkatkan promosi, pelayanan dan advokasi keluarga berencana.

Misi 4 :

Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kinerja sektor industri;

2. peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
3. pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha;
2. meningkatkan jejaring pemasaran;
3. meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
4. mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja; dan
5. menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan.

Misi 5 :

Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kinerja sektor pariwisata;
2. peningkatan iklim perdagangan yang kondusif;
3. peningkatan pengawasan barang bersubsidi;
4. peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor; dan
5. revitalisasi pertanian.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi pariwisata;
2. meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif;
3. meningkatkan pengawasan barang bersubsidi;
4. meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor; dan
5. meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan.

Misi 6 :

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah;
2. penerapan manajemen rekayasa lalu lintas;
3. pemanfaatan energi terbarukan;
4. peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni;
5. peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup;
6. peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan;
7. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
8. peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang; dan

9. peningkatan kepastian hukum atas tanah.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
2. meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air;
3. meningkatkan manajemen transportasi;
4. melakukan penghematan energi tidak terbarukan;
5. melakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman;
6. meningkatkan tutupan lahan;
7. meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
8. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana;
9. meningkatkan pengendalian pertambangan;
10. meningkatkan pengelolaan sampah terpadu;
11. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup;
12. menyelenggarakan penataan ruang; dan
13. meningkatkan penatagunaan tanah

Misi 7 :

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan;
2. peningkatan pemenuhan data statistik;
3. penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih;
4. penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian;
5. peningkatan pengendalian pembangunan;
6. penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemda;
7. peningkatan pendidikan SDM legislatif;
8. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
9. peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa;
10. pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;
11. penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi;
12. peningkatan kesempatan kerja antar daerah;
13. peningkatan kinerja pemerintahan;
14. peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah;
15. peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
16. optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan;
17. evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan

18. percepatan penanganan bencana.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik;
3. melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur;
4. meningkatkan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
5. meningkatkan pengendalian pembangunan;
6. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM;
7. meningkatkan kapasitas SDM legislatif;
8. melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
9. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa;
10. meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
11. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan;
12. memperluas kesempatan kerja antar daerah;
13. meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
14. meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah;
15. meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
16. melakukan penataan peraturan perundang-undangan;
17. melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah; dan
18. meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana.

Misi 8 :

Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama;
2. penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal;
3. optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional;
4. peningkatan pelestarian benda cagar budaya;
5. peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda ;
6. penguatan moral pemuda;
7. penurunan jumlah keluarga miskin ;
8. Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal;
9. penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma;
10. penyediaan sarpras panti singgah;
11. peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial;
12. peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
13. percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan;
14. peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

15. penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan anak;
16. peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi;
17. peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa;
18. peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat;
19. peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa; dan
20. peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan;
2. meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
3. meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah;
4. meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya;
5. meningkatkan pembinaan prestasi olahraga dan pemuda;
6. meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba;
7. meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin ;
8. meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal;
9. meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan trauma;
10. meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar dan lansia;
11. meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial;
12. meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial;
13. meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
14. meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
15. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
16. meningkatkan pemberdayaan perempuan;
17. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
18. meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat;
19. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
20. meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak hanya mengagendakan rencana pembangunan, namun juga mencakup semua program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tahapan implementasi strategi dan arah kebijakan tahun 2013 – 2018 dalam rangka pencapaian visi dan misi disusun secara berkesinambungan selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. tahun pertama (2013 – 2014)

Pembangunan pada tahun pertama diarahkan untuk mempertahankan berbagai capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahun pertama, arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen koperasi dan UMKM, akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM, perbaikan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih, serta penguatan jati diri dan karakter daerah. Di samping itu dalam peningkatan infrastruktur telah diupayakan pendekatan kewilayahan, dimana tahun 2014 diprioritaskan pada Kecamatan Kota, Kecamatan Jati dan Kecamatan Dawe.

Sejalan dengan tahapan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD, maka tahun pertama RPJMD Kabupaten Kudus 2013 – 2014 berada pada tahap kedua (2010 – 2014) RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025 yang ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas SDM termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dengan demikian kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada pengembangan pembangunan di segala bidang.

2. tahun kedua (2014 – 2015)

Pada tahun kedua, fokus pembangunan lebih diarahkan pada percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada tahun kedua, arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM, perbaikan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, penguatan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih, serta pengembangan karakter daerah. Di samping itu dalam peningkatan infrastruktur telah diupayakan pendekatan kewilayahan, dimana tahun 2015 diprioritaskan pada Kecamatan Jekulo, Kecamatan Undaan dan Kecamatan Gebog. Selain itu pembangunan pada tahun kedua juga diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

Tahun kedua RPJMD Kabupaten Kudus 2013 – 2014 berada pada tahap ketiga (2014 – 2019) RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025 yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

3. tahun ketiga (2015 – 2016)

Pembangunan pada tahun ketiga diarahkan untuk melanjutkan tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Pada tahun ketiga, arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk pengembangan fasilitasi permodalan UMKM dan perluasan pemasaran produk UMKM, peningkatan mutu pendidikan, perluasan pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan infrastruktur dan sarpras penunjang, penguatan birokrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik serta pelestarian budaya daerah. Di samping itu dalam peningkatan infrastruktur telah diupayakan pendekatan kewilayahan, dimana tahun 2016 diprioritaskan pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae. Fokus pembangunan tahun ketiga diarahkan untuk percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran pembangunan pada 4 (empat) pilar pembangunan. Sebagaimana tahun kedua yang berada pada tahap ketiga RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, maka kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada penguatan pembangunan dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja sasaran untuk mencapai tujuan pada misi pembangunan.

4. tahun keempat (2016 – 2017)

Pada tahun keempat, fokus pembangunan mulai diarahkan pada perwujudan visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera”. Proses percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran tetap diarahkan sejalan dengan penguatan 4 (empat) pilar pembangunan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Percepatan penurunan kesenjangan antar wilayah ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan prasarana wilayah lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya ungkit sektor – sektor unggulan daerah dalam pembangunan yang menyeluruh. Selain itu pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global.

5. tahun kelima (2017 – 2018)

Tahun kelima sebagai akhir periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018, lebih difokuskan pada perwujudan visi “Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera” yang telah dirintis pada tahun sebelumnya. Tolok ukur pencapaian visi tersebut berdasarkan berbagai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi sehingga tujuan akhir “Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera” dapat dicapai.

Keterkaitan antara Misi dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, dapat dijabarkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
1. Pemberdayaan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan	a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM	Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM	Tahun 2013-2014 : <ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja pembangunan sebelumnya • Difokuskan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen koperasi dan UMKM, akses permodalan UMKM, perluasan jaringan pemasaran produk UMKM, perbaikan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih, serta penguatan jatidiri dan karakter daerah
		b. Meningkatnya akses pasar produk UMKM	Peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM	Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM	
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal	a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mempertahankan tuntas wajib belajar 9 tahun serta memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah	
		b. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
		c. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Perbaiki ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas SDM termasuk iptek serta penguatan daya saing perekonomian. • Fokus Kecamatan Kota, Jati, Dawe <p>Tahun 2014 - 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan pada percepatan pencapaian target MDG's • Difokuskan untuk peningkatan akses permodalan UMKM, perluasan jaringan pemasaran produk UMKM, perbaikan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, penguatan birokrasi, pengembangan karakter daerah
		d. Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien	Perbaiki kualitas manajemen pendidikan	Mengoptimalkan pelayanan pendidikan	
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	- Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan	
			- Pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD	- Meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD	
			- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan	- Meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan	
			- Penurunan angka kesakitan	- Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular	
			- Peningkatan mutu sumber daya kesehatan	- Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan	
			- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan	- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
			- Pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV AID dan PMS	<ul style="list-style-type: none"> • Ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. • Fokus Kecamatan Jekulo, Undaan, Gebog
		b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	- Peningkatan gizi masyarakat	- Meningkatkan cakupan pengetahuan gizi	
			- Peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga	- Meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang syarat kesehatan makanan	
			- Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil	- Meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil	
			- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat	
	2. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatkan promosi, pelayanan dan advokasi keluarga berencana	
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh	Pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja	a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Peningkatan kinerja sektor industri	- Meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha	
				- Meningkatkan jejaring pemasaran	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
		b. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja	Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja	- Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja	Tahun 2015 - 2016 : <ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan untuk melanjutkan tahapan pembangunan tahun sebelumnya • Difokuskan untuk pengembangan fasilitasi permodalan UMKM dan perluasan pemasaran produk UMKM, peningkatan mutu pendidikan, perluasan layanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, penguatan birokrasi dan layanan publik, pelestarian budaya daerah • Kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada penguatan pembangunan dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja sasaran untuk mencapai tujuan pada misi pembangunan • Fokus Kecamatan Kaliwungu, Mejobo, Bae
				- Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja	
		c. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja	Pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi	Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan	
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing	1. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah	a. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata	Peningkatan kinerja sektor pariwisata	Meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi pariwisata	
		b. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	- Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif	- Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif	
			- Peningkatan pengawasan barang bersubsidi	- Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi	
			- Peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor	- Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor	
	2. Peningkatan peran sektor pertanian	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	Revitalisasi pertanian	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	a. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan	- Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah	- Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah	Tahun 2016 - 2017 : <ul style="list-style-type: none"> • Mulai diarahkan pada perwujudan visi yaitu Terwujudnya masyarakat Kudus yang semakin sejahtera. • Sejalan dengan penguatan 4 pilar pembangunan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. • Percepatan penurunan kesenjangan antar wilayah ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan prasarana wilayah untuk mendukung pertumbuhan berbagai sektor pembangunan. • Difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global
				- Meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air	
			- Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen transportasi	
			- Pemanfaatan energi terbarukan	Melakukan penghematan energi tidak terbarukan	
		b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni	Melakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman	
	2. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan	a. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup	Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup	- Meningkatkan tutupan lahan	
				- Meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan	
				- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
				- Meningkatkan pengendalian pertambangan	Tahun 2017 - 2018 : <ul style="list-style-type: none"> Difokuskan pada perwujudan visi Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera yang telah dirintis pada tahun sebelumnya. Penguatan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi sehingga tujuan akhir Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera dapat dicapai.
		b. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu	
		c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	
	3. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang	Menyelenggarakan penataan ruang	
	4. Perwujudan tertib pertanahan	Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Peningkatan kepastian hukum atas tanah	Meningkatkan penatagunaan tanah	
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	- Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan	- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	
			- Peningkatan pemenuhan data statistik	- Meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik	
		b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih	Melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
		c. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	- Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian	- Meningkatkan penerapan SPIP	
			- Peningkatan pengendalian pembangunan	- Meningkatkan pengendalian pembangunan	
			- Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemda	- Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM	
		d. Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Peningkatan pendidikan SDM legislatif	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif	
	2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	- Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	
			- Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa	- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa	
	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil	Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	
		b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
		c. Meningkatnya pelayanan bidang ketransmigrasian	Peningkatan kesempatan kerja antar daerah	Memperluas kesempatan kerja antar daerah	
		d. Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah	Peningkatan kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	
		e. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah	Meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah	
	4. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi	
		b. Terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat	- Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan	- Melakukan penataan peraturan perundang-undangan	
			- Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	- Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah	
		c. Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Percepatan penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana	
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial	1. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama	Peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama	Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan	
	2. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
		b. Meningkatkan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	- Optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	- Meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah	
			- Peningkatan pelestarian benda cagar budaya	- Meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya	
	3. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan	a. Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan	Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga dan pemuda	
		b. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba	Penguatan moral pemuda	Meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba	
	4. Pewujudan pembangunan yang berkeadilan sosial	a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	- Penurunan jumlah keluarga miskin ,	- Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin	
			- Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal	- Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal	
			- Penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma	- Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan trauma	
			- Penyediaan sarpras panti singgah	- Meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar dan lansia	
			- Peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial	- Meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
			- Peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan PMKS	- Meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial	
		b. Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak	- Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	- Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	
			- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
			- Penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan anak	- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	
			- Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan	
	5. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial	a. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	- Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	
			- Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat	- Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
1	2	3	4	5	6
			- Peningkatan pengetahuan aparaturn pemerintahan desa	- Meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	
		b. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2014 (diolah)

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2013–2018 Kabupaten Kudus perlu dituangkan ke dalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang dipilih dengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sedangkan untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Renstra SKPD. Namun demikian, untuk landasan pelaksanaannya agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD, maka program yang terkait penyelenggaraan SPM maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Bab VIII tentang Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan yang disertai dengan target capaian program untuk 5 (lima) tahun.

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Kebijakan umum yang terkait dengan Pemberdayaan UMKM dan koperasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Potensi ekonomi yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan diberdayakan adalah potensi usaha kecil menengah yang mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan produk berdaya saing. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi diharapkan berdampak luas bagi pengembangan potensi ekonomi lain yakni perdagangan, perbankan, transportasi, dan sebagainya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah dan koperasi yang telah dilakukan Pemerintah dengan menetapkan beberapa peraturan, yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, perlu dikaji lebih lanjut dari aspek 1) perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah, 2) alternatif pemecahan masalah

pengusaha kecil dan menengah untuk mengatasi/menghilangkan kendala-kendala yang dihadapi, dan 3) peranan yang dapat diberikan kepada usaha kecil dan menengah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan umum yang terkait dengan pemberdayaan UMKM meliputi :

- a. pengembangan koperasi dan UMKM yang berdaya saing; dan
- b. pendampingan dan Pengembangan pemasaran hasil produk UMKM.

2. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.

Mulai tahun 2013, pemerintah Indonesia merintis program pendidikan menengah universal atau pendidikan 12 tahun yang diharapkan tuntas pada 2025. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerapkan wajib belajar 12 tahun sejak tahun ajaran 2008/2009. Diharapkan pada 2025 seluruh angkatan kerja minimal berpendidikan sekolah menengah, sehingga dapat memperbaiki struktur angkatan kerja dan tingkat pendidikan, dimana saat ini komposisi penduduk yang bekerja masih didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun demikian, masih perlu kebijakan yang tepat dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak. Terdapat dua syarat untuk memajukan pendidikan anak, pertama secara progresif dan kedua perlu ada kesetaraan (*on the basis of equal opportunity*).

Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas meliputi :

- a. peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar, pendidikan menengah;
- b. peningkatan pemerataan pelayanan PAUD;
- c. peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal; dan
- d. pengembangan manajemen pelayanan pendidikan.

3. Kebijakan umum yang terkait dengan tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

Pembangunan kesehatan yang diproyeksikan (murah atau terjangkau) merupakan fokus misi, yang membawa konsekuensi perlunya peningkatan pelayanan kesehatan. Namun keberadaan rumah sakit swasta yang modern dan berkelas masih diperlukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan mandiri ataupun yang bermitra dengan perusahaan ataupun asuransi. Tapi "tantangan" kesehatan murah dan terjangkau harus tetap dilaksanakan sejalan dengan kebijakan perluasan jangkauan jaminan sosial.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kudus sekitar 780 ribu, perlu diperhitungkan proporsi yang perlu dijamin dalam jaminan sosial. Mulai Januari 2014, melalui BPJS jangkauan layanan kesehatan diperluas. Hal ini semakin menuntut peningkatan pelayanan kesehatan yang juga berkaitan dengan masalah jenis penyakit yang harus dijamin dan daya tampung rumah sakit yang wajib disediakan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dinamika kependudukan dan kesehatan dalam program pasca *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015. Pendekatan untuk mengurangi tingkat fertilitas dengan pilihan sukarela harus menjadi prioritas pembangunan kesehatan berkelanjutan, diantaranya melalui investasi manusia sebagai modal sepanjang siklus hidup, khususnya akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau meliputi :

- a. peningkatan pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan;
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 - d. pemenuhan standar pelayanan kesehatan;
 - e. peningkatan pelayanan kesehatan di RSU;
 - f. peningkatan upaya komunikasi, informasi dan edukasi tentang HIV AIDS dan PMS;
 - g. peningkatan kesehatan ibu, balita dan anak;
 - h. peningkatan industri makanan rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan;
 - i. peningkatan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - j. peningkatan pelayanan Keluarga Berencana.
4. Kebijakan umum yang terkait dengan perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Pola ideal perlindungan usaha kecil adalah penyederhanaan izin dan prosedur pengurusannya, peningkatan penyaluran kredit lunak oleh Bank Pembangunan Daerah melalui kredit usaha mikro paket dana bergulir, agar dapat dimanfaatkan oleh semua usaha mikro, kecil, dan usaha dan menengah. Di samping itu Pemerintah perlu secara proaktif bermitra dalam rangka meningkatkan jejaring usaha kecil, menengah dengan usaha besar untuk pemanfaatan dana CSR. Sebagian pengusaha kecil yang mengalami kendala dalam pengelolaan usaha mereka, berkaitan dengan faktor-faktor modal, pengetahuan hukum dan kebijaksanaan pemerintah, kondisi

birokrasi pemerintah, sarana pendukung dan latar belakang sosial budaya pengusaha bersangkutan.

Kebijakan umum yang terkait dengan perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh, meliputi :

- a. peningkatan produksi dan produktivitas industri;
 - b. pendampingan pada pelaku usaha;
 - c. pembinaan industri kecil;
 - d. perluasan akses pemasaran;
 - e. peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - f. penguatan lembaga ketenagakerjaan dan perlindungan ketenagakerjaan;
 - g. peningkatan iklim investasi yang kondusif; dan
 - h. peningkatan pelayanan perijinan investasi.
5. Kebijakan umum yang terkait dengan meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing
- a. pengembangan kerjasama promosi pariwisata;
 - b. peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;
 - c. peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perdagangan kecil;
 - d. peningkatan pengawasan peredaran barang-barang strategis/kebutuhan pokok masyarakat;
 - e. peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan;
 - f. fasilitasi prosedur ekspor;
 - g. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani;
 - h. peningkatan kelestarian sumber daya kehutanan;
 - i. peningkatan kelestarian sumber daya perikanan; dan
 - j. peningkatan ketahanan pangan.
6. Kebijakan umum yang terkait dengan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Pembangunan infrastruktur memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan infrastruktur yang baik, maka akan mendorong pelaku-pelaku ekonomi beraktivitas lebih ekonomis, sehingga mampu menciptakan *long scale economic advantages* secara simultan. Namun demikian, mengingat keterbatasan sumberdaya alam yang ada, pelaku pembangunan baik masyarakat, pemerintah maupun swasta dituntut pula untuk bijaksana, sehingga harus memperhatikan pola tata ruang yang telah diatur agar arah pembangunan lebih jelas. Selain itu pembangunan harus berwawasan lingkungan yaitu mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan sehingga merosotnya kualitas lingkungan sebagai dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir. Hal ini dikandung maksud pembangunan yang dilaksanakan harus berkelanjutan.

Kebijakan umum yang terkait pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan meliputi :

- a. peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana transportasi;
 - b. peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana sumber daya air dan pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP);
 - c. peningkatan sarana dan prasarana sistem drainase perkotaan;
 - d. peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan;
 - e. peningkatan pelayanan perhubungan;
 - f. peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana energi;
 - g. peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman layak huni;
 - h. peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH serta pengendalian pencemaran;
 - i. peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - j. peningkatan kemampuan deteksi dini bencana;
 - k. pencegahan kerusakan lingkungan;
 - l. peningkatan pelayanan persampahan;
 - m. peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. peningkatan efektifitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pembangunan daerah; dan
 - o. peningkatan fasilitasi dan koordinasi penatagunaan tanah.
7. Kebijakan umum yang terkait dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dibutuhkan suatu sarana dan lingkungan yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Dari sisi aparatur pemerintah Kabupaten Kudus, perlu dibangun tata kelola pemerintahan yang baik sebagai sarana untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Suatu pemerintahan yang baik dapat terwujud jika dapat dibangun aspek-aspek *good governance* yaitu terbangunnya akuntabilitas yang baik, adanya transparansi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kebijakan umum yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kudus meliputi :

- a. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. peningkatan kualitas data;
- c. peningkatan kompetensi, keahlian dan ketrampilan SDM aparatur;
- d. peningkatan kinerja pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH;
- e. peningkatan manajemen pengendalian pembangunan;
- f. peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus;
- g. peningkatan profesionalisme SDM legislatif;

- h. intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - i. peningkatan pengelolaan keuangan desa;
 - j. peningkatan kecepatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - k. peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan bidang informasi dan komunikasi;
 - l. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi;
 - m. peningkatan pelayanan bidang ketransmigrasian;
 - n. peningkatan pelayanan bidang pemerintahan umum;
 - o. peningkatan fasilitasi kerjasama antar daerah;
 - p. peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat;
 - q. peningkatan pembinaan masyarakat dalam kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - r. peningkatan penataan dan kajian peraturan perundang-undangan;
 - s. penataan kelembagaan perangkat daerah; dan
 - t. peningkatan kesiapsiagaan penanganan korban bencana.
8. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Dalam melaksanakan pembangunan, setiap komponen masyarakat, baik aparatur, dunia usaha maupun masyarakat diharapkan dapat bekerja dengan berlandaskan akhlak dan nilai-nilai agama yang kuat. Di samping itu, dengan menjaga toleransi antar umat beragama, dapat menjaga ketentraman dan menciptakan kedamaian.

Kebijakan umum yang terkait dengan perwujudan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial di Kabupaten Kudus meliputi :

- a. peningkatan pembinaan orsosmas dalam kehidupan beragama;
- b. pengembangan identitas daerah;
- c. peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan;
- d. peningkatan perlindungan dan revitalisasi benda cagar budaya;
- e. penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;
- f. penguatan kelembagaan dan organisasi olahraga;
- g. peningkatan pembinaan kepemudaan;
- h. peningkatan pembinaan keluarga miskin, anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal;
- i. peningkatan pelayanan advokasi penyandang cacat dan trauma;
- j. peningkatan pelayanan orang terlantar dan lanjut usia;
- k. peningkatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial;
- l. peningkatan kinerja organisasi sosial;
- m. peningkatan kualitas kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak;

- n. peningkatan fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- o. peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus;
- p. peningkatan kapasitas kelompok usaha perempuan;
- q. peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;
- r. pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat;
- s. peningkatan pelayanan pemerintahan desa;
- t. peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya; dan
- u. pengembangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

7.2. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut :

Misi 1 : Pemberdayaan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; dan
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Misi 2 : Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas

Urusan Pendidikan :

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- b. Program Pendidikan Menengah;
- c. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Program Pendidikan Non Formal; dan
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Misi 3 : Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

1. Urusan Kesehatan :

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

- c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana; Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
 - d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
 - e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - h. Program Pelayanan Kesehatan BLUD;
 - i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - j. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
 - k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; dan
 - l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
2. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera :
- a. Program Keluarga Berencana;
 - b. Program Pelayanan Kontrasepsi; dan
 - c. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

Misi 4 : Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

- 1. Urusan Industri :
 - a. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - b. Program Penataan Struktur Industri;
 - c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
- 2. Urusan Ketenagakerjaan :
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
 - c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- 3. Urusan Penanaman Modal :
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Misi 5 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.

- 1. Urusan Ketahanan Pangan :
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- 2. Urusan Pertanian :
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
 - d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; dan
 - e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
3. Urusan Kehutanan :
- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; dan
 - b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
4. Urusan Pariwisata :
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
5. Urusan Kelautan dan Perikanan :
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
6. Urusan Perdagangan :
- a. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
 - b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;
 - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
 - d. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan; dan
 - e. Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Misi 6 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

1. Urusan Pekerjaan Umum :
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
 - e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
2. Urusan Perumahan :
- Program Pengembangan Perumahan.
3. Urusan Penataan Ruang :
- a. Program Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

4. Urusan Perhubungan :
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
5. Urusan Lingkungan Hidup :
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
 - e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
6. Urusan Pertanahan :

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
7. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral :

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Misi 7 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian :
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - c. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
 - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - h. Program pembinaan dan pengembangan Aparatur;
 - i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - j. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; dan
 - k. Program penataan peraturan Perundang-undangan.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan :
 - a. Program Pengembangan Data/Informasi;
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
 - f. Program pengembangan dan penelitian daerah.
3. Urusan Statistik :
Program pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah.
4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
5. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; dan
 - b. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media.
6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
 - d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; dan
 - e. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana.
7. Urusan Kearsipan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.
8. Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
9. Urusan Ketrasmigrasian
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Misi 8 : Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

1. Urusan Kebudayaan :
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
 - b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

- c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
 - d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
2. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga :
 - a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - c. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
 3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; dan
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
 4. Urusan Sosial :
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pembinaan Anak Terlantar;
 - d. Program peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama;
 - e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
 - f. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
 - g. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya); dan
 - h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 5. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :
 - a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 - b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
 - c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan
 - d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Guna melihat keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018, dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Kudus

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
MISI 1 : Pemberdayaan (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.									
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM	Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM	a) Cakupan UMKM yang difasilitasi	1,03	4,93	1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Din Perinkop & UMKM
				b) Jumlah UMKM	11.596	12.172	2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi dan UKM	Din Perinkop & UMKM
2	Meningkatnya akses pasar produk UMKM	Peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM	Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM	a) Jumlah pameran/ Expo produk UMKM	2	53	1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Din Perinkop & UMKM
				b) Jumlah UMKM yg terfasilitasi dalam pameran	72	360			
				c) Cakupan UMKM yg terfasilitasi dalam perkreditan	0	1,60			
				d) Jumlah UMKM yg terfasilitasi dalam pameran	15 UMKM	75 UMKM		Koperasi dan UKM	Kec Kaliwungu
					25 UMKM	125 UMKM			Kec Kota
					4 UMKM	20 UMKM			Kec Jati
					16 UMKM	80 UMKM			Kec Undaan
					5 UMKM	25 UMKM			Kec Mejobo
					6 UMKM	30 UMKM			Kec Jekulo
					6 UMKM	30 UMKM			Kec Bae
					11 UMKM	55 UMKM			Kec Gebog
					18 UMKM	90 UMKM			Kec Dawe

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
MISI 2 : Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.										
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mempertahankan tuntas wajib belajar 9 tahun serta memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah	a) APK SD/MI/Paket A	95%	100%	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora
				b) APK SMP/MTs/Paket B	95%	100%				
				c) APM SD/MI/Paket A	95%	> 95%				
				d) APM SMP/MTs/Paket B	95%	> 95%				
				e) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	> 95%	> 95%				
				f) Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	> 95%	> 95%				
				g) Bangunan SD/MI dalam kondisi baik	50%	60%				
				h) Bangunan SMP kondisi baik	91,22%	92,02%				
				i) Angka Putus Sekolah SD/MI	0,03%	0,02%				
				j) Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%	0,10%				
				k) Rata-rata Kelulusan SD/MI	99%	99%				
				l) Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	99%	99%				
				m) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%				
				n) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,00%	95%				
				o) Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6	6				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				p) Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3	3				
				q) Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah	76,5%	76,75%				
				r) Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah	27,76%	28,01%				
				s) APK SMA/MA/SMK/Paket C	86,79%	90%	2	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
				t) APM SMA/SMK/MA/Paket C	75%	80%				
				u) Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun	80%	85%				
				v) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,12%	0,11%				
				w) Rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA	99,00%	99,00%				
				x) Bangunan SMA/SMK kondisi baik	95,68%	95,98%				
				y) Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA (tahun)	3	3				
				z) Angka rata-rata lama sekolah SMK (tahun)	3	3				
2	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	50%	60%	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Disdikpora
3	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	a) Angka melek huruf	100%	100%	1	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Disdikpora
				b) Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	1	5				
4	Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien	Perbaikan kualitas manajemen pendidikan	Mengoptimalkan pelayanan pendidikan	Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan	100%	100%	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Disdikpora

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
MISI 3 : Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.										
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan	a) Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%	100%	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	DKK
				b) Cakupan puskesmas	211,10%	211,10%	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	DKK
				c) Cakupan puskesmas pembantu (pustu)	28,79%	28,79%				
				d) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%				
				e) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%				
				f) Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	100%	100%				
				g) Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	2,4	2,4				
				h) Rasio pustu per 100.000 penduduk	5,05	5,05				
				i) Angka usia harapan hidup (AHH)	69,68	69,70				
				j) Cakupan ketersediaan alat2 kesehatan	100%	100%			Kesehatan	BLUD
				k) Terpenuhinya kebutuhan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya	100%	100%	3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	DKK
		b. Pemenuhan alat-alat kesehatan di RSUD	Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD	Cakupan ketersediaan alat2 kesehatan	23%	100%	1	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	BLUD
		c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan	Meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan	a) Cakupan desa siaga aktif	30%	55%	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	DKK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				b) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%				
				c) Rasio posyandu per satuan balita	87	44				
		d) Penurunan angka kesakitan	Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular	a) Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	DKK
				b) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	69%	> 70%				
				c) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%				
				d) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :						
				1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	≥ 2	≥ 2				
				2) Penemuan penderita pneumonia balita	100%	100%				
				3) Penemuan penderita diare	100%	100%				
				e) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%				
				f) Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	58	≤ 20				
				g) Persentase penderita HIV AIDS yang tertangani	100%	100%				
				h) Prevalensi HIV	2,3/100.000	< 9/100.000				
				i) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular	-	56%				
		e. Peningkatan mutu sumber daya kesehatan	Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan	a) Pelayanan perijinan bidang kesehatan	12 bulan	12 bulan	1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	DKK
				b) Cakupan puskesmas yang telah terakreditasi	-	19 Pusk				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				c) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah penduduk)	1,26	1,26				
				d) Rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk	3,42	3,47				
		f. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan	Cakupan pelayanan BLUD	100%	100%	1	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Kesehatan	BLUD
		g. Pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV AID dan PMS	Jumlah penemuan penderita HIV AIDS	40 orang	40 orang	1	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	KB & KS	BPMPKB
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	a. Peningkatan gizi masyarakat	Peningkatan cakupan pengetahuan gizi	a) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	DKK
				b) Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%				
				c) Prevalensi balita gizi buruk	0,76%	0,70%				
				d) Prevalensi balita gizi kurang	5,82%	5,60%				
		b. Peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga	Meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang syarat kesehatan makanan	Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	7,69%	8,07%	1	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kesehatan	DKK
		c. Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil	Meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil	a) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	133,68	96	1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	DKK
				b) Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	96,2%				
				c) Cakupan pelayanan nifas	90%	96,5%				
				d) Cakupan peserta KB aktif	79,0%	82%				
				e) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,0%	100%				
				f) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90,0%	100%				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				g) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,0%	96%				
				h) Cakupan kunjungan neonatal pertama	100%	100%				
				i) Angka kematian bayi per 1000 KH	6,9	6,5				
		d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat	a) Cakupan penduduk menggunakan air bersih	79%	90%	1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	DKK
				b) Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat	69%	83%				
				c) Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	71%	82%				
				d) Cakupan rumah sehat	72%	82%				
				e) Cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	70%	82%				
3	Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatkan promosi, pelayanan dan advokasi keluarga berencana	a) Cakupan peserta KB aktif	82,35%	83,45%	1	Program Keluarga Berencana	KB & KS	BPMPKB
				b) Persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I	31,31%	31,29%				
				c) Cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW)	100%	100%	2	Program Pelayanan Kontrasepsi	KB & KS	BPMPKB
MISI 4 : Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.										
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Peningkatan kinerja sektor industri	1) Meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha	a) Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha	1,15	11	1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Industri	Perinkop & UMKM
				b) Jumlah bina KUB	0	250				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				c) Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,02	0,04	2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	Perinkop & UMKM
				d) Jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan	0	80				
				e) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	62,41	62,6				
				f) Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi	0	80	3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri	Perinkop & UMKM
				g) Jumlah Industri rokok yang telah mengujikan tar dan nikotin	0	10				
			2) Meningkatkan jejaring pemasaran	a) Jumlah kluster yang memiliki tempat pameran	0	3	1	Program Penataan Struktur Industri	Industri	Perinkop & UMKM
				b) Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran	4	50				
2	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja	1) Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja	a) Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	0,14	1,11	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans
				b) rasio ketergantungan penduduk	45,37	45,31				
				c) Jumlah pencari kerja terdaftar	8.131 orang	75.000 orang	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans
				d) Jumlah pencari kerja ditempatkan	4.254 orang	22.500 orang				
				e) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,89	78,28				
				f) Tingkat Pengangguran Terbuka	5,75	5,55				
				g) Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara	360 orang	5400 orang				
			2) Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	25 kasus	1	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
3	Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja	Pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi	Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan	a) Jumlah investor	9	19	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KPPT
				b) Jumlah penerbitan ijin investasi	12	72			
				c) Jumlah Investor berskala Nasional	11	16	2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	KPPT
				d) Jumlah nilai investasi berskala nasional (dlm juta)	167.390	213.637			
				e) Daya serap tenaga kerja	33.762	43.089			
				f) Kenaikkan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	7.511	11.815			
				g) Jumlah lembaga keuangan bank/non bank	57	117			
				h) Lama proses perijinan	10 hari	10 hari			
MISI 5 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing									
1	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Peningkatan kinerja sektor pariwisata	Meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi pariwisata	a) Kunjungan wisata	1.178.835	1.459.510	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Disbudpar
				b) % Kenaikan PAD sektor pariwisata	7,00	7,00			
				c) Jenis ,kelas dan	2 ,4	2 ,4			
				d) jumlah rumah Makan /Restoran	7, 1	28, 6			
				e) Jenis, kelas dan	2, 6	2, 6			
				f) jumlah Penginapan/Hotel	24	51,00			
				g) Terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata	0	100%	2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Disbudpar
				h) Jumlah obyek wisata	10	12			
				i) Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan)	2.368.399	3.444.944			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	a. Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif	Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif	a) Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual	-	30 temuan	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Diperdagsar
				b) Jumlah pengaduan konsumen	3 aduan	5 aduan				
		b. Peningkatan pengawasan barang bersubsidi	Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi	a) Jumlah Rakor Ekuinda	2 kali	10 kali	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Bag Perekonomian
				b) Operasional Raskin		36,332RTS				
				c) cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (Jumlah PKL dan Asongan)	975 PKL	1.500 PKL	2	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Perdagangan	Diperdagsar
				d) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	-	53.181.696				
				e) Cakupan pembinaan pasar tradisional	-	930				
				f) Persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar	(4,27)	15,38				
				g) cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional)	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los				
				h) Jumlah pasar daerah dan pasar desa	23 unit	23 unit				
				i) terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan	100%	100%				
				j) partisipasi dalam pasar lelang		4 kali				
				k) tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat	96 kali	480 kali				
				l) terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri		115 org				
				m) terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis	4 kali	20 kali				
				n) terlaksananya temu usaha	-	55 unit				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		c. Peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor	Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor	a) Ekspor bersih perdagangan (Juta Rupiah)	(1.432.954)	211.625.641	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Diperdagsar
				b) cakupan bina calon eksportir	-	43 org			
				c) Jumlah peserta pameran UMKM skala regional	12 unit	70 unit			
				d) Jumlah pedagang pasar tradisional	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	2 Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Perdagangan	Diperdagsar
				e) Jumlah PKL dan Asongan	975 PKL	1.500 PKL			
3	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	Revitalisasi pertanian	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan	a) Peningkatan Nilai Tukar Petani	105,61	107,11	1 Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Distanhut
				b) Peningkatan produktifitas tanaman	5,75%	6%	2 Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan	Pertanian	Distanhut
				c) peningkatan produksi asal ternak	3.586.454 kg	5.038.904 kg	3 Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Distanhut
				d) Persentase cakupan bina kelompok tani	50%	100%	4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	Pertanian	Distanhut
				e) Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran	70 %	100 %	5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Pertanian	Distanhut
				f) Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan (Ha)	25	125	6 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kehutanan	Distanhut
				g) Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	300	2.750	7 Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Distanhut
				h) Produksi ikan kelompok pembudidaya (ton)	1.770	2.157	8 Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Distanhut

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
				i) Regulasi Ketahanan Pangan	-	-	9 Program peningkatan ketahanan pangan	Ketahanan pangan	Kantor Ket Pangan
				j) Ketersediaan Pangan Utama	91	100			
				k) Ketersediaan energi dan Protein Per Kapita	61	100			
				l) Penguatan Cadangan Pangan	64	90			
				m) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	86	100			
				n) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	70	100			
				o) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89	95			
				p) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	79	85			
				q) Penanganan Daerah Rawan Pangan	67	75			
MISI 6 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.									
1	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan	a. Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah	1) Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah	a) Panjang jalan kabupaten yang dibangun	-	9.490 m	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PU	BPESDM
				b) Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	-	4 unit			
				c) Persentase rumah tinggal bersanitasi	93,17%	95,53%	2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	PU	Cikataru
				d) Panjang jalan perdesaan yang dibangun	32,250 km	664 km			
				e) Jumlah jembatan perdesaan yang dibangun	7 unit	66 unit			
				f) Cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	83%	87%			
				g) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	16 km	21 km	3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	PU	Cikataru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				h) Penyediaan Gedung kantor terpadu	0	100%				
			2) Meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air	a) Persentase Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	59,50%	65,00%	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	PU	BPESDM
				b) Sistem informasi/database jaringan irigasi	20%	100%				
				c) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	65,70%	65,80%				
				d) Berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya	100%	100%	2	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	PU	BPESDM
				e) Embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik	40%	100%				
		b. Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen transportasi	a) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,86	1,39	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Hubkominfo
				b) Jumlah Terminal Bis	5 lokasi	6 lokasi	2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Hubkominfo
				c) Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%				
				d) Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	1.125.289 orang	5.970.876 orang				
				e) Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kab	57,14%	93,01%	3	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Hubkominfo
				f) Pemasangan rambu-rambu	2,22%	28,88%				
				g) Rasio izin trayek	0,000733	0,000775	4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Hubkominfo

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				h) Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab	60,14%	62,59%				
				i) Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%				
				j) Persentase angkutan darat	16,08%	16,27%				
				k) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	35.600 orang	35.600 orang				
		c. Pemanfaatan energi terbarukan	Penghematan energi tidak terbarukan	a) Berfungsinya LPJU	100%	100%	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	ESDM	BPESDM
				b) Rasio elektrifikasi tingkat desa	100%	100%				
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni	Penataan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rumah layak huni	87,63%	90,41%	1	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	CKTR
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup	Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup	1) Meningkatkan tutupan lahan	a) Proporsi RTH Publik	5,0%	9%	1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	LH	Cikataru
				b) Meningkatnya luas tutupan lahan	0,37%	0,84%	2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	LH	Kantor LH
				c) Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	40%	100%				
				d) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,21%	0,45%	3	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	LH	Kantor LH
			2) Meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan	a) Pencegahan pencemaran air	100%	100%	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	LH	Kantor LH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				b) Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100%	100%				
				c) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup	100%	100%				
				d) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	100%				
			3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana	Jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau	5 desa	6 desa	1	Program Mitigasi Bencana alam tanah longsor	ESDM	BPESDM
			4) Meningkatkan pengendalian pertambangan	a) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,03	0,03	1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	ESDM	BPE
				b) Jumlah pertambangan berijin	3 lokasi	5 lokasi				
				c) Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	100%	100%				
				d) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	100%	100%				
4	Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu	a) Persentase penanganan sampah	84,6%	89%	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	LH	CKTR
				b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,270	0,454				
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	Penyediaan akses informasi lingkungan	100%	100%	1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	LH	Kantor LH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
6	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang	Menyelenggarakan penataan ruang	a) Jumlah dokumen tata ruang	-	9 dokumen	1 Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Cikataru
				b) Jumlah dokumen tata ruang	-	7 dokumen		Penataan Ruang	Bappeda
				c) Jumlah rancangan perda tata ruang	6 raperda	10 raperda			
				d) Penyebarluasan informasi penataan ruang	100%	100%			
				e) Pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	100%	100%			
				f) Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang	1 dokumen	5 dokumen	2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Cikataru
				g) Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang	12 kali	20 kali			
7	Peningkatan pengelolaan pertanahan	Peningkatan kepastian hukum atas tanah	Meningkatkan penatagunaan tanah	a) Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten	-	1.961.935,195 m2	1 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pertanahan	Cikataru
				b) Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten		5.186 m2		Pertanahan	Hubkominfo
				c) Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten		124.500 m2		Pertanahan	BPESDM
				d) persentase luas lahan bersertifikat	-	27,25%		Pertanahan	Bag pengelolaan Aset Daerah
				e) Persentase luas lahan bersertifikat	0%	0,15%		Pertanahan	Kel Wergu Kulon

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
MISI 7 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	a) Persentase keterisian data/informasi	60 %	80 %	1 Program Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan pembangunan	Bappeda
				b) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 dokumen	50 dokumen	2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan	Bappeda
				c) Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	1 dokumen	6 dokumen			
				d) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	95 %			
				e) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dokumen	12 dokumen	3 Program perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan pembangunan	Bappeda
				f) Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP	6 klaster	9 klaster			
				g) Jumlah dokumen perencanaan sosbud	3 dokumen	22 dokumen	4 Program perencanaan sosial dan budaya	Perencanaan pembangunan	Bappeda
				h) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	2 dokumen	9 dokumen	5 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan pembangunan	Bappeda
				i) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air	100%	100%			
				j) Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah		8 dokumen	6 Program pengembangan dan penelitian daerah	Perencanaan pembangunan	Bappeda
		b. Peningkatan pemenuhan data statistik	Meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik	Jumlah data/informasi statistik daerah	5 dokumen	7 dokumen	1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Statistik	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih	Melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur	a) Rasio Pejabat struktural yang mengikuti diklatpim	13.6	45.92	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Otonomi Daerah	BKD
				b) Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab	-	985 orang			
				c) Rasio penanganan pelanggaran disiplin	0,00	0,80	2 Program pembinaan dan pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah	BKD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				d) Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi	12.603	61.029				
				e) Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK	4 SKPD	36 SKPD		Otonomi Daerah	Bag orpeg	
				f) Tersedianya Pedoman IKM	44 SKPD	44 SKPD				
				g) Jumlah unit pelayanan yang sudah di SKM	12 unit pelayanan	40 unit pelayanan				
3	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	a. Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian	Meningkatkan penerapan SPIP	a) Persentase penyelesaian TLHP Reguler	100%	100%	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah	Inspektorat
				b) Persentase penyelesaian penanganan kasus	100%	100%				
				c) Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi	100%	100%				
				d) Persentase terpenuhinya laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)	100%	100%	2	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Otonomi Daerah	Inspektorat
				e) Persentase terlaksananya PMPRB	100%	100%				
				f) Persentase tersusunnya SOP	100%	100%				
				g) Persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP	100%	100%				
		b. Peningkatan pengendalian pembangunan	Meningkatkan pengendalian pembangunan	a) Persentase pengendalian, monev dan pelaporan kegiatan SKPD	100%	100%	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah	Bag Dalbang
				b) Persentase sistem informasi jasa konstruksi	100%	100%				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				c) Fasilitasi proses pengadaan barang / jasa	0%	90%				
				d) Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi	10 hari	10 hari				
		c. Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemda	Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	100 %	100%	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah	Bag Hukum
4	Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Peningkatan pendidikan SDM legislatif	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif	Jumlah Perda yang ditetapkan	18 perda	90 perda	1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Otonomi Daerah	Set DPRD
5	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	a) Opini laporan keuangan (WTP, WDP)	100%	100%	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah	DPPKD
				b) Peningkatan PAD (%)	19,61%	17,94%				
				c) Jumlah dokumen standart satuan harga	1 dok	5 dok				Bag orpeg
				d) Persentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib	100%	100%				Bag Aset
		b. Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa	a) Persentase tertib administrasi keuangan desa	45 %	70%	1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Otonomi Daerah	Bag Pemdes
				b) Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%				9 Kecamatan
6	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil	Pengembangan system informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	a) Rasio bayi berakte kelahiran	83%	100%	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan & catatan sipil	Dukcapil
				b) Rasio pasangan berakte nikah	13%	18%				
				c) Kepemilikan e-KTP	93,50%	100,00%				
				d) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	687	950				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
				e) Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	100%	100%			
				f) Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%		Kependudukan & catatan sipil	9 Kecamatan
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan	a) Persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik	75%	100%	1	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Dukcapil
				b) Pengelolaan arsip secara baku	20 desa	192 desa/SKPD/kelurahan		Kearsipan	Kt Perpus & Arsip
				c) Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat)	165 perpus	184 perpus	2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kt Perpus & Arsip
				d) Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	1 kali	5 kali	3	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Bag Tapem
				e) Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	177 kali	493 kali		Komunikasi & informatika	Bag Humas
				f) Jumlah surat kabar nasional dan lokal.	9 media	9 media			
				g) Jumlah publikasi kegiatan dewan	1,500 eks	9,000 eks		Komunikasi & informatika	Set DPRD
				h) Jumlah sarana media publikasi	2 jenis	2 jenis		Komunikasi & informatika	Kec Undaan
				i) Jumlah website milik pemerintah daerah	17 web	18 web		Komunikasi & informatika	Dishub
				j) Jumlah surat kabar nasional dan lokal.	11 surat kabar	12 surat kabar			
				k) Jumlah penyiaran radio/tv lokal yang sesuai standar penyiaran	24 stasiun	24 stasiun			
				l) Pameran/expo	1 kali	5 kali			
				m) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV)	275 kali	1.506 kali			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				n) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online)	setiap hari	setiap hari				
				o) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)	23 kali	23 kali				
				p) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan)	4 kali tiap kecamatan	4 kali tiap kecamatan				
				q) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)	2 kali	12 kali				
				r) Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%				
				s) Jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Pemkab	84 kali	360 kali	4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Otonomi Daerah	Bag Humas
				t) Jumlah Sosialisasi cukai melalui media	-	5 paket				
				u) Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi	2 unit	7 unit	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi & informatika	Bag Humas
				v) Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah	3 dokumen	2 dokumen				Bappeda
				w) Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi	11 dokumen	13 dokumen				Dishub
8	Meningkatnya pelayanan bidang ketransmigrasian	Peningkatan kesempatan kerja antar daerah	Memperluas kesempatan kerja antar daerah	Jumlah calon transmigran terlayani	10 KK	140 KK	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketransmigrasian	Dinsosnakertrans

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
9	Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah	Peningkatan kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	a) Jumlah rapat koordinasi pimpinan	6 kali	30 kali	1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Otonomi Daerah	Bag Tapem
				b) Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja	25 kali	125 kali			
				c) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus	1 kali	1 kali			
				d) Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi Bupati di Desa/Kelurahan	28 kali	152 kali			Bag Pemdes
				e) Jumlah rapat koordinasi pimpinan	11 kali	55 kali			Bag orpeg
				f) Meningkatnya Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%			Bag. Umum
10	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah	Meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah	Persentase fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	-	100%	1 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Otonomi Daerah	Bag Tapem
11	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi	a) Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	70%	85%	1 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbangpol	Kesbangpol
				b) Jumlah pembinaan politik daerah	1 kali	5 kali			
				c) Jumlah pendidikan politik masyarakat	1 kali	19 kali			
				d) Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	25 buku	60 buku			Bag Tapem
				e) Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%			9 Kecamatan
				f) Persentase penurunan konflik di daerah	75%	75%	2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesbangpol	Kesbangpol
				g) Rasio linmas per 10.000 penduduk	59 orang	59 orang			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
				h) Persentase penanganan gangguan keamanan		75%			
				i) Persentase Penurunan tindak kriminalitas di daerah	80%	10%		Kesbangpol	Satpol PP
				j) jumlah aduan masyarakat tiap bulan	18	15			
				k) Persentase pelanggar HO	80%	60%			
				l) Persentase pelanggar Perda	80%	60%			
				m) Jumlah satgas siaga bencana	50 orang	60 orang		Kesbangpol	BPBD
				n) Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)	100%	100%			9 Kelurahan
				o) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	40%	40%			Kel. Purwosari
				p) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	70%	86%			Kel. Sunggingan
				q) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kel. Panjunan
				r) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	40%	40%			Kel. Wergu Wetan
				s) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	40%	40%			Kel. Wergu Kulon
				t) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	40%	25%			Kel. Mlati Kidul
				u) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	47%	38,9%			Kel. Mlati Norowito
				v) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	75%	75%			Kel. Kerjasan
				w) Penurunan kasus pelanggaran trantibum dan kriminalitas	40%	40%			Kel. Kajeksan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
				x) Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah	12 kali	60 kali	3 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesbangpol	Kesbangpol
				y) Jumlah demo, angka kriminalitas dan penegakan perda		10 kali			Satpol PP
				z) Rasio pol PP per 10.000 penduduk	0,7948	0,7948			
				aa) Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal	0	24 kali			
				ab) Cakupan patroli petugas Satpol PP	100%	100%			9 Kecamatan
				ac) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Kaliwungu
				ad) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Kota
				ae) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Jati
				af) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Undaan
				ag) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Mejobo
				ah) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Jekulo
				ai) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Bae
				aj) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Gebog

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				ak) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%			Kec Dawe	
12	Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat	a. Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan	Melakukan penataan peraturan perundang-undangan	a) Jumlah Produk Hukum yang disusun dan didistribusikan	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	25 Ranp., 125 Perbup.;500 Kep.Bup, 1.300 buku	1	Program penataan peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah	Bag Hukum
				b) Jumlah Produk Hukum yang didistribusikan	260 buku	1.300 buku				
				c) Jumlah sosialisasi ketentuan cukai	5 kali	25 kali				
		b. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah	a) Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya	4 SKPD	24 SKPD	1	Program penataan peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah	Bag orpeg
				b) Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	1 dok	4 dok				
13	Meningkatkan penanganan bencana	Percepatan penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana	a) Jumlah desa tangguh bencana	7 desa	42 desa	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kesbangpol	BPBD
				b) Jumlah satgas siaga bencana	-	100 orang				
				c) jumlah posko bencana	5 posko	5 posko			Kec Kaliwungu	
				d) jumlah posko bencana	1 posko	1 posko			Kec Kota	
				e) jumlah posko bencana	3 posko	3 posko			Kec Jati	
				f) jumlah posko bencana	1 posko	17 posko			Kec Undaan	
				g) jumlah posko bencana	1 posko	1 posko			Kec Mejobo	
				h) jumlah posko bencana	6 posko	6 posko			Kec Jekulo	
				i) jumlah posko bencana	1 posko	1 posko			Kec Bae	
				j) jumlah posko bencana	1 posko	1 posko			Kec Gebog	
				k) jumlah posko bencana	1 posko	1 posko			Kec Dawe	
				l) Persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	20%	100%	2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	Kesbangpol	BPBD
MISI 8 : Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial										
1	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Peningkatan kerukunan hidup beragama	Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan	a) Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	90 orang	445 orang	1	Program peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama	Sosial	Bag.Kesra

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				b) Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama	0%	90%				
				c) pelaksanaan Hisab dan Rukyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu	4 keg.	4 keg.				
				d) jumlah pengajian selapanan	12 keg.	12 keg.				
				e) jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan	12 keg.	12 keg.				
				f) Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	-	100%		Sosial	9 Kecamatan	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan	a) Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda	-	200	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Disbudpar
				b) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali			Kec Kaliwungu	
				c) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali			Kec Kota	
				d) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0 kali	5 kali			Kec Jati	
				e) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	5 kali			Kec Undaan	
				f) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 kali	10 kali			Kec Mejobo	
				g) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0 kali	15 kali			Kec Jekulo	
				h) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	5 kali			Kec Bae	
				i) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	5 kali			Kec Gebog	
				j) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali			Kec Dawe	
				k) Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi	32	40	2	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Disbudpar
				l) Jumlah tradisi desa	-	27				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
3	Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	a. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	Meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah	a) Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	7	1 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Disbudpar
				b) Jumlah sarana disitus patiyam dan Taman Budaya	2	5			
		b. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya	a) Jumlah BCB yang direvitalisasi	1		1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Disbudpar
				b) dan Jumlah seni budaya yg dilestarikan	-	5			
				c) Jumlah BCB	156	160			
4	Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan	Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda	pembinaan prestasi olahraga dan pemuda	a) Jumlah organisasi pemuda	26	26	1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan & olahraga	Disdikpora
				b) Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi			9 Kecamatan
				c) Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi			9 Kelurahan
				d) Jumlah gedung olahraga	7	7	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kepemudaan & olahraga	DINDIKPORA
				e) Jumlah Lapangan olahraga	248	248			
				f) Jumlah Gelanggang olahraga	1	1			
				g) Jumlah balai remaja	132	132			
				h) Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	100%	100%			Kel Wergu Kulon
				i) Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	100%	100%			Kec Kota
				j) Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	100%	100%			Kec Mejobo
5	Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba	Penguatan moral pemuda	Meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba	a) Jumlah kegiatan kepemudaan	13	15	1 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kepemudaan & olahraga	Disdikpora
				b) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg			Kec Kaliwungu

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				c) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg			Kec Jati	
				d) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg			Kec Mejubo	
				e) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	2 keg	2 keg			Kec Jekulo	
				f) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg			Kec Bae	
				g) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg			Kec Gebog	
				h) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg			Kec Dawe	
				i) jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg			Kel Purwosari	
6	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	a. Penurunan jumlah keluarga miskin	Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan	90 KK	450 KK	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsosnakertrans
		b. Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal	Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	0 orang	360 orang	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertrans
					75 orang	90 orang	2	Program Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	Dinsosnakertrans
		c. Penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma	Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang cacat dan trauma	0 orang	100 orang	1	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Sosial	Dinsosnakertrans
		d. Penyediaan sarpras panti singgah	Meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar dan lansia	Jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung	2.000 orang	2.000 orang	1	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sosial	Dinsosnakertrans

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		e. Peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial	Meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial	355 orang	100 orang	1 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Sosial	Dinsosnakertrans
		f. Peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan PMKS	Meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial	a) Cakupan orsos, PSM, karangtaruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif	377 buah	377 buah	1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertrans
				b) Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial		2 WKSBM			
7	Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak	a. Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,04%	5,04%	1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	BPMPKB
				b) Persentase perempuan di lembaga legislatif	13,33%	13,33%			
				c) Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)	100%	100%			
				d) Jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak yang mendapatkan penyuluhan	100 orang	110 orang			Kec. Mejobo
		b. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos)	11,77%	11,77%	1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	BPMPKB
		c. Penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan anak	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	a) Cakupan KDRT yang tertangani	100%	100%	1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	BPMPKB
				b) Cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani	100%	100%			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		d. Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	a) Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,63%	94,65%	1 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	BPMPKB
				b) Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok			9 Kecamatan
				c) PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi			9 Kelurahan
8	Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	a. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a) Persentase Posyandu aktif	100%	100%	1 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat & desa	BPMPKB
				b) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	7%	9%			
				c) Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%			9 Kecamatan
				d) Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat	1 keg	5 keg			Kec Kaliwungu, Kec. Jati, Kec. Undaan, Kec. Jekulo, Kec. Gebog
				e) Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	2 keg	10 keg			Kec. Kota
				f) Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%			Kel. Purwosari, Kel. Sunggingan, Kel. Wergu Wetan, Kel. Mlati Kidul, Kel. Mlati Norowito, Kel. Kerjasan, Kel. Kajeksan
				g) Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	85%	85%			KELURAHAN PANJUNAN
				h) Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	75%	75%			KELURAHAN WERGU KULON

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
				i) Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	5 keg			Kel. Purwosari, Kel. Wergu Wetan, Kel. Wergu Kulon, Kel. Mlati Kidul, Kel. Mlati Norowito, Kel. Kerjasan, Kel. Kajeksan	
				j) Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	8 keg			Kel. Sunggingan	
				k) Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	2 keg	10 keg			Kel. Panjunan	
		b. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat	a) Persentase BKM berkinerja baik	50%	70%	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat & desa	Bappeda
				b) Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	89	89				BPMPKB
				c) Jumlah kelompok binaan petani	3 klmpk	15 klmpk				Kec Kaliwungu
				d) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20%	20%				Kec Kota
				e) Jumlah kelompok binaan petani	14 klmpk	70 klmpk				Kec Jati
				f) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20%	20%				Kec Mejobo
				g) Jumlah kelompok binaan petani	14 klmpk	14 klmpk				
				h) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20%	20%				Kec Gebog
				i) Jumlah kelompok binaan petani	3 klmpk	3 klmpk				
		c. Peningkatan pengetahuan aparaturn pemerintahan desa	Meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	a) Jumlah aparaturn Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek	269 orang	1476 orang	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat & desa	Bag Pemdes

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
				b) Fasilitasi Pilkades	116 desa	7 desa			
				c) Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan	45%	70%			
				d) Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%			9 Kecamatan
9	Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	a) Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat & desa	BPMPKB
				b) Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%	10 kali			Bag Pemdes
				c) cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%			9 Kecamatan
				d) Cakupan RT, RW terbina	100%	100%			9 Kelurahan

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2014 (diolah)

BAB VIII
 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
 YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program prioritas pembangunan merupakan penjabaran strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kudus. Secara garis besar, proses penyusunan program prioritas RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 didahului dari Visi, Misi selanjutnya tujuan, sasaran, arah kebijakan kemudian ditentukan urusan dan program-program prioritasnya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator yang akan dicapai adalah Angka Partisipasi Kasar PAUD.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Indikator yang akan dicapai adalah APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun, Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun, Bangunan SD dalam kondisi baik, Bangunan SMP kondisi baik, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Rata-rata Kelulusan SD/MI, Rata-rata Kelulusan SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Angka rata-rata lama sekolah SD/MI, Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah, persentase SD/MI yang mempunyai perpustakaan, dan persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, didukung dengan penyediaan perpustakaan pada tingkat SD dan SMP yang semakin meningkat.

c. Program Pendidikan Menengah

Indikator yang akan dicapai adalah APK SMA/MA/SMK/Paket C, APM SMA/SMK/MA/Paket C, angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun, angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA, bangunan SMA/SMK kondisi baik, angka rata-rata lama sekolah SMA/MA, angka rata-rata lama sekolah SMK, dan persentase SMA/MA/SMK yang mempunyai

perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, didukung dengan penyediaan perpustakaan pada tingkat SMA yang semakin meningkat.

d. Program Pendidikan Non Formal

Indikator yang akan dicapai adalah Angka melek huruf dan jumlah desa vokasi yang dikembangkan.

e. Program Pendidikan Luar Biasa

Indikator yang akan dicapai adalah APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun, Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun, APK SMA/MA/SMK/Paket C, APM SMA/SMK/MA/Paket C, angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang akan dicapai adalah rasio Guru/Murid SD/MI, rasio Guru/Murid SMP/MTs, rasio Guru/Murid SMA, Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, jumlah guru TK tersertifikasi, jumlah guru SD tersertifikasi, jumlah guru SMP tersertifikasi dan jumlah guru SMA/SMK tersertifikasi. Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan ditingkatkan melalui jumlah guru bersertifikat.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan, rata-rata nilai UN SD/MI, rata-rata nilai UN SMP/MTs, rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK, persentase SD/MI yang terakreditasi, persentase SMP/MTs yang terakreditasi dan persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi. Rata-rata nilai UN SD, SMP dan SMA semakin meningkat. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan diupayakan dengan peningkatan sekolah yang terakreditasi.

2. Kesehatan

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai adalah persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai adalah cakupan puskesmas, cakupan puskesmas pembantu (pustu), cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio pustu per 100.000 penduduk, angka usia harapan hidup (AHH) dan cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan.

- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan desa siaga aktif, cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat dan rasio posyandu per satuan balita.
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, prevalensi balita gizi buruk dan prevalensi balita gizi kurang.
- e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan penduduk menggunakan air bersih, cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat, cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, cakupan rumah sehat, dan cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+), cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : 1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun, 2) penemuan penderita pneumonia balita, 3) penemuan penderita diare, Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk, persentase penderita HIV AIDS yang tertangani, prevalensi HIV, dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular.
- g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Indikator yang akan dicapai adalah pelayanan perijinan bidang kesehatan, cakupan puskesmas yang telah terakreditasi, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah penduduk) dan rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk.
- h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya.
- i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan.
- j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak balita.

- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia lanjut.
 - l. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.
 - m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Indikator yang akan dicapai adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan pelayanan nifas, cakupan peserta KB aktif, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan kunjungan neonatal pertama dan angka kematian bayi per 1000 KH.
 - n. Program Pelayanan Kesehatan BLUD
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan pelayanan BLUD.
 - o. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesehatan
Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarpras akbid Pemda Kudus.
3. Pekerjaan Umum
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator yang akan dicapai adalah panjang jalan kabupaten yang dibangun, jumlah jembatan kabupaten yang dibangun, peningkatan jalan kabupaten, dan penggantian jembatan kabupaten.
 - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Indikator yang akan dicapai adalah panjang saluran drainase yang dibangun, drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat dan sistem informasi drainase.
 - c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Indikator yang akan dicapai adalah panjang talud jalan kabupaten yang dibangun.
 - d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikator yang akan dicapai adalah proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang, dan proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik.
 - e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
Indikator yang akan dicapai adalah panjang talud/bronjong yang dipelihara, proporsi talud dalam kondisi baik.
 - f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana.

- g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Indikator yang akan dicapai adalah sistem informasi/database jalan dan jembatan, sistem informasi data base jalan lingkungan, sistem informasi data base jembatan desa.
 - h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase alat-alat berat dalam kondisi baik.
 - i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Indikator yang akan dicapai adalah persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik, sistem informasi/database jaringan irigasi dan luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik.
 - j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Indikator yang akan dicapai adalah berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya, embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik.
 - k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan pelayanan perpipaan air minum.
 - l. Program Pengendalian Banjir
Indikator yang akan dicapai adalah berfungsinya reservoir pengendali banjir.
 - m. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator yang akan dicapai adalah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air dan penyediaan gedung kantor terpadu.
 - n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
Indikator yang akan dicapai adalah persentase rumah tinggal bersanitasi, panjang jalan perdesaaan yang dibangun, jumlah jembatan perdesaaan yang dibangun, cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan.
4. Perumahan
- a. Program Pengembangan Perumahan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase rumah layak huni.
 - b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase rumah tangga bersanitasi.
 - c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Indikator yang akan dicapai adalah fasilitasi dan replikasi PLPBK.
 - d. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah rehab rumah akibat bencana alam dan persentase penyediaan sarana evakuasi.

- e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten dan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.
 - f. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
Indikator yang akan dicapai adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk.
5. Penataan Ruang
- a. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen tata ruang, jumlah rancangan perda tata ruang, penyebarluasan informasi penataan ruang, dan pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
 - b. Program Pemanfaatan Ruang
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang dan jumlah dokumen data pemanfaatan ruang.
 - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang dan jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan Pembangunan
- a. Program Pengembangan Data/Informasi
Indikator yang akan dicapai adalah persentase keterisian data/informasi.
 - b. Program Kerjasama Pembangunan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani, jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama.
 - c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan, jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah aparat perencana yang meningkat kapasitasnya.
 - e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, penjabaran program

RPJMD ke dalam RKPD, jumlah dokumen Review RPIJM, jumlah dokumen kinerja daerah.

- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP.
 - g. Program Perencanaan Sosial Budaya
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan sosial budaya.
 - h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air.
 - i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana.
 - j. Program Pengembangan Penelitian Daerah.
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah.
7. Perhubungan
- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator yang akan dicapai adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah arus penumpang angkutan umum dan persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU.
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Indikator yang akan dicapai adalah rasio izin trayek, persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten, persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, persentase angkutan darat, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.
 - d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah terminal bus, persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, jumlah orang/barang melalui terminal per tahun.
 - e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Indikator yang akan dicapai adalah persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten dan pemasangan rambu-rambu.

- f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Indikator yang akan dicapai adalah kepemilikan KIR angkutan umum, persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten, jumlah uji kir angkutan umum, dan lama pengujian kelayakan angkutan umum – KIR.

8. Lingkungan Hidup

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator yang akan dicapai adalah persentase penanganan sampah dan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai adalah pencegahan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya luas tutupan lahan, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.

- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Indikator yang akan dicapai adalah cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.

- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai adalah penyediaan akses informasi lingkungan.

- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Indikator yang akan dicapai adalah pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak.

- g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator yang akan dicapai adalah proporsi RTH Publik.

- h. Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di Bidang LH.

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH.

9. Pertanahan

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Indikator yang akan dicapai adalah luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten, persentase luas lahan bersertifikat.

- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani.
 - c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
Indikator yang akan dicapai adalah sistem informasi pertanahan.
10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Indikator yang akan dicapai adalah kepemilikan e-KTP, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, ketersediaan database kependudukan skala kabupaten, penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, persentase perempuan di lembaga legislatif, persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten), jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak dan PKK aktif.
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Indikator yang akan dicapai adalah partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos).
 - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan KDRT yang tertangani dan cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani.
 - d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Indikator yang akan dicapai adalah partisipasi angkatan kerja perempuan dan rata-rata jumlah kelompok PKK.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- a. Program Keluarga Berencana
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan peserta KB aktif dan persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I.
 - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun.
 - c. Program Pelayanan Kontrasepsi
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW).

- d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS.

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah penemuan penderita HIV AIDS.

13. Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan.

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, jumlah PMKS yang terdata, jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center, jumlah kegiatan upacara hari besar nasional dan fasilitasi resepsi kenegaraan.

- c. Program Pembinaan Anak Terlantar

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan.

- d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah penyandang cacat dan trauma.

- e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung.

- f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah eks penyandang penyakit sosial.

- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator yang akan dicapai adalah cakupan orsos, PSM, karang taruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial.

- h. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama.

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah peserta dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaan Hisab dan Rukyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiah dan sholat fardlu, jumlah pengajian selapanan, jumlah penyaluran hibah dan bansos keagamaan dan cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan.

14. Ketenagakerjaan

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai adalah cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan, rasio ketergantungan penduduk.

- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pencari kerja terdaftar, jumlah pencari kerja ditempatkan, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara.
 - c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah UMKM, jumlah usaha mikro, jumlah usaha kecil, dan jumlah usaha menengah.
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan UMKM yang difasilitasi.
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pameran/ekspo produk UMKM dan jumlah UKM yang terfasilitasi dalam pameran.
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Indikator yang akan dicapai adalah persentase koperasi aktif.
16. Penanaman Modal
- a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah investor dan jumlah penerbitan ijin investasi.
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah investor berskala nasional, jumlah nilai investasi berskala nasional, daya serap tenaga kerja, nilai realisasi PMDN, jumlah lembaga keuangan bank/non bank dan lama proses perijinan.
17. Kebudayaan
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi, jumlah tradisi desa.
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yang dilestarikan, jumlah BCB.
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.
 - d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah sarana di situs Patiayam dan Taman Budaya.

18. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kegiatan kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah organisasi pemuda.
- c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah organisasi pemuda.
- d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi penyalahgunaan narkoba.
- e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kegiatan olahraga, jumlah organisasi olahraga, jumlah klub olahraga.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah gedung olahraga, jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang olahraga, jumlah balai remaja, persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase penurunan konflik di daerah, rasio linmas per 10.000 penduduk, persentase penanganan gangguan keamanan, persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah, jumlah aduan masyarakat tiap bulan, persentase pelanggar HO, persentase pelanggar Perda, jumlah satgas siaga bencana, persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (di luar perda).
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah, jumlah demo, angka kriminalitas dan penegakan perda, Rasio Pol PP per 10.000 penduduk, penurunan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas, cakupan patroli petugas Pol PP.
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan, jumlah kegiatan upacara hari besar nasional, jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang.
- d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pembinaan LSM, Ormas/OKP.

- e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Indikator yang akan dicapai adalah angka kriminalitas yang tertangani.

- f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, jumlah peredaran miras dan narkoba di masyarakat, persentase operasi prostitusi, jumlah pengguna miras dan narkoba di masyarakat, persentase penurunan pemakai / kasus miras dan narkoba.

- g. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator yang akan dicapai adalah tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, jumlah pembinaan politik daerah, jumlah pendidikan politik masyarakat, jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum, cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu.

- h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah desa tangguh bencana, jumlah satgas siaga bencana dan jumlah posko bencana.

- i. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana.

Indikator yang akan dicapai adalah persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah Perda yang ditetapkan.

- b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah rapat koordinasi pimpinan, jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi Bupati di Desa/Kelurahan dan persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen standar satuan harga, persentase SKPD yang telah melakukan

inventarisasi aset dengan tertib, opini laporan keuangan (WTP, WDP) dan peningkatan PAD.

- d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Indikator yang akan dicapai adalah persentase tertib administrasi keuangan desa, persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi.
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kecamatan yang tertib administrasi, persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, persentase penyelesaian TLHP Reguler, persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi, persentase pengendalian, monev dan pelaporan kegiatan SKPD, persentase sistem informasi jasa konstruksi, fasilitasi proses pengadaan barang / jasa, lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi.
- f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional.
- g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase terpenuhinya Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P), persentase terlaksananya PMPRB, persentase tersusunnya SOP, persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP.
- h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemkab, jumlah sosialisasi cukai melalui media.
- i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Indikator yang akan dicapai adalah persentase fasilitasi kerjasama antar daerah.
- j. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan, jumlah sosialisasi ketentuan cukai, jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya, dan jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi.
- k. Program Pendidikan Kedinasan
Indikator yang akan dicapai adalah rasio PNS yang mengikuti diklat teknis, rasio S1 terhadap jumlah pegawai, dan rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai.
- l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator yang akan dicapai adalah rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim, jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab.

m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK, tersedianya Pedoman Standar Kompetensi Jabatan, jumlah SKPD yang sudah di SKM, rasio penanganan pelanggaran disiplin, dan jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi.

n. Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD

Indikator yang akan dicapai adalah persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap BUMD.

21. Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Indikator yang akan dicapai adalah regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein per kapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH), pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, penanganan daerah rawan pangan.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada, persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, cakupan RT/RW dan desa terbina.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat, persentase BKM berkinerja baik, jumlah kelompok binaan petani, dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Indikator yang akan dicapai adalah persentase Posyandu aktif, persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang, dan jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat.

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah desa yang mempunyai profil desa, jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek, fasilitasi Pilkades, persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan, dan cakupan aparatur desa terbina.

e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Indikator yang akan dicapai adalah persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten), jumlah PKK aktif, dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

f. Program Fasilitasi Kegiatan Sosial.

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi.

23. Statistik

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah data/informasi statistik daerah.

24. Kearsipan

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Indikator yang akan dicapai adalah pengelolaan arsip secara baku.

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Indikator yang akan dicapai adalah pengelolaan arsip secara baku, jumlah arsip kependudukan yang terdokumentasi.

c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Indikator yang akan dicapai adalah pengelolaan arsip secara baku, persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Indikator yang akan dicapai adalah peningkatan SDM pengelola kearsipan.

25. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi, jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah, jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi.

b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Indikator yang akan dicapai adalah rasio wartel/warnet terhadap penduduk.

c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi.

d. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media.

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah website milik pemerintah daerah, jumlah surat kabar nasional dan lokal, jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran, jumlah pameran/expo, diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV), diseminasi dan

distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online), diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat), diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan), diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho), persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa, jumlah publikasi kegiatan dewan, jumlah sarana media publikasi.

26. Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Indikator yang akan dicapai adalah jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpustakaan Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpustakaan Masyarakat).

B. Urusan Pilihan

1. Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Indikator yang akan dicapai adalah peningkatan Nilai Tukar Petani.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Indikator yang akan dicapai adalah cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran.

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Indikator yang akan dicapai adalah persentase cakupan bina kelompok tani.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Indikator yang akan dicapai adalah peningkatan produktivitas tanaman.

e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Indikator yang akan dicapai adalah cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak.

g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Indikator yang akan dicapai adalah peningkatan produksi asal ternak.

h. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

Indikator yang akan dicapai adalah cakupan irigasi.

2. Kehutanan
 - a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
 - b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah rehabilitasi hutan dan lahan.
 - c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Indikator yang akan dicapai adalah persentase kerusakan kawasan hutan.
 - d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Indikator yang akan dicapai adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, jumlah pertambangan berijin, dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Indikator yang akan dicapai adalah berfungsinya LPJU dan rasio elektrifikasi tingkat desa.
 - c. Program Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau.
4. Pariwisata
 - a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Indikator yang akan dicapai adalah kunjungan wisata, perentase kenaikan PAD sektor pariwisata, jenis, kelas dan jumlah rumah makan /restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel.
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata, jumlah obyek wisata, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
 - c. Program Pengembangan Kemitraan.
Indikator yang akan dicapai adalah tersedianya sarpras promosi pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
 - a. Pengembangan Budidaya Perikanan
Indikator yang akan dicapai adalah produksi ikan kelompok pembudidaya.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya.

- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap.
 - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran.
6. Perdagangan
- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual, jumlah pengaduan konsumen, rakor Ekuinda, dan jumlah penerima raskin.
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Indikator yang akan dicapai adalah ekspor bersih perdagangan, cakupan bina calon eksportir, dan jumlah peserta pameran UMKM skala regional.
 - c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Indikator yang akan dicapai adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, cakupan pembinaan pasar tradisional, persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar, cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional), Jumlah pasar daerah dan pasar desa, dan terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan.
 - d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal.
 - e. Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah pedagang pasar tradisional, jumlah PKL dan asongan.
7. Industri
- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Indikator yang akan dicapai adalah cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha, dan jumlah bina KUB.
 - b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Indikator yang akan dicapai adalah pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM), jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan, dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
 - c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Indikator yang akan dicapai adalah jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi, dan jumlah Industri rokok yang telah mengujikan tar dan nikotin.

d. Program Penataan Struktur Industri

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah kluster yang memiliki tempat pameran, dan jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran.

8. Ketransmigrasian

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah calon transmigran terlayani.

Program-program sebagaimana dalam Tabel 8.1 di bawah ini merupakan program yang akan dijalankan oleh SKPD dalam mencapai target indikator pertahunnya dengan disertai kebutuhan pendanaan. Tabel 8.1 berisi uraian lengkap mengenai bidang urusan pemerintahan dan program pembangunan yang akan dijalankan, indikator kinerja program (*outcome*), capaian kinerja program tiap tahun, beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawabnya.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kudus

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG																		
1	BELANJA PEGAWAI					815.347.426.000		890.877.763.000		974.934.941.000		1.069.648.339.000		1.176.391.825.000			4.927.200.294.000	53 SKPD	
1 01	Gaji dan Tunjangan					588.524.530.000		662.090.096.000		744.851.358.000		837.957.777.000		942.702.499.000					
1 02	Tambahan Penghasilan PNS					22.817.256.000		22.817.256.000		22.817.256.000		22.817.256.000		22.817.256.000					
1 03	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH					3.989.038.000		4.198.183.000		4.326.832.000		4.484.346.000		4.678.550.000					
1 03 01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD					3.402.000.000		3.402.000.000		3.402.000.000		3.402.000.000		3.402.000.000					
1 03 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH					587.038.000		796.183.000		924.832.000		1.082.346.000		1.276.550.000					
1 05	Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD					196.228.110.000		196.228.110.000		196.228.110.000		196.228.110.000		196.228.110.000					
1 06	Insentif Pemungutan Pajak					2.791.172.000		3.605.034.000		4.578.392.000		5.814.558.000		7.384.489.000					
1 07	Insentif Pemungutan Retribusi					997.320.000		1.939.084.000		2.132.993.000		2.346.292.000		2.580.921.000					
2	BELANJA BUNGA					70.802.000		70.802.000		70.802.000		-		-			212.406.000	PPKD	
4	BELANJA HIBAH					46.029.515.000		35.527.040.000		35.527.040.000		35.527.040.000		35.527.040.000			188.137.675.000	PPKD	
5	BELANJA BANTUAN SOSIAL					32.371.987.000		23.474.000.000		23.474.000.000		23.474.000.000		23.474.000.000			126.267.987.000	PPKD	
6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA					6.181.567.000		6.799.724.000		7.479.696.000		8.227.666.000		9.050.433.000			37.739.086.000	PPKD	
7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK					44.812.104.000		47.051.610.000		49.505.687.000		52.108.430.000		54.869.555.000			248.347.386.000	PPKD	
8	BELANJA TIDAK TERDUGA					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000			15.000.000.000	PPKD	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					947.813.401.000		1.006.800.939.000		1.093.992.166.000		1.191.985.475.000		1.302.312.853.000			5.542.904.834.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
B	BELANJA LANGSUNG																	
1	URUSAN WAJIB					595.235.100.000		592.772.956.000		670.187.379.000		767.964.890.000		849.087.138.000		3.475.247.463.000		
1 01	Pendidikan					49.580.866.000		56.013.404.000		61.520.051.000		67.659.702.000		89.285.655.000		324.059.678.000		
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	1.870.541.000		12 bln	1.400.000.000	12 bln	1.400.000.000	12 bln	1.500.000.000	12 bln	1.500.000.000	12 bln	7.670.541.000	DINDIKPORA
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	1.708.065.000		100 %	1.228.436.000	100 %	1.401.827.000	100 %	1.575.218.000	100 %	1.748.609.000	100 %	7.662.155.000	DINDIKPORA
1 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	3 paket	3 paket	3 paket	50.000.000		3 paket	34.700.000	3 paket	37.928.000	3 paket	41.157.000	3 paket	44.386.000	3 paket	208.171.000	DINDIKPORA
1 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-		6 jenis	50.000.000	6 jenis	200.000.000	DINDIKPORA						
1 01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	49,75%	50%	52%	1.814.000.000		54%	3.737.800.000	56%	4.111.580.000	58%	4.522.738.000	60%	4.975.011.000	60%	19.161.129.000	DINDIKPORA
1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI/Paket A	106,31%	95%	100%	23.017.426.000		100%	25.335.999.000	100%	27.869.599.000	100%	30.656.559.000	100%	38.722.215.000	100%	145.601.798.000	DINDIKPORA
		APK SMP/MTs/Paket B	104,42%	95%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
		APM SD/MI/Paket A	97,92%	95%	> 95%			> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		
		APM SMP/MTs/Paket B	95,32%	95%	> 95%			> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	99,64%	95%	> 95%			> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	100,29%	95%	> 95%			> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		
		Bangunan SD/MI dalam kondisi baik	87,55%	91,80%	93,80%			95,80%		97,80%		99,80%		100,00%		100,00%		
		a. Bangunan SD dalam kondisi baik	85,17%	91,89%	93,89%			95,89%		97,89%		99,89%		100,00%		100,00%		
		b. Bangunan MI dalam kondisi baik	94,73%	91,53%	93,53%			95,53%		97,53%		99,53%		100,00%		100,00%		
		Bangunan SMP kondisi baik	91,06%	91,22%	91,22%			91,54%		91,70%		91,86%		92,02%		92,02%		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,03%	0,03%	0,03%			0,03%		0,02%		0,02%		0,02%		0,02%		
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%	0,11%	0,11%			0,11%		0,11%		0,10%		0,10%		0,10%		
		Rata-rata Kelulusan SD/MI	100%	99%	99%			99%		99%		99%		99%		99%		
		Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	99,77%	99%	99%			99%		99%		99%		99%		99%		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	102,6%	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,56%	90,00%	90,10%			90,20%		91,5%		93%		95%		95%		
		Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6,21	6	6			6		6		6		6		6		
		Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3,01	3	3			3		3		3		3		3		
		Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah	76,45%	76,5%	76,55%			76,6%		76,65%		76,7%		76,75%		76,75%		
		Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah	27,71%	27,76%	27,81%			27,86%		27,91%		27,96%		28,01%		28,01%		
		Persentase SD/MI yang mempunyai perpustakaan	84,98	85,81	86,81			87,81		88,81		89,81		90,81		90,81		
		a. Persentase SD yang mempunyai perpustakaan	88,03	89,10	90,10			91,10		92,10		93,10		94,10		94,10		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		b. Persentase MI yang mempunyai perpustakaan	74,64	74,64	75,64		76,64		77,64		78,64		79,64		79,64			
		Persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan	59,29	60	61,80		63,65		65,56		67,53		90,00		90,00			
		Terpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa											100%		100%			
1 01 01 17	Program Pendidikan Menengah	APK SMA/MA/SMK/Paket C	86,79%	86,79%	86,79%	19.268.534.000	87,00%	21.195.388.000	87,50%	23.314.927.000	88,00%	25.646.420.000	90,00%	38.211.062.000	90,00%	127.636.331.000	DINDIKPORA	
		APM SMA/SMK/MA/Paket C	80,38%	75%	76%		77%		78%		79%		80%		80%			
		Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun	81,43%	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%			
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,12%	0,12%	0,12%		0,12%		0,12%		0,11%		0,11%		0,11%			
		Rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA	99,98%	99,00%	99,00%		99,00%		99,00%		99,00%		99,00%		99,00%			
		Bangunan SMA/SMK kondisi baik	95,62%	95,68%	95,68%		95,80%		95,86%		95,92%		95,98%		95,98%			
		Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA (tahun)	3	3	3		3		3		3		3		3			
		Angka rata-rata lama sekolah SMK (tahun)	3	3	3		3		3		3		3		3			
		Persentase SMA/MA/SMK yang mempunyai perpustakaan	55,26	55,84	57,52		59,24		61,02		62,85		64,73		64,73			
		Terpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa											100%		100%			
1 01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	100%	100%	100%	165.200.000	100%	181.720.000	100%	199.892.000	100%	219.882.000	100%	241.871.000	100%	1.008.565.000	DINDIKPORA	
		Jumlah Desa Vokasi yang Dikembangkan	7	1	1		1		1		1		1		5			
1 01 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa					11.000.000		290.400.000		319.440.000		351.384.000		386.522.000		1.358.746.000	DINDIKPORA	
		APK SD/MI/Paket A	106,31%	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		APK SMP/MTs/Paket B	104,42%	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		APM SD/MI/Paket A	97,92%	95%	> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%			
		APM SMP/MTs/Paket B	95,32%	95%	> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%			
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	99,64%	100%	> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%			
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	100,29%	95%	> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		> 95%		95%			
		APK SMA/MA/SMK/Paket C	86,79%	86,79%	86,79%		87,00%		87,50%		88,00%		90,00%		90,00%			
		APM SMA/SMK/MA/Paket C	80,38%	75%	76%		77%		78%		79%		80%		80%			
		Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun	81,43%	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%			
1 01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid SD/MI	828,88	829,08	829,28	355.000.000	829,48	1.155.000.000	829,68	1.270.500.000	829,88	1.397.550.000	830,08	1.537.305.000	830,08	5.715.355.000	DINDIKPORA	
		Rasio Guru/Murid SMP/MTs	759,11	759,31	759,51		759,71		759,91		760,11		760,31		760,31			
		Rasio Guru/Murid SMA	791,95	792,15	792,35		792,55		792,75		792,95		793,15		793,15			
		Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	59,50%	59,60%	59,80%		60,10%		60,50%		61,00%		61,60%		61,60%			
		Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,95%	93,05%	93,25%		93,55%		93,95%		94,45%		95,05%		95,05%			
		Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93,81%	93,91%	94,11%		94,41%		94,81%		95,81%		95,91%		95,91%			
		Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,24%	94,34%	94,54%		94,84%		95,24%		95,74%		96,34%		96,34%			
		Jumlah guru TK tersertifikasi	156	412	419		426		433		440		447		447			
		Jumlah guru SD tersertifikasi	2.343	2.807	2.821		2.835		2.849		2.863		2.877		2.877			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk	3,41	3,42	3,43		3,44		3,45		3,46		3,47		3,47		-	
1 02 01 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Terpenuhinya kebutuhan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya	100%	100%	100%	340.000.000	100%	472.600.000	100%	572.600.000	100%	2.222.600.000	100%	7.172.600.000	100%	10.780.400.000		DINAS KESEHATAN
1 02 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan alat2 kesehatan	100%	100%	100%	1.399.800.000	100%	5.900.000.000	100%	7.500.000.000	100%	8.825.000.000	100%	10.176.250.000	100%	33.801.050.000		BLUD RSUD
1 02 01 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	95,84%	90%	95%	111.000.000	100%	135.000.000	100%	145.000.000	100%	155.000.000	100%	165.000.000	100%	711.000.000		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan anak balita	90,27%	83%	84%		85%		85%		85%		85%		85%			
1 02 01 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pra usia dan usia lanjut	75%	78%	80%	50.000.000	80%	55.000.000	80%	55.000.000	80%	65.000.000	80%	65.000.000	80%	290.000.000		DINAS KESEHATAN
1 02 01 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	4,84%	7,69%	7,77%	50.000.000	7,84%	55.000.000	7,92%	55.000.000	7,99%	65.000.000	8,07%	65.000.000	8,07%	290.000.000		DINAS KESEHATAN
1 02 01 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	95,42	133,68	102	114.000.000	96	90.000.000	96	100.000.000	96	110.000.000	96	120.000.000	96	534.000.000		DINAS KESEHATAN
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,87%	95%	95,25%		95,5%		95,7%		96,0%		96,2%		96,2%			
		Cakupan pelayanan nifas	94,62%	90%	90%		95%		95,5%		96,0%		96,5%		96,5%			
		Cakupan peserta KB aktif	81,69%	79,0%	80%		80%		80%		81%		82%		82%			
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	94,73%	100,0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	91,00%	90,0%	95%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,76%	90,0%	90%		95%		95,5%		95,7%		96,0%		96,0%			
		Cakupan kunjungan neonatal pertama	99,07	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Angka kematian bayi per 1000 KH	6,93	6,9	6,9		6,8		6,7		6,6		6,5		6,5			
1 02 01 34	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan sarpras akbid Penda Kudus	-	-	100%	1.530.000.000									100%	1.530.000.000		DINAS KESEHATAN
1 02 02 33	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	100,0%	100,0%	100,0%	61.654.580.000	100,0%	66.720.000.000	100,0%	70.056.000.000	100,0%	73.558.800.000	100,0%	77.236.740.000	100,0%	349.226.120.000		BLUD RSUD
1 03	Pekerjaan Umum					179.640.509.000		171.245.868.000		241.728.036.000		312.481.162.000		340.750.835.000		1.245.846.410.000		
1 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	515.927.000	12 bln	659.500.000	12 bln	699.800.000	12 bln	706.430.000	12 bln	743.423.000	12 bln	3.325.080.000		DINAS BPESDM
1 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	1.004.000.000	100 %	1.039.800.000	100 %	1.185.400.000	100 %	1.410.300.000	100 %	1.519.000.000	100 %	6.158.500.000		DINAS BPESDM
1 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	-	-	17 orang	50.000.000	32 orang	165.000.000	34 orang	181.500.000	36 orang	199.650.000	39 orang	219.600.000	158 orang	815.750.000		DINAS BPESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	30.000.000	100 %	33.000.000	100 %	36.600.000	100 %	152.100.000	DINAS BPESDM
1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun	-	-	-	47.582.000.000	2.050 m	32.500.000.000	3.400 m	42.500.000.000	1.818 m	22.500.000.000	2.222 m	27.500.000.000	9.490 m	172.582.000.000	DINAS BPESDM
		Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	-	-	-		2 unit		1 unit		1 unit				4 unit		
		Peningkatan jalan kabupaten				18.500 m											
		Penggantian jembatan kabupaten				11 unit											
1 03 01 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun	-	-	150 m	204.000.000	500 m	500.000.000	1500 m	2.000.000.000	30.000 m	50.500.000.000	500 m	500.000.000	32.650 m	53.704.000.000	DINAS BPESDM
1 03 01 17	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang talud jalan kabupaten yang dibangun	100 m	-	100 m	1.020.000.000	50 m	500.000.000	200 m	2.000.000.000	200 m	2.000.000.000	200 m	2.000.000.000	750 m	7.520.000.000	DINAS BPESDM
1 03 01 18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang	70,30%	73,65%	63,21%	33.789.329.000	67,37%	51.659.000.000	68,87%	67.459.000.000	74,22%	87.059.000.000	80,15%	106.209.000.000	80,15%	346.175.329.000	DINAS BPESDM
		Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	77,17%	78,54%	80,36%		82,19%		84,02%		85,84%		87,67%		87,67%		
1 03 01 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Panjang talud/bronjong yang dipelihara	350 m	419 m	500 m	3.764.000.000	1400 m	6.600.000.000	1500 m	7.000.000.000	1650 m	7.837.500.000	2150 m	10.163.125.000	7200 m	35.364.625.000	DINAS BPESDM
1 03 01 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	-	100%	100%	258.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	858.000.000	DINAS BPESDM
1 03 01 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	64 %	64 %	65 %	1.276.000.000	67 %	1.900.000.000	68%	2.325.000.000	71%	2.900.000.000	74%	7.525.000.000	74%	15.926.000.000	DINAS BPESDM
1 03 01 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	58,50%	59,50%	60,50%	9.892.590.000	61,50%	9.515.000.000	63,50%	10.515.000.000	64,50%	11.515.000.000	65,00%	12.515.000.000	65,00%	53.952.590.000	DINAS BPESDM
		Sistem informasi/database jaringan irigasi	-	20%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	65,68%	65,70%	65,72%		65,74%		65,76%		65,78%		65,80%		65,80%		-
1 03 01 26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya	100%	100%	100%	605.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	11.605.000.000	DINAS BPESDM
		Embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik	40%	40%	80%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 03 01 28	Program pengendalian banjir	Berfungsinya reservoir pengendali banjir	100%	100%	100%	300.000.000	100%	7.780.068.000	100%	5.832.336.000	100%	14.820.282.000	100%	70.520.087.000	100%	99.252.773.000	DINAS BPESDM
1 03 01.01 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun	3 km	4,44 km	14,08 km	17.498.000.000	3,75 km	4.500.000.000	4,5 km	5.500.000.000	11,5 km	12.900.000.000	13,75 km	17.500.000.000	47,58 km	57.898.000.000	DINAS CIPKATARU
		Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	58,13%	60,07%	60,84%		61,01%		62,94%		63,82%		65,47%		65,47%		
		Sistem informasi drainase	-	-	100%		-		-		-		-		100%		
1 03 01.01 17	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang talud yang dibangun	-	-	3,1 km	3.522.000.000	1,2 km	1.200.000.000	3 km	3.000.000.000	5,5 km	5.500.000.000	7 km	7.000.000.000	19,8 km	20.222.000.000	DINAS CIPKATARU
1 03 01.01 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Proporsi talud dalam kondisi baik	-	44,40%	44,40%		45,44%	1.000.000.000	46,66%	1.000.000.000	47,36%	1.000.000.000	48,13%	1.000.000.000	48,13%	4.000.000.000	DINAS CIPKATARU
1 03 01.01 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Sistem informasi data base jalan lingkungan	-	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.600.000.000	DINAS CIPKATARU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sistem informasi data base jembatan desa	-	-	-		100%		-		-		-		100%		
1 03 01.01 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan pelayanan perpipaan air minum	81,20%	82,01%	82,83%	938.750.000	83,66%	550.000.000	84,61%	1.650.000.000	85,57%	1.250.000.000	86,31%	1.450.000.000	86,31%	5.838.750.000	DINAS CIPKATARU
1 03 01.01 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	15 km	16 km	16 km	5.784.000.000	17 km	22.000.000.000	17 km	34.000.000.000	18 km	33.000.000.000	21 km	5.000.000.000	21 km	99.784.000.000	DINAS CIPKATARU
		Penyediaan Gedung kantor terpadu			5%		30%		60%		100%		100%		100%		
1 03 01.01 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	92,71%	93,17%	93,64%	50.261.913.000	94,11%	27.500.000.000	94,58%	53.500.000.000	95,05%	56.000.000.000	95,53%	61.000.000.000	95,53%	248.261.913.000	DINAS CIPKATARU
		Panjang jalan perdesaan yang dibangun	16,7 km	32,25 km	52 km		85 km		171 km		176 km		180 km		664 km	-	
		Jumlah jembatan perdesaan yang dibangun	4 unit	7 unit	19 unit		12 unit		11 unit		12 unit		13 unit		66 unit		
		Cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	81%	83%	83%		84%		85%		86%		87%		87%		
1 03 01.02 21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana		100%	100%	850.000.000									100%	850.000.000	BPBD
1 04	Perumahan					8.400.625.000		9.656.866.000		11.204.847.000		10.825.624.000		12.566.176.000		52.654.138.000	
1 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	1.397.137.000	12 bln	1.620.574.000	12 bln	1.782.632.000	12 bln	1.960.893.000	12 bln	2.156.978.000	12 bln	8.918.214.000	DINAS CIPKATARU
1 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	3.098.863.000	100 %	4.527.292.000	100 %	4.634.315.000	100 %	4.735.041.000	100 %	4.548.540.000	100 %	21.544.051.000	DINAS CIPKATARU
1 04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	65.450.000	100 %	110.000.000	100 %	121.000.000	100 %	133.100.000	100 %	146.410.000	100 %	575.960.000	DINAS CIPKATARU
1 04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 orang	6 orang	9 orang	35.000.000	9 orang	38.500.000	9 orang	42.350.000	9 orang	46.585.000	9 orang	51.243.000	45 orang	213.678.000	DINAS CIPKATARU
1 04 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	100 %	25.000.000	100 %	40.500.000	100 %	44.550.000	100 %	49.005.000	100 %	53.905.000	100 %	212.960.000	DINAS CIPKATARU
1 04 01 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	86,85%	87,36%	87,97%	1.300.000.000	88,58%	1.350.000.000	89,19%	1.410.000.000	89,80%	1.581.000.000	90,41%	1.689.100.000	90,41%	7.330.100.000	DINAS CIPKATARU
1 04 01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tangga bersanitasi	92,71%	93,17%	93,17%		94,11%	400.000.000	94,58%	400.000.000	95,05%	400.000.000	95,53%	400.000.000	95,53%	1.600.000.000	DINAS CIPKATARU
1 04 01.01 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Fasilitasi dan replikasi PLPBK	-	1 desa	-		1 desa	40.000.000	1 desa	40.000.000	1 desa	40.000.000	1 desa	40.000.000	1 desa	160.000.000	BAPPEDA
1 04 01 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Jumlah rehab rumah akibat bencana alam	-	-	-		25 unit	30.000.000	25 unit	30.000.000	25 unit	30.000.000	25 unit	30.000.000	100 unit	120.000.000	DINAS CIPKATARU
		Persentase penyediaan sarana evakuasi	-	-	-		12,58%		13,64%		13,64%		14,39%		14,39%		
1 04 01 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	100%	100%	100%	784.175.000	100%	900.000.000	100%	2.000.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.084.175.000	DINAS CIPKATARU
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	33%	33%	39%		44%		50%		56%		61%		61%		
1 04 01 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1,667	1,655	1,643	1.695.000.000	1,648	600.000.000	1,652	700.000.000	1,657	700.000.000	1,662	2.200.000.000	1,662	5.895.000.000	DINAS CIPKATARU
1 05	Penataan Ruang					1.540.317.000		1.980.000.000		1.780.000.000		1.130.000.000		1.130.000.000		7.560.317.000	
1 05 01 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang	-	-	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	1.000.000.000	3 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	9 dokumen	2.850.000.000	DINAS CIPKATARU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 05 01 16	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang	-	2 kali	2 kali	40.000.000	2 kali	100.000.000	10 kali	440.000.000	DINAS CIPKATARU						
		Jumlah dokumen data pemanfaatan ruang	-	-	-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		
1 05 01 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang	-	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	5 dokumen	1.550.000.000	DINAS CIPKATARU
		Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang	4 kali	12 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 kali		
1 05 01.01 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang	4 dokumen	-	2 dokumen	1.200.317.000	2 dokumen	530.000.000	2 dokumen	330.000.000	2 dokumen	330.000.000	1 dokumen	330.000.000	7 dokumen	2.720.317.000	BAPPEDA
		Jumlah rancangan perda tata ruang	6 raperda	6 raperda	6 raperda		2 raperda		2 raperda		2 raperda				10 raperda		
		Penyebarluasan informasi penataan ruang	-	100%	100%								100%		100%		
		Pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	100%	100%			100%								100%		
1 06	Perencanaan Pembangunan					3.763.963.000		5.259.555.000		4.501.500.000		4.341.500.000		4.517.000.000		22.383.518.000	
1 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	350.763.000	12 bln	464.555.000	12 bln	421.500.000	12 bln	441.500.000	12 bln	442.000.000	12 bln	2.120.318.000	BAPPEDA
1 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	192.000.000	100 %	1.230.000.000	100 %	640.000.000	100 %	250.000.000	100 %	260.000.000	100 %	2.572.000.000	BAPPEDA
1 06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 orang	5 orang	10 orang	45.000.000	10 orang	50.000.000	50 orang	245.000.000	BAPPEDA						
1 06 01 15	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase keterisian data/informasi	60 %	60 %	64 %	190.000.000	68 %	210.000.000	72 %	240.000.000	76 %	265.000.000	80 %	275.000.000	80 %	1.180.000.000	BAPPEDA
1 06 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani	80 %	80 %	80 %	75.000.000	80 %	75.000.000	80 %	75.000.000	80 %	75.000.000	80 %	75.000.000	80 %	375.000.000	BAPPEDA
1 06 01 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	350.000.000	1 dokumen	100.000.000	6 dokumen	750.000.000	BAPPEDA						
1 06 01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparat perencana yang meningkat kapasitasnya	-	165 orang	145 orang	144.500.000	-	-	150 orang	375.000.000	-	-	150 orang	250.000.000	445 orang	769.500.000	BAPPEDA
1 06 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	6 dokumen	11 dokumen	1.095.000.000	9 dokumen	595.000.000	9 dokumen	630.000.000	10 dokumen	1.045.000.000	11 dokumen	1.600.000.000	50 dokumen	4.965.000.000	BAPPEDA
		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	-	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		1 dokumen		6 dokumen		
		Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	85 %	90 %	91 %		92 %		93 %		94 %		95 %		95 %		
1 06 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	305.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	400.000.000	4 dokumen	1.050.000.000	2 dokumen	500.000.000	12 dokumen	2.605.000.000	BAPPEDA
		Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP	5 klaster	6 klaster	7 klaster		8 klaster		8 klaster		8 klaster		9 klaster		9 klaster		
1 06 01 23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	175.000.000	5 dokumen	395.000.000	5 dokumen	395.000.000	4 dokumen	215.000.000	4 dokumen	215.000.000	22 dokumen	1.395.000.000	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 06 01 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	297.000.000	3 dokumen	925.000.000	2 dokumen	135.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	85.000.000	9 dokumen	1.527.000.000	BAPPEDA
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		
1 06 01 26	Program Pengembangan Penelitian Daerah	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah			2 dokumen	325.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	375.000.000	8 dokumen	1.425.000.000	BAPPEDA
1 06 01.02 25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana	-	-	1 dok	100.000.000	1 dok	150.000.000	-	-	-	-	-	-	2 dok	250.000.000	BPBD
1 06 01.01 15	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah Dokumen data perencanaan dan evaluasi capaian kinerja	-	-	2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000	1 dok	50.000.000	7 dok	500.000.000	DINAS CIPKATARU
1 06 01.01 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	100%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	300.000.000	DINAS CIPKATARU
1 06 01.01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Review RPLJM	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	300.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	300.000.000	DINAS CIPKATARU
1 06 03.01 16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama	30 buku	30 buku	30 buku	15.000.000	30 buku	15.000.000	30 buku	15.000.000	30 buku	15.000.000	30 buku	15.000.000	150 buku	75.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 06 03.01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kinerja daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	6 dokumen	675.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 06 03.05 16	Program kerjasama pembangunan	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani	80%	80%	80%	52.000.000	80%	75.000.000	80%	75.000.000	80%	75.000.000	80%	75.000.000	80%	352.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
1 06 12 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 dokumen	2.700.000	KECAMATAN UNDAAN
1 07	Perhubungan					16.860.031.000		11.880.161.000		13.563.000.000		13.142.539.000		12.965.728.000		68.411.459.000	
1 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	1.409.154.000	12 bln	2.438.161.000	12 bln	2.438.000.000	12 bln	2.454.000.000	12 bln	2.470.728.000	12 bln	11.210.043.000	DINHUBKOMINFO
1 07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	797.232.000	100%	3.873.010.000	100%	3.525.000.000	100%	3.190.000.000	100%	1.675.000.000	100%	13.060.242.000	DINHUBKOMINFO
1 07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	100%	70.600.000	100%	42.000.000	100%	60.000.000	-	-	100%	65.000.000	100%	237.600.000	DINHUBKOMINFO
1 07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	6 orang	12 orang	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	50 orang	200.000.000	DINHUBKOMINFO
1 07 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	75.000.000	100%	175.000.000	DINHUBKOMINFO
1 07 01 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,99	1,86	1,74	2.475.396.000	1,63	1.995.000.000	1,59	1.258.010.000	1,49	823.010.000	1,39	1.793.010.000	1,39	8.344.426.000	DINHUBKOMINFO
1 07 01 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah arus penumpang angkutan umum	875.117 orang	875.992 orang	876.868 orang	1.320.000.000	877.745 orang	250.000.000	878.623 orang	750.000.000	879.501 orang	1.300.000.000	880.381 orang	975.000.000	4.393.118 orang	4.595.000.000	DINHUBKOMINFO
		Persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
1 07 01 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio izin trayek	0,000753	0,000733	0,000737	427.600.000	0,000754	400.000.000	0,000756	240.000.000	0,000766	633.539.000	0,000775	330.000.000	0,000775	2.031.139.000	DINHUBKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1 08 01 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya luas tutupan lahan	0,24%	0,37%	0,44%	3.579.620.000	0,54%	1.500.000.000	0,64%	1.500.000.000	0,74%	1.500.000.000	0,84%	2.600.000.000	0,84%	10.679.620.000		KANTOR LH
		Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	20,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
1 08 01 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,14%	0,21%	0,25%	100.000.000	0,30%	2.100.000.000	0,35%	2.100.000.000	0,40%	2.100.000.000	0,45%	2.100.000.000	0,45%	8.500.000.000		KANTOR LH
1 08 01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyediaan akses informasi lingkungan	75%	75%	100%	80.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	175.000.000	100%	130.000.000	100%	785.000.000		KANTOR LH
1 08 01 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak	40%	100%	0%	-	100%	60.000.000	100%	67.000.000	100%	74.000.000	100%	81.000.000	100%	282.000.000		KANTOR LH
1 08 01 25	Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di Bidang LH	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH	0,051	0,075	0,093	37.400.000	0,123	70.000.000	0,121	75.000.000	0,090	48.000.000	0,089	42.000.000	0,506	272.400.000		KANTOR LH
1 08 01.01 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	82%	84,60%	85%	5.104.688.000	86%	7.000.000.000	87%	8.430.070.000	88%	7.000.000.000	89%	10.565.000.000	89%	38.099.758.000		DINAS CIPKATARU
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,277	0,270	0,308		0,349		0,390		0,429		0,454		0,454			
1 08 01.01 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi RTH Publik	5%	5%	5,2%	1.009.000.000	6%	2.985.500.000	7%	3.000.000.000	8%	3.500.000.000	9%	4.000.000.000	9%	14.494.500.000		DINAS CIPKATARU
1 09	Pertanahan					35.360.509.000		19.860.000.000		11.292.988.000		6.460.000.000		6.465.000.000		79.438.497.000		
1 09 01 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten	-	-	890.010 m2	35.020.520.000	1.069.990 m2	18.050.000.000	1.935,195 m2	4.837.988.000					1.961.935,195 m2	57.908.508.000		DINAS CIPKATARU
1 09 01 18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Sistem informasi pertanahan	-	-	-		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	200.000.000		DINAS CIPKATARU
1 09 02 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten	-	-	-				41.500 m2	6.275.000.000	41.500 m2	6.275.000.000	41.500 m2	6.275.000.000	124.500 m2	18.825.000.000		DINAS BPESDM
1 09 03 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten	-	-	-				5.186 m2	1.640.000.000					5.186 m2	1.640.000.000		DINHUBKOMINFO
1 09 03.10 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	persentase luas lahan bersertifikat	-	-	5,45%	150.000.000	5,45%	105.000.000	5,45%	110.000.000	5,45%	115.000.000	5,45%	120.000.000	27,25%	600.000.000		BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
1 09 03.10 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani	3 kasus	6 kasus	3 kasus	30.000.000	3 kasus	15.000.000	3 kasus	20.000.000	3 kasus	20.000.000	3 kasus	20.000.000	15 kasus	105.000.000		BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
1 09 22 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	0%	0%	0,15%	159.989.000									0,15%	159.989.000		KELURAHAN WERGU KULON

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil				9.235.927.000		4.275.771.000		4.466.967.000		4.606.146.000		4.845.324.000		27.430.135.000				
1 10 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran yang terselenggara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	412.284.000	12 bulan	317.789.000	12 bulan	331.967.000	12 bulan	346.146.000	12 bulan	360.324.000	60 bulan	1.768.510.000	DINAS DUKCAPIL		
1 10 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana aparatur yang tersedia	100 %	100 %	100 %	1.990.275.000	100 %	417.982.000	100 %	425.000.000	100 %	450.000.000	100 %	475.000.000	100 %	3.758.257.000	DINAS DUKCAPIL		
1 10 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	-	-	12 bulan	60.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	140.000.000	DINAS DUKCAPIL								
1 10 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-			100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	40.000.000	DINAS DUKCAPIL		
1 10 01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan e-KTP		93,50%	94,70%	6.670.868.000	95,50%	3.510.000.000	96,70%	3.680.000.000	97,50%	3.780.000.000	100%	3.980.000.000	100%	21.620.868.000	DINAS DUKCAPIL		
		Rasio bayi berakte kelahiran		83%	86%		89%		92%		95%		100%		100%				
		Rasio pasangan berakte nikah		13%	14%		15%		16%		17%		18%		18%				
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		687	735		786		841		900		950		950				
		Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 10 09 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	5.000.000	0	-	-	-	-	-	-	100%	5.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU			
1 10 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	8.500.000	0%	-	-	-	-	-	-	100%	8.500.000	KECAMATAN KOTA			
1 10 11 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	8.000.000	0%	-	-	-	-	-	-	100%	8.000.000	KECAMATAN JATI			
1 10 12 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	21.000.000	0%	-	-	-	-	-	-	100%	21.000.000	KECAMATAN UNDAAN			
1 10 13 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	15.000.000	KECAMATAN MEJOBLO			
1 10 14 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	12.000.000	KECAMATAN JEKULO			
1 10 15 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	14.500.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.500.000	KECAMATAN BAE			
1 10 16 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	11.000.000	KECAMATAN GEBOG			
1 10 17 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	7.500.000	KECAMATAN DAWE			
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.412.750.000		3.700.000.000		3.725.000.000		3.725.000.000		3.725.000.000		19.287.750.000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 11 01 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,04%	5,04%	5,04%	1.118.000.000	5,04%	500.000.000	5,04%	500.000.000	5,04%	500.000.000	5,04%	500.000.000	5,04%	3.118.000.000	BMPKPB
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	13,33%	13,33%	13,33%		13,33%		13,33%		13,33%		13,33%		13,33%		
		Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)	100%	100%	100%		-		-		-		-		100%		
1 11 01 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos)	11,77%	11,77%	11,77%	100.000.000	11,77%	100.000.000	11,77%	100.000.000	11,77%	100.000.000	11,77%	100.000.000	11,77%	500.000.000	BMPKPB
1 11 01 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	475.000.000	BMPKPB
		Cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 11 01 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,63%	94,63%	94,63%	3.000.000.000	94,64%	3.000.000.000	94,64%	3.000.000.000	94,65%	3.000.000.000	94,65%	3.000.000.000	94,65%	15.000.000.000	BMPKPB
1 11 09 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	8.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 11 10 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	15.000.000	KECAMATAN KOTA
1 11 11 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	12.000.000	KECAMATAN JATI
1 11 12 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	12.000.000	KECAMATAN UNDAAN
1 11 13 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak	-	100 orang	110 orang	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 orang	5.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 11 13 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	15.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 11 14 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	17.500.000	KECAMATAN JEKULO
1 11 14 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	33.000.000	KECAMATAN BAE
1 11 16 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	11.000.000	KECAMATAN GEBOG
1 11 17 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok PKK	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok	7.500.000	KECAMATAN DAWE
1 11 18 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	7.750.000									1 organisasi	7.750.000	KELURAHAN PURWOSARI
1 11 19 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	6.000.000									1 organisasi	6.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
1 11 20 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	8.000.000									1 organisasi	8.000.000	KELURAHAN PANJUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 11 21 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	7.000.000										1 organisasi	7.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
1 11 22 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	5.000.000										1 organisasi	5.000.000	KELURAHAN WERGU KULON
1 11 23 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	7.500.000										1 organisasi	7.500.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
1 11 24 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	6.500.000										1 organisasi	6.500.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
1 11 25 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	6.000.000										1 organisasi	6.000.000	KELURAHAN KERJASAN
1 11 26 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	PKK aktif	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	5.000.000										1 organisasi	5.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					2.894.920.000		5.341.961.000		6.024.723.000		6.707.485.000		7.390.248.000			28.359.337.000	
1 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	261.512.000	12 bln	269.599.000	12 bln	285.748.000	12 bln	301.896.000	12 bln	318.045.000	12 bln	1.436.800.000		BPMPKB
1 12 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	912.000.000	100 %	2.762.011.000	100 %	3.219.224.000	100 %	3.676.438.000	100 %	4.133.652.000	100 %	14.703.325.000		BPMPKB
1 12 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	3 orang	3 orang	3 orang	2.300.000	3 orang	2.500.000	15 orang	12.300.000		BPMPKB						
1 12 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	-	100 %	12.000.000	100 %	13.000.000	100 %	14.000.000	100 %	15.000.000	100 %	54.000.000		BPMPKB
1 12 01 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	82,35%	82,35%	82,35%	1.269.108.000	83,4%	1.133.916.000	83,4%	1.211.030.000	83,45%	1.288.144.000	83,45%	1.365.258.000	83,45%	6.267.456.000		BPMPKB
		Persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I	31,31%	31,31%	31,31%		31,30%		31,30%		31,29%		31,29%		31,29%			
1 12 01 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	1,62%	1,62%	1,62%	220.000.000	1,61%	288.000.000	1,61%	328.000.000	1,60%	368.000.000	1,60%	408.000.000	1,60%	1.612.000.000		BPMPKB
1 12 01 17	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW)	100%	100%	100%	130.000.000	100%	573.935.000	100%	665.221.000	100%	756.507.000	100%	847.793.000	100%	2.973.456.000		BPMPKB
1 12 01 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah penemuan penderita HIV AIDS	40 orang	40 orang	40 orang	100.000.000	40 orang	300.000.000	40 orang	1.300.000.000		BPMPKB						
1 13	Sosial					1.798.044.000		1.685.180.000		1.406.058.000		1.553.684.000		1.616.498.000		8.059.464.000		
1 13 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran yang terselenggara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	248.352.000									12 bulan	248.352.000		BPBD
1 13 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana aparatur yang tersedia	100 %	100 %	100 %	147.196.000									100 %	147.196.000		BPBD
1 13 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga terampil penanggulangan bencana	-	25 orang	5 orang	20.000.000									25 orang	20.000.000		BPBD
1 13 01.01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan	90 KK	90 KK	90 KK	300.000.000	90 KK	264.266.000	90 KK	290.580.000	90 KK	316.894.000	90 KK	316.894.000	450 KK	1.488.634.000		DINSOSNAKER-TRANS
1 13. 01.01 16	Program Palayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan.	0 orang	0 orang	0 orang	209.196.000	90 orang	164.664.000	90 orang	191.549.000	90 orang	218.434.000	90 orang	245.319.000	360 orang	1.029.162.000		DINSOSNAKER-TRANS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012 (4a)	Tahun 2013 (4b)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah PMKS yang terdata	15.000 orang	10.000 orang	9000 orang		8000 orang		7000 orang		6000 orang		5000 orang		5000 orang		
		Jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center											1 unit		1 unit		
1 13 01.01 17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan.	150 orang	75 orang	90 orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 orang	300.000.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 13 01.01 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang cacat dan trauma	0 orang	0 orang	-	-	25 orang	75.000.000	25 orang	125.000.000	25 orang	125.000.000	25 orang	125.000.000	100 orang	450.000.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 13 01.01 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung	2412 orang	2000 orang	-	-	2000 orang	500.000.000	2000 orang	50.000.000	2000 orang	50.000.000	2000 orang	50.000.000	2000 orang	650.000.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 13 01.01 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial	193 orang	355 orang	50 orang	100.000.000	70 orang	150.000.000	80 orang	164.286.000	90 orang	178.571.000	100 orang	192.857.000	100 orang	785.714.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 13 01.01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan orsos, PSM, karangtaruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif	377 buah	377 buah	377 buah	60.000.000		59.833.000		68.833.000		77.833.000		86.833.000	377 buah	353.332.000	DINSOSNAKER-TRANS
		Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial					2 WKSBM										
1 13 03.07 16	Program Palayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional dan fasilitasi resepsi kenegaraan	3 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	151.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kegiatan	151.300.000	BAGIAN KESRA
1 13 03.07 22	Program peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama	Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	90 orang	90 orang	90 orang	262.000.000	75 orang	325.000.000	80 orang	350.000.000	100 orang	400.000.000	100 orang	400.000.000	445 orang	1.737.000.000	BAGIAN KESRA
		Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama			60%		70%		80%		85%		90%		90%		
		pelaksanaan Hisab dan Rukyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiah dan sholat fardlu	4 keg.	4 keg.	4 keg.		4 keg.		4 keg.		4 keg.		4 keg.		4 keg.		
		jumlah pengajian selapanan	12 keg.	12 keg.	12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		
		jumlah penyuhuran hibah dan Bansos keagamaan	12 keg.	12 keg.	12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		
1 13 09 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	8.000.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	42.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 13 10 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	16.000.000	100%	21.000.000	100%	26.000.000	100%	31.000.000	100%	94.000.000	KECAMATAN KOTA
1 13 11 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	8.000.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000	100%	44.000.000	KECAMATAN JATI
1 13 12 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	13.750.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.000.000	100%	63.250.000	KECAMATAN UNDAAN
1 13 13 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	110.000.000	KECAMATAN MEJOBO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1 13 14 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	13.000.000	100%	19.000.000	100%	21.500.000	100%	22.500.000	100%	76.000.000	KECAMATAN JEKULO		
1 13 15 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	40.000.000	KECAMATAN BAE		
1 13 16 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 13 17 22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	0	-	100%	22.667.000	100%	25.810.000	100%	28.952.000	100%	32.095.000	100%	109.524.000	KECAMATAN DAWE		
1 14	Ketenagakerjaan							34.193.376.000		15.444.893.000		24.320.633.000		19.089.647.000		20.988.585.000		114.037.134.000	
1 14 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran yang terselenggara	12 bulan	12 bulan	12 bulan			443.376.000	12 bulan	483.275.000	12 bulan	520.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	2.596.651.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 14 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana aparatur yang tersedia	100 %	100 %	100 %			1.325.000.000	100 %	245.000.000	100 %	245.000.000	100 %	245.000.000	100 %	245.000.000	100 %	2.305.000.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 14 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah personel yang mengikuti diklat formal	4 Orang	4 Orang	4 Orang			25.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	20 Orang	65.000.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 14 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-				100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	20.000.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 14 01. 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	0,14	0,14	0,16			23.525.000.000	0,13	7.715.411.000	0,30	17.918.136.000	0,24	14.020.861.000	0,28	15.873.585.000	1,11	79.052.993.000	DINSOSNAKER-TRANS
		rasio ketergantungan penduduk	48,28	45,37	45,36				45,35		45,33		45,32		45,31		45,31		
1 14 01. 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar	9.253 orang	8.131 orang	15.000 orang			8.675.000.000	15.000 orang	6.731.207.000	15.000 orang	5.367.497.000	15.000 orang	4.003.786.000	15.000 orang	4.000.000.000	75.000 orang	28.777.490.000	DINSOSNAKER-TRANS
		Jumlah pencari kerja ditempatkan	3.693 orang	4.254 orang	4.500 orang				4.500 orang		4.500 orang		4.500 orang		4.500 orang		22.500 orang		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,83	60,89	70,01				72,25		74,42		76,54		78,28		78,28		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,85	5,75	5,7				5,65		5,60		5,55		5,55		5,55		
		Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara	160 orang	360 orang	900 orang				900 orang		900 orang		900 orang		1800 orang		5400 orang		
1 14 01. 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	5 kasus	5 kasus			200.000.000	5 kasus	255.000.000	5 kasus	255.000.000	5 kasus	255.000.000	5 kasus	255.000.000	25 kasus	1.220.000.000	DINSOSNAKER-TRANS
1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							3.592.129.000		5.016.458.000		7.000.208.000		10.497.518.000		10.489.828.000		36.596.141.000	
1 15 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan			433.834.000	12 bulan	447.632.000	12 bulan	460.842.000	12 bulan	474.052.000	12 bulan	487.262.000	12 bulan	2.303.622.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
1 15 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %			633.000.000	100 %	568.260.000	100 %	650.000.000	100 %	700.000.000	100 %	750.000.000	100 %	3.301.260.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
1 15 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kinerja aparatur	1	1	1			25.000.000	1	21.933.000		23.033.000	1	24.133.000	1	25.233.000	1	119.332.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
1 15 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kinerja aparatur	1	1	1			25.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	92.500.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 15 01 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM	11.596	11.596	11.717	30.000.000	11.833	136.000.000	11.947	150.000.000	12.059	165.000.000	12.172	180.000.000	12.172	661.000.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
		Jumlah Usaha Mikro		11.047	11.159			11.266	11.371		11.474		11.578		11.578		
		Jumlah Usaha Kecil		429	434			439	444		449		454		454		
		Jumlah Usaha Menengah		120	124			128	132		136		140		140		
1 15 01 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM yang difasilitasi	0,78	1,03	1,02	265.000.000	1,01	1.100.000.000	1,00	2.750.000.000	1,00	2.900.000.000	0,99	4.100.000.000	4,93	11.115.000.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
1 15 01 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Pameran/ Ekspo produk UMKM	3	2	6	1.350.000.000	6	1.653.333.000	6	1.866.333.000	20	5.079.333.000	15	3.792.333.000	53	13.741.332.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran	68	72	72		72		72		72		72		360		
		Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan			0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		1,6		
1 15 01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	87	87	89	610.000.000	90	941.800.000	92	950.000.000	93	1.000.000.000	94	1.000.000.000	94	4.501.800.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
1 15 09 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	15 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	25.000.000	15 UMKM	15.000.000	75 UMKM	85.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU						
1 15 10 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	25 UMKM	25 UMKM	25 UMKM	15.000.000	25 UMKM	15.000.000	25 UMKM	15.000.000	25 UMKM	15.000.000	25 UMKM	15.000.000	125 UMKM	75.000.000	KECAMATAN KOTA
1 15 11 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	6 UMKM	4 UMKM	4 UMKM	40.000.000	4 UMKM	15.000.000	20 UMKM	100.000.000	KECAMATAN JATI						
1 15 12 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	16 UMKM	16 UMKM	16 UMKM	25.000.000	16 UMKM	15.000.000	80 UMKM	85.000.000	KECAMATAN UNDAAN						
1 15 13 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	15.000.000	5 UMKM	15.000.000	5 UMKM	15.000.000	5 UMKM	15.000.000	5 UMKM	15.000.000	25 UMKM	75.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 15 14 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	6 UMKM	6 UMKM	6 UMKM	40.000.000	6 UMKM	15.000.000	30 UMKM	100.000.000	KECAMATAN JEKULO						
1 15 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	6 UMKM	6 UMKM	6 UMKM	16.295.000	6 UMKM	15.000.000	30 UMKM	76.295.000	KECAMATAN BAE						
1 15 16 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	11 UMKM	11 UMKM	11 UMKM	34.000.000	11 UMKM	15.000.000	55 UMKM	94.000.000	KECAMATAN GEBOG						
1 15 17 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	18 UMKM	18 UMKM	18 UMKM	10.000.000	18 UMKM	15.000.000	90 UMKM	70.000.000	KECAMATAN DAWE						
1 16	Penanaman Modal					1.473.887.000		2.443.877.000		3.814.501.000		3.709.628.000		3.942.250.000		15.384.143.000	
1 16 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	468.816.000	12 bulan	622.000.000	12 bulan	705.500.000	12 bulan	777.000.000	12 bulan	766.000.000	12 bulan	3.339.316.000	KPPT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 16 01 02	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	181.521.000	100 %	181.377.000	100 %	441.001.000	100 %	214.628.000	100 %	308.250.000	100 %	1.326.777.000	KPPT
1 16 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	15.000.000	100 %	27.500.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000	100 %	147.500.000	KPPT
1 16 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur		5 orang	5 orang	12.000.000	5 orang	3.000.000	25 orang	24.000.000	KPPT						
1 16 01 15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor		9	11	426.050.000	13	840.000.000	15	1.445.000.000	17	1.515.000.000	19	1.600.000.000	19	5.826.050.000	KPPT
		Jumlah penerbitan ijin investasi	-	12	24		36		48		60		72		72		
1 16 01 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor berskala Nasional	11	11	12	370.500.000	13	770.000.000	14	1.190.000.000	15	1.165.000.000	16	1.225.000.000	16	4.720.500.000	KPPT
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (dlm juta)	159.419	167.390	175.759		184.547		193.775		203.464		213.637		213.637		
		Daya serap tenaga kerja	32.154	33.762	35.450		37.222		39.083		41.038		43.089		43.089		
		Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	12.163	7.511	8.070		8.877		9.765		10.741		11.815		11.815		
		Jumlah lembaga keuangan bank/non bank		57	69		81		93		105		117		117		
		Lama proses perijinan	10 hari	10 hari	10 hari		10 hari		10 hari		10 hari		10 hari		10 hari		
1 17	Kebudayaan					4.833.250.000		2.768.327.000		3.285.317.000		3.446.178.000		3.106.566.000		17.439.638.000	
1 17 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan operasional dan sarpras kantor	12 bl	12 bl	12 bl	895.500.000	12 bl	663.900.000	12 bl	663.900.000	12 bl	700.000.000	12 bl	736.000.000	12 bl	3.659.300.000	DISBUDPAR
1 17 01 02	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	Penyediaan operasional dan sarpras kantor	12 bl	12 bl	12 bl	369.500.000	12 bl	235.000.000	12 bl	235.200.000	12 bl	249.500.000	12 bl	263.655.000	12 bl	1.352.855.000	DISBUDPAR
1 17 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan profesionalisme SDM	12 bl	12 bl	12 bl	50.000.000	12 bl	28.200.000	12 bl	30.000.000	12 bl	31.620.000	12 bl	33.250.000	12 bl	173.070.000	DISBUDPAR
1 17 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kinerja aparatur			100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000	DISBUDPAR
1 17 01 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi	30	32	32	500.000.000	34	281.994.000	36	782.734.000	38	798.250.000	40	313.630.000	40	2.676.608.000	DISBUDPAR
		Jumlah tradisi desa	-	-	26		26		26		27		27		27		
1 17 01 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah BCB yang direvitalisasi	1	1	5	1.225.000.000	5	746.000.000	5	746.000.000	5	791.700.000	5	837.690.000	5	4.346.390.000	DISBUDPAR
		dan Jumlah seni budaya yg dilestarikan	-	-	-		5		5		5		5		5		
		Jumlah BCB	156	156	156		157		158		159		160		160		
1 17 01 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda	-	-	160	40.000.000	170	49.000.000	180	49.000.000	190	51.635.000	200	54.308.000	2.000	243.943.000	DISBUDPAR
1 17 01 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	7	1.595.000.000	7	564.000.000	7	564.000.000	7	594.440.000	7	625.100.000	7	3.942.540.000	DISBUDPAR
		Jumlah sarana disitus patiyam dan Taman Budaya	2	2	5		5		5		5		5		5		
1 17 09 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	25.000.000	1 kali	2.000.000	5 kali	33.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU						
1 17 10 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	4.000.000	1 kali	2.000.000	5 kali	12.000.000	KECAMATAN KOTA						
1 17 11 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	0 kali	1 kali	12.000.000	1 kali	10.000.000	5 kali	52.000.000	KECAMATAN JATI						
1 17 12 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	-	1 kali	25.000.000	1 kali	38.500.000	1 kali	42.350.000	1 kali	46.500.000	1 kali	50.000.000	5 kali	202.350.000	KECAMATAN UNDAAN
1 17 13 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 kali	2 kali	2 kali	15.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	30.000.000	2 kali	35.000.000	10 kali	125.000.000	KECAMATAN MEJOBLO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		16	16
1 17 14 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0 kali	0 kali	3 kali	15.000.000	3 kali	16.000.000	3 kali	17.000.000	3 kali	18.000.000	3 kali	19.000.000	15 kali	85.000.000	KECAMATAN JEKULO		
1 17 15 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	5.250.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	5 kali	65.250.000	KECAMATAN BAE		
1 17 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	12.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	5 kali	212.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 17 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	20.000.000	1 kali	21.733.000	1 kali	26.133.000	1 kali	30.533.000	1 kali	34.933.000	1 kali	133.332.000	KECAMATAN DAWE		
1 18	Kepemudaan dan Olah Raga					8.787.646.000		7.530.000.000		8.293.200.000		18.128.470.000		30.026.728.000		72.766.044.000			
1 18 01 15	Program Pengembangan dan Keresian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	13	15	45.000.000	15	154.000.000	15	169.400.000	15	186.340.000	15	204.974.000	15	759.714.000	DINDIKPORA		
1 18 01 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	23	26	26	100.000.000	26	368.500.000	26	405.350.000	26	445.885.000	26	490.473.000	26	1.810.208.000	DINDIKPORA		
1 18 01 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah organisasi pemuda	23	26	26	25.000.000	26	66.000.000	26	72.600.000	26	79.860.000	26	87.846.000	26	331.306.000	DINDIKPORA		
1 18 01 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	13	15	45.000.000	15	143.000.000	15	157.300.000	15	173.030.000	15	190.333.000	15	708.663.000	DINDIKPORA		
1 18 01 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	14	14	14	1.015.300.000	14	1.105.500.000	14	1.216.050.000	14	1.337.655.000	14	1.471.420.000	14	6.145.925.000	DINDIKPORA		
		Jumlah organisasi olahraga	32	36	36										36				
		Jumlah Klub Olah Raga	132	132	132										132				
1 18 01 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	7	7	7	7.400.000.000	7	5.500.000.000	7	6.050.000.000	7	15.655.000.000	7	27.320.000.000	7	61.925.000.000	DINDIKPORA		
		Jumlah Lapangan olahraga	248	248	248										248				
		Jumlah Gelanggang olahraga	1	1	1										1				
		Jumlah balai remaja	132	132	132										132				
1 18 09 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	11.000.000	1 organisasi	14.000.000	1 organisasi	17.000.000	1 organisasi	19.000.000	1 organisasi	69.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU		
1 18 09 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	5.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU		
1 18 10 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	7.000.000	1 organisasi	17.000.000	1 organisasi	22.000.000	1 organisasi	22.000.000	1 organisasi	22.500.000	1 organisasi	90.500.000	KECAMATAN KOTA		
1 18 10 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan keolahragaan	2 keg	2 keg	2 keg	5.000.000	2 keg	10.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	25.000.000	10 keg	75.000.000	KECAMATAN KOTA		
1 18 10 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	100%	100%	100%	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	10.000.000	KECAMATAN KOTA		
1 18 11 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	7.000.000	1 organisasi	17.000.000	1 organisasi	22.000.000	1 organisasi	27.000.000	1 organisasi	78.000.000	KECAMATAN JATI		
1 18 11 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	3.000.000	KECAMATAN JATI		
1 18 12 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	13.500.000	1 organisasi	15.000.000	1 organisasi	16.800.000	1 organisasi	18.000.000	1 organisasi	71.300.000	KECAMATAN UNDAAN		
1 18 13 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	22.000.000	1 organisasi	27.000.000	1 organisasi	32.000.000	1 organisasi	37.000.000	1 organisasi	123.000.000	KECAMATAN MEJOBLO		
1 18 13 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	5.000.000	KECAMATAN MEJOBLO		
1 18 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	100%	100%	100%	7.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	7.000.000	KECAMATAN MEJOBLO		
1 18 14 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	10.000.000	1 organisasi	15.500.000	1 organisasi	17.000.000	1 organisasi	19.400.000	1 organisasi	21.182.000	1 organisasi	83.082.000	KECAMATAN JEKULO		
1 18 14 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	2 keg	2 keg	1 keg	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	6.000.000	KECAMATAN JEKULO		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 18 15 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	10.000.000	1 organisasi	17.000.000	1 organisasi	17.000.000	1 organisasi	20.000.000	1 organisasi	12.000.000	1 organisasi	76.000.000	KECAMATAN BAE
1 18 15 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	4.540.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	4.540.000	KECAMATAN BAE
1 18 16 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	14.550.000	1 organisasi	42.000.000	1 organisasi	182.550.000	KECAMATAN GEBOG						
1 18 16 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	KECAMATAN GEBOG
1 18 17 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	10.000.000	1 organisasi	4.000.000	1 organisasi	26.000.000	KECAMATAN DAWE						
1 18 17 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	3.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	3.500.000	KECAMATAN DAWE
1 18 18 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	3.000.000	1 organisasi	3.000.000	1 organisasi	3.000.000	1 organisasi	3.000.000	1 organisasi	3.000.000	1 organisasi	15.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
1 18 18 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	2.296.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	2.296.000	KELURAHAN PURWOSARI
1 18 19 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	4.000.000	1 organisasi	21.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN						
1 18 20 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	2.500.000	1 organisasi	3.500.000	1 organisasi	3.750.000	1 organisasi	4.000.000	1 organisasi	4.000.000	1 organisasi	17.750.000	KELURAHAN PANJUNAN
1 18 21 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	-	-	1 organisasi	3.500.000	1 organisasi	3.750.000	1 organisasi	4.000.000	1 organisasi	4.000.000	1 organisasi	15.250.000	KELURAHAN WERGU WETAN
1 18 21 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan keolahragaan	1 keg	1 keg	-	-	1 keg	1.000.000	5 keg	4.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN						
1 18 21 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	-	-	-	-	100%	2.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	2.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
1 18 22 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1.500.000	1 organisasi	1.500.000	1 organisasi	1.500.000	1 organisasi	4.000.000	1 organisasi	1.500.000	1 organisasi	10.000.000	KELURAHAN WERGU KULON
1 18 22 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	100%	100%	100%	4.000.000	-	0	-	0	-	0	-	-	100%	4.000.000	KELURAHAN WERGU KULON
1 18 23 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	2.460.000	1 organisasi	2.500.000	1 organisasi	12.460.000	KELURAHAN MLATI KIDUL						
1 18 24 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	2.000.000	1 organisasi	3.000.000	1 organisasi	14.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITTO						
1 18 25 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	6.000.000	1 organisasi	26.000.000	KELURAHAN KERJASAN
1 18 26 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	3.000.000	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	23.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN						
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					11.955.936.000		15.866.121.000		11.815.196.000		12.184.440.000		12.901.593.000		64.723.286.000	
1 19 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran yang terselenggara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	108.478.000	12 bulan	82.870.000	12 bulan	76.679.000	12 bulan	71.488.000	12 bulan	65.298.000	12 bulan	404.813.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS
1 19 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana aparatur yang tersedia	100 %	100 %	100 %	127.125.000	100 %	104.377.000	100 %	118.001.000	100 %	131.626.000	100 %	145.250.000	100 %	626.379.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS
1 19 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur kesbangpol dan linmas yang mengikuti diklat/pelatihan	5 orang	5 orang	1 orang	2.860.000	2 orang	3.000.000	9 orang	14.860.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS						
1 19 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	6 laporan	10.000.000	6 laporan	8.000.000	6 laporan	5.000.000	6 laporan	3.000.000	6 laporan	26.000.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS
1 19 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran yang terselenggara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	316.484.000	12 bulan	360.500.000	12 bulan	1.758.484.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1 19 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana aparatur yang tersedia	100 %	100 %	100 %	216.000.000	100 %	260.868.000	100 %	260.868.000	100 %	260.868.000	100 %	260.868.000	100 %	1.259.472.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1 19 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian dinas dan/atau dinas lapangan yang tersedia		31 stel	160 stel	130.000.000	160 stel	160.000.000	800 stel	770.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
1 19 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah anggota personel Satpol PP yang mengikuti diklat/sosialisasi			100 orang	67.994.000	100 orang	200.000.000	500 orang	867.994.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
1 19 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur					100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1 19 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran yang terselenggara					12 bulan	298.500.000	12 bulan	353.500.000	12 bulan	408.500.000	12 bulan	463.500.000	12 bulan	1.524.000.000	BPBD		
1 19 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana aparatur yang tersedia					100 %	3.087.000.000	100 %	3.120.000.000	100 %	3.135.000.000	100 %	3.150.000.000	100 %	12.492.000.000	BPBD		
1 19 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga terampil penanggulangan bencana					5 orang	20.000.000	25 orang	80.000.000	BPBD								
1 19 03 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur					100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	40.000.000	BPBD		
1 19 01 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	persentase penurunan konflik di daerah		80%	70%	6.173.870.000	60%	425.000.000	50%	425.000.000	40%	450.000.000	30%	450.000.000	30%	7.923.870.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS		
		Rasio linmas per 10.000 penduduk	59 orang	59 orang	59 orang		59 orang	59 orang	59 orang										
		persentase penanganan gangguan keamanan	75%		75%		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%				
1 19 02 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penurunan tindak kriminalitas di daerah		80%	75%	366.000.000	60%	475.000.000	40%	475.000.000	20%	475.000.000	10%	475.000.000	10%	2.266.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		persentase penurunan konflik di daerah		80%	70%		60%	50%	40%	30%	30%								
		jumlah aduan masyarakat tiap bulan		18	16		15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		Persentase pelanggaran HO		80%	70%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				
		Persentase pelanggaran Perda		80%	70%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				
1 19 01 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah		12 kali	12 kali	666.755.000	12 kali	280.000.000	12 kali	290.000.000	12 kali	300.000.000	12 kali	310.000.000	60 kali	1.846.755.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS		
1 19 02 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah demo, angka kriminalitas dan penegakan perda			70 kali	330.000.000	50 kali	500.000.000	40 kali	500.000.000	25 kali	500.000.000	10 kali	500.000.000	10 kali	2.330.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		Rasio pol PP per 10.000 penduduk	0,7948	0,7948	0,7948		0,7948	0,7948	0,7948	0,7948	0,7948	0,7948	0,7948	0,7948	0,7948				
		Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal					6 kali	6 kali	6 kali										
1 19 01 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan		5 kali	6 kali	243.000.000	22 kali	495.666.000	26 kali	570.380.000	26 kali	645.094.000	25 kali	719.808.000	105 kali	2.673.948.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS		
1 19 01 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pembinaan LSM,Ormas/OKP	75 LSM	75 LSM	45 LSM	115.000.000	47 LSM	200.000.000	48 LSM	225.000.000	50 LSM	250.000.000	52 LSM	275.000.000	52 LSM	1.065.000.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS		
1 19 01 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba		100 orang	200 orang	40.000.000	550 orang	127.250.000	400 orang	130.000.000	400 orang	135.000.000	400 orang	145.000.000	1.950 orang	577.250.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 19 02 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah peredaran miras dan narkoba di masyarakat		150	150	50.000.000	120	50.000.000	90	50.000.000	50	50.000.000	30	50.000.000	30	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase operasi prostitusi		8,3%	8,0%		7%		5%		5%		7%		7%		
		Jumlah pengguna miras dan narkoba di masyarakat		320	300		270		220		150		100		100		
1 19 01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	65%	70%	75%	90.000.000	77%	130.000.000	80%	125.000.000	82%	120.000.000	85%	115.000.000	85%	580.000.000	KANTOR KESBANG-POLINMAS
		Jumlah pembinaan politik daerah	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali		
		Jumlah pendidikan politik masyarakat	1 kali	1 kali	9 kali		4 kali		3 kali		2 kali		1 kali		19 kali		
1 19 03 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah satgas siaga bencana		50 orang	60 orang	200.000.000									60 orang	200.000.000	BPBD
1 19 03 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Desa Tangguh Bencana	0 desa	7 desa	14 desa	1.150.000.000	21 desa	1.350.000.000	28 desa	1.500.000.000	35 desa	1.500.000.000	42 desa	1.500.000.000	42 desa	7.000.000.000	BPBD
		Jumlah Satgas Siaga Bencana					70 orang		80 orang		90 orang		100 orang		100 org		
1 19 03 23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	Persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana		20%	10%	-	73,8%	5.830.000.000	83,8%	1.330.000.000	90%	1.330.000.000	100%	1.350.000.000	100%	9.840.000.000	BPBD
1 19 03.07 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	3 keg	50.000.000	3 keg	52.500.000	3 keg	57.000.000	3 keg	62.000.000	3 keg	221.500.000	BAGIAN KESRA
1 19 03.01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	20 buku	25 buku	25 buku	200.000.000	0	-	0	-	20 buku	40.000.000	25 buku	150.000.000	60 buku	390.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 19 09 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	127.000.000	100%	128.000.000	100%	128.700.000	100%	633.700.000	KECAMATAN KALIWUNGU
		Cakupan patroli petugas Pol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 19 09 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	40 org	40 org	40 org	4.000.000	40 org	5.000.000	200 org	24.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU						
1 19 09 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	16.000.000	100%	31.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 19 09 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	5 posko	5 posko	5 posko	20.000.000	5 posko	31.200.000	5 posko	31.200.000	5 posko	31.100.000	5 posko	31.100.000	5 posko	144.600.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 19 10 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	130.000.000	100%	180.000.000	100%	230.000.000	100%	280.000.000	100%	330.000.000	100%	1.150.000.000	KECAMATAN KOTA
		Cakupan patroli petugas Pol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 19 10 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	60 org	60 org	50 org	3.000.000	50 org	10.000.000	50 org	15.000.000	50 org	20.000.000	50 org	25.000.000	250 org	73.000.000	KECAMATAN KOTA
1 19 10 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	65.000.000	KECAMATAN KOTA
1 19 10 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	1 posko	1 posko	1 posko	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 posko	8.500.000	KECAMATAN KOTA
1 19 11 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	107.700.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	133.000.000	100%	135.000.000	100%	630.700.000	KECAMATAN JATI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Cakupan patroli petugas Pol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 19 11 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	14.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	15.000.000	100%	29.000.000		KECAMATAN JATI	
1 19 11 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	4 posko	3 posko	3 posko	12.800.000	3 posko	12.500.000	3 posko	14.000.000	3 posko	16.000.000	3 posko	18.000.000	3 posko	73.300.000		KECAMATAN JATI	
1 19 12 16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	85.000.000	100%	112.000.000	100%	123.200.000	100%	135.520.000	100%	149.072.000	100%	604.792.000		KECAMATAN UNDAAN	
		Cakupan patroli petugas Pol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 19 12 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	23.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	55.000.000	100%	78.000.000		KECAMATAN UNDAAN	
1 19 12 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	1 posko	1 posko	1 posko	13.000.000	17 posko	63.000.000	17 posko	69.300.000	17 posko	76.000.000	17 posko	83.600.000	17 posko	304.900.000		KECAMATAN UNDAAN	
1 19 13 16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	104.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	354.000.000		KECAMATAN MEJOBLO	
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 19 13 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	75 org	75 org	75 org	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75 org	5.000.000		KECAMATAN MEJOBLO	
1 19 13 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	15.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	45.000.000	100%	60.000.000		KECAMATAN MEJOBLO	
1 19 13 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	1 posko	1 posko	1 posko	15.000.000	1 posko	40.000.000	1 posko	40.000.000	1 posko	45.000.000	1 posko	50.000.000	1 posko	190.000.000		KECAMATAN MEJOBLO	
1 19 14 16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	115.000.000	100%	115.090.000	100%	118.568.000	100%	122.044.000	100%	124.520.000	100%	595.222.000		KECAMATAN JEKULO	
		Cakupan patroli petugas Pol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 19 14 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	10.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	20.877.000	100%	30.877.000		KECAMATAN JEKULO	
1 19 14 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	6 posko	6 posko	6 posko	15.000.000	6 posko	10.000.000	6 posko	55.000.000		KECAMATAN JEKULO							
1 19 15 16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	107.900.000	100%	141.000.000	100%	130.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	673.900.000		KECAMATAN BAE	
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 19 15 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	35 orang	35 orang	35 orang	3.500.000	35 orang	4.000.000	35 orang	5.000.000	35 orang	6.000.000	35 orang	7.000.000	175 orang	25.500.000		KECAMATAN BAE	
1 19 15 19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Angka kriminalitas yang tertangani	12 kasus	12 kasus	12 kasus	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kasus	4.000.000		KECAMATAN BAE	
1 19 15 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	10.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	20.000.000	100%	30.500.000		KECAMATAN BAE	
1 19 15 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	1 posko	1 posko	1 posko	13.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 posko	13.100.000		KECAMATAN BAE	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1 19 16 16	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	103.000.000	100%	110.000.000	100%	123.000.000	100%	123.000.000	100%	123.000.000	100%	582.000.000	KECAMATAN GEBOG		
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 19 16 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	50 org	50 org	50 org	2.000.000	50 org	5.000.000	250 org	22.000.000	KECAMATAN GEBOG								
1 19 16 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	8.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	30.000.000	100%	38.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 19 16 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	1 posko	1 posko	1 posko	16.000.000	1 posko	7.000.000	1 posko	44.000.000	KECAMATAN GEBOG								
1 19 17 16	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	115.000.000	100%	117.000.000	100%	120.000.000	100%	123.000.000	100%	125.000.000	100%	600.000.000	KECAMATAN DAWE		
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 19 17 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	45 org	45 org	45 org	3.500.000	45 org	3.500.000	45 org	3.500.000	45 org	3.500.000	45 org	3.500.000	225 org	17.500.000	KECAMATAN DAWE		
1 19 17 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	20.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	25.000.000	100%	45.000.000	KECAMATAN DAWE		
1 19 17 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	jumlah posko bencana	1 posko	1 posko	1 posko	10.000.000	1 posko	6.500.000	1 posko	36.000.000	KECAMATAN DAWE								
1 19 18 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di perumahan (diluar perda)	100%	100%	100%	5.120.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	25.120.000	KELURAHAN PURWOSARI		
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 19 19 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di perumahan (diluar perda)	100%	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	25.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN		
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 19 20 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di perumahan (diluar perda)	100%	100%	100%	8.550.000	100%	8.650.000	100%	8.750.000	100%	8.850.000	100%	9.000.000	100%	43.800.000	KELURAHAN PANJUNAN		
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 19 21 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di perumahan (diluar perda)	100%	100%	100%	13.500.000	100%	8.650.000	100%	8.750.000	100%	8.850.000	100%	9.000.000	100%	48.750.000	KELURAHAN WERGU WETAN		
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 19 22 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di perumahan (diluar perda)	100%	100%	100%	13.000.000	100%	3.000.000	100%	2.000.000	100%	3.000.000	100%	13.000.000	100%	34.000.000	KELURAHAN WERGU KULON		
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1 19 22 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan pemakai / kasus miras dan narkoba	0	0	10%	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	3.200.000	KELURAHAN WERGU KULON		
1 19 23 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di perumahan (diluar perda)	100%	100%	100%	7.500.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	10.000.000	100%	44.500.000	KELURAHAN MLATI KIDUL		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1 19 24 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)	100%	100%	100%	16.000.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	13.500.000	100%	67.000.000		KELURAHAN MLATI NOROWITO
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1 19 25 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)	100%	100%	100%	10.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	9.000.000	100%	43.000.000		KELURAHAN KERJASAN
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1 19 26 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)	100%	100%	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	48.500.000		KELURAHAN KAJEKSAN
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian					68.123.775.000		58.925.167.000		61.751.917.000		70.476.216.000		64.933.504.000		324.210.579.000		
1 20 03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	105.150.000	12 bln	106.800.000	12 bln	110.300.000	12 bln	115.800.000	12 bln	120.300.000	12 bln	558.350.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 20 03.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	24.993.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	132.993.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 20 03.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	30.000.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 20 03.01 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	7 kali	6 kali	6 kali	45.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	550.000.000	30 kali	745.000.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja	25 kali	25 kali	25 kali	-	25 kali	-	25 kali	-	25 kali	-	25 kali	-	125 kali	-		
		Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	-	1 kali	-	
1 20 03.01 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah kecamatan yang tertib administrasi	9 kec	9 kec			9 kec	15.000.000	9 kec	60.000.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						
1 20 03.01 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	-	-	0%	-	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 20 03.01 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kali	3 kali	3 kali	15.000.000	3 kali	15.000.000	3 kali	15.000.000	3 kali	15.000.000	3 kali	15.000.000	15 kali	75.000.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 20 03.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	136.629.000	12 bln	190.000.000	12 bln	220.000.000	12 bln	240.000.000	12 bln	260.000.000	12 bln	1.046.629.000		BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 20 03.02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	36.966.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	226.966.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 20 03.02 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi Bupati di Desa/Kelurahan	40 kali	28 kali	20 kali	226.495.000	33 kali	424.044.000	33 kali	430.000.000	33 kali	440.000.000	33 kali	450.000.000	152 kali	1.970.539.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 20 03.02 19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase tertib administrasi keuangan desa	45%	45 %	50%	27.000.000	55%	35.000.000	60%	40.000.000	65%	45.000.000	70%	50.000.000	70%	197.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 20 03.02 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	1 kali	1 kali	70.000.000	1 kali	130.000.000	1 kali	140.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	160.000.000	5 kali	650.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 20 03.03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	127.225.000	12 bln	113.802.000	12 bln	582.433.000	BAGIAN HUKUM						
1 20 03.03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	31.980.000	100%	20.205.000	100%	20.955.000	100%	20.955.000	100%	20.955.000	100%	115.050.000	BAGIAN HUKUM
1 20 03.03 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	100 %	100 %	100%	142.565.000	100%	182.785.000	100%	182.785.000	100%	182.785.000	100%	182.785.000	100%	873.705.000	BAGIAN HUKUM
1 20 03.03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum yang disusun dan didistribusikan	5 Ranperda, 25 Perbup., 200 Kep. Bupati, 150 buku	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	498.000.000	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	430.000.000	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	436.497.000	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	448.746.000	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	470.993.000	25 Ranp., 125 Perbup., 500 Kep. Bupati, 1.300 buku	2.284.236.000	BAGIAN HUKUM
		Jumlah Produk Hukum yang didistribusikan	150 buku	260 buku	260 buku		1.300 buku										
		Jumlah sosialisasi ketentuan cukai	5 kali	5 kali	5 kali		25 kali										
1 20 03.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	438.196.000	12 bln	300.000.000	12 bln	1.638.196.000	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT						
1 20 03.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	20.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	92.000.000	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
1 20 03.04 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Pemkab	72 kali	84 kali	72 kali	5.080.000.000	72 kali	1.580.000.000	72 kali	1.585.000.000	72 kali	1.590.000.000	72 kali	1.590.000.000	360 kali	11.425.000.000	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
		Jumlah Sosialisasi cukai melalui media	1 paket	-	1 paket		5 paket										
1 20 03.08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	287.400.000	12 bln	270.000.000	12 bln	272.500.000	12 bln	275.000.000	12 bln	277.500.000	12 bln	1.382.400.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
1 20 03.08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	-	100%	15.000.000	100%	-	100%	15.000.000	100%	-	100%	30.000.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
1 20 03.08 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	100 %	100 %	235.250.000	0%	-	100%	75.000.000	0%	-	100%	80.000.000	100%	390.250.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
1 20 03.08 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen penetapan kinerja dan laporan capaian kinerja dan keuangan	3 dok	3 dok	3 dok	240.000.000	3 dok	45.000.000	3 dok	50.000.000	3 dok	55.000.000	3 dok	65.000.000	3 dok	455.000.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1 20 03.08 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	11 kali	11 kali	11 kali	45.000.000	11 kali	45.000.000	11 kali	50.000.000	11 kali	50.000.000	11 kali	50.000.000	55 kali	240.000.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		
1 20 03.08 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen standart satuan harga	1 dok	1 dok	1 dok	273.100.000	1 dok	50.000.000	5 dok	473.100.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN								
1 20 03.08 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya	-	4 SKPD	4 SKPD	185.000.000	5 SKPD	160.000.000	24 SKPD	825.000.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN								
		Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	-	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok	-	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		
1 20 03.08 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK	4 SKPD	4 SKPD	6 SKPD	435.000.000	7 SKPD	425.000.000	7 SKPD	400.000.000	8 SKPD	450.000.000	8 SKPD	400.000.000	36 SKPD	2.110.000.000	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		
		Tersedianya Pedoman IKM	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD		44 SKPD		44 SKPD		44 SKPD		44 SKPD		44 SKPD		BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		
		Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM	-	12 unit pelayanan	14 unit pelayanan		20 unit pelayanan		20 unit pelayanan		20 unit pelayanan		20 unit pelayanan		40 unit pelayanan		BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		
1 20 03.07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	153.655.000	12 bln	145.000.000	12 bln	155.000.000	12 bln	160.000.000	12 bln	165.000.000	12 bulan	778.655.000	BAGIAN KESRA		
1 20 03.07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	36.345.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100%	124.345.000	BAGIAN KESRA		
1 20 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	1.598.190.000	12 bln	1.700.000.000	12 bln	1.800.000.000	12 bln	1.700.000.000	12 bln	1.800.000.000	12 bln	8.598.190.000	SEKRETARIAT DPRD		
1 20 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	1.110.180.000	100 %	895.000.000	100 %	5.395.000.000	100 %	745.000.000	100 %	895.000.000	100 %	9.040.180.000	SEKRETARIAT DPRD		
1 20 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	297.000.000	100 %	235.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	1.282.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
1 20 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	27 orang	27 orang	20 orang	138.850.000	30 orang	165.000.000	35 orang	175.000.000	35 orang	175.000.000	35 orang	175.000.000	155 orang	828.850.000	SEKRETARIAT DPRD		
1 20 04 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	100 %		100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
1 20 04 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	18 perda	18 perda	18 perda	13.906.998.000	18 perda	11.400.000.000	18 perda	11.500.000.000	18 perda	11.300.000.000	18 perda	11.450.000.000	90 perda	59.556.998.000	SEKRETARIAT DPRD		
1 20 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	558.993.000	12 bln	561.300.000	12 bln	588.200.000	12 bln	561.570.000	12 bln	628.487.000	12 bln	2.898.550.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
1 20 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	3.236.760.000	100 %	2.804.000.000	100 %	1.106.000.000	100 %	262.000.000	100 %	282.000.000	100 %	7.690.760.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
1 20 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	3.024.000.000	100 %	2.742.000.000	100 %	3.265.000.000	100 %	3.287.000.000	100 %	3.278.000.000	100 %	15.596.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
1 20 07 04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS/PHD	Persentase PNS atau PHD yang terfasilitasi pindah dan purna tugas	100 %	100 %	100 %	187.500.000	100 %	310.200.000	100 %	177.470.000	100 %	247.317.000	100 %	160.000.000	100 %	1.082.487.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP	0%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 20 03.06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	103.558.000	12 bln	86.991.000	12 bln	86.951.000	12 bln	92.912.000	12 bln	99.872.000	12 bln	470.284.000	BAGIAN DALBANG
1 20 03.06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	102.000.000	100 %	38.000.000	100 %	43.000.000	100 %	52.000.000	100 %	80.000.000	100 %	315.000.000	BAGIAN DALBANG
1 20 03.06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	200 orang	100 orang	500 orang	455.000.000	75 orang	35.000.000	100 orang	75.000.000	75 orang	70.000.000	100 orang	90.000.000	850 orang	725.000.000	BAGIAN DALBANG
1 20 03.06 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pengendalian, money dan pelaporan kegiatan SKPD	100%	100%	100%	605.000.000	100%	430.000.000	100%	425.000.000	100%	445.000.000	100%	425.000.000	100%	2.330.000.000	BAGIAN DALBANG
		Persentase sistem informasi jasa konstruksi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Fasilitasi proses pengadaan barang / jasa	0%	0%	50%		60%		70%		80%		90%		90%		
		Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi	15 hari	10 hari	10 hari		10 hari		10 hari		10 hari		10 hari		10 hari		
1 20 03.09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bl	12 bl	12 bl	4.540.620.000	12 bl	3.000.000.000	12 bl	3.175.000.000	12 bl	3.200.000.000	12 bl	3.250.000.000	12 bl	17.165.620.000	BAGIAN UMUM
1 20 03.09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarpras	100%	100%	100%	8.458.883.000	100%	3.398.000.000	100%	3.408.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.538.000.000	100%	22.302.883.000	BAGIAN UMUM
1 20 03.09 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	94,49%	100%	100%	488.570.000	100%	398.500.000	100%	410.000.000	100%	413.000.000	100%	425.000.000	100%	2.135.070.000	BAGIAN UMUM
1 20 03.09 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	100%	100%	1.887.912.000	100%	1.857.036.000	100%	1.930.000.000	100%	1.935.000.000	100%	2.010.000.000	100%	9.619.948.000	BAGIAN UMUM
1 20 03.05 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	107.425.000	12 bln	149.550.000	12 bln	150.850.000	12 bln	151.850.000	12 bln	151.850.000	12 bln	711.525.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
1 20 03.05 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	32.652.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	184.652.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
1 20 03.05 33	Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap BUMD	2%	-	2%	56.000.000	2%		2%	50.000.000	2%	-	2%	50.000.000	10%	156.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
1 20 03.10 01	program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatnya pelayanan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.112.604.000	12 bulan	1.159.500.000	12 bulan	1.165.500.000	12 bulan	1.167.500.000	12 bulan	1.168.000.000	12 bulan	5.773.104.000	BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
1 20 03.10 02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	meningkatnya pelayanan kantor	100%	100%	100%	1.985.235.000	100%	3.962.150.000	100%	4.182.000.000	100%	10.059.172.000	100%	10.643.508.000	100%	30.832.065.000	BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
1 20 03.10 17	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib	100%	100%	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	250.000.000	100%	450.000.000	100%	250.000	100%	1.400.250.000	BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
1 20 05 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan kinerja aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.320.899.000	12 bulan	1.321.000.000	12 bulan	1.453.100.000	12 bulan	1.598.410.000	12 bulan	1.758.253.000	12 bulan	7.451.662.000	DPPKD
1 20 05 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	100%	524.652.000	100%	1.218.000.000	100%	239.800.000	100%	263.780.000	100%	290.158.000	100%	2.536.390.000	DPPKD
1 20 05 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	100%	24.000.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	140.025.000	DPPKD
1 20 05 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan keuangan (WTP, WDP)	100%	100%	100%	2.177.263.000	100%	2.269.800.000	100%	2.496.780.000	100%	2.746.458.000	100%	3.021.104.000	100%	12.711.405.000	DPPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 20 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan PAD (%) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	1,67% 12 bln	19,61% 12 bln	21,21% 12 bln	123.988.000	18,21% 12 bln	125.670.000	16,16% 12 bln	135.690.000	17,03% 12 bln	139.590.000	17,94% 12 bln	141.590.000	17,94% 12 bln	666.528.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 20 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	176.500.000	100%	289.500.000	100%	294.000.000	100%	394.000.000	100%	374.000.000	100%	1.528.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 20 09 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 20 09 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	3.000.000	100%	2.000.000	100%	2.400.000	100%	2.850.000	100%	3.200.000	100%	13.450.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 20 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	112.460.000	12 bln	166.460.000	12 bln	205.160.000	12 bln	246.960.000	12 bln	292.760.000	12 bln	1.023.800.000	KECAMATAN KOTA
1 20 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	238.040.000	100%	414.440.000	100%	403.440.000	100%	451.440.000	100%	293.440.000	100%	1.800.800.000	KECAMATAN KOTA
1 20 10 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	0 orang	5 orang	6 orang	1.000.000	6 orang	2.000.000	6 orang	3.000.000	6 orang	4.000.000	6 orang	5.000.000	30 orang	15.000.000	KECAMATAN KOTA
1 20 10 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN KOTA
1 20 10 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	7.500.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	97.500.000	KECAMATAN KOTA
1 20 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	106.775.000	12 bln	108.750.000	12 bln	111.560.000	12 bln	115.500.000	12 bln	118.350.000	12 bln	560.935.000	KECAMATAN JATI
1 20 11 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	173.110.000	100 %	227.940.000	100 %	237.940.000	100 %	385.940.000	100 %	350.940.000	100 %	1.375.870.000	KECAMATAN JATI
1 20 11 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN JATI
1 20 11 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	5.500.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	100%	39.500.000	KECAMATAN JATI
1 20 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	99.831.000	12 bln	160.850.000	12 bln	177.100.000	12 bln	194.500.000	12 bln	212.900.000	12 bln	845.181.000	KECAMATAN UNDAAN
1 20 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	171.800.000	100%	101.500.000	100%	111.950.000	100%	223.220.000	100%	135.012.000	100%	743.482.000	KECAMATAN UNDAAN
1 20 12 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 orang	5 orang	5 orang	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	5 org	1.500.000	KECAMATAN UNDAAN	
1 20 12 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN UNDAAN
1 20 12 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	8.000.000	100%	12.000.000	100%	13.200.000	100%	14.500.000	100%	15.500.000	100%	63.200.000	KECAMATAN UNDAAN
1 20 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	133.971.000	12 bln	241.000.000	12 bln	263.000.000	12 bln	285.000.000	12 bln	289.000.000	12 bln	1.211.971.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 20 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	193.980.000	100%	267.000.000	100%	296.000.000	100%	410.000.000	100%	331.000.000	100%	1.497.980.000	KECAMATAN MEJOBLO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1 20 13 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 orang	5 orang	5 orang	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	3.000.000	KECAMATAN MEJOBLO		
1 20 13 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN MEJOBLO		
1 20 13 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	15.000.000	100%	52.000.000	KECAMATAN MEJOBLO		
1 20 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	146.488.000	12 bln	167.530.000	12 bln	206.709.000	12 bln	233.683.000	12 bln	209.094.000	12 bln	963.504.000	KECAMATAN JEKULO		
1 20 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	141.500.000	100 %	505.668.000	100 %	255.651.000	100 %	342.797.000	100 %	273.269.000	100 %	1.518.885.000	KECAMATAN JEKULO		
1 20 14 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN JEKULO		
1 20 14 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	6.000.000	100%	10.500.000	100%	11.250.000	100%	13.500.000	100%	15.155.000	100%	56.405.000	KECAMATAN JEKULO		
1 20 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	104.119.000	12 bln	123.000.000	12 bln	142.060.000	12 bln	153.600.000	12 bln	158.200.000	12 bln	680.979.000	KECAMATAN BAE		
1 20 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	201.234.000	100%	227.940.000	100%	266.940.000	100%	375.940.000	100%	285.940.000	100%	1.357.994.000	KECAMATAN BAE		
1 20 15 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	0 orang	0 orang	-	-	6 orang	5.000.000	6 orang	5.000.000	6 orang	4.000.000	4 orang	4.000.000	22 orang	18.000.000	KECAMATAN BAE		
1 20 15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN BAE		
1 20 15 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	4.132.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	44.132.000	KECAMATAN BAE		
1 20 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	158.920.000	12 bln	167.970.000	12 bln	184.338.000	12 bln	201.540.000	12 bln	221.265.000	12 bln	934.033.000	KECAMATAN GEBOG		
1 20 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	206.340.000	100%	115.940.000	100%	150.940.000	100%	250.940.000	100%	213.715.000	100%	937.875.000	KECAMATAN GEBOG		
1 20 16 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	1 orang	1 orang	1 orang	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang	2.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 20 16 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 20 16 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	6.000.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	36.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 20 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	121.548.000	12 bln	164.725.000	12 bln	171.918.000	12 bln	179.111.000	12 bln	186.803.000	12 bln	824.105.000	KECAMATAN DAWE		
1 20 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	186.940.000	100%	397.000.000	100%	147.000.000	100%	247.000.000	100%	197.000.000	100%	1.174.940.000	KECAMATAN DAWE		
1 20 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	-	-	-	-	4 orang	4.000.000	5 orang	5.000.000	6 orang	6.000.000	7 orang	7.500.000	22 orang	22.500.000	KECAMATAN DAWE		
1 20 17 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-	-	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	12.000.000	KECAMATAN DAWE		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 20 17 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	45.000.000	KECAMATAN DAWE
1 20 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	81.908.000	12 bln	86.500.000	12 bln	87.000.000	12 bln	88.000.000	12 bln	91.000.000	12 bln	434.408.000	KELURAHAN PURWOSARI
1 20 18 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	27.000.000	100%	45.500.000	100%	145.000.000	100%	949.750.000	100%	49.750.000	100%	1.217.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
1 20 18 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
1 20 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	79.000.000	12 bln	81.112.000	12 bln	83.000.000	12 bln	85.000.000	12 bln	87.500.000	12 bln	415.612.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
1 20 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	40.500.000	100%	629.500.000	100%	29.500.000	100%	29.500.000	100%	30.000.000	100%	759.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
1 20 19 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
1 20 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	61.508.000	12 bln	81.500.000	12 bln	87.500.000	12 bln	88.500.000	12 bln	92.000.000	12 bln	411.008.000	KELURAHAN PANJUNAN
1 20 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	54.612.000	100%	58.000.000	100%	148.000.000	100%	933.000.000	100%	28.000.000	100%	1.221.612.000	KELURAHAN PANJUNAN
1 20 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN PANJUNAN
1 20 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	69.150.000	12 bln	76.500.000	12 bln	87.500.000	12 bln	88.500.000	12 bln	91.500.000	12 bln	413.150.000	KELURAHAN WERGU WETAN
1 20 21 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	24.200.000	100%	33.000.000	100%	129.500.000	100%	929.000.000	100%	28.500.000	100%	1.144.200.000	KELURAHAN WERGU WETAN
1 20 21 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
1 20 22 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	48.940.000	12 bln	46.567.000	12 bln	46.652.000	12 bln	51.238.000	12 bln	51.680.000	12 bln	245.077.000	KELURAHAN WERGU KULON
1 20 22 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	243.046.000	100%	108.000.000	100%	209.000.000	100%	1.000.000.000	100%	78.144.000	100%	1.638.190.000	KELURAHAN WERGU KULON
1 20 22 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN WERGU KULON
1 20 23 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	96.733.000	12 bln	97.227.000	12 bln	98.339.000	12 bln	98.829.000	12 bln	100.440.000	12 bln	491.568.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
1 20 23 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	30.500.000	100%	36.000.000	100%	131.000.000	100%	931.000.000	100%	33.000.000	100%	1.161.500.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
1 20 23 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
1 20 24 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	81.082.000	12 bln	82.504.000	12 bln	84.000.000	12 bln	87.000.000	12 bln	89.000.000	12 bln	423.586.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 20 24 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	220.380.000	100%	30.996.000	100%	129.000.000	100%	929.000.000	100%	29.000.000	100%	1.338.376.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
1 20 24 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
1 20 25 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	91.626.000	12 bln	91.920.000	12 bln	92.110.000	12 bln	92.025.000	12 bln	92.146.000	12 bln	459.827.000	KELURAHAN KERJASAN
1 20 25 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	31.000.000	100%	24.500.000	100%	124.500.000	100%	929.500.000	100%	30.000.000	100%	1.139.500.000	KELURAHAN KERJASAN
1 20 25 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN KERJASAN
1 20 26 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	113.495.000	12 bln	109.000.000	12 bln	110.000.000	12 bln	111.000.000	12 bln	111.500.000	12 bln	554.995.000	KELURAHAN KAJEKSAN
1 20 26 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100%	40.700.000	100%	33.000.000	100%	130.500.000	100%	931.000.000	100%	31.000.000	100%	1.166.200.000	KELURAHAN KAJEKSAN
1 20 26 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		-	-		100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN
1 21	Ketahanan Pangan					7.677.082.000		5.245.000.000		5.473.000.000		5.827.500.000		6.532.000.000		30.754.582.000	
1 21 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi		12 bulan	12 bulan	347.482.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	60 bulan	1.672.482.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
1 21 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelayanan administrasi		12 bulan	12 bulan	300.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	225.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	950.000.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
1 21 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur		12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.000.000	60 bulan	145.000.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
1 21 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	112.500.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
1 21 01 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Regulasi Ketahanan Pangan	1	-	-	6.974.600.000	-	4.700.000.000	-	4.900.000.000	-	5.200.000.000	-	6.100.000.000	-	27.874.600.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		Ketersediaan Pangan Utama	91	91	100		100		100		100		100		100,0		
		Ketersediaan energi dan Protein Per Kapita	53	61	75		90		92		100		100		100,0		
		Penguatan Cadangan Pangan	63	64	65		67		70		80		90		90,0		
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	86	86	88		90		95		100		100		100,0		
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	70	70	75		90		95		100		100		100,0		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87	89	90		90		91		92		95		95,0		
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	77	79	80		80		82		84		85		85,0		
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	56	67	68		68		69		70		75		75,0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					8.253.946.000		13.778.318.000		14.516.143.000		15.267.061.000		15.984.187.000		67.799.655.000	
1 22 01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	336.400.000	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	325.000.000	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	325.000.000	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	325.000.000	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	325.000.000	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	1.636.400.000	BPMPKB
1 22 01 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	89	89	89	834.900.000	89	864.400.000	89	941.043.000	89	1.017.685.000	89	1.094.328.000	89	4.752.356.000	BPMPKB
1 22 01 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	4.525.000.000	100%	8.277.090.000	100%	8.794.898.000	100%	9.312.706.000	100%	9.830.515.000	100%	40.740.209.000	BPMPKB
		Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	3%	7%	7%		7%		8%		8%		9%		9%		
1 22 01 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	110.000.000	132 desa/kel	122.543.000	132 desa/kel	108.963.000	132 desa/kel	95.383.000	132 desa/kel	81.804.000	132 desa/kel	518.693.000	BPMPKB
1 22 01 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)	-	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.000.000.000	BPMPKB
1 22 01.01 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase BKM berkinerja baik	50%	50%	52%	300.000.000	55%	280.000.000	60%	280.000.000	65%	280.000.000	70%	280.000.000	70%	1.420.000.000	BAPPEDA
1 22 03.02 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	-	100%	100%	180.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.180.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 22 03.02 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek	269 Orang	269 orang	369 orang	324.550.000	369 orang	695.000.000	1476 orang	3.104.550.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA						
		Fasilitasi Pilkades	-	116 desa	0 desa		5 desa		1 desa		1 desa				7 desa		
		Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan	45%	45%	50%		55%		60%		65%		70%		70%		
1 22 09 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	35.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	115.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 22 09 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah kelompok binaan petani	3 klmpk	3 klmpk	3 klmpk	6.000.000	3 klmpk	6.000.000	3 klmpk	6.000.000	3 klmpk	6.000.000	3 klmpk	6.000.000	15 klmpk	30.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 22 09 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	3.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	43.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		
1 22 09 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	31.000.000	30%	31.500.000	30%	29.500.000	30%	29.500.000	30%	29.500.000	30%	151.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 22 09 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	10.000.000	1 organisasi	12.000.000	1 organisasi	14.000.000	1 organisasi	44.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 22 09 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	3 keg	3 keg	3 keg	8.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3 keg	20.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
1 22 10 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	180.000.000	KECAMATAN KOTA
1 22 10 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20%	20%	20%	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	5.000.000	KECAMATAN KOTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 22 10 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	13.000.000	80%	28.000.000	80%	38.000.000	80%	48.000.000	80%	58.000.000	80%	185.000.000	KECAMATAN KOTA
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	2 keg	2 keg	2 keg			2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		10 keg	
1 22 10 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	56.000.000	30%	75.000.000	30%	90.000.000	30%	105.000.000	30%	120.000.000	30%	446.000.000	KECAMATAN KOTA
1 22 10 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	25.000.000	1 organisasi	38.000.000	1 organisasi	50.000.000	1 organisasi	68.000.000	1 organisasi	181.000.000	KECAMATAN KOTA
1 22 10 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	3 keg	3 keg	3 keg	6.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3 keg	18.000.000	KECAMATAN KOTA
1 22 11 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	38.000.000	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000	100%	238.000.000	KECAMATAN JATI
1 22 11 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah kelompok binaan petani	14 klmpk	14 klmpk	14 klmpk	7.000.000	14 klmpk	14.000.000	14 klmpk	15.000.000	14 klmpk	16.000.000	14 klmpk	16.000.000	70 klmpk	68.000.000	KECAMATAN JATI
1 22 11 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	6.000.000	80%	10.800.000	80%	10.800.000	80%	10.900.000	80%	11.000.000	80%	49.500.000	KECAMATAN JATI
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg			1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg	
1 22 11 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	69.400.000	30%	52.000.000	30%	54.000.000	30%	54.000.000	30%	56.000.000	30%	285.400.000	KECAMATAN JATI
1 22 11 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	20.000.000	1 organisasi	25.000.000	1 organisasi	30.000.000	1 organisasi	35.000.000	1 organisasi	110.000.000	KECAMATAN JATI
1 22 11 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	3 keg	3 keg	3 keg	6.615.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3keg	18.615.000	KECAMATAN JATI
1 22 12 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.500.000	100%	51.550.000	100%	197.050.000	KECAMATAN UNDAAN
1 22 12 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	15.000.000	80%	24.000.000	80%	26.400.000	80%	29.000.000	80%	31.000.000	80%	125.400.000	KECAMATAN UNDAAN
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg			1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg	
1 22 12 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	67.000.000	30%	74.000.000	30%	80.500.000	30%	88.500.000	30%	97.200.000	30%	407.200.000	KECAMATAN UNDAAN
1 22 12 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	0	-	1 organisasi	22.000.000	1 organisasi	24.000.000	1 organisasi	26.000.000	1 organisasi	28.000.000	1 organisasi	100.000.000	KECAMATAN UNDAAN
1 22 12 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	5 keg	5 keg	5 keg	15.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	5 keg	27.000.000	KECAMATAN UNDAAN
1 22 13 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	170.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 22 13 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20%	20%	20%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	10.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
		Jumlah kelompok binaan petani	14 klmpk	14 klmpk	14 klmpk										14 klmpk		
1 22 13 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	5.000.000	80%	25.000.000	80%	32.000.000	80%	36.000.000	80%	40.000.000	80%	138.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 22 13 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	50.000.000	30%	85.000.000	30%	85.000.000	30%	103.000.000	30%	90.000.000	30%	413.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 22 13 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	0	-	1 organisasi	34.000.000	1 organisasi	40.000.000	1 organisasi	45.000.000	1 organisasi	45.000.000	1 organisasi	164.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
1 22 13 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	1 keg	1 keg	1 keg	10.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1 keg	22.000.000	KECAMATAN MEJOBLO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1 22 14 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	32.000.000	100%	40.377.000	100%	48.108.000	100%	55.952.000	100%	59.000.000	100%	235.437.000	KECAMATAN JEKULO		
1 22 14 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	8.000.000	80%	18.500.000	80%	20.900.000	80%	24.160.000	80%	24.900.000	80%	96.460.000	KECAMATAN JEKULO		
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	5 keg	5 keg	5 keg	-	-	0	-	0	-	0	-	5 keg	-	-			
1 22 14 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	40.000.000	30%	80.000.000	30%	87.600.000	30%	95.205.000	30%	97.865.000	30%	400.670.000	KECAMATAN JEKULO		
1 22 14 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	0	-	1 organisasi	27.730.000	1 organisasi	29.000.000	1 organisasi	35.476.000	1 organisasi	35.476.000	1 organisasi	127.682.000	KECAMATAN JEKULO		
1 22 14 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	5 keg	5 keg	5 keg	12.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	5 keg	24.000.000	KECAMATAN JEKULO		
1 22 15 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	31.400.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	37.000.000	100%	45.000.000	100%	183.400.000	KECAMATAN BAE		
1 22 15 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	4.400.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	13.000.000	80%	47.400.000	KECAMATAN BAE		
1 22 15 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	50.130.000	30%	94.060.000	30%	92.000.000	30%	95.000.000	30%	100.000.000	30%	431.190.000	KECAMATAN BAE		
1 22 15 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	0	-	1 organisasi	40.000.000	1 organisasi	42.000.000	1 organisasi	40.000.000	1 organisasi	40.000.000	1 organisasi	162.000.000	KECAMATAN BAE		
1 22 15 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	4 keg	4 keg	4 keg	7.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	4 keg	19.000.000	KECAMATAN BAE		
1 22 16 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 22 16 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20%	20%	20%	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	20%	8.500.000	KECAMATAN GEBOG			
		Jumlah kelompok binaan petani	3 klmpk	3 klmpk	3 klmpk	-	-	-	-	-	-	-	-	3 klmpk	-	-			
1 22 16 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	14.000.000	80%	15.000.000	80%	15.000.000	80%	15.000.000	80%	15.000.000	80%	74.000.000	KECAMATAN GEBOG		
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	1 keg	5 keg	-									
1 22 16 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	51.210.000	30%	75.000.000	30%	80.000.000	30%	80.000.000	30%	80.000.000	30%	366.210.000	KECAMATAN GEBOG		
1 22 16 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	0	-	1 organisasi	12.000.000	1 organisasi	48.000.000	KECAMATAN GEBOG								
1 22 16 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	1 keg	1 keg	1 keg	5.000.000	-	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1 keg	17.000.000	KECAMATAN GEBOG		
1 22 17 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	30.000.000	100%	34.533.000	100%	41.190.000	100%	47.848.000	100%	54.504.000	100%	208.075.000	KECAMATAN DAWE		
1 22 17 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	3.500.000	80%	10.333.000	80%	10.476.000	80%	10.619.000	80%	10.762.000	80%	45.690.000	KECAMATAN DAWE		
1 22 17 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	83.500.000	30%	83.500.000	30%	83.500.000	30%	83.500.000	30%	83.500.000	30%	417.500.000	KECAMATAN DAWE		
1 22 17 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	0	-	1 organisasi	7.500.000	1 organisasi	30.000.000	KECAMATAN DAWE								
1 22 17 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	1 keg	1 keg	1 keg	10.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1 keg	22.000.000	KECAMATAN DAWE		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 22 18 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	65.411.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	43.000.000	100%	213.411.000	KELURAHAN PURWOSARI
1 22 18 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	39.700.000	80%	28.000.000	80%	25.000.000	80%	22.000.000	80%	22.000.000	80%	136.700.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		
1 22 18 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	7.850.000	1 organisasi	7.900.000	1 organisasi	7.900.000	1 organisasi	7.900.000	1 organisasi	31.550.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		
1 22 19 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	34.600.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	35.000.000	100%	37.000.000	100%	169.600.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
1 22 19 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	46.500.000	80%	46.500.000	80%	46.500.000	80%	46.500.000	80%	46.500.000	80%	232.500.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	2 keg		2 keg		2 keg		1 keg		1 keg		8 keg		
1 22 19 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	8.266.000	1 organisasi	8.652.000	1 organisasi	9.038.000	1 organisasi	9.423.000	1 organisasi	35.379.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		
1 22 19 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	1 keg	1 keg	1 keg	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	3.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
1 22 20 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	30.180.000	100%	27.000.000	100%	30.000.000	100%	34.000.000	100%	37.500.000	100%	158.680.000	KELURAHAN PANJUNAN
1 22 20 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	32.000.000	80%	35.000.000	80%	35.695.000	80%	36.385.000	80%	37.075.000	80%	176.155.000	KELURAHAN PANJUNAN
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	3 keg	2 keg	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		10 keg		
1 22 20 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	32.000.000	KELURAHAN PANJUNAN						
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		
1 22 21 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	29.250.000	100%	27.245.000	100%	28.000.000	100%	28.500.000	100%	28.500.000	100%	141.495.000	KELURAHAN WERGU WETAN
1 22 21 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	69.999.000	80%	38.000.000	80%	43.000.000	80%	45.000.000	80%	47.500.000	80%	243.499.000	KELURAHAN WERGU WETAN
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		
1 22 21 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	9.000.000	1 organisasi	10.000.000	1 organisasi	10.500.000	1 organisasi	11.000.000	1 organisasi	40.500.000	KELURAHAN WERGU WETAN
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		
1 22 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	34.750.000	100%	25.900.000	100%	25.900.000	100%	25.900.000	100%	25.900.000	100%	138.350.000	KELURAHAN WERGU KULON
1 22 22 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	28.000.000	80%	22.000.000	80%	22.000.000	80%	22.000.000	80%	23.000.000	80%	117.000.000	KELURAHAN WERGU KULON

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		
1 22 22 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	20.000.000	KELURAHAN WERGU KULON						
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-		1 klmpk										
1 22 23 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	26.150.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	34.000.000	100%	35.000.000	100%	150.150.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
1 22 23 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	27.000.000	80%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	31.000.000	80%	32.000.000	80%	150.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		
1 22 23 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	8.500.000	1 organisasi	8.500.000	1 organisasi	33.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-		1 klmpk										
1 22 24 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	44.765.000	100%	43.859.000	100%	45.000.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000	100%	225.624.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
1 22 24 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	53.391.000	80%	38.000.000	80%	39.000.000	80%	40.000.000	80%	42.000.000	80%	212.391.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		
1 22 24 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	6.500.000	1 organisasi	26.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO						
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-		1 klmpk										
1 22 24 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	1 keg	1 keg	1 keg	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	3.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
1 22 25 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	15.900.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	67.900.000	KELURAHAN KERJASAN
1 22 25 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	43.550.000	80%	51.500.000	80%	54.500.000	80%	54.500.000	80%	57.000.000	80%	261.050.000	KELURAHAN KERJASAN
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		
1 22 25 19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	8.000.000	1 organisasi	9.000.000	1 organisasi	33.000.000	KELURAHAN KERJASAN
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-		1 klmpk										
1 22 25 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	1 keg	1 keg	1 keg	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	3.000.000	KELURAHAN KERJASAN
1 22 26 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	19.550.000	100%	17.500.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	103.050.000	KELURAHAN KAJEKSAN
1 22 26 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	33.245.000	80%	35.332.000	80%	38.118.000	80%	41.404.000	80%	43.485.000	80%	191.584.000	KELURAHAN KAJEKSAN
		Jumlah kegiatan penataan lingkungan dgn partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 22 26 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	1 organisasi	5.000.000	1 organisasi	20.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN						
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	1 klmpr		1 klmpr		1 klmpr		1 klmpr		1 klmpr		
1 22 26 20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	1 keg	1 keg	1 keg	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 keg	2.500.000	KELURAHAN KAJEKSAN
1 23	Statistik					250.000.000		325.000.000		365.000.000		385.000.000		385.000.000		1.710.000.000	
1 23 01 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah data/informasi statistik daerah	5 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	250.000.000	7 dokumen	325.000.000	7 dokumen	365.000.000	7 dokumen	385.000.000	7 dokumen	385.000.000	7 dokumen	1.710.000.000	BAPPEDA
1 24	Kearsipan					798.862.000		393.018.000		407.000.000		420.500.000		442.000.000		2.461.380.000	
1 24 01 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan arsip secara baku	-	18 desa/ke	14 desa	145.000.000	17 desa	130.000.000	17 desa	130.000.000	18 desa	140.500.000	19 desa	150.000.000	85 desa	695.500.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 24 01 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pengelolaan arsip secara baku	3 SKPD	6 desa	6 desa	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 desa	65.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 24 01 17	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pengelolaan arsip secara baku	-	20 desa	38 desa/ke	65.000.000	38 desa/ke	51.000.000	38 desa/ke	55.000.000	38 desa/ke	58.000.000	38 desa/ke	62.000.000	192 desa/SKPD/ke	291.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 24 01 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	60 orang	60 orang	250.000.000	60 orang	80.000.000	60 orang	82.000.000	60 orang	82.000.000	60 orang	90.000.000	300 orang	584.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 24 01.01 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip kependudukan yang terdokumentasi		3,500 dokumen	6,000 dokumen	245.033.000	4,500 dokumen	102.018.000	5,000 dokumen	110.000.000	5,500 dokumen	110.000.000	6,000 dokumen	110.000.000	6,000 dokumen	677.051.000	DINAS DUKCAPIL
1 24 01.01 17	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik		75%	85%	28.829.000	90%	30.000.000	95%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	148.829.000	DINAS DUKCAPIL
1 25	Komunikasi dan Informatika					5.810.258.000		4.353.035.000		4.190.723.000		4.681.712.000		4.909.050.000		23.944.778.000	
1 25 01 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi	7 sistem	11 sistem	11 sistem	634.000.000	12 sistem	2.425.000.000	12 sistem	2.200.000.000	13 sistem	2.525.000.000	13 sistem	2.708.000.000	13 sistem	10.492.000.000	DINHUBKOMINFO
1 25 01 16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,240	0,234	0,231	-	0,229	150.000.000	0,227	123.350.000	0,225	100.000.000	0,223	200.000.000	0,223	573.350.000	DINHUBKOMINFO
1 25 01 17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi	7 sistem	11 sistem	11 sistem	50.000.000	12 sistem	30.000.000	12 sistem	30.000.000	13 sistem	30.000.000	13 sistem	30.000.000	13 sistem	170.000.000	DINHUBKOMINFO
1 25 01 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah website milik pemerintah daerah	4 web	17 web	17 web	375.318.000	17 web	470.000.000	18 web	470.000.000	18 web	545.000.000	18 web	420.000.000	18 web	2.280.318.000	DINHUBKOMINFO
		Jumlah surat kabar nasional dan lokal.	11 surat kabar	11 surat kabar	12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		
		Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran	24 stasiun	24 stasiun	24 stasiun		24 stasiun		24 stasiun		24 stasiun		24 stasiun		24 stasiun		
		Jumlah pameran/expo	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali		
		Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV)	189 kali	275 kali	297 kali		302 kali		302 kali		305 kali		300 kali		1506 kali		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online)	setiap hari	setiap hari	setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari			
		Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)	22 kali	23 kali	23 kali		23 kali		23 kali		23 kali		23 kali		23 kali		23 kali	
		Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan)	5 kali tiap kecamatan	4 kali tiap kecamatan	3 kali tiap kecamatan		4 kali tiap kecamatan		4 kali tiap kecamatan		4 kali tiap kecamatan		4 kali tiap kecamatan		4 kali tiap kecamatan		4 kali tiap kecamatan	
		Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, balliho)	4 kali	2 kali	4 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali	
		Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1 25 02 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	282.000.000										2 dokumen	282.000.000	BAPPEDA
1 25 03.01 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	1 kali	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	5 kali	250.000.000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 25 03.04 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi	-	2 unit	3 unit	250.000.000	1 unit	78.035.000	1 unit	142.373.000	1 unit	281.712.000	1 unit	326.050.000	7 unit	1.078.170.000		BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
1 25 03.04 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	60 kali	177 kali	213 kali	3.950.440.000	70 kali	1.000.000.000	70 kali	1.000.000.000	70 kali	1.000.000.000	70 kali	1.000.000.000	493 kali	7.950.440.000		BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
		Jumlah surat kabar nasional dan lokal.	11 surat kabar	11 surat kabar	12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar		12 surat kabar	
1 25 04 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah publikasi kegiatan dewan	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	211.500.000	1,500 eks	150.000.000	1,500 eks	175.000.000	1,500 eks	150.000.000	1,500 eks	175.000.000	9,000 eks	861.500.000		SEKRETARIAT DPRD
1 25 12 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah sarana media publikasi	2 jenis	2 jenis	2 jenis	7.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	2 jenis	7.000.000		KECAMATAN UNDAAN
1 26	Perpustakaan					2.003.191.000		1.808.500.000		877.000.000		857.500.000		928.000.000		6.474.191.000		
1 26 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	342.411.000	12 bln	268.000.000	12 bln	297.000.000	12 bln	319.500.000	12 bln	342.000.000	12 bln	1.568.911.000		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 26 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	1.402.780.000	100 %	1.320.500.000	100 %	300.000.000	100 %	245.000.000	100 %	266.000.000	100 %	3.534.280.000		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 26 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	4 orang	4 orang	16 orang	28.000.000	16 orang	30.000.000	16 orang	35.000.000	16 orang	38.000.000	16 orang	40.000.000	80 orang	171.000.000		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1 26 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	-	-	-		100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	20.000.000		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012 (4a)	Tahun 2013 (4b)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 26 01 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat)	163 perpus	165 perpus	168 perpus	230.000.000	171 perpus	185.000.000	175 perpus	240.000.000	180 perpus	250.000.000	184 perpus	275.000.000	184 perpus	1.180.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	URUSAN PILIHAN		-	-		134.547.294.000		120.691.912.000		128.240.069.000		130.096.817.000		169.424.716.000		683.000.808.000	
2 01	Pertanian					52.152.309.000		33.196.545.000		33.681.197.000		36.259.447.000		38.358.947.000		193.648.445.000	
2 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	1.016.600.000	12 bln	843.000.000	12 bln	843.000.000	12 bln	828.000.000	12 bln	828.000.000	60 bulan	4.358.600.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarpras aparatur	100 %	100 %	100 %	206.836.000	100 %	356.146.000	100 %	356.146.000	100 %	356.146.000	100 %	356.146.000	100 %	1.631.420.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas Aparatur	100 %	100 %	100 %	107.000.000	100 %	47.000.000	100 %	47.000.000	100 %	47.000.000	100 %	47.000.000	100 %	295.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem pelaporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	125.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Nilai Tukar Petani	104,71	105,61	105,91	30.519.400.000	106,21	14.719.326.000	106,51	15.203.978.000	106,81	17.797.228.000	107,11	19.896.728.000	107,11	98.136.660.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran	60 %	70 %	80 %	3.698.160.000	90 %	4.217.979.000	100 %	4.217.979.000	100 %	4.217.979.000	100 %	4.217.979.000	100 %	20.570.076.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok tani	40%	50%	60%	780.000.000	70%	725.000.000	80%	725.000.000	90%	725.000.000	100%	725.000.000	100%	3.680.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produktifitas tanaman	5,70%	5,75%	5,80%	1.501.400.000	5,85%	4.710.000.000	5,90%	4.710.000.000	5,95%	4.710.000.000	6%	4.710.000.000	6%	20.341.400.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian	100%	100%	100%	2.077.913.000	100%	1.112.254.000	100%	1.112.254.000	100%	1.112.254.000	100%	1.112.254.000	100%	6.526.929.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak	40%	50%	60%	145.000.000	70%	175.000.000	80%	175.000.000	90%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	845.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 01 01 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	peningkatan produksi asal ternak	3.460.367 kg	3.586.454 kg	3.709.989 kg	12.075.000.000	3.809.914 kg	5.670.000.000	4.172.484 kg	5.670.000.000	4.536.756 kg	5.670.000.000	5.038.904 kg	5.670.000.000	5.038.904 kg	34.755.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 01 01 25	Program pengembangan jaringan irigasi pertanian	Cakupan irigasi	4,9%	9,75%	13,80%	-	18,85%	595.840.000	22,90%	595.840.000	26,95%	595.840.000	31,8%	595.840.000	31,8%	2.383.360.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 02	Kehutanan					2.090.704.000		3.710.219.000		3.710.219.000		3.660.219.000		3.660.219.000		16.831.580.000	
2 02 01 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan (Ha)	25	25	25	200.000.000	25	2.090.514.000	25	2.090.514.000	25	2.040.514.000	25	2.040.514.000	125	8.462.056.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 02 01 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	300	300	450	1.589.773.000	500	1.339.942.000	550	1.339.942.000	600	1.339.942.000	650	1.339.942.000	2.750	6.949.541.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 02 01 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Persentase kerusakan kawasan hutan	17,6%	15,5%	13,5%	50.000.000	11,5%	50.000.000	9,5%	50.000.000	7,5%	50.000.000	5,5%	50.000.000	5,5%	250.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 02 01 22	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan	100%	100%	100%	250.931.000	100%	229.763.000	100%	229.763.000	100%	229.763.000	100%	229.763.000	100%	1.169.983.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 03	Energi dan Sumberdaya Mineral					26.325.000.000		29.825.000.000		33.950.000.000		36.050.000.000		36.150.000.000		162.300.000.000	Dinas BPESDM
2 03 01 15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0.03	0.03	0.03	150.000.000	0.03	350.000.000	0.03	450.000.000	0.03	500.000.000	0.03	600.000.000	0.03	2.050.000.000	DINAS BPESDM
		Jumlah pertambangan berijin	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		
		Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2 03 01 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Berfungsinya LPUU	100%	100%	100%	26.175.000.000	100%	29.350.000.000	100%	33.350.000.000	100%	35.350.000.000	100%	35.350.000.000	100%	159.575.000.000	DINAS BPESDM
		Rasio elektrifikasi tingkat desa	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2 03 01 18	Program Mitigasi Bencana alam tanah longsor	Jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau	5 desa	5 desa			6 desa	125.000.000	6 desa	150.000.000	6 desa	200.000.000	6 desa	200.000.000	6 desa	675.000.000	DINAS BPESDM
2 04	Pariwisata					4.295.000.000		6.927.400.000		6.427.400.000		5.532.480.000		20.137.285.000		43.319.565.000	DISBUDPAR
2 04 01 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	1.122.700	1.178.835	1.234.970	1.880.000.000	1.291.105	761.400.000	1.347.240	761.400.000	1.403.375	802.500.000	1.459.510	843.885.000	1.459.510	5.049.185.000	DISBUDPAR
		% Naik PAD sektor pariwisata	7	7	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
		Jenis ,kelas dan jumlah rumah Makan /Restoran	2,4	2,4	2,4		2,4		2,4		2,4		2,4		2,4		
			7,1	7,1	11,1		17,2		20,4		24,5		28,6		28,6		
		Jenis, kelas dan jumlah Penginapan/Hotel	2,6	2,6	2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		
			24	24	30,00		36,00		41,00		47,00		51,00		51,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 04 01 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terpenuhiya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata	-	-	100%	1.895.000.000	100%	5.666.000.000	100%	5.166.000.000	100%	4.202.480.000	100%	18.738.700.000	100%	35.668.180.000	DISBUDPAR
		Jumlah obyek wisata	10	10	10		10		11		11		12		12		
		Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan)	2.153.090	2.368.399	2.583.708		2.799.017		3.014.326		3.229.635		3.444.944		3.444.944		
2 04 01 17	Program Pengembangan Kemitraan	Tersedianya sarpras promosi pariwisata	-	-	100%	520.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	527.500.000	100%	554.700.000	100%	2.602.200.000	DISBUDPAR
2 05	Kelautan dan Perikanan					5.354.609.000		9.381.000.000		9.249.000.000		9.599.000.000		9.985.000.000		43.568.609.000	
2 05 01 20	Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan kelompok pembudidaya	1.697 ton	1.770 ton	1.827 ton	3.000.000.000	1.959 ton	7.026.391.000	2.018 ton	6.894.391.000	2.086 ton	7.244.391.000	2.157 ton	7.630.391.000	2.157 ton	31.795.564.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 05 01 27	Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Terpenuhiya sarana dan prasarana perikanan budidaya	100 %	100 %	100 %	1.821.109.000	100 %	2.079.609.000	100 %	2.079.609.000	100 %	2.079.609.000	100 %	2.079.609.000	100 %	10.139.545.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 05 01 28	Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Terpenuhiya sarana dan prasarana perikanan tangkap	100 %	100 %	100 %	198.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	638.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 05 01 29	Program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Terpenuhiya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran		100 %	100 %	335.500.000	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	995.500.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 06	Perdagangan					25.029.672.000		17.860.435.000		21.076.344.000		14.792.253.000		28.778.162.000		107.536.866.000	
2 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.924.932.000	12 bulan	2.101.579.000	12 bulan	2.231.842.000	12 bulan	2.362.105.000	12 bulan	2.492.368.000	12 bulan	12.112.826.000	DIPERDAGSAR
2 06 01 02	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.234.841.000	12 bulan	828.856.000	12 bulan	874.502.000	12 bulan	920.148.000	12 bulan	965.794.000	12 bulan	4.824.141.000	DIPERDAGSAR
2 06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	300.000.000	DIPERDAGSAR
2 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	100.000.000	DIPERDAGSAR
2 06 01 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual	16		10 temuan	275.000.000	8 temuan	250.000.000	6 temuan	300.000.000	4 temuan	350.000.000	2 temuan	375.000.000	30 temuan	1.550.000.000	DIPERDAGSAR
		Jumlah pengaduan konsumen		3 aduan	2 aduan		1 aduan		1 aduan		1 aduan		-		5 aduan	-	
2 06 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan (Juta Rupiah)	105.215.345	(1.432.954)	120.997.647	530.000.000	139.147.294	585.000.000	160.019.388	585.000.000	184.022.296	585.000.000	211.625.641	585.000.000	211.625.641	2.870.000.000	DIPERDAGSAR
		cakupan bina calon eksportir			3 org		5 org		8 org		12 org		15 org		43 org		
		Jumlah peserta pameran UMKM skala regional	12 unit	12 unit	10 unit		15 unir		15 unir		15 unir		15 unir		70 unit		
2 06 01 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	9.245.094		9.624.547	13.814.039.000	10.105.774	3.000.000.000	10.611.063	7.000.000.000	11.141.616	2.000.000.000	11.698.696	12.000.000.000	53.181.696	37.814.039.000	DIPERDAGSAR
		Cakupan pembinaan pasar tradisional	930		940		945		930		940		950		950		
		Persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar		(4,27)	5,35		2,38		2,33		2,27		2,22		15,38		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab					
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD							
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.			
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional)		10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los					
		Jumlah pasar daerah dan pasar desa	23 unit	23 unit	23 unit			23 unit			23 unit			23 unit			23 unit					
		terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan	100%	100%	100%			100%			100%			100%			100%					
		partisipasi dalam pasar lelang	6 kali		4 kali												4 kali					
		tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat	96 kali	96 kali	96 kali			96 kali			96 kali			96 kali			480 kali					
		terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri						25 org			30 org			30 org			115 org					
		terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis	4 kali	4 kali	4 kali			4 kali			4 kali			4 kali			20 kali					
		terlaksananya temu usaha						10 unit			15 unit			15 unit			55 unit					
2 06 01 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (Jumlah PKL dan Asongan)	800 PKL		1.100 PKL	5.060.000.000		1.200 PKL	10.000.000.000		1.300 PKL	9.000.000.000		1.400 PKL	7.500.000.000		1.500 PKL	9.300.000.000	1.500 PKL	40.860.000.000	DIPERDAGSAR	
2 06 01 21	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah					950.000.000			870.000.000			855.000.000			845.000.000			2.830.000.000		6.350.000.000	DIPERDAGSAR	
		Jumlah pedagang pasar tradisional		10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los			10.501 pedagang kios dan los		10.501 pedagang kios dan los		DIPERDAGSAR	
		Jumlah PKL dan Asongan		975 PKL	1.100 PKL			1.200 PKL			1.300 PKL			1.400 PKL			1.500 PKL		1.500 PKL		DIPERDAGSAR	
2 06 03.05 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan				155.860.000			150.000.000			150.000.000			150.000.000			150.000.000		755.860.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	
		Jumlah Rakor Ekuinda	2 kali	2 kali	2 kali			2 kali			2 kali			2 kali			10 kali					
		Operasional Raskin	43.626 RTS		36,332RTS			36,332RTS			36,332RTS			36,332RTS			36,332RTS			36,332RTS		
2 07	Industri					19.000.000.000			19.322.927.000			19.650.672.000			23.678.418.000			31.806.163.000		113.458.180.000		
2 07 01 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha	0,41	1,15	2	15.700.000.000		2	16.600.000.000		2	16.600.000.000		2	20.300.000.000		3	23.100.000.000		11	92.300.000.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
2 07 01 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah bina KUB	-	-	50			50			50			50			50		250			
		Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,02	0,02	0,02	875.000.000		0,02	1.300.000.000		0,03	1.300.000.000		0,03	1.500.000.000		0,04	1.500.000.000		0,04	6.475.000.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
		Jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan	-	-	-			20			20			20			20		80			
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	63	62	63			63			63			63			63		63			
2 07 01 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi	-	-	-	425.000.000		5	287.000.000		5	337.571.000		5	388.143.000		65	5.438.714.000		80	6.876.428.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
		Jumlah Industri rokok yang telah mengujikan tar dan nikotin	-	-	-			5			7			10			10		10			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 07 01 18	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah kluster yang memiliki tempat pameran	-	-	-	2.000.000.000	1	1.135.927.000	-	1.413.101.000	1	1.490.275.000	1	1.767.449.000	3	7.806.752.000	DINAS PERINKOP DAN UMKM
		Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran	4	4	10		10		10		10		10		50		
2 08	Ketransmigrasian				300.000.000		468.386.000		495.237.000		525.000.000		548.940.000		2.337.563.000		
2 08 01. 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah calon transmigran terlayani	10 KK	10 KK	20 KK	300.000.000	30 KK	468.386.000	30 KK	495.237.000	30 KK	525.000.000	30 KK	548.940.000	140 KK	2.337.563.000	DINSOSNAKER-TRANS
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		-	-		729.782.394.000		713.464.868.000		798.427.448.000		898.061.707.000		1.018.511.854.000		4.158.248.271.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
			Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN																		
2	Pembayaran Pokok Utang					115.000.000			115.000.000			115.000.000						345.000.000	PPKD
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					56.000.000.000			2.800.000.000			3.260.920.000						62.060.920.000	53 SKPD
5	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan					2.000.000.000												2.000.000.000	PPKD
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					58.115.000.000			2.915.000.000			3.375.920.000						64.405.920.000	
	JUMLAH A + B + C					1.735.710.795.000			1.723.180.807.000			1.895.795.534.000			2.090.047.182.000			2.320.824.707.000	

Sumber : - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 (diolah)
- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 (diolah)

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Keberhasilan ditunjukkan dari pencapaian target indikator pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018. Keberhasilan indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator keberhasilan pembangunan daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah gambaran tentang kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Aspek pelayanan umum adalah gambaran mengenai pelayanan pemerintah dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang pada Tabel 9.1 berikut.

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,33	4,83	5,13	5,37	5,64	5,908	6,1	6,1
2	Laju inflasi kabupaten (%)	4,77	8,31	6-7	5±1	5±1	5±1	5±1	5±1
3	PDRB per kapita (dalam juta)	47,826	50,227	53,114	56,001	58,888	61,775	64,662	64,662
4	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,7966	0,7966	0,7966	0,7966	0,7966	0,7966	0,7966	0,7966
5	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	91,4	91,55	91,7	91,9	92	92,15	92,2	92,2
Fokus Kesejahteraan Sosial									
I	Pendidikan								
1	Angka melek huruf	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	106,31%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104,42%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	86,79%	86,79%	86,79%	87,00%	87,50%	88,00%	90,00%	90,00%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,92%	95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	95,32%	95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	80,38%	75%	76%	77%	78%	79%	80%	80%
8	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)								
	- SD+MI	6,21	6	6	6	6	6	6	6
	- SMP+MTs	3,01	3	3	3	3	3	3	3
	- SMA+MA	3	3	3	3	3	3	3	3
	- SMK	3	3	3	3	3	3	3	3
	- SM+MA	3	3	3	3	3	3	3	3
	SD+MI+SMP+MTs+SMA+SMK+MA	12,22	12	12	12	12	12	12	12
II	Kesehatan								
1	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	6,93	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,5
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	95,42	133,68	102	96	96	96	96	96
3	Angka usia harapan hidup	69,68	69,68	69,69	69,69	69,69	69,69	69,7	69,7
4	Persentase balita gizi buruk (BB/TB)	0,75%	0,76%	0,74%	0,73%	0,72%	0,71%	0,70%	0,70%
III	Ketenagakerjaan								
	Rasio penduduk yang bekerja	94,15	94,15	94,25	94,35	94,45	94,55	94,65	94,65
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
I	Seni Budaya dan Olahraga								
1	Gedung kesenian per 10.000 penduduk	4	4	4	4	4	4	4	4
B. Aspek Pelayanan Umum									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
I	PENDIDIKAN								
1	APK PAUD	49,75%	50%	52%	54%	56%	58%	60%	60%
2	Bangunan SD/MI dalam kondisi baik	87,55%	91,80%	93,80%	95,80%	97,80%	99,80%	100%	100%
	a. Bangunan SD dalam kondisi baik	85,17%	91,89%	93,89%	95,89%	97,89%	99,89%	100%	100%
	b. Bangunan MI dalam kondisi baik	94,73%	91,53%	93,53%	95,53%	97,53%	99,53%	100%	100%
3	Bangunan SMP kondisi baik	91,06%	91,22%	91,22%	91,54%	91,70%	91,86%	92,02%	92,02%
4	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
5	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
6	Rata-rata Kelulusan SD/MI	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
7	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	99,77%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	102,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,56%	90,00%	90,10%	90,20%	91,5%	93%	95%	95%
10	Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah	76,45%	76,5%	76,55%	76,6%	76,65%	76,7%	76,75%	76,75%
11	Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah	27,71%	27,76%	27,81%	27,86%	27,91%	27,96%	28,01%	28,01%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	60%	69%	70%	> 70%	> 70%	> 70%	> 70%	> 70%
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :								
	1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
	2) Penemuan penderita pneumonia balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Penemuan penderita diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	21,2	58	< 20	< 20	< 20	< 20	<20	< 20
29	Persentase penderita HIV AIDS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Prevalensi HIV	2/100.000	2,3/100.000	< 9/100.000	< 9/100.000	< 9/100.000	< 9/100.000	< 9/100.000	< 9/100.000
31	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular	-	-	-	50%	52%	54%	56%	56%
32	Pelayanan perijinan bidang kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
33	Cakupan puskesmas yang telah terakreditasi	-	-	3 Pusk	4 Pusk	4 Pusk	4 Pusk	4 Pusk	19 Pusk
34	Terpenuhinya kebutuhan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Cakupan kunjungan bayi	95,84%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Cakupan pelayanan anak balita	90,27%	83%	84%	85%	85%	85%	85%	85%
37	Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia lanjut	75%	78%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
38	Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	4,84%	7,69%	7,77%	7,84%	7,92%	7,99%	8,07%	8,07%
39	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,87%	95%	95,25%	95,50%	95,70%	96,00%	96,20%	96,20%
40	Cakupan pelayanan nifas	94,62%	90%	90%	95%	95,5%	96,0%	96,5%	96,5%
41	Cakupan peserta KB aktif	81,69%	79,0%	80%	80%	80%	81%	82%	82%
42	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	94,73%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	91,00%	90,0%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,76%	90,0%	90%	95%	95,5%	95,7%	96,0%	96,0%
45	Cakupan kunjungan neonatal pertama	99,07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Cakupan Pelayanan BLUD	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
III	PEKERJAAN UMUM								
1	Panjang jalan kabupaten yang dibangun	-	-		2.050 m	3.400 m	1.818 m	2.222 m	9.490 m
2	Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	-	-		2 unit	1 unit	1 unit		4 unit
3	Peningkatan jalan kabupaten			18.500 m					
4	Penggantian jembatan kabupaten			11 unit					
5	Panjang saluran drainase yang dibangun	3 km	4,44 km	14,23 km	4,25 km	6 km	41,5 km	14,25 km	80,23 km
6	Panjang talud jalan kabupaten yang dibangun	100 m	-	100 m	50 m	200 m	200 m	200 m	750 m
7	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang	70,30%	73,65%	63,21%	67,37%	68,87%	74,22%	80,15%	80,15%
8	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	77,17%	78,54%	80,36%	82,19%	84,02%	85,84%	87,67%	87,67%
9	Panjang talud/bronjong yang dipelihara	350 m	419 m	500 m	1400 m	1500 m	1650 m	2150 m	7200 m
10	Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	64 %	64 %	65 %	67 %	68%	71%	74%	74%
12	Persentase Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	58,50%	59,50%	60,50%	61,50%	63,50%	64,50%	65,00%	65,00%
13	Sistem informasi/database jaringan irigasi	-	20%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	65,68%	65,70%	65,72%	65,74%	65,76%	65,78%	65,80%	65,80%
15	Berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik	40%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Berfungsinya reservoir pengendali banjir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	58,13%	60,07%	60,84%	61,01%	62,94%	63,82%	65,47%	65,47%
19	Sistem informasi drainase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Panjang talud yang dibangun	-	-	3,1 km	1,2 km	3 km	5,5 km	7 km	19,8 km
21	Proporsi talud dalam kondisi baik	-	44,40%	44,40%	45,44%	46,66%	47,36%	48,13%	48,13%

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati Kudus serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kudus periode 2013-2018.

10.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Bupati Kudus periode 2013-2018 akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018, di sisi lain Pemerintah Kabupaten Kudus harus menyusun RKPD tahun 2019, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2019 serta RAPBD tahun 2019. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Kudus, maka RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2019, yang merupakan tahun pertama dari masa bakti Bupati Kudus periode berikutnya, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kabupaten Kudus setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kudus serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Kudus dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

4. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta disahkan oleh Bupati;
5. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, Bappeda Kabupaten Kudus berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD;
6. penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Kudus;
7. sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Kudus; dan
8. dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Kudus dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Kudus untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati, yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kudus periode 2013-2018 yang sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, DPRD Kabupaten Kudus, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 merupakan bagian dari pentahapan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kudus akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka panjangnya, yaitu **“Kudus yang Religius, Maju dan Adil”**.



The image shows the official seal of the Bupati (Mayor) of Kudus, Indonesia. The seal is circular and contains the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. The text "BUPATI KUDUS," is written at the top of the seal, and "MUSTHOFA" is written at the bottom. A large, stylized signature in black ink is written over the seal.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
22	Sistem informasi data base jalan lingkungan	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
23	Sistem informasi data base jembatan desa	-	-	-	100%	-	-	-	100%
24	Cakupan pelayanan perpipaan air minum	81,20%	82,01%	82,83%	83,66%	84,61%	85,57%	86,31%	86,31%
25	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	15 km	16 km	16 km	17 km	17 km	18 km	21 km	21 km
26	Penyediaan Gedung kantor terpadu			5%	30%	60%	100%	100%	100%
27	Persentase rumah tinggal bersanitasi	92,71%	93,17%	93,64%	94,11%	94,58%	95,05%	95,53%	95,53%
28	Panjang jalan perdesaan yang dibangun	16,7 km	32,25 km	52 km	85 km	171 km	176 km	180 km	664 km
29	Jumlah jembatan perdesaan yang dibangun	4 unit	7 unit	19 unit	12 unit	11 unit	12 unit	13 unit	66 unit
30	Cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	81%	83%	83%	84%	85%	86%	87%	87%
31	Cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana		100%	100%					100%
IV PERUMAHAN									
1	Persentase rumah layak huni	86,85%	87,36%	87,97%	88,58%	89,19%	89,80%	90,41%	90,41%
2	Persentase rumah tangga bersanitasi	92,71%	93,17%	93,17%	94,11%	94,58%	95,05%	95,53%	95,53%
3	Fasilitasi dan replikasi PLPBK	-	1 desa	-	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa
4	Jumlah rehab rumah akibat bencana alam	-	-	-	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100 unit
5	Persentase penyediaan sarana evakuasi	-	-	-	12,58%	13,64%	13,64%	14,39%	14,39%
6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	33%	33%	39%	44%	50%	56%	61%	61%
8	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1,667	1,655	1,643	1,648	1,652	1,657	1,662	1,662
V PENATAAN RUANG									
1	Jumlah dokumen tata ruang	4 dokumen	-	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	16 dokumen
2	Jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
3	Jumlah dokumen data pemanfaatan ruang	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
4	Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen
5	Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang	4 kali	12 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	20 kali
6	Jumlah rancangan perda tata ruang	6 raperda	6 raperda	6 raperda	2 raperda	2 raperda	2 raperda		10 raperda
7	Penyebarluasan informasi penataan ruang	-	100%	100%				100%	100%
8	Pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	100%	100%		100%				100%
VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1	Persentase keterisian data/informasi	60 %	60 %	64 %	68 %	72 %	76 %	80 %	80 %
2	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6 dokumen
4	Jumlah aparat perencana yang meningkat kapasitasnya	-	165 orang	145 orang	-	150 orang	-	150 orang	445 orang
5	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	6 dokumen	11 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	10 dokumen	11 dokumen	50 dokumen
6	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	6 dokumen
7	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	85 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %
8	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	12 dokumen
9	Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP	5 klaster	6 klaster	7 klaster	8 klaster	8 klaster	8 klaster	9 klaster	9 klaster
10	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	22 dokumen
11	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9 dokumen
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen
14	jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana	-	-	1 dok	1 dok				2 dok

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
15	Jumlah Dokumen data perencanaan dan evaluasi capaian kinerja	-	-	-	2 dok	2 dok	2 dok	1 dok	7 dok
16	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	100%	-	-	-	-	100%
17	Jumlah Dokumen Review RPIJM	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen
18	Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	150 buku
19	Jumlah dokumen kinerja daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	6 dokumen
20	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen
VII PERHUBUNGAN									
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,99	1,86	1,74	1,63	1,59	1,49	1,39	1,39
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	875.117 orang	875.992 orang	876.868 orang	877.744 orang	878.622 orang	879.501 orang	880.380 orang	4.393.117 orang
3	Persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio izin trayek	0,000753	0,000733	0,000737	0,000754	0,000756	0,000766	0,000775	0,000775
5	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab	60,14%	60,14%	60,14%	61,19%	61,19%	62,59%	62,59%	62,59%
6	Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase angkutan darat	16,08%	16,08%	16,18%	16,19%	16,23%	16,26%	16,27%	16,27%
8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang
9	Jumlah Terminal Bis	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi
10	Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	1.103.225 orang	1.125.289 orang	1.147.354 orang	1.170.301 orang	1.193.707 orang	1.217.581 orang	1.241.932 orang	5.970.876 orang
12	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kab	50,82%	57,14%	64,32%	71,49%	78,66%	85,83%	93,01%	93,01%
13	Pemasangan rambu-rambu	5,63%	2,22%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	28,88%
14	Kepemilikan KIR angkutan umum	11,60%	11,04%	10,98%	10,83%	10,64%	10,44%	10,21%	10,21%
15	Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah uji kir angkutan umum	17.347 unit	17.900 unit	18.000 unit	18.100 unit	18.200 unit	18.250 unit	18.300 unit	18.300 unit
17	Lama pengujian kelayakan angkutan umum - KIR	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit
VIII LINGKUNGAN HIDUP									
1	Pencegahan pencemaran air	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	20%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya luas tutupan lahan	0,24%	0,37%	0,44%	0,54%	0,64%	0,74%	0,84%	0,84%
7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,14%	0,21%	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	0,45%	0,45%
8	Penyediaan akses informasi lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak	40%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH	0,051	0,075	0,093	0,123	0,121	0,090	0,089	0,506
11	Persentase penanganan sampah	82%	84,60%	85%	86%	87%	88%	89%	89%
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,277	0,270	0,308	0,349	0,390	0,429	0,454	0,454
13	Proporsi RTH Publik	5%	5%	5,2%	6%	7%	8%	9%	9%
IX PERTANAHAN									
1	Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten	-	-	890.010 m2	1.075.176 m2	43.435,195 m2	41.500 m2	41.500 m2	2.091.621,195 m2
2	Sistem informasi pertanahan	-	-	-	1 dokumen				
3	persentase luas lahan bersertifikat	-	-	5,60%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	27,40%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
4	Jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani	3 kasus	6 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	15 kasus
X	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
1	Rasio bayi berakte kelahiran		83%	86%	89%	92%	95%	100%	100%
2	Rasio pasangan berakte menikah		13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%
3	Kepemilikan e-KTP		93,50%	94,70%	95,50%	96,70%	97,50%	100%	100%
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		687	735	786	841	900	950	950
5	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	-				100%
XI	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%
3	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)	100%	100%	100%					100%
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos)	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%
5	Cakupan KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,63%	94,63%	94,63%	94,64%	94,64%	94,65%	94,65%	94,65%
8	Rata-rata jumlah kelompok PKK	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	-	-	-	-	9 kelompok
9	Jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak yang mendapatkan penyuluhan	-	100 orang	110 orang					110 orang
10	PKK aktif	9 organisasi	9 organisasi	9 organisasi					9 organisasi
XII	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA								
1	Cakupan peserta KB aktif	82,35%	82,35%	82,35%	83,4%	83,4%	83,45%	83,45%	83,45%
2	Persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I	31,31%	31,31%	31,31%	31,30%	31,30%	31,29%	31,29%	31,29%
3	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	1,62%	1,62%	1,62%	1,61%	1,61%	1,60%	1,60%	1,60%
4	Cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah penemuan penderita HIV AIDS	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
XIII	SOSIAL								
1	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan	90 KK	90 KK	90 KK	90 KK	90 KK	90 KK	90 KK	450 KK
2	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan.	150 orang	75 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	450 orang
3	Jumlah PMKS yang terdata	15.000 orang	10.000 orang	9000 orang	8000 orang	7000 orang	6000 orang	5000 orang	5000 orang
4	Jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center							1 unit	1 unit
5	Jumlah penyandang cacat dan trauma	0 orang	0 orang	-	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100 orang
6	Jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung	2412 orang	2000 orang	-	2000 orang				
7	Jumlah eks penyandang penyakit sosial	193 orang	355 orang	50 orang	70 orang	80 orang	90 orang	100 orang	100 orang
8	Cakupan orsos, PSM, karangtaruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif	377 buah	377 buah	377 buah					377 buah
9	Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial				2 WKSBM				
10	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional dan fasilitasi resepsi kenegaraan	3 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
11	Jumlah peserta dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME	90 orang	90 orang	90 orang	75 orang	80 orang	100 orang	100 orang	445 orang
12	Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama			60%	70%	80%	85%	90%	90%
13	pelaksanaan Hisab dan Rukyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.
14	jumlah pengajian selapanan	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.
15	jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.
16	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
XIV	KETENAGAKERJAAN								
1	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	0,14	0,14	0,16	0,13	0,3	0,24	0,28	1,11
2	Jumlah pencari kerja terdaftar	9.253 orang	8.131 orang	15.000 orang	75.000 orang				
3	Jumlah pencari kerja ditempatkan	3.693 orang	4.254 orang	4.500 orang	4.500 orang	4.500 orang	4.500 orang	4.500 orang	22.500 orang
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,83	60,89	70,01	72,25	74,42	76,54	78,28	78,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,85	5,75	5,7	5,65	5,6	5,55	5,55	5,55
6	Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara	160 orang	360 orang	900 orang	900 orang	900 orang	900 orang	1800 orang	5400 orang
7	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	25 kasus
XV	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Jumlah UMKM	11.596	11.596	11.717	11.833	11.947	12.059	12.172	12.172
2	Jumlah Usaha Mikro		11.047	11.159	11.266	11.371	11.474	11.578	11.578
3	Jumlah Usaha Kecil		429	434	439	444	449	454	454
4	Jumlah Usaha Menengah		120	124	128	132	136	140	140
5	Cakupan UMKM yang difasilitasi	0,78	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00	0,99	4,93
6	Jumlah Pameran/ Ekspo produk UMKM	3	2	6	6	6	20	15	53
7	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran	176	178	178	178	178	178	178	890
8	Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan				0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
9	Persentase koperasi aktif	87	87	89	90	92	93	94	94
XVI	PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah investor	-	9	11	13	15	17	19	19
2	Jumlah penerbitan ijin investasi	-	12	24	36	48	60	72	72
3	Jumlah Investor berskala Nasional	11	11	12	13	14	15	16	16
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dlm juta)	159.419	167.390	175.759	184.547	193.775	203.464	213.637	213.637
5	Daya serap tenaga kerja	32.154	33.762	35.450	37.222	39.083	41.038	43.089	43.089
6	Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	12.163	7.511	8.070	8.877	9.765	10.741	11.815	11.815
7	Jumlah lembaga keuangan bank/non bank		57	69	81	93	105	117	117
8	Lama proses perijinan	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari
XVII	KEBUDAYAAN								
1	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi	30	32	32	34	36	38	40	40
2	Jumlah tradisi desa	-	-	26	26	26	27	27	27
3	Jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yg dilestarikan	1	1	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah BCB	156	156	156	157	158	159	160	160
5	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda	-	-	160	170	180	190	200	200
6	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	7	7	7	7	7	7
7	Jumlah sarana disitus patiyam dan Taman Budaya	2	2	5	5	5	5	5	5
8	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	9 kali	7 kali	12 kali	60 kali				
XVIII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	13	15	15	15	15	15	15
2	Jumlah organisasi pemuda	41	44	43	44	44	44	44	44
3	Jumlah kegiatan olahraga	14	14	14	14	14	14	14	14
4	Jumlah organisasi olahraga	32	36	36	36	36	36	36	36
5	Jumlah Klub Olah Raga	132	132	132	132	132	132	132	132
6	Jumlah gedung olahraga	7	7	7	7	7	7	7	7
7	Jumlah Lapangan olahraga	248	248	248	248	248	248	248	248
8	Jumlah gelanggang olahraga	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Jumlah balai remaja	132	132	132	132	132	132	132	132
10	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	9 keg	9 keg	8 keg	-	-	-	-	8 keg
11	Jumlah kegiatan keolahragaan	3 keg	3 keg	2 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	14 keg
12	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%
XIX	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI								
1	Persentase penurunan konflik di daerah		80%	70%	60%	50%	40%	30%	30%
2	Rasio linmas per 10.000 penduduk	59 orang	59 orang	59 orang	59 orang	59 orang	59 orang	59 orang	59 orang
3	Persentase penanganan gangguan keamanan	75%		75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	Persentase Penurunan tindak kriminalitas di daerah		80%	75%	60%	40%	20%	10%	10%
5	jumlah aduan masyarakat tiap bulan		18	16	15	15	15	15	15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
11	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)	4 kali	2 kali	4 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
12	Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen					2 temuan
14	Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	61 kali	178 kali	214 kali	71 kali	71 kali	71 kali	71 kali	498 kali
15	Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi	-	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	7 unit
16	Jumlah publikasi kegiatan dewan	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	9,000 eks
17	Jumlah sarana media publikasi	2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis
XXVI	PERPUSTAKAAN								
1	Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat)	163 perpus	165 perpus	168 perpus	171 perpus	175 perpus	180 perpus	184 perpus	184 perpus
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
I	PERTANIAN								
1	Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Cakupan bina kelompok tani	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Peningkatan produktifitas tanaman	5,70%	5,75%	5,80%	5,85%	5,90%	5,95%	6%	6%
4	Terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
6	peningkatan produksi asal ternak	3.460.367 kg	3.586.454 kg	3.709.989 kg	3.809.914 kg	4.172.484 kg	4.536.756 kg	5.038.904 kg	5.038.904 kg
7	Cakupan irigasi	4,9%	9,75%	13,80%	18,85%	22,90%	26,95%	31,8%	31,8%
II	KEHUTANAN								
1	Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan (Ha)	25	25	25	25	25	25	25	125
2	Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	300	300	450	500	550	600	650	2750
3	Persentase kerusakan kawasan hutan	17,6%	15,5%	13,5%	11,5%	9,5%	7,5%	5,5%	5,5%
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
III	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2	Jumlah pertambangan berijin	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi				
3	Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Berfungsinya LPJU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rasio elektrifikasi tingkat desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau	5 desa	5 desa		6 desa				
IV	PARIWISATA								
1	Kunjungan wisata	1.122.700	1.178.835	1.234.970	1.291.105	1.347.240	1.403.375	1.459.510	1.459.510
2	% Kenaikan PAD sektor pariwisata	7	7	7	7	7	7	7	7
3	Jenis, kelas dan jumlah rumah Makan /Restoran	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
4	Jenis, kelas dan jumlah Penginapan/Hotel	7,1	7,1	11,1	17,2	20,4	24,5	28,6	28,6
5	Jenis, kelas dan jumlah Penginapan/Hotel	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
6	Terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah obyek wisata	10	10	10	10	11	11	12	12
8	Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan)	2.153.090	2.368.399	2.583.708	2.799.017	3.014.326	3.229.635	3.444.944	3.444.944
9	Tersedianya sarpras promosi pariwisata	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
V	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi ikan kelompok pembudidaya	1.697 ton	1.770 ton	1.827 ton	1.959 ton	2.018 ton	2.086 ton	2.157 ton	2.157 ton

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
VI PERDAGANGAN									
1	Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual	16 temuan		10 temuan	8 temuan	6 temuan	4 temuan	2 temuan	30 temuan
2	Jumlah pengaduan konsumen		3 aduan	2 aduan	1 aduan	1 aduan	1 aduan	-	5 aduan
3	Ekspor bersih perdagangan (Juta Rupiah)	105.215.345	(1.432.954)	120.997.647	139.147.294	160.019.388	184.022.296	211.625.641	211.625.641
4	cakupan bina calon eksportir			3 org	5 org	8 org	12 org	15 org	43 org
5	Jumlah peserta pameran UMKM skala regional	12 unit	12 unit	10 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	70 unit
6	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	9.245.094		9.624.547	10.105.774	10.611.063	11.141.616	11.698.696	53.181.696
7	Cakupan pembinaan pasar tradisional	930		940	945	930	940	950	950
8	Persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar		-4,27	5,35	2,38	2,33	2,27	2,22	15,38
9	cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional)		10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los
10	Jumlah pasar daerah dan pasar desa	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit
11	terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	partisipasi dalam pasar lelang	6 kali		4 kali					4 kali
13	tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	480 kali
14	terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri				25 org	30 org	30 org	30 org	115 org
15	terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	20 kali
16	terlaksananya temu usaha				10 unit	15 unit	15 unit	15 unit	55 unit
17	Jumlah PKL dan Asongan	800 PKL	975 PKL	1.100 PKL	1.200 PKL	1.300 PKL	1.400 PKL	1.500 PKL	1.500 PKL
18	Jumlah Rakor Ekuinda	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
19	Operasional Raskin	43.626 RTS		36,332RTS	36,332RTS	36,332RTS	36,332RTS	36,332RTS	36,332RTS
VII INDUSTRI									
1	Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha	0,41	1,15	2	2	2	2	3	11
2	Jumlah bina KUB	-	-	50	50	50	50	50	250
3	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
4	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan	-	-	-	20	20	20	20	80
5	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	62,75	62,41	62,5	62,5	62,6	62,6	62,6	62,6
6	Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi	-	-	-	5	5	5	65	80
7	Jumlah Industri rokok yang telah mengujikan tar dan nikotin	-	-	-	5	7	10	10	10
8	Jumlah kluster yang memiliki tempat pameran	-	-	-	1	-	1	1	3
9	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran	4	4	10	10	10	10	10	50
VIII TRANSMIGRASI									
1	Jumlah calon transmigran terlayani	10 KK	10 KK	20 KK	30 KK	30 KK	30 KK	30 KK	140 KK
C. Aspek Daya Saing Daerah									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
I Pertanian									
1	Nilai tukar petani	104,71	105,61	105,91	106,21	106,51	106,81	107,11	107,11
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
II Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1	Jumlah bank	35	35	35	35	35	35	35	35
2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	13	13	13	13	13	13	13	13
3	Jenis, kelas dan jumlah restoran	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 1 RM : 7	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 1 RM : 7	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 1 RM : 11	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 2 RM : 17	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 4 RM : 20	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 5 RM : 24	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 6 RM : 28	Jenis : 2 Kelas : 4 Resto : 6 RM : 28
Fokus Sumber Daya Manusia									
III Ketenagakerjaan									
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	290,25	372,479	442,294	512,109	581,924	651,739	721,554	721,554
2	Rasio ketergantungan	48,28	45,37	45,36	45,35	45,33	45,32	45,31	45,31

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2014 (diolah)

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati Kudus serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kudus periode 2013-2018.

10.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Bupati Kudus periode 2013-2018 akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018, di sisi lain Pemerintah Kabupaten Kudus harus menyusun RKPD tahun 2019, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2019 serta RAPBD tahun 2019. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Kudus, maka RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2019, yang merupakan tahun pertama dari masa bakti Bupati Kudus periode berikutnya, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kabupaten Kudus setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kudus serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Kudus dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

4. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta disahkan oleh Bupati;
5. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, Bappeda Kabupaten Kudus berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD;
6. penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Kudus;
7. sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Kudus; dan
8. dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Kudus dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Kudus untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

